PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN

LKPD

AUDITED

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TA 2025

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkat dan rahmatNya, sehingga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan serta informasi tambahan lainnya.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selalu berusaha menyajikan yang terbaik dan selalu mengikuti perubahan-perubahan kebijakan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan, namun kami menyadari bahwa penyajian LKPD ini masih perlu disempurnakan, sehingga kami mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak guna mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Wamena, 29 Mei 2026

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN,

Dr. (H.C.) JOHN TABO, S.E., M.B.A.

DAFTAR ISI

Hal:

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel viii
Daftar Gambar xx
Daftar Lampiran xxi
Pernyataan Tanggung Jawab xxii
Laporan Keuangan:
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) xxiii
- Laporan Perubahan SAL xxv
- Neraca xxvi
- Laporan Operasional xxviii
- Laporan Arus Kas (LAK) xxx
- Laporan Perubahan Ekuitas xxxii

Catatan Atas Laporan Keuangan:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Sistematika Penulisan 3

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 4
2.1.1 Tingkat Kemiskinan 4
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka 5
2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio) 5
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5
2.1.5 Struktur Ekonomi Provinsi Papua Pegunungan 7
2.2 Kebijakan Keuangan 9
2.2.1 Kebijakan Anggaran 9
2.2.2 Kebijakan Keuangan 10
2.3 Indikator Pencapaian Kinerja APBD 12
2.3.1 Pendapatan Daerah 13
2.3.2 Belanja Daerah 13
2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 14
2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 17
2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 24
2.3.2.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 26
2.3.2.5 Unsur Kekhususan Dan Keistimewaan 30
2.3.3 Pembiayaan Daerah 31

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 32
3.1.1 Target Kinerja Keuangan dan Perubahannya 32
3.1.2 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 34
3.1.3 Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana-Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Dampak/Manfaat Dana Transfer Bagi Masyarakat 36
3.1.4 Pengungkapan *Mandatory Spending* 38
3.1.5 Pengungkapan Pencegahan *Stunting* 40
3.1.6 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan dari Dana Otsus dan DTI 41
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan 42
3.2.1 Permasalahan/Kendala Pencapaian Pendapatan yang Ditetapkan 42
3.2.2 Permasalahan/Kendala pada Penyerapan Belanja yang Ditetapkan 44
3.2.3 Solusi 44

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan 45
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 45
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 45
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP 45
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset 45
4.4.1.1 Kas dan Setara Kas 45
4.4.1.2 Investasi Jangka Pendek 46
4.4.1.3 Piutang 47
4.4.1.4 Beban Dibayar Dimuka 49
4.4.1.5 Persediaan 49
4.4.1.6 Investasi Jangka Panjang 51
4.4.1.7 Aset Tetap 52
4.4.1.8 Dana Cadangan 55
4.4.1.9 Aset Lainnya 55
4.4.1.10 Aset Tidak Berwujud (ATB) 57
4.4.1.11 Amortisasi Aset Lainnya 59
4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 59
4.4.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 59
4.4.2.2 Utang Jangka Pendek Lainnya 60
4.4.2.3 Pendapatan Diterima Dimuka 60
4.4.2.4 Utang Beban 60
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas 61
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA 62
4.4.4.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA 63
4.4.4.2 Pendapatan Transfer - LRA 63
4.4.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA 64

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja 64
4.4.6 Kebijakan Akuntansi Transfer 65
4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 67
4.4.7.1 Pembiayaan 67
4.4.7.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL) 68
4.4.8 Kebijakan Akuntansi Pelaporan - LO 69
4.4.9 Kebijakan Akuntansi Beban 70

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos LRA 74
5.1.1 Pendapatan Daerah 74
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 74
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 75
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 76
5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 77
5.1.1.2 Pendapatan Transfer 79
5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 79
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 82
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah 82
5.1.2 Belanja Daerah 83
5.1.2.1 Belanja Operasi 83
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai 84
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 87
5.1.2.1.3 Belanja Hibah 92
5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 94
5.1.2.2 Belanja Modal 94
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah 95
5.1.2.2.2 Belanja Modal – Peralatan Mesin 96
5.1.2.2.3 Belanja Modal – Gedung dan Bangunan 97
5.1.2.2.4 Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan 98
5.1.2.2.5 Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya 99
5.1.2.2.6 Belanja Modal – Aset Lainnya 99
5.1.2.3 Belanja Tak Terduga 100
5.1.2.4 Transfer Daerah 100
5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil 101
5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 103
5.1.3 Pembiayaan Daerah 103
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan 103
5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 104
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan 104
5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA/(SiKPA) 104

5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos LP SAL 106
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 106
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 106
5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 107
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuaan Tahun Sebelumnya 107
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir 107
5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 109
5.3.1 Aset 109
5.3.1.1 Aset Lancar 109
5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas 110
5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah 120
5.3.1.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 120
5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka 121
5.3.1.1.5 Persediaan 121
5.3.1.2 Investasi Jangaka Panjang 123
5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 123
5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen 124
5.3.1.3 Aset Tetap 124
5.3.1.3.1 Tanah 124
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin 125
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan 134
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 137
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya 141
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 142
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan 143
5.3.1.4 Aset Lainnya 146
5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang 146
5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud 147
5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 148
5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain 148
5.3.1.4.5 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) 151
5.3.2 Kewajiban 151
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 151
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 151
5.3.2.1.2 Utang Belanja 152
5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya 154
5.3.3 Ekuitas 154
5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 155
5.4.1 Pendapatan Daerah - LO 155
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO 155
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 156

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO 156
5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO 157
5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO 157
5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 158
5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO 159
5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO 159
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO 160
5.4.2 Beban Operasional 160
5.4.2.1 Beban Pegawai 161
5.4.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN 162
5.4.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN 162
5.4.2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 163
5.4.2.1.4 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 163
5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa 164
5.4.2.2.1 Beban Barang 165
5.4.2.2.2 Beban Jasa 166
5.4.2.2.3 Beban Pemeliharaan 166
5.4.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas 167
5.4.2.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat 168
5.4.2.3 Beban Hibah 168
5.4.2.3.1 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 169
5.4.2.3.2 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 169
5.4.2.4 Beban Bantuan Sosial 169
5.4.2.4.1 Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga 170
5.4.2.4.2 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu 170
5.4.2.4.3 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat 171
5.4.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi 171
5.4.2.6 Beban Transfer 172
5.4.2.6.1 Beban Bagi Hasil 172
5.4.2.6.2 Beban Bantuan Keuangan 173
5.4.3 Surplus Non - Operasional 173
5.4.4 Defisit Non - Operasional 173
5.4.5 Pos Luar Biasa 174
5.4.6 Surplus/(Defisit) – LO 174
5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas 175
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 175
5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 175
5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 176

5.5.2 Aktivitas Investasi 177
5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 177
5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 178
5.5.3 Aktivitas Pendanaan 179
5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 179
5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 179
5.5.4 Aktivitas Transitoris 180
5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 181
5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 181
5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas 181
5.5.6 Saldo Awal Kas 182
5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu 182
5.5.8 Saldo Akhir Kas 182
5.6 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 184
5.6.1 Ekuitas Awal 184
5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO 184
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 183
5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir 185

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 186
6.2 Visi dan Misi 186
6.3 Organisasi dan Kelembagaan 187

BAB VII PENUTUP 188

DAFTAR TABEL

		Hal:
Tabel 2.1.1.1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi	5
Tabel 2.1.1.2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	5
Tabel 2.1.1.3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	6
Tabel 2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi	6
Tabel 2.1.3	Gini Rasio Provinsi	6
Tabel 2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia	7
Tabel 2.1.5	PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha	7
Tabel 2.1.5.1	Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha	9
Tabel 2.3.2.1.1	Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2025	14
Tabel 2.3.2.1.2	Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2025	15
Tabel 2.3.2.1.3	Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025	15
Tabel 2.3.2.1.4	Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman Tahun 2025	16
Tabel 2.3.2.1.5	Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	16
Tabel 2.3.2.1.6	Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial Tahun 2025	16
Tabel 2.3.2.2.1	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja Tahun 2025	17
Tabel 2.3.2.2.2	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025	18
Tabel 2.3.2.2.3	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2025	18
Tabel 2.3.2.2.4	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan Tahun 2025	19
Tabel 2.3.2.2.5	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025	19
Tabel 2.3.2.2.6	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	19
Tabel 2.3.2.2.7	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025	20
Tabel 2.3.2.2.8	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	20
Tabel 2.3.2.2.9	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Tahun 2025	21
Tabel 2.3.2.2.10	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2025	21
Tabel 2.3.2.2.11	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025	22
Tabel 2.3.2.2.12	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Tahun 2025	22
Tabel 2.3.2.2.13	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025	23
Tabel 2.3.2.2.14	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik Tahun 2025	23
Tabel 2.3.2.2.15	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian Tahun 2025	23
Tabel 2.3.2.2.16	Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan Tahun 2025	24
Tabel 2.3.2.3.1	Belanja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	24
Tabel 2.3.2.3.2	Belanja Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Tahun 2025	24
Tabel 2.3.2.3.3	Belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian Tahun 2025	25
Tabel 2.3.2.3.4	Belanja Urusan Pilihan Bidang Kehutanan Tahun 2025	25

Tabel 2.3.2.3.5 Belanja Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 25
Tabel 2.3.2.3.6 Belanja Urusan Pilihan Bidang Perdagangan Tahun 2025 26
Tabel 2.3.2.3.7 Belanja Urusan Pilihan Bidang Perindustrian Tahun 2025 26
Tabel 2.3.2.3.8 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Transmigrasi Tahun 2025 26
Tabel 2.3.2.4.1 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2025 27
Tabel 2.3.2.4.2 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2025 27
Tabel 2.3.2.4.3 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian Tahun 2025 28
Tabel 2.3.2.4.4 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 28
Tabel 2.3.2.4.5 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Tahun 2025 29
Tabel 2.3.2.4.6 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2025 30
Tabel 2.3.2.4.7 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 30
Tabel 2.3.2.5.1 Belanja Urusan Pemerintahan Umum Lembaga MRP Tahun 2025 31
Tabel 2.3.3.1 Perhitungan SiLPA Tahun 2025 31
Tabel 3.1.1.1 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025 33
Tabel 3.1.1.2 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 33
Tabel 3.1.1.3 Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 34
Tabel 3.1.2.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 34
Tabel 3.1.2.2 Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 34
Tabel 3.1.2.3 Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2025 35
Tabel 3.1.2.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA. 2024 dan TA. 2025 35
Tabel 3.1.2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2024 dan TA. 2025 35
Tabel 3.1.3.1 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer Umum 36
Tabel 3.1.3.2 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer Khusus 37
Tabel 3.1.3.3 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur 38
Tabel 3.1.4.1 *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan 38
Tabel 3.1.4.2 *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Daerah 39
Tabel 3.1.4.3 *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Daerah – Belanja Infrastruktur Pelayanan Daerah 39
Tabel 3.1.4.4 *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan 40
Tabel 3.1.4.5 Rincian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat 40
Tabel 3.1.4.6 *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan 40
Tabel 3.1.5.1 Program dan Kegiatan Pencegahan *Stunting* 41
Tabel 3.1.6.1 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Block Grant 41
Tabel 3.1.6.2 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Spesifik Grant 42
Tabel 3.1.6.3 Tabel 3.1.6.3 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur 42
Tabel 4.1.1.7 Komponen Biaya Perolehan 54
Tabel 4.1.1.11 Masa Manfaat Amortisasi 59
Tabel 5.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 74

Tabel 5.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 74
Tabel 5.1.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 75
Tabel 5.1.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 76
Tabel 5.1.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 77
Tabel 5.1.1.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Jasa Giro Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 78
Tabel 5.1.1.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Deposito Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 78
Tabel 5.1.1.1.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 78
Tabel 5.1.1.1.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 78
Tabel 5.1.1.1.3.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 78
Tabel 5.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 79
Tabel 5.1.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 79
Tabel 5.1.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 80
Tabel 5.1.1.2.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 80
Tabel 5.1.1.2.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 80
Tabel 5.1.1.2.1.1.2.a Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 80
Tabel 5.1.1.2.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 81
Tabel 5.1.1.2.1.1.3a Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 81
Tabel 5.1.1.2.1.1.3b Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 81
Tabel 5.1.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Otonomi Khusus dan Dana Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 81
Tabel 5.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 82
Tabel 5.1.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – Pendapatan Hibah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 82
Tabel 5.1.1.3.1.1 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – Pendapatan Hibah – Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 83
Tabel 5.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 83
Tabel 5.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 84

Tabel 5.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 84
Tabel 5.1.2.1.1.a Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 85
Tabel 5.1.2.1.1.b Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Pegawai Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 85
Tabel 5.1.2.1.1.c Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 86
Tabel 5.1.2.1.1.d Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 86
Tabel 5.1.2.1.1.e Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 86
Tabel 5.1.2.1.1.f Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 87
Tabel 5.1.2.1.1.g Gaji danTunjangan MRP Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 87
Tabel 5.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 87
Tabel 5.1.2.1.2a Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 88
Tabel 5.1.2.1.2b Rincian Belanja Barang Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 89
Tabel 5.1.2.1.2c Rincian Belanja Barang pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 89
Tabel 5.1.2.1.2d Rincian Belanja Jasa pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA.2025 89
Tabel 5.1.2.1.2e Rincian Belanja Jasa Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 90
Tabel 5.1.2.1.2f Rincian Belanja Pemeliharaan pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 90
Tabel 5.1.2.1.2g Rincian Belanja Pemeliharaan Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 91
Tabel 5.1.2.1.2h Rincian Belanja Perjalanan Dinas pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 91
Tabel 5.1.2.1.2i Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 92
Tabel 5.1.2.1.2j Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 92
Tabel 5.1.2.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 93
Tabel 5.1.2.1.3a Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 93
Tabel 5.1.2.1.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 94
Tabel 5.1.2.1.4a Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 94
Tabel 5.1.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 94
Tabel 5.1.2.2a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 95
Tabel 5.1.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 96
Tabel 5.1.2.2.1a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 96

Tabel 5.1.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 96
Tabel 5.1.2.2.2a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 97
Tabel 5.1.2.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 97
Tabel 5.1.2.2.3a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 98
Tabel 5.1.2.2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 98
Tabel 5.1.2.2.4a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 99
Tabel 5.1.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 99
Tabel 5.1.2.2.5a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 99
Tabel 5.1.2.2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Aset Lainnya Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 100
Tabel 5.1.2.2.6a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Aset Lainnya pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 100
Tabel 5.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 100
Tabel 5.1.2.3a Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 100
Tabel 5.1.2.4 Anggaran dan Realisasi Transfer Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 101
Tabel 5.1.2.4.1 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 101
Tabel 5.1.2.4.1.1 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 101
Tabel 5.1.2.4.1.2 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 101
Tabel 5.1.2.4.1.3 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 102
Tabel 5.1.2.4.1.4 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 102
Tabel 5.1.2.4.1.5 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Air Tanah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 102
Tabel 5.1.2.4.1.6 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 102
Tabel 5.1.2.4.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Papua Pegunungan 2025 dan Realisasi TA 2024 103
Tabel 5.1.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 103
Tabel 5.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah – Penerimaan Pembiayaan Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 103
Tabel 5.1.3.1.1 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 104
Tabel 5.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah – Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 104
Tabel 5.1.4 Realisasi Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/(SiKPA) Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 dan Realisasi TA. 2024 104

Tabel 5.1.4a Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Provinsi Papua Pegunungan TA. 2025 105
Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan Tahun 2024 106
Tabel 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan Tahun 2024 106
Tabel 5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan Tahun 2024 107
Tabel 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuaan Tahun sebelumnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 107
Tabel 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan Tahun 2024 107
Tabel 5.3.1 Aset Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 109
Tabel 5.3.1.1 Aset Lancar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 109
Tabel 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 110
Tabel 5.3.1.1.1.1 Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 111
Tabel 5.3.1.1.1.1a Rincian Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 111
Tabel 5.3.1.1.1.1b Rincian Penyetoran Sisa Uang Persediaan (S3UP) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 112
Tabel 5.3.1.1.1.1c Rincian Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 113
Tabel 5.3.1.1.1.1d Rincian Pencairan Deposito Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 113
Tabel 5.3.1.1.1.2 Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 114
Tabel 5.3.1.1.1.3 Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 114
Tabel 5.3.1.1.1.3a Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 115
Tabel 5.3.1.1.1.3b Rincian Penerimaan SP2D TU pada Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 115
Tabel 5.3.1.1.1.3c Rincian Penerimaan SP2D LS pada Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 116
Tabel 5.3.1.1.1.3d Rincian Pengeluaran SPJ TU Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 116
Tabel 5.3.1.1.1.3e Rincian Pengeluaran SPJ LS Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 117
Tabel 5.3.1.1.1.3e Rincian Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 117
Tabel 5.3.1.1.1.3f Rincian Penyetoran Sisa Uang Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 118
Tabel 5.3.1.1.1.3g Rincian Penyetoran Sisa Kas Bendahara 2024 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 119
Tabel 5.3.1.1.1.4 Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Kas Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 119
Tabel 5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 120
Tabel 5.3.1.1.2a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 120

Tabel 5.3.1.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 120
Tabel 5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 121
Tabel 5.3.1.1.4a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 121
Tabel 5.3.1.1.5 Persediaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 121
Tabel 5.3.1.1.5a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Persediaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 122
Tabel 5.3.1.1.5b Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Persediaan pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 122
Tabel 5.3.1.1.5c Pemakaian Persediaan per SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 .. 122
Tabel 5.3.1.1.5d Jenis Persediaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 123
Tabel 5.3.1.3 Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 124
Tabel 5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 124
Tabel 5.3.1.3.1a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Tanah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 125
Tabel 5.3.1.3.2 Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 125
Tabel 5.3.1.3.2a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap–Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 126
Tabel 5.3.1.3.2b Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap–Peralatan dan Mesin–Alat Besar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 127
Tabel 5.3.1.3.2c Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap–Peralatan dan Mesin–Alat Angkutan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 127
Tabel 5.3.1.3.2d Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap–Peralatan dan Mesin–Alat Angkutan pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 128
Tabel 5.3.1.3.2e Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap–Peralatan dan Mesin–Alat Bengkel dan Alat Ukur Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 128
Tabel 5.3.1.3.2f Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap–Peralatan dan Mesin–Alat Pertanian Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 128
Tabel 5.3.1.3.2g Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap–Peralatan dan Mesin–Alat Kantor dan Rumah Tangga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 129
Tabel 5.3.1.3.2h Rincian Belanja Modal–Peralatan dan Mesin–Alat Kantor dan Rumah Tangga pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 129
Tabel 5.3.1.3.2i Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin–Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 130
Tabel 5.3.1.3.2j Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin–Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 131
Tabel 5.3.1.3.2k Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin–Alat Laboratorium Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 131
Tabel 5.3.1.3.2l Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Komputer Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 132
Tabel 5.3.1.3.2m Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin-Komputer pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 132
Tabel 5.3.1.3.2n Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 133

Tabel 5.3.1.3.2o Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 133
Tabel 5.3.1.3.2p Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan KerjacProvinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 133
Tabel 5.3.1.3.2q Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 134
Tabel 5.3.1.3.3 Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 134
Tabel 5.3.1.3.3a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 135
Tabel 5.3.1.3.3b Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 135
Tabel 5.3.1.3.3c Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 136
Tabel 5.3.1.3.3d Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Tugu Titik Kontrol/Pasti Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 136
Tabel 5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 137
Tabel 5.3.1.3.4a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 138
Tabel 5.3.1.3.4b Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Jalan dan Jembatan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 138
Tabel 5.3.1.3.4c Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Bangunan Air Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 139
Tabel 5.3.1.3.4d Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Instalasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 140
Tabel 5.3.1.3.4e Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Jaringan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 141
Tabel 5.3.1.3.5 Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 141
Tabel 5.3.1.3.5a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Bahan Perpustakaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 141
Tabel 5.3.1.3.5b Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Aset Tetap Renovasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 142
Tabel 5.3.1.3.6 Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 142
Tabel 5.3.1.3.6a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 142
Tabel 5.3.1.3.6b Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 143
Tabel 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 143
Tabel 5.3.1.3.7a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 144
Tabel 5.3.1.3.7b Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 145
Tabel 5.3.1.3.7c Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 145

Tabel 5.3.1.4 Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 146
Tabel 5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 146
Tabel 5.3.1.4.1a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Tagihan Jangka Panjang-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025..... 147
Tabel 5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024..... 147
Tabel 5.3.1.4.2a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025..... 147
Tabel 5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024..... 148
Tabel 5.3.1.4.3a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025..... 148
Tabel 5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 149
Tabel 5.3.1.4.4a Rincian Penjelasan Aset Lain-Lain Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember2025 dan 2024..... 149
Tabel 5.3.1.4.4b Reklasifiksi ke Aset Lain - Lain Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 149
Tabel 5.3.1.4.4c Reklasifiksi ke Aset Lain - Lain Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 149
Tabel 5.3.1.4.6 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Per 31 Desember 2025 dan 2024..... 150
Tabel 5.3.1.4.6a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (*TDF) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025..... 151
Tabel 5.3.2 Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024..... 151
Tabel 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 151
Tabel 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024..... 152
Tabel 5.3.2.1.1a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025..... 152
Tabel 5.3.2.1.1b Rincian Utang PFK masing-masing OPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025..... 152
Tabel 5.3.2.1.2 Utang Belanja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024. 153
Tabel 5.3.2.1.2a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Utang Belanja Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025..... 153
Tabel 5.3.2.1.2b Rincian Utang Belanja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025..... 153
Tabel 5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024..... 154
Tabel 5.3.3 Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 154
Tabel 5.4.1 Pendapatan Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 155
Tabel 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO P Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 156
Tabel 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 156
Tabel 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024.... 157
Tabel 5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 157

Tabel 5.4.1.1.3.1 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 157
Tabel 5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 158
Tabel 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 158
Tabel 5.4.1.2.1a Rincian Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan LRA 159
Tabel 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 159
Tabel 5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 160
Tabel 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 160
Tabel 5.4.1.3.1a Rincian Penjelasan Selisih Pendapatan Hibah – LO dan LRA 160
Tabel 5.4.2 Beban Operasional Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 161
Tabel 5.4.2.1 Beban Pegawai Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 161
Tabel 5.4.2.1a Rincian Penjelasan Selisih Beban Pegawai – LO dan LRA 162
Tabel 5.4.2.1.1 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan Tahun 2024 162
Tabel 5.4.2.1.2 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 162
Tabel 5.4.2.1.3a Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 163
Tabel 5.4.2.1.3b Rincian Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 163
Tabel 5.4.2.1.4a Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 163
Tabel 5.4.2.1.4b Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 163
Tabel 5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 164
Tabel 5.4.2.2a Rincian Penjelasan Selisih Beban Barang & Jasa-LO dan Belanja Barang & Jasa LRA 164
Tabel 5.4.2.2.1a Beban Barang pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 165
Tabel 5.4.2.2.1b Rincian Beban Barang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 165
Tabel 5.4.2.2.2a Beban Jasa pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 166
Tabel 5.4.2.2.2b Rincian Beban Jasa Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 166
Tabel 5.4.2.2.3a Beban Pemeliharaan pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 167
Tabel 5.4.2.2.3b Rincian Beban Pemeliharaan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 167
Tabel 5.4.2.2.4a Beban Perjalanan Dinas pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 167
Tabel 5.4.2.2.4b Rincian Beban Perjalanan Dinas Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 168
Tabel 5.4.2.2.5a Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 168
Tabel 5.4.2.2.5b Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 168
Tabel 5.4.2.3 Beban Hibah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 168

Tabel 5.4.2.3.1a Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 169
Tabel 5.4.2.3.1b Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 169
Tabel 5.4.2.3.2a Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 169
Tabel 5.4.2.3.2b Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 169
Tabel 5.4.2.4 Beban Bantuan Sosial Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 170
Tabel 5.4.2.4.1a Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 170
Tabel 5.4.2.4.1b Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 170
Tabel 5.4.2.4.2a Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 171
Tabel 5.4.2.4.2b Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 171
Tabel 5.4.2.4.3a Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat pada Masing-Masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 171
Tabel 5.4.2.4.3b Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 171
Tabel 5.4.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 171
Tabel 5.4.2.6 Beban Transfer Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 172
Tabel 5.4.2.6.1 Beban Bagi Hasil Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 172
Tabel 5.4.2.6.1a Rincian Penjelasan Selisih Beban Bagi Hasil – LO dan LRA 172
Tabel 5.4.2.6.2 Beban Bantuan Keuangan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 173
Tabel 5.4.3 Surplus Non Operasional Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 173
Tabel 5.4.4 Defisit Non Operasional Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 173
Tabel 5.4.5 Pos Luar Biasa Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 174
Tabel 5.4.6 Surplus/(Defisit) – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 174
Tabel 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 175
Tabel 5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 175
Tabel 5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 176
Tabel 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 177
Tabel 5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dan 2025 177
Tabel 5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 178
Tabel 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 179
Tabel 5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 179

Tabel 5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 180
Tabel 5.5.4 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 180
Tabel 5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 181
Tabel 5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 181
Tabel 5.5.4.3 Penjelasan Koreksi Saldo Awal Kas Daerah pada Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 181
Tabel 5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 181
Tabel 5.5.6 Saldo Awal Kas Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 182
Tabel 5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 182
Tabel 5.5.8 Saldo Akhir Kas Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 183
Tabel 5.6.1 Ekuitas Awal Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 184
Tabel 5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 184
Tabel 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 184
Tabel 5.6.3.1 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 185
Tabel 5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 185

DAFTAR GAMBAR

		Hal:
Gambar 5.1.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2025	74
Gambar 5.1.1.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2025	75
Gambar 5.1.1.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2025	79
Gambar 5.1.2	Komposisi Realisasi Belanja Daerah TA. 2025	83
Gambar 5.1.2.1	Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA. 2025	84
Gambar 5.1.2.2	Komposisi Realisasi Belanja Modal TA. 2025	95
Gambar 5.2.1	Komposisi Saldo Anggaran Lebih Awal TA. 2025 dan TA. 2024	106
Gambar 5.2.5	Komposisi Saldo Anggaran Lebih Akhir TA. 2025 dan TA. 2024	108
Gambar 5.3.1	Komposisi Aset per 31 Desember 2025 dan 2024	109
Gambar 5.3.1.1	Komposisi Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024	110
Gambar 5.4.1	Komposisi Pendapatan Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024	155
Gambar 5.4.1.1	Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024	156
Gambar 5.4.1.2	Komposisi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024	158
Gambar 5.4.2	Komposisi Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024	161
Gambar 5.4.2.2	Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	165
Gambar 5.4.2.4	Komposisi Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024	170
Gambar 5.4.2.5	Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024	172
Gambar 5.5.1	Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024	175
Gambar 5.5.4	Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024	180
Gambar 5.5.5	Komposisi Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun 2025 dan 2024	182
Gambar 5.5.8	Komposisi Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024	183

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1.1.1.1a	Rincian atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lampiran 5.1.1.1.1b	Rincian atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lampiran 5.1.1.1.1c	Rincian atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lampiran 5.1.1.1.1e	Rincian atas Pajak Rokok
Lampiran 5.1.1.1.1f	Rincian atas Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Lampiran 5.1.1.1.3a	Rincian atas Jasa Giro
Lampiran 5.1.1.1.3c	Rincian atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Lampiran 5.1.1.1.3d	Rincian atas Pendapatan Denda Pajak Daerah
Lampiran 5.1.1.1.3e	Rincian atas Pendapatan Dari Pengembalian
Lampran 5.3.1.1.1.3	Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025
Lampiran 5.3.1.1.1.4	Rekapitulasi Kas Lainnya per 31 Desember 2025
Lampiran 5.3.1.1.3	Rekapitulasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025
Lampiran 5.3.1.1.4	Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025
Lampiran 5.3.1.1.5a	Rincian atas Hibah dari Kementrian Kesehatan
Lampiran 5.3.1.1.5b	Rincian Per Barang atas Persediaan
Lampiran 5.3.1.3	Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025
Lampiran 5.3.1.4	Rekapitulasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025
Lampiran 5.3.2.1	Rekapitulasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Wamena, 29 Mei 2026

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN,

Dr. (H.C.) JOHN TABO, S.E., M.B.A.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	**PENDAPATAN DAERAH**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	184.475.019.128,00	135.326.816.784,00	73,36	165.444.602.582,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	0,00	27.990.440,00	100,00	0,00
5	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.3	29.761.670.276,00	24.148.537.784,10	81,14	5.813.066.299,00
6	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4+5)**		**214.236.689.404,00**	**159.503.345.008,10**	**74,45**	**171.257.668.881,00**
7						
8	**PENDAPATAN TRANSFER**					
9	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**					
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	446.106.250.274,00	434.529.127.800,00	97,40	601.546.036.932,00
11	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	5.1.1.2.1	1.204.628.727.000,00	1.204.628.727.000,00	100,00	1.429.852.017.000,00
12	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10+11)**		**1.650.734.977.274,00**	**1.639.157.854.800,00**	**99,30**	**2.031.398.053.932,00**
13						
14	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**					
15	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	100.000.000.000,00	13.778.225.502,00	13,78	127.282.000,00
16	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (15)**		**100.000.000.000,00**	**13.778.225.502,00**	**13,78**	**127.282.000,00**
17	**JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (6+12+16)**		**1.964.971.666.678,00**	**1.812.439.425.310,10**	**92,24**	**2.202.783.004.813,00**
18						
19	**BELANJA DAERAH**					
20	**BELANJA OPERASI**					
21	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	381.064.123.709,67	378.396.540.066,52	99,30	298.535.200.797,40
22	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.003.785.225.366,70	944.241.925.133,00	94,07	929.988.945.356,63
23	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	119.670.000.000,00	114.817.007.969,76	95,94	222.743.958.046,79
24	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	41.845.000.000,00	41.841.750.000,00	99,99	5.247.050.000,00
25	**Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 24)**		**1.546.364.349.076,37**	**1.479.297.223.169,28**	**95,66**	**1.456.515.154.200,82**
26	**BELANJA MODAL**					
27	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	31.000.000.000,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	22.500.537.427,00	22.266.044.949,00	98,96	33.854.864.903,00
29	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	16.943.699.968,00	10.311.158.200,00	60,86	53.115.679.212,00
30	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	412.137.320.122,00	322.700.973.787,00	78,30	422.086.213.196,00
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	501.771.800,00
32	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Jumlah Belanja Modal (27 s.d. 32)**		**463.081.557.517,00**	**366.778.176.936,00**	**79,20**	**540.558.529.111,00**
34						
35	**BELANJA TIDAK TERDUGA**					
36	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	14.681.910.366,82	14.681.729.000,00	100,00	53.525.500.000,00
37	**Jumlah Belanja Tidak Terduga (36)**		**14.681.910.366,82**	**14.681.729.000,00**	**100,00**	**53.525.500.000,00**
38						
39	**BELANJA TRANSFER**					
40	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	82.186.900.188,88	82.062.972.249,00	99,85	106.656.074.529,00
41	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	14.450.000.000,00	14.450.000.000,00	100,00	23.531.815.425,00
42	**Jumlah Belanja Transfer (40 s.d 41)**		**96.636.900.188,88**	**96.512.972.249,00**	**99,87**	**130.187.889.954,00**
43	**JUMLAH BELANJA DAERAH (25+33+37+42)**		**2.120.764.717.149,07**	**1.957.270.101.354,28**	**92,29**	**2.180.787.073.265,82**
44						
45	**SURPLUS / (DEFISIT) (17-43)**		**(155.793.050.471,07)**	**(144.830.676.044,18)**	**92,96**	**21.995.931.547,18**
46						
47	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
48	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
49	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	155.793.050.471,07	155.793.050.471,07	100,00	133.797.118.923,89

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
50	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (49)**		**155.793.050.471,07**	**155.793.050.471,07**	**100,00**	**133.797.118.923,89**
51						
52	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
53	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	5.1.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54						
55	**PEMBIAYAAN NETO (50-53)**		**155.793.050.471,07**	**155.793.050.471,07**	**100,00**	**133.797.118.923,89**
56						
57	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (45+55)**	**5.1.4**	**0,00**	**10.962.374.426,89**	**100,00**	**155.793.050.471,07**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN,

Dr. (H.C.) JOHN TABO, S.E., M.B.A.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	155.793.050.471,07	134.270.721.923,89
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	155.793.050.471,07	133.797.118.923,89
3	**Sub Total (1 - 2)**		**0,00**	**473.603.000,00**
4	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	10.962.374.426,89	155.793.050.471,07
5	**Sub Total (3 + 4)**		**10.962.374.426,89**	**156.266.653.471,07**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	(473.603.000,00)
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)**	**5.2.5**	**10.962.374.426,89**	**155.793.050.471,07**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN,

Dr. (H.C.) JOHN TABO, S.E., M.B.A.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	**ASET**			
2	**ASET LANCAR**			
3	**Kas dan Setara Kas**			
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	9.931.444.084,89	153.604.329.833,07
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	188.720.638,00
7	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.4	1.316.737.455,00	2.803.372.874,00
8	Setara Kas	5.3.1.1.1.5	0,00	0,00
9	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	0,00	0,00
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3	122.860.602,00	5.973.291.499,67
11	Beban Dibayar dimuka	5.3.1.1.4	0,00	137.513.000,00
12	Persediaan	5.3.1.1.5	73.489.278.035,49	180.663.903.749,47
13	**JUMLAH ASET LANCAR (4 s.d. 12)**		**84.860.320.177,38**	**343.371.131.594,21**
14				
15	**INVESTASI JANGKA PANJANG**			
16	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	5.3.1.2.1	0,00	0,00
17	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		**0,00**	**0,00**
18				
19	**Investasi Jangka Panjang Permanen**			
20	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen**	5.3.1.2.2	**0,00**	**0,00**
21	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (17+20)**		**0,00**	**0,00**
22				
23	**ASET TETAP**			
24	Tanah	5.3.1.3.1	129.644.632.000,00	78.564.500.000,00
25	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	106.405.636.948,22	82.126.438.624,88
26	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	199.004.198.246,50	55.599.517.613,50
27	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.949.692.374.543,98	2.302.379.548.278,98
28	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	321.765.215.301,57	290.332.073.261,57
29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	483.443.390.360,88	376.021.703.926,88
30	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.606.510.505.925,14)	(1.299.117.734.281,57)
31	**JUMLAH ASET TETAP (24 s.d. 30)**		**2.583.444.941.476,01**	**1.885.906.047.424,24**
32				
33	**ASET LAINNYA**			
34	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	0,00	0,00
35	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	6.230.501.893,00	5.384.627.510,00
36	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	(3.399.951.382,60)	(2.153.851.004,00)
37	Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	23.145.454.548,40	32.536.246.877,57
38	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.5	0,00	17.334.398.274,00
39	**JUMLAH ASET LAINNYA (34 s.d. 38)**		**25.976.005.058,80**	**53.101.421.657,57**
40	**JUMLAH ASET (13+21+31+39)**		**2.694.281.266.712,19**	**2.282.378.600.676,02**
41				
42	**KEWAJIBAN**			
43	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			
44	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	285.807.113,00	803.372.874,00
45	Utang Belanja	5.3.2.1.2	57.699.220.163,00	8.554.584.726,23
46	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	16.953.104.745,00	0,00
47	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (44 s.d 46)**		**74.938.132.021,00**	**9.357.957.600,23**
48				
49	**JUMLAH KEWAJIBAN (47)**		**74.938.132.021,00**	**9.357.957.600,23**
50				

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
51	**EKUITAS**			
52	EKUITAS	5.3.3	2.619.343.134.691,19	2.273.020.643.075,79
53	**JUMLAH EKUITAS (52)**		**2.619.343.134.691,19**	**2.273.020.643.075,79**
54	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+53)**		**2.694.281.266.712,19**	**2.282.378.600.676,02**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN,

Dr. (H.C.) JOHN TABO, S.E., M.B.A.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**					
2	**PENDAPATAN DAERAH-LO**					
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**					
4	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	135.326.816.784,00	120.022.463.383,00	15.304.353.401,00	12,75
5	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	27.990.440,00	0,00	27.990.440,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.3	1.648.826.002,10	5.413.066.299,00	(3.764.240.296,90)	(69,54)
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO (4+5+6)**		**137.003.633.226,10**	**125.435.529.682,00**	**11.568.103.544,10**	**9,22**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**					
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	1.621.823.456.526,00	1.998.028.760.206,00	(376.205.303.680,00)	(18,83)
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Jumlah Pendapatan Transfer-LO (10+11)**		**1.621.823.456.526,00**	**1.998.028.760.206,00**	**(376.205.303.680,00)**	**(18,83)**
13						
14	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**					
15	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	377.322.660.950,00	1.895.182.871.635,02	(1.517.860.210.685,02)	(80,09)
16	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO (15)**		**377.322.660.950,00**	**1.895.182.871.635,02**	**(1.517.860.210.685,02)**	**(80,09)**
17	**JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO (7+12+16)**		**2.136.149.750.702,10**	**4.018.647.161.523,02**	**(1.882.497.410.820,92)**	**(46,84)**
18						
19	**BEBAN DAERAH**					
20	**BEBAN OPERASIONAL**					
21	Beban Pegawai	5.4.2.1	378.105.851.409,52	298.505.440.145,40	79.600.411.264,12	26,67
22	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	836.800.475.359,24	762.825.839.601,20	73.974.635.758,04	9,70
23	Beban Hibah	5.4.2.3	104.128.521.448,00	211.720.212.516,75	(107.591.691.068,75)	(50,82)
24	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.4	41.841.750.000,00	5.247.050.000,00	36.594.700.000,00	697,43
25	**Jumlah Beban Operasi (21 s.d. 24)**		**1.360.876.598.216,76**	**1.278.298.542.263,35**	**82.578.055.953,41**	**6,46**
26						
27	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**					
28	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.5	17.147.118.738,41	13.007.336.686,49	4.139.782.051,92	31,83
29	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.5	3.980.083.964,93	1.111.990.352,27	2.868.093.612,66	257,92
30	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.5	158.325.557.081,15	145.244.508.333,22	13.081.048.747,93	9,01
31	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	5.4.2.5	1.246.100.378,60	1.076.925.502,00	169.174.876,60	15,71
32	**Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (28 s.d. 31)**		**180.698.860.163,09**	**160.440.760.873,98**	**20.258.099.289,11**	**12,63**
33						
34	**BEBAN TRANSFER**					
35	Beban Bagi Hasil	5.4.2.6.1	91.087.735.468,00	114.584.416.055,23	(23.496.680.587,23)	(20,51)
36	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.6.2	14.450.000.000,00	23.531.815.425,00	(9.081.815.425,00)	(38,59)
37	**Jumlah Beban Transfer (35 s.d. 36)**		**105.537.735.468,00**	**138.116.231.480,23**	**(32.578.496.012,23)**	**(23,59)**
38						
39	**JUMLAH BEBAN DAERAH-LO (25+32+37)**		**1.647.113.193.847,85**	**1.576.855.534.617,56**	**70.257.659.230,29**	**4,46**
40						
41	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (17-39)**		**489.036.556.854,25**	**2.441.791.626.905,46**	**(1.952.755.070.051,21)**	**(79,97)**
42						
43	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
44	**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**					
45	**Jumlah Surplus Non Operasional-LO**	5.4.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46						
47	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**					
48	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4	92.324.380,00	143.587.000,00	(51.262.620,00)	(35,70)
49	**Jumlah Defisit Non Operasional-LO (45+48)**		**92.324.380,00**	**143.587.000,00**	**(51.262.620,00)**	**(35,70)**

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
50	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (45-49)**		**(92.324.380,00)**	**(143.587.000,00)**	**51.262.620,00**	**(35,70)**
51						
52	**POS LUAR BIASA**					
53	Pendapatan Luar Biasa	5.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Beban Luar Biasa	5.4.5	14.681.729.000,00	53.525.500.000,00	(38.843.771.000,00)	(72,57)
55	**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (53-54)**		**(14.681.729.000,00)**	**(53.525.500.000,00)**	**38.843.771.000,00**	**(72,57)**
56						
57	**SURPLUS/DEFISIT-LO (41+50+55)**	**5.4.6**	**474.262.503.474,25**	**2.388.122.539.905,46**	**(1.913.860.036.431,21)**	**(80,14)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN,

Dr. (H.C.) JOHN TABO, S.E., M.B.A.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	**5.5.1**		
2	**Arus Kas Masuk**	**5.5.1.1**		
3	Pajak Daerah		135.326.816.784,00	165.444.602.582,00
4	Retribusi Daerah		27.990.440,00	
5	Lain-lain PAD yang Sah		24.148.537.784,10	5.813.066.299,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.639.157.854.800,00	2.031.398.053.932,00
7	Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
8	Pendapatan Hibah		13.778.225.502,00	127.282.000,00
9	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**1.812.439.425.310,10**	**2.202.783.004.813,00**
10	**Arus Kas Keluar**	**5.5.1.2**		
11	Belanja Pegawai		378.396.540.066,52	298.535.200.797,40
12	Belanja Barang dan Jasa		944.241.925.133,00	929.988.945.356,63
13	Belanja Hibah		114.817.007.969,76	222.743.958.046,79
14	Belanja Bantuan Sosial		41.841.750.000,00	5.247.050.000,00
15	Belanja Tidak Terduga		14.681.729.000,00	53.525.500.000,00
16	Belanja Bagi Hasil		82.062.972.249,00	106.656.074.529,00
17	Belanja Bantuan Keuangan		14.450.000.000,00	23.531.815.425,00
18	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**1.590.491.924.418,28**	**1.640.228.544.154,82**
19	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**221.947.500.891,82**	**562.554.460.658,18**
20				
21	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	**5.5.2**		
22	**Arus Kas Masuk**	**5.5.2.1**		
23	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**0,00**	**0,00**
24	**Arus Kas Keluar**	**5.5.2.2**		
25	Belanja Modal Tanah		11.500.000.000,00	31.000.000.000,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		22.266.044.949,00	33.854.864.903,00
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		10.311.158.200,00	53.115.679.212,00
28	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		322.700.973.787,00	422.086.213.196,00
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	501.771.800,00
30	Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00
31	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**366.778.176.936,00**	**540.558.529.111,00**
32	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(366.778.176.936,00)**	**(540.558.529.111,00)**
33				
34	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	**5.5.3**		
35	**Arus Kas Masuk**	**5.5.3.1**		
36	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**0,00**	**0,00**
37	**Arus Kas Keluar**	**5.5.3.2**		
38	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**0,00**	**0,00**
39	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**0,00**	**0,00**
40				
41	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	**5.5.4**		
42	**Arus Kas Masuk**	**5.5.4.1**		

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
43	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		104.946.518.296,23	118.167.415.882,66
44	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		0,00	101.088.440.296,00
45	Penerimaan Kembali UP 2024/2025		188.720.638,00	2.079.433.876,00
46	Penerimaan Kembali Kas Bendahara penerimaan 2024/2025		0,00	0,00
47	Kiriman Uang Masuk		2.000.000.000,00	29.755.876.249,11
48	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**107.135.238.934,23**	**251.091.166.303,77**
49	**Arus Kas Keluar**	**5.5.4.2**		
50	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		104.946.518.296,23	118.167.415.882,66
51	Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		0,00	101.276.442.281,00
52	Koreksi Saldo Awal Kas Daerah		0,00	272.525.000,00
53	Kiriman Uang Keluar		1.030.930.342,00	2.000.000.000,00
54	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**105.977.448.638,23**	**221.716.383.163,66**
55	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**1.157.790.296,00**	**29.374.783.140,11**
56				
57	**Kenaikan / (Penurunan) Kas (19+32+39+55)**	**5.5.5**	**(143.672.885.748,18)**	**51.370.714.687,29**
58	**Saldo Awal Kas**	**5.5.6**	**153.604.329.833,07**	**102.233.615.145,78**
59				
60	**Koreksi SiLPA Tahun Lalu**	**5.5.7**	**0,00**	**0,00**
61				
62	**Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)**		**0,00**	**0,00**
63				
64	**Saldo Akhir Kas Di Fungsi Perbendaharaan (57+58+60+62)**	**5.5.8**	**9.931.444.084,89**	**153.604.329.833,07**
65	Kas di Bendahara Pengeluaran	**5.5.8**	0,00	188.720.638,00
66	Kas di Bendahara Penerimaan	**5.5.8**	0,00	0,00
67	Kas Lainnya	**5.5.8**	1.316.737.455,00	2.803.372.874,00
68	**Saldo Akhir Kas (64+65+66+67)**	**5.5.8**	**11.248.181.539,89**	**156.596.423.345,07**

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN,

Dr. (H.C.) JOHN TABO, S.E., M.B.A.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	**EKUITAS AWAL**	**5.6.1**	**2.273.020.643.075,79**	**952.908.303.381,66**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**5.6.2**	**474.262.503.474,25**	**2.388.122.539.905,46**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	**5.6.3**	**(127.940.011.858,85)**	**(1.068.010.200.211,33)**
4	Koreksi Ekuitas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		0,00	(293.067.345,14)
5	Koreksi Ekuitas Aset Tetap - Gedung dan Bangunan		0,00	(22.486.070,00)
6	Koreksi Ekuitas Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		946.939.398,48	(687.727.158,96)
7	Koreksi Ekuitas Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan		(21.599.697.420,56)	(6.149.756.124,00)
8	Koreksi Ekuitas Penyusutan Aset Tetap JIJ		(107.287.253.837,00)	(1.060.857.163.513,23)
9	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek		0,23	0,00
10	**EKUITAS AKHIR**	**5.6.4**	**2.619.343.134.691,19**	**2.273.020.643.075,79**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN,

Dr. (H.C.) JOHN TABO, S.E., M.B.A.

BAB I
PENDAHULUAN

Di era yang semakin terbuka seperti saat ini, upaya peningkatan kualitas layanan pengelolaan keuangan merupakan keharusan bagi setiap entitas pemerintahan di tanah air, selain tata kelola keuangan yang telah diatur secara detail dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat, termasuk pada penyelenggaraan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ditujukan terhadap kinerja entitas agar dapat terukur dengan lebih baik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun ***trust public*** terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran dan pelaksanaan pembangunan. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya ***good governance and clean government*** untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu kemakmuran bagi masyarakat seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam penyusunan program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus melakukan perbaikan dan berusaha menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif, untuk mewujudkannnya serangkaian upaya telah dilakukan sebagai bagian dari proses untuk peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, pengungkapan yang memadai atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian disajikan secara objektif, sehingga pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik melalui sumber daya yang dikelola, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
d. Menyediakan infomasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer dan cadangan pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan;
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Sinergi Bagan Akun Standar Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

u. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

v. Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

w. Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan;

x. Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua Pegunungan; dan

y. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan penjelasan dari catatan atas laporan keuangan terbagi atas tujuh bab yang secara garis besar uraian dari masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**
Bab ini menguraikan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
Menguraikan asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD, tingkat capaiannya dibandingkan dengan tahun lalu dan kebijakan keuangan yang menjelaskan informasi tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya serta indikator pencapaian target kinerja APBD berupa indikator program dan kegiatan.

Bab III **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
Menguraikan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD berupa realisasi pencapaian kinerja APBD, efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan serta hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV **Kebijakan Akuntansi**
Menguraikan entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab V **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
Menjelaskan rincian dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan meliputi realiasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan ekuitas, neraca, dan arus kas.

Bab VI **Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**
Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan meliputi dasar hukum, visi, dan misi organisasi dan manajemen pemerintahan.

Bab VII **Penutup**

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah Tahun 2025 atau tahun sebelumnya, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 30,03%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,68%;
c. *Gini Ratio* sebesar 0,349%;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 54,91%; dan
e. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp21,027.674,50 juta.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi

No.	Tingkat Kemiskinan	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Persentase Penduduk Miskin Prov. Papua Pegunungan	%	32,97	30,03
2.	Jumlah Penduduk Miskin Prov. Papua Pegunungan	(000) Orang	365,44	337,32
3.	Persentase Penduduk Miskin Indonesia	%	9,03	8,47

Sumber Data: BPS Provinsi Papua Pegunungan, 2026

Persentase penduduk miskin Provinsi Papua Pegunungan pada Tahun 2024 sebesar 32,97% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2025 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 30,03% dan diharapkan pada tahun selanjutnya terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Provinsi Papua Pegunungan masih di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	%	6,205	5,624
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	%	1,461	1,365

Sumber Data: BPS Provinsi Papua Pegunungan, 2026

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	%	1,615	1,437
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	%	0,319	0,319

Sumber Data: BPS Provinsi Papua Pegunungan, 2026

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka**,** terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Pegunungan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 sebesar 1,68. Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 1,32 ada Kenaikan sebesar 0,36%. Data sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/ Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi	%	1,32	1,68	0,36
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	4,91	4,85	-0,06

Sumber Data: BPS Provinsi Papua Pegunungan, 2026

2.1.3 Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada ***Kurva Lorenz***, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi ***uniform*** (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua realisasi pencapaian *Gini Ratio* Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 adalah sebesar 0,349 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3 *Gini Ratio* Provinsi

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1.	*Gini Ratio Provinsi*	0,340	0,349	0,009
2.	*Gini Ratio Nasional*	0,379	0,375	-0,004

Sumber Data: BPS Provinsi Papua Pegunungan, 2026

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Papua Pegunungan yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,349. Angka ini naik 0,009% jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2024 yang sebesar 0,340 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi

dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60);

b. Sedang (60 ≤ IPM < 70);

c. Tinggi (70 ≤ IPM < 80); dan

d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Realisasi pencapaian IPM Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 adalah sebesar 54,91% dengan kategori tinggi atau sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	IPM Provinsi	54,43	54,91
2.	IPM Nasional	75,02	75,90

Sumber Data: BPS Provinsi Papua Pegunungan, 2026

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 adalah sebesar 54,91%, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 54,43% mengalami kenaikan sebesar 0,48%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

2.1.5 Struktur Perekonomian Provinsi Papua Pegunungan

Struktur perekonomian Provinsi Papua Pegunungan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.5 PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun 2024**	Pertumbuhan Tahunan
A.	**Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**4.348.849,20**	**3,24**
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4.062.386,50	3,4
	a. Tanaman Pangan	2.417.034,60	2,99
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	217,3	4
	c. Perkebunan Semusim	318.160,00	2,58
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan lainnya	47.657,50	4,58
	e. Perkebunan Tahunan	861.315,20	4,52
	f. Peternakan	48.824,10	3,98
	g. Jasa Pertanian dan Perkebunan	244.173,80	0,77
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	42,289,00	2,52
	3. Perikanan		
B.	**Pertambangan dan Penggalian**	**303.618,30**	**2,1**
	1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0	0
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0	0
	3. Pertambangan Bijih Logam	0	0
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	303.618,30	2,1
C.	**Industri Pengolahan**	**200.672,00**	**3,53**
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0	0
	a. Industri Batabara	0	0
	b. Industri Pengilangan Migas	0	0
	2. Industri Makanan dan Minuman	74.777,10	5,54
	3. Pengolahan Tembakau	0	0

	4.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	10.343,30	1,88
	5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0
	6.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	74.739,00	2,21
	7.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	10.084,40	2,79
	8.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	777,5	3,62
	9.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0	0
	10.	Industri Barang Galian dan Bukan Logam	10.214,20	4,95
	11.	Industri Logam Dasar	0	0
	12.	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	1.825,10	3,2
	13.	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0	0
	14.	Industri Alat Angkutan	0	0
	15.	Industri Furnitur	16.524,60	1,87
	16.	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Masin dan Peralatan	1.386,80	2,96
D.	**Pengadaan Listrik dan Gas**		**8.358,60**	**5,18**
	1.	Ketenagalistrikan	8.164,30	5,22
	2.	Pengadaan Gas dan Produksi Es	194,2	3,08
E.	**Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**		**2.656,80**	**1,85**
F.	**Konstruksi**		**5.281.297,80**	**5,57**
G.	**Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**		**4.061.867,90**	**6,53**
	1.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	318.969,20	2,9
	2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	3.742.898,70	6,89
H.	**Transportasi dan Pergudangan**		**2.592.516,60**	**9,22**
	1.	Angkutan Rel	0	0
	2.	Angkutan Darat	1.227.833,00	5,37
	3.	Angkutan Laut	0	0
	4.	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	21.846,30	3,99
	5.	Angkutan Udara	1.338.346,30	14,72
	6.	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	4.491,10	2,1
I.	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**		**97.631,50**	**4,55**
	1.	Penyediaan Akomodasi	41.780,40	4
	2.	Penyediaan Makan Minum	55.851,10	5,01
J.	**Informasi dan Komunikasi**		**744.142,50**	**3,77**
K.	**Jasa Keuangan dan Asuransi**		**211.495,20**	**2,38**
	1.	Jasa Perantara Keuangan	203.134,70	2,32
	2.	Asuransi dan Dana Pensiun	1.160,80	2,64
	3.	Jasa Keuangan Lainnya	7.199,70	3,72
	4.	Jasa Penunjang Keuangan	0	0
L.	**Real Estate**		**1.222.321,90**	**4,94**
M.N	**Jasa Perusahaan**		**168.772,20**	**4,49**
O.	**Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib**		**5.298.941,50**	**3,22**
P.	**Jasa Pendidikan**		**921.055,50**	**3,47**
Q.	**Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**		**734.551,90**	**4,4**
R.S.T.U	**Jasa Lainnya**		**362.677,10**	**3,52**
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**26.561,426,50**	**4,75**

*Sumber Data : BPS Provinsi Papua Pegunungan, 2026 (Angka Sangat Sementara **)*

Tabel 2.1.5.1 Distribusi PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Sampai Sengan Triwulan III-2025

Kategori	Uraian	Tahun 2025***	Pertumbuhan Kumulatif PDRB SERI 2010 c to c (Triwulan III-2025 diBandingkan Tahun III-2024)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.398.121,90	2,28
B.	Pertambangan dan Penggalian	240.074,50	2,26
C.	Industri Pengolahan	163.683,10	3,72
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6.232,60	1,53
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.066,50	2,05
F.	Konstruksi	4.035.097,70	-0,33
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.214.014,30	4,3
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.052.304,80	2,44
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	77.102,20	3,45
J.	Informasi dan Komunikasi	586.005,00	3,9
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	157.845,40	-4,68
L.	Real Estate	945.803,50	5,3
M.N	Jasa Perusahaan	127.435,10	2,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4.403.598,00	8,39
P	Jasa Pendidikan	745.038,50	3,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	588.127,10	3,85
R.S.T.U	Jasa Lainnya	285.124,30	5,31
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**21.027.674,50**	**3,53**

*Sumber Data : BPS Provinsi Papua Pegunungan, 2026, (Angka Sangat Sangat Sementara **)*

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Anggaran

Kebijakan ekonomi publik melalui belanja APBD Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat memberi ***multiplayer effect*** yang besar bagi perkembangan ekonomi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang memuat berbagai program dan kegiatan, disusun atas dasar pendekatan kinerja yang mengutamakan *output*, hasil dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu anggaran setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus disertai dengan tujuan, target sasaran, dan hasil yang ingin dicapai secara jelas dan terukur.

Untuk mewujudkan pokok-pokok kebijakan anggaran tersebut di atas, maka penyusunan dan pelaksanaan APBD mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas Anggaran Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

b. Disiplin Anggaran

APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan yang direncanakan adalah batas minimal yang akan dicapai untuk setiap sumber pendapatan, berdasarkan perkiraan yang terukur dan rasional. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap jenis dan objek belanja merupakan batas tertinggi penggeluaran yang setara dengan pelayanan yang diberikan.

Belanja Daerah untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dialokasikan melalui program dan kegiatan Sekretariat/ Dinas/Badan, direncanakan secara jelas sehingga pelaksanaan antara kedua sifat/fungsi anggaran tersebut tidak tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan penyimpangan penggunaan dana.

c. Partisipatif

Dalam menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang responsif dan partisipatif, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan proses perencanaan dengan didampingi oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun proses pengesahan APBD belum melalui DPRD dikarenakan belum terbentuknya Lembaga Legislatif. Pengesahan APBD masih dibawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana daerah yang masih tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan perbaikan dan peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 harus diupayakan dengan mempertimbangkan skala prioritas guna mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran.

e. Anggaran Kinerja

Penyusunan APBD harus menggambarkan kinerja pemerintahan dengan menetapkan indikator kinerja (*input*, *output*, hasil, dan manfaat) dan target kinerja yang ingin dicapai dari suatu program kegiatan yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

2.2.2 Kebijakan Keuangan

Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025 diprioritaskan untuk melaksanakan agenda pembangunan Provinsi Papua Pegunungan secara maksimal, mendorong kekuatan ekonomi daerah dan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Arah dan kebijakan umum keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Kebijakan Anggaran Pendapatan:
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
      1) Dalam perencanaan PAD Tahun 2025, dengan didasarkan atas realisasi penerimaan tahun lalu serta mempertimbangkan potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
      2) Dalam upaya peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh dengan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan serta melakukan inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan penyesuaian tarif pajak; dan
      3) Penerimaan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan

dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD.

b. Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan memperoleh dana perimbangan yang bersumber dari APBN bersifat dana transfer dari pemerintah pusat dengan prinsip ***money follows function***, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan Belanja Langsung meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

a. Belanja Operasi meliputi:

1) Belanja Pegawai

a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, dan penambahan PNSD dengan memperhitungkan ***acress*** sebesar 2,5% dari jumlah Belanja Pegawai (gaji pokok dan tunjangan);

b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD didasarkan penyesuaian hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan oleh Departemen Keuangan dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2025 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah;

c) Untuk mengantisipasi pengangkatan pegawai honorer (Non PNS) menjadi CPNSD, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menganggarkan Belanja Pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD;

d) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan berupa uang makan dan tambahan penghasilan lainnya hanya untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, yang kriterianya dan besarnya ditetapkan dengan peraturan;

e) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah; dan

f) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak dianggarkan dalam APBD.

2) Belanja Barang dan Jasa

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan melalui analisis kewajaran biaya, yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari satu

kegiatan, guna menghindari adanya pemborosan, program, dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil;

b) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; dan

c) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah.

3) Belanja Hibah

a) Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat masyarakat; dan

b) Belanja Hibah diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non professional, dan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah merencanakan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

b. Belanja Modal

Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi Belanja Modal diupayakan secara proporsional sesuai dengan peringkat dan prioritas dibidang pelayanan publik.

c. Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

d. Belanja Transfer – Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025.

3. Pembiayaan Daerah

Dalam rangka menutupi defisit anggaran, dibiayai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu dan pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal dan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga.

2.3 Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Sasaran dan prioritas Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dibidang pembangunan tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang tersebar pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Pegunungan, sebagai tindak lanjut dari visi dan misi Provinsi Papua Pegunungan. Adapun visi Provinsi Papua Pegunungan adalah ***"Mewujudkan Provinsi Papua Pegunungan BERSINAR".***

Misi: 1) Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan berbudaya, dalam lingkungan sosial yang inklusif;

2) Terwujudnya kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel;
3) Terbangunnya infrastruktur yang merata, berkualitas dan terintegrasi dalam mengurangi keterisolasian dengan memperhatikan aspek lingkungan;
4) Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing melalui pemanfaatan sumber daya lokal, investasi, serta peningkatan ketahanan pangan;

Visi dan Misi Provinsi Papua Pegunungan pada tahun pertama dilaksankan dalam bentuk program dan kegiatan bagi masing-masing SKPD. Visi dan Misi disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan dalam 5 Program Prioritas.

2.3.1 Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.964.971.666.678,00 dengan realisasi sebesar Rp1.812.439.425.310,10 atau sebesar 92,24%. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp184.475.019.128,00 dengan realisasi sebesar Rp135.326.816.784,00 atau 73,35%;
2. Penerimaan Retribusi sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp27.990.440,00.
3. Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp29.761.670.276,00 terealisasi sebesar Rp24.148.537.784,10 atau 81,13%.
4. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.650.734.977.274,00 dengan realisasi sebesar Rp1.639.157.854.800,00 atau 99,29%.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp100.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.778.225.502,00 atau 13,78%.

2.3.2 Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.120.764.717.149,07 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp1.546.364.349.076,37;
2. Belanja Modal sebesar Rp463.081.557.517,00;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp14.681.910.366,82; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp96.636.900.188,88.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.957.270.101.354,28 atau 92,29% dengan realisasi masing-masing belanja sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.479.297.223.169,28 atau 95,66%;
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp366.778.176.936,00 atau 79,20%;
3. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp14.681.729.000,00 atau 99,99%; dan
4. Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp96.512.972.249,00 atau 99,87%.

Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan empat urusan yaitu 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar; 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar; 3) Urusan Pemerintahan Pilihan; dan 4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Belanja Daerah dijabarkan dalam beberapa bidang, program dan kegiatan adapun Realisasi Belanja Tahun 2025 sebesar Rp1.957.270.101.354,28 atau 92,29% dari total Anggaran Belanja sebesar

Rp2.120.764.717.149,07. Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp2.180.787.073.265,82 terdapat penurunan sebesar Rp223.516.971.911,54 atau 10,25%. Rincian belanja yang dilaksanakan berdasarkan urusan dan bidang adalah sebagai berikut.

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah 6 bidang utama yang menjadi kewenangan daerah dan wajib dipenuhi karena berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Berdasarkan Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 bidang-bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan sosial.

Total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar Rp887.537.654.923,00 terealisasi sebesar Rp756.272.531.943,90 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Belanja daerah bidang pendidikan dari anggaran sebesar Rp107.557.009.515,24 terealisasi sebesar Rp106.486.720.933,90. Belanja tersebut difokuskan pada program pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan bahasa dan sastra, serta beberapa program lainnya yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.1.1 Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.744.487.752,24	7.732.267.295,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.075.255.000,00	1.072.059.500,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.994.967,00	18.995.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	16.000.000,00
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3.847.825.000,00	3.751.154.250,00
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.500.000.000,00	1.457.209.750,00
10	Pengelolaan Akademi Komunitas	17.153.407.600,00	16.585.475.942,90
11	Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	3.764.250.000,00	3.764.250.000,00
12	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	56.327.935.196,00	56.327.935.196,00
13	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	6.500.000.000,00	6.478.520.000,00
14	Penetapan Kurikulum Muatan pendidikan khusus	500.000.000,00	500.000.000,00
15	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	8.000.000.000,00	7.680.000.000,00
16	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	743.854.000,00	743.854.000,00
	Jumlah	**107.557.009.515,24**	**106.486.720.933,90**

b. Bidang Kesehatan

Belanja daerah bidang kesehatan dari anggaran sebesar Rp126.021.280.975,00 terealisasi sebesar Rp119.109.408.129,00 yang diprioritaskan pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, akreditasi pelayanan kesehatan, serta beberapa program lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.1.2 Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.121.493.297,00	8.096.503.268,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.022.293.760,00	1.022.138.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.957.985,00	436.274.785,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.670.000,00	0,00
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	37.797.512.110,00	34.494.701.694,00
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	76.630.112.423,00	73.089.777.382,00
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.182.871.900,00	1.180.643.500,00
11	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	304.369.500,00	304.369.500,00
12	Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	400.000.000,00	400.000.000,00
	JUMLAH	**126.021.280.975,00**	**119.109.408.129,00**

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja daerah pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dari anggaran sebesar Rp588.489.028.799,28 dan terealisasi sebesar Rp466.802.880.198,00 dengan prioritas program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, pengembangan jasa konstruksi, dan penyelenggaraan penataan ruang, serta beberapa program lainnya yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.1.3 Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.073.443.741,28	8.065.926.329,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.134.816.000,00	2.133.045.573,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.899.700,00	174.950.000,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.667.442.370,00	48.518.185.250,00
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.155.250.000,00	4.113.661.000,00
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	11.760.750.000,00	7.953.516.100,00
9	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	300.000.000,00	0,00
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	77.703.600.000,00	50.705.726.400,00
11	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.421.000.000,00	0,00
12	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	17.750.000.000,00	2.294.614.500,00
13	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.500.000.000,00	12.335.133.790,00
14	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	396.157.126.988,00	328.401.852.256,00

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
15	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	577.700.000,00	577.700.000,00
16	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.900.000.000,00	1.318.569.000,00
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00
	Jumlah	**588.489.028.799,28**	**466.802.880.198,00**

d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Belanja daerah pada bidang perumahan dan kawasan permukiman dari anggaran sebesar Rp9.448.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.056.000.000,00 dengan prioritas program pengembangan perumahan, dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta beberapa program lainnya yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:.

Tabel 2.3.2.1.4 Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	9.448.625.000,00	8.056.000.000,00
	Jumlah	**9.448.625.000,00**	**8.056.000.000,00**

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Belanja daerah pada bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dari anggaran sebesar Rp21.269.258.940,24 terealisasi sebesar Rp21.240.417.469,00 dengan prioritas peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana dan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, serta beberapa program lainnya yang terdapat pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.1.5 Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.524.941.973,24	8.503.851.836,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.270.500.000,00	1.269.937.666,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.494.967,00	201.494.967,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
7	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	380.109.000,00	380.000.000,00
8	Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	10.489.320.000,00	10.488.240.000,00
9	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	361.893.000,00	361.893.000,00
	Jumlah	**21.269.258.940,24**	**21.240.417.469,00**

f. Bidang Sosial

Belanja daerah bidang sosial dari anggaran sebesar Rp34.752.451.693,24 terealisasi sebesar Rp34.577.105.214,00 dengan prioritas program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana dengan beberapa rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.1.6 Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.946.505.693,24	4.930.605.117,00

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.138.502.000,00	1.120.999.289,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.444.000,00	386.237.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
8	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.250.000.000,00	1.242.600.000,00
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	1.250.000.000,00	1.235.000.000,00
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	200.000.000,00	198.712.000,00
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	1.600.000.000,00	1.593.301.808,00
12	Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
13	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	18.800.000.000,00	18.689.650.000,00
14	Penetapan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	Jumlah	**34.752.451.693,24**	**34.577.105.214,00**

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan wajib daerah yang berfokus pada fungsi pengaturan dan pemberdayaan, mencakup 18 bidang seperti tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pertanahan, perhubungan, komunikasi, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, koperasi/UMKM, penanaman modal, kepemudaan-olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk membiayai urusan wajib bukan pelayanan dasar adalah sebesar Rp201.336.426.610,72 terealisasi sebesar Rp181.280.786.968,38 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut.

a. Bidang Tenaga Kerja

Belanja daerah bidang tenaga kerja dari anggaran sebesar Rp11.091.838.614,36 terealisasi sebesar Rp10.935.551.800,00 dengan program prioritas pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial serta program lainnya dengan beberapa rincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.2.1 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.159.356.614,36	4.134.377.710,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.648.748.000,00	1.537.979.900,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.000,00	114.750.000,00
7	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.054.460.000,00	1.052.674.190,00
8	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00
9	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.250.000.000,00	2.242.582.000,00
10	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	300.000.000,00	300.000.000,00
11	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	350.000.000,00	350.000.000,00

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
12	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	539.274.000,00	538.188.000,00
	Jumlah	**11.091.838.614,36**	**10.935.551.800,00**

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belanja daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari anggaran sebesar Rp1.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.599.549.820,00 dengan prioritas program pengelolaan sistem data kesetaraan ***gender*** dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan pemenuhan hak anak dengan beberapa rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.2.2 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	330.000.000,00	330.000.000,00
2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	870.000.000,00	869.549.820,00
	Jumlah	**1.600.000.000,00**	**1.599.549.820,00**

c. Bidang Pangan

Belanja daerah bidang ketahanan pangan dari anggaran sebesar Rp11.678.858.740,24 terealisasi sebesar Rp11.524.932.278,00 dengan prioritas pengelolaan sumber daya ekonomi dan kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan, pengawasan kerawanan pangan, dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.2.3 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.324.235.740,24	8.300.786.452,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.929.000,00	4.920.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.379.804.000,00	1.341.434.476,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.892.000,00	435.534.000,00
7	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	379.000.000,00	299.690.000,00
8	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	499.240.000,00	494.000.000,00
9	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	199.758.000,00	198.599.950,00
10	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	144.967.400,00
	Jumlah	**11.678.858.740,24**	**11.524.932.278,00**

d. Bidang Pertanahan

Belanja daerah bidang pertanahan dari anggaran sebesar Rp26.413.626.635,20 terealisasi sebesar Rp26.394.846.744,00 dengan prioritas program pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaiaaan ganti kerugian dan santuan tanah untuk pembangunan, penetapan tanah ulayat,

pengelolaan tanah kosong serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.2.4 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.176.769.635,20	13.160.581.744,00
3	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	200.057.000,00	200.000.000,00
4	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	12.131.800.000,00	12.129.820.000,00
5	Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Provins	500.000.000,00	500.000.000,00
6	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	400.000.000,00	399.445.000,00
	Jumlah	**26.413.626.635,20**	**26.394.846.744,00**

e. Bidang Lingkungan Hidup

Belanja daerah bidang lingkungan hidup dari anggaran sebesar Rp3.946.235.927,33 terealisasi sebesar Rp3.422.728.050,00 dengan prioritas program perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, pengelolaan hutan serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.2.5 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.385.861.460,00	1.377.691.050,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.999.967,33	365.850.000,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	5.415.000,00
7	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
8	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	654.372.000,00	653.772.000,00
9	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	500.002.500,00	0,00
	Jumlah	**3.946.235.927,33**	**3.422.728.050,00**

f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Belanja daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pemberdayaan masyarakat dan kampung dari anggaran sebesar Rp7.278.438.915,28 terealisasi sebesar Rp7.104.097.687,00 dengan prioritas program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.2.6 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.520.884.948,28	4.494.043.395,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.998.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.191.993.000,00	1.191.950.325,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.969.967,00	94.564.967,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
8	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1.144.591.000,00	1.138.541.000,00
9	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	140.000.000,00	0,00
	Jumlah	**7.278.438.915,28**	**7.104.097.687,00**

g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kampung

Belanja daerah bidang pemberdayaan masyarakat kampung dari anggaran sebesar Rp3.255.260.000,00 terealisasi sebesar Rp3.231.360.000,00 dengan prioritas program administrasi pemerintah desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pemberdayaan masyarakat dan kampung papua, peningkatan kesejahteraan orang asli papua, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.2.7 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rpdefr)
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	290.300.000,00	289.500.000,00
2	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
3	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	350.000.000,00	344.000.000,00
4	Pemberdayaan Orang Asli Papua	314.960.000,00	297.860.000,00
	Jumlah	**3.255.260.000,00**	**3.231.360.000,00**

h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belanja daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari anggaran sebesar Rp2.057.896.000,00 terealisasi sebesar Rp1.857.896.000,00 dengan prioritas program pengendalian penduduk, pembinaan keluarga berencana (KB), pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.2.8 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	498.146.000,00	298.146.000,00
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00
3	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	659.750.000,00	659.750.000,00
4	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000,00	200.000.000,00
5	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00
	JUMLAH	**2.057.896.000,00**	**1.857.896.000,00**

i. Bidang Perhubungan

Belanja daerah bidang Perhubungan dari anggaran sebesar Rp77.766.753.190,36 terealisasi sebesar Rp60.531.787.150,52 dengan prioritas program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ),

pengelolaan pelayaran, pengelolaan penerbangan, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.2.9 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.276.087.533,36	5.262.764.697,52
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.391.179.100,00	1.379.416.264,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.957.000,00	208.957.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.995.000,00	161.715.721,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00
8	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	149.986.000,00	121.186.000,00
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	4.440.999.968,00	3.968.618.200,00
10	Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ	199.812.000,00	199.812.000,00
11	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.176.903.805,00	5.001.141.792,00
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	236.890.000,00	225.390.000,00
13	Pembangunan Bandar Udara	60.266.130.784,00	43.797.058.745,00
14	Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang Penerbangan	199.812.000,00	186.726.731,00
	Jumlah	**77.766.753.190,36**	**60.531.787.150,52**

j. Bidang Komunikasi dan Informatika

Belanja daerah bidang komunikasi dan informatika dari anggaran sebesar Rp18.053.861.846,19 terealisasi sebesar Rp17.987.356.474,00 dengan prioritas program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informasi serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.2.10 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.436.201.850,28	4.400.609.479,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.481.166.000,01	1.480.852.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.499.995,90	172.994.995,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.994.000,00	19.900.000,00
7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
8	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	10.250.000.000,00	10.248.000.000,00
	Jumlah	**18.053.861.846,19**	**17.987.356.474,00**

k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Belanja daerah bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan perindustrian dan perdagangan dari anggaran sebesar Rp9.517.723.482,16 terealisasi sebesar Rp9.327.668.231,00 dengan prioritas program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM), pengembangan UMKM, penguatan badan hukum koperasi serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.2.11 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.429.020.382,16	5.239.202.231,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.779.000,00	104.779.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.463.953.000,00	1.463.815.000,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.999.100,00	434.900.000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	349.972.000,00	349.972.000,00
10	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	900.000.000,00	900.000.000,00
11	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	550.000.000,00	550.000.000,00
12	Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00
	Jumlah	**9.517.723.482,16**	**9.327.668.231,00**

l. Bidang Penanaman Modal

Belanja daerah bidang penanaman modal dari anggaran sebesar Rp4.979.483.871,00 terealisasi sebesar Rp4.943.002.312,00 dengan prioritas program pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.2.12 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.261.349.871,00	3.243.107.367,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	925.264.000,00	909.254.945,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	571.350.000,00	569.200.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.995.000,00	100.995.000,00
7	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	58.170.000,00	58.170.000,00
8	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	52.355.000,00	52.275.000,00
	Jumlah	**4.979.483.871,00**	**4.943.002.312,00**

m. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Belanja daerah bidang kepemudaan, olahraga dari anggaran sebesar Rp15.520.252.938,60 terealisasi sebesar Rp15.476.540.839,00 dengan prioritas program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, pengembangan daya saing keolahragaan, pengembangan kapasitas kepramukaan, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.2.13 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaaan dan Olahraga Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.998.000,00	29.998.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.046.280.938,60	5.024.908.146,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.233.429.000,00	1.219.089.693,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.550.000,00	66.550.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.995.000,00	260.995.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
8	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00
9	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	300.000.000,00	300.000.000,00
10	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	300.000.000,00	300.000.000,00
11	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	750.000.000,00	750.000.000,00
12	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00
13	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400.000.000,00	400.000.000,00
	Jumlah	**15.520.252.938,60**	**15.476.540.839,00**

n. Bidang Statistik

Belanja daerah bidang statistik dari anggaran sebesar Rp591.750.000,00 terealisasi sebesar Rp587.742.956,00 dengan prioritas program penyelenggaraan statistik sektoral dan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.2.14 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	591.750.000,00	587.742.956,00
	Jumlah	**591.750.000,00**	**587.742.956,00**

o. Bidang Persandian

Belanja daerah bidang persandian dari anggaran sebesar Rp1.934.686.450,00 terealisasi sebesar Rp1.929.966.000,00 dengan prioritas program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.2.15 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.350.000.000,00	1.345.320.000,00
2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	584.686.450,00	584.646.000,00
	Jumlah	**1.934.686.450,00**	**1.929.966.000,00**

p. Bidang Kebudayaan

Belanja daerah bidang kebudayaan dari anggaran sebesar Rp5.649.760.000,00 terealisasi sebesar Rp4.425.760.626,86. Belanja tersebut difokuskan pada program pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, dan pengelolaan

permuseuman, serta beberapa program lainnya yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.2.16 Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.000.000.000,00	0,00
2	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	649.760.000,00	449.880.000,00
3	Pengelolaan Museum Provinsi	4.000.000.000,00	3.975.880.626,86
	Jumlah	**5.649.760.000,00**	**4.425.760.626,86**

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah berdasarkan potensi unggulan, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bidang-bidang ini meliputi pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, kehutanan, energi/sumber daya mineral, dan transmigrasi.

Total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk membiayai urusan Pilihan adalah sebesar Rp55.825.583.520,00 terealisasi sebesar Rp55.375.009.776,00 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut.

a. Bidang Kelautan dan Perikanan

Belanja daerah bidang kelautan dan perikanan dari anggaran sebesar Rp2.685.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.682.844.365,00 dengan prioritas program pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.3.1 Belanja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.785.000.000,00	1.784.322.365,00
2	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	900.000.000,00	898.522.000,00
	Jumlah	**2.685.000.000,00**	**2.682.844.365,00**

b. Bidang Pariwisata

Belanja daerah bidang pariwisata dari anggaran sebesar Rp2.270.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.270.000.000,00 dengan prioritas program pemasaran pariwsata, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.3.2 Belanja Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	300.000.000,00	300.000.000,00
2	Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00
	Jumlah	**2.270.000.000,00**	**2.270.000.000,00**

c. Bidang Pertanian

Belanja daerah bidang pertanian dari anggaran sebesar Rp1.100.116.960,00 terealisasi sebesar Rp693.288.710,00 dengan prioritas program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penaggulangan bencana

pertanian, penyuluhan pertanian, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.3.3 Belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	200.000.000,00	0,00
2	Penataan Prasarana Pertanian	99.996.000,00	0,00
3	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.122.500,00	211.389.350,00
4	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	100.000.000,00	93.897.360,00
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	199.998.460,00	199.350.000,00
6	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	100.000.000,00	100.000.000,00
7	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	100.000.000,00	88.652.000,00
	Jumlah	**1.100.116.960,00**	**693.288.710,00**

d. Bidang Kehutanan

Belanja daerah bidang kehutanan dari anggaran sebesar Rp2.600.890.000,00 terealisasi sebesar Rp2.592.715.000,00 dengan prioritas program pengelolaan hutan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.3.4 Belanja Urusan Pilihan Bidang Kehutanan Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.200.890.000,00	2.192.715.000,00
2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	400.000.000,00	400.000.000,00
	Jumlah	**2.600.890.000,00**	**2.592.715.000,00**

e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Belanja daerah bidang energi dan sumber daya mineral dari anggaran sebesar Rp4.219.488.560,00 terealisasi sebesar Rp4.193.340.400,00 dengan prioritas program minyak dan gas bumi, pengelolaan ketenagalistrikan, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.3.5 Belanja Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Koordinasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Dari OAP	200.000.000,00	199.907.800,00
2	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4.019.488.560,00	3.993.432.600,00
	Jumlah	**4.219.488.560,00**	**4.193.340.400,00**

f. Bidang Perdagangan

Belanja daerah bidang perdagangan dari anggaran sebesar Rp41.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp40.996.750.000,00 dengan prioritas program peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.3.6 Belanja Urusan Pilihan Bidang Perdagangan
Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	40.500.000.000,00	40.496.750.000,00
2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	500.000.000,00	500.000.000,00
	Jumlah	**41.000.000.000,00**	**40.996.750.000,00**

g. Bidang Perindustrian

Belanja daerah bidang perindustrian dari anggaran sebesar Rp1.449.958.000,00 terealisasi sebesar Rp1.448.308.000,00 dengan prioritas program, perencanaan dan pembangunan industri, pengelolaan sistem informasi industri nasional, serta program prioritas lainnya dengan beberapa rincian program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.3.7 Belanja Urusan Pilihan Bidang Perindustrian
Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.250.000.000,00	1.248.350.000,00
2	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	199.958.000,00	199.958.000,00
	Jumlah	**1.449.958.000,00**	**1.448.308.000,00**

h. Bidang Transmigrasi

Belanja daerah bidang transmigrasi dari anggaran sebesar Rp500.130.000,00 terealisasi sebesar Rp497.763.301,00 dengan program perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, serta program lainnya dengan beberapa rincian kegiatan sebagai berikut:.

Tabel 2.3.2.3.8 Belanja Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi
Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	250.000.000,00	249.177.201,00
2	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.130.000,00	248.586.100,00
	Jumlah	**500.130.000,00**	**497.763.301,00**

2.3.2.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya (seperti PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan utama (wajib dan pilihan) agar berjalan efektif. Bidang-bidang yang termasuk unsur pendukung meliputi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan serta bidang pelayanan administrasi umum, organisasi dan reformasi birokrasi, pemerintahan dan otonomi daerah, hukum, pengadaan barang dan jasa, umum dan administrasi pimpinan/protokol dengan total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk membiayai unsur pendukung urusan pemerintahan adalah sebesar Rp897.786.337.118,85 terealisasi sebesar Rp888.566.341.079,00 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut.

a. Bidang Perencanaan

Belanja daerah bidang perencanaan dari anggaran sebesar Rp21.745.136.557,24 terealisasi sebesar Rp18.415.614.965,00 dengan prioritas program pengembangan data/informasi, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan ekonomi, penelitian dan pengembangan dan beberapa program sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.4.1 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.394.136.532,24	6.126.269.341,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	950.357.945,00	847.529.023,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.337.604.000,00	3.092.446.580,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	641.400.000,00	640.680.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.962.500,00	89.967.500,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.260.000,00	134.260.000,00
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.897.291.200,00	4.680.749.236,00
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.684.104.380,00	684.100.000,00
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.050.000.000,00	843.118.708,00
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	600.000.000,00	600.000.000,00
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	951.020.000,00	666.494.577,00
	Jumlah	**21.745.136.557,24**	**18.415.614.965,00**

b. Bidang Keuangan

Belanja daerah bidang keuangan dari anggaran sebesar Rp212.480.768.252,29 terealisasi sebesar Rp209.464.935.465,00 dengan prioritas program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota beberapa rincian program sebagai berikut:.

Tabel 2.3.2.4.2 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.065.775.000,00	1.057.490.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.324.336.590,59	25.010.970.004,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000,00	27.900.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.454.237.930,00	13.370.942.266,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.096.928,00	708.295.242,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.260.000,00	31.000.000,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	21.611.156.473,00	21.562.504.961,00
8	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	3.494.456.000,00	3.485.162.000,00
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	6.197.903.000,00	6.194.508.370,00
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	10.239.544.940,00	10.208.214.918,00
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	118.318.810.555,70	118.194.701.249,00
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.579.490.500,00	2.578.964.500,00
13	Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.406.700.335,00	7.034.281.955,00
	Jumlah	**212.480.768.252,29**	**209.464.935.465,00**

c. Bidang Kepegawaian

Belanja daerah bidang kepegawaian, penelitian dan pengembangan dari anggaran sebesar Rp19.330.152.514,18 terealisasi sebesar Rp17.852.477.753,00 dengan prioritas program pembinaan dan pengembangan aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan beberapa program sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.4.3 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Penelitian dan Pengmbangan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.526.110.084,12	4.502.571.819,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.315.990.000,00	1.314.642.017,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.999.100,00	210.988.000,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.733.460.000,00	3.031.739.000,00
8	Mutasi dan Promosi ASN	4.805.058.330,06	4.491.232.527,00
9	Pengembangan Kompetensi ASN	2.818.535.000,00	2.381.778.584,00
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.900.000.000,00	1.899.619.806,00
	Jumlah	**19.330.152.514,18**	**17.852.477.753,00**

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Belanja daerah bidang penelitian dan pengembangan dari anggaran sebesar Rp1.150.250.000,00 terealisasi sebesar Rp1.144.826.000,00 dengan prioritas program penelitian dan pengembangan dan beberapa program sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.4.4 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.150.250.000,00	1.144.826.000,00
	Jumlah	**1.150.250.000,00**	**1.144.826.000,00**

e. Bidang Administrasi Pemerintahan

Belanja daerah bidang administrasi pemerintahan atau Fungsi Sekretariat/Umum, mencakup pengelolaan kerumahtanggaan, keprotokolan, tata usaha, dan administrasi umum perangkat daerah, dari anggaran sebesar Rp596.486.705.481,38 terealisasi sebesar Rp595.205.674.770,00 dengan prioritas program penataan organisasi, koordinasi hukum, kebijakan pelayanan barang dan jasa, kebijakan administrasi pembangunan dan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan beberapa program pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.4.5 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.915.195.506,00	27.736.551.013,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.994.000,00	19.994.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.875.772.082,00	35.778.769.652,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.599.212.600,00	5.592.600.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.640.009.450,00	2.631.805.636,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.500.000,00	695.474.693,00
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	162.313.023.592,00	162.272.610.878,00
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	18.363.716.560,00	18.104.616.560,00
10	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	41.008.513.660,00	41.006.602.700,00
11	Fasilitasi Keprotokolan	51.777.768.000,00	51.750.418.000,00

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
12	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	3.885.074.000,00	3.883.711.000,00
13	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.080.124.000,00	1.079.831.000,00
14	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	800.054.000,00	800.000.000,00
15	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.220.000.000,00	1.220.000.000,00
16	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	599.955.750,00	599.955.750,00
17	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	700.000.000,00	700.000.000,00
18	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00
19	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	899.999.800,00	899.000.000,00
20	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.585.000.000,00	1.456.265.200,00
21	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.326.089.000,00	1.250.087.200,00
22	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.187.250.000,00	1.150.060.860,00
23	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	650.000.000,00	650.000.000,00
24	Pelaksanaan Otonomi Daerah	2.262.689.000,00	2.262.207.000,00
25	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	48.850.821.000,00	48.850.000.000,00
26	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus	1.600.000.000,00	1.450.000.000,00
27	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	1.175.160.000,00	1.174.510.000,00
28	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00
29	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.640.936.633,28	4.609.188.920,00
30	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00
31	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.711.893.000,00	1.702.850.000,00
32	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.039.296.385,00	3.038.120.200,00
33	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.100.000.000,00	5.099.600.000,00
34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.135.000,00	665.130.000,00
35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.900.000,00	19.873.000,00
36	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	31.857.325.390,70	31.812.332.994,00
37	Layanan Administrasi DPRD	7.190.159.250,00	7.185.904.000,00
38	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2.157.257.000,00	2.147.436.000,00
39	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.546.700.000,00	4.542.400.000,00
40	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.422.101.892,40	7.367.593.350,00
41	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.835.404.230,00	3.803.140.164,00
42	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	54.369.004.000,00	54.352.934.000,00
43	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.167.964.000,00	1.166.964.000,00
44	Fasilitasi Tugas DPRD	4.759.199.100,00	4.746.528.000,00
45	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	49.392.507.600,00	49.370.609.000,00
	Jumlah	**596.486.705.481,36**	**595.205.674.770,00**

f. Bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan

Belanja daerah bidang pengawasan urusan pemerintahan dari anggaran sebesar Rp22.453.298.172,48 terealisasi sebesar Rp22.425.133.874,00 dengan prioritas program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan beberapa rincian program sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.4.6 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.379.642.642,48	4.358.090.774,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	981.563.000,00	981.563.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.272.726.830,00	3.272.726.830,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.920.000,00	299.920.000,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.000.000,00	432.000.000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	8.816.954.000,00	8.816.954.000,00
10	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.205.985.400,00	2.205.796.505,00
11	Pendampingan dan Asistensi	2.024.506.300,00	2.018.082.765,00
	Jumlah	**22.453.298.172,48**	**22.425.133.874,00**

g. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja daerah kesatuan bangsa dan politik dari anggaran sebesar Rp24.140.026.141,28 terealisasi sebesar Rp24.057.678.252,00 dengan prioritas program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dan beberapa program kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.4.7 Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.628.033.141,28	3.608.184.252,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.776.998.000,00	2.776.907.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.995.000,00	98.995.000,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	15.000.000,00
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.100.000.000,00	1.099.600.000,00
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	300.000.000,00	299.800.000,00
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.500.000.000,00	1.444.352.000,00
	Jumlah	**24.140.026.141,28**	**24.057.678.252,00**

2.3.2.5 Unsur Kekhususan dan Keistimewaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang mencakup Papua Barat dan provinsi baru hasil pemekaran. Unsur kekhususan dan keistimewaan daerah di Indonesia merupakan perlakuan asimetris (berbeda) yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu berdasarkan sejarah, budaya, maupun kondisi sosial-politik, dengan total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk membiayai unsur Kekhususan dan Keistimewaan adalah sebesar Rp78.278.714.976,50 terealisasi sebesar Rp76.805.417.859,00 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut.

a. Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP)

Belanja daerah lembaga khusus MRP dari anggaran sebesar Rp78.278.714.976,50 terealisasi sebesar Rp76.805.417.859,00 dengan prioritas program penunjang dan peningkatan kapasitas lembaga MRP Papua Pegunungan dan beberapa program sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.5.1 Belanja Urusan Pemerintahan Umum Lembaga MRP Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.684.083.161,12	3.657.523.547,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.503.503.000,00	3.473.486.200,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.995.000,00	19.995.000,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.800.000,00	19.800.000,00
7	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	17.809.443.500,00	17.752.432.000,00
8	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	21.152.170.000,00	21.152.165.800,00
	Jumlah	**78.278.714.976,50**	**76.805.417.859,00**

2.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar **Rp155.793.050.471,07** dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp0,00** sehingga diperoleh Pembiayaan Netto sebesar **Rp155.793.050.471,07**. Dari perbandingan realisasi Pendapatan Daerah sebesar **Rp1.812.415.327.810,10** dan Belanja Daerah sebesar **Rp1.958.300.087.626,28** sehingga diperoleh Surplus/(Defisit) sebesar **Rp(145.884.759.816,18)** sehingga diperoleh SiLPA tahun berjalan sebesar **Rp9.908.290.654,89** yaitu Surplus/(Defisit) ditambah dengan Pembiayaan Netto.

Perhitungan SiLPA tahun berjalan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3.3.1 Perhitungan SiLPA Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	1.812.439.425.310,10
2	Belanja	1.957.270.101.354,28
3	**Surplus (Defisit)**	**(144.830.676.044,18)**
4	Penerimaan Pembiayaan	155.793.050.471,07
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6	**Pembiayaan Netto**	**155.793.050.471,07**
7	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayan tahun Berkenan (SiLPA)**	**10.962.374.426,89**

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Target Kinerja Keuangan dan Perubahannya

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan satuan nominal, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat disebabkan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah Wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya dan dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat di investasikan dan/atau digunakan untuk Pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi dan dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 ditetapkan sebagai upaya kesinambungan pembangunan daerah yang terencana, sistematis dan dilaksanakan oleh seluruh komponen pembangunan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 antara lain:

(i) Adanya potensi peningkatan objek pajak baru; dan

(ii) Adanya regulasi baru yang berkaitan dengan Dana Transfer.

Adapun hal yang menyebabkan perubahan anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan antara lain:

a. Adanya pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran, dan adanya penjadwalan ulang terhadap program kegiatan yang sudah dipastikan tidak dapat dilaksanakan atau secara teknis sudah dilakukan dengan sumber pendanaan dari kegiatan yang lain;

b. Adanya pelaksanakan kegiatan yang harus dikerjakan namun belum dianggarkan pada APBD Induk; dan

c. Peningkatan target kinerja pada Tahun 2025, seiring peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga terdapat peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah. Peningkatan kualitas

belanja daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis kegiatan dan volume kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melakukan perubahan kebijakan dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan rincian perubahan anggaran sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Provinsi Papua Pegunungan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan APBD Murni, yaitu ditetapkan sebesar Rp1.964.971.666.678,00. Tidak terdapat revisi atau perubahan pada target Pendapatan Daerah (PAD/Pendapatan Transfer/Lain-lain Pendapatan yang Sah) antara anggaran murni dan anggaran perubahan. Total Anggaran Pendapatan dalam APBD Perubahan tetap konsisten dengan APBD Murni sebesar Rp1.964.971.666.678,00. Berikut ini rincian Anggaran Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.1.1.1 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	(Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah:				
- Pajak Daerah	184.475.019.128,00	184.475.019.128,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer:				
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.650.734.977.274,00	1.650.734.977.274,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:				
- Pendapatan Hibah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.964.971.666.678,00**	**1.964.971.666.678,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja dan Transfer Daerah Provinsi Papua Pegunungan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp48.000.000,00) atau menjadi sebesar Rp2.120.764.717.149,07 dibandingkan Belanja dan Transfer Daerah dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.120.812.717.149,07 atau menurun sebesar (0,00%). Berikut ini rincian Anggaran Belanja Daerah sebelum dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.1.1.2 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025

Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	(Rp)	%
Belanja Operasi	1.543.128.263.106,37	1.546.364.349.076,37	3.236.085.970,00	0,31
Belanja Modal	461.061.699.517,00	463.081.557.517,00	2.019.858.000,00	0,44
Belanja Tak Terduga	15.912.910.336,82	14.681.910.366,82	(1.230.999.970,00)	(8,38)
Belanja Transfer	100.709.844.188,88	96.636.900.188,88	(4.072.944.000,00)	(4,21)
Jumlah	**2.120.812.717.149,07**	**2.120.764.717.149,07**	**(48.000.000,00)**	**(0,00)**

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dianggarkan dan dicatat secara definitif dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025. Besarnya SiLPA yang dianggarkan Tahun 2025 sebesar Rp155.793.050.471,07. Anggaran sesuai alokasi yang terdapat dalam SiLPA, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku harus dianggarkan kembali dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku tahun berkenaan.

Tabel 3.1.1.3 Anggaran Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun 2025

Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	(Rp)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH:				
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	155.793.050.471,07	155.793.050.471,07	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH:				
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**155.793.050.471,07**	**155.793.050.471,07**	**0,00**	**0,00**

3.1.2 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.964.971.666.678,00 dan terealisasi mencapai sebesar Rp1.812.415.327.810,10 atau sebesar 92,23%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp2.202.783.004.813,00 mengalami penurunan sebesar Rp390.367.677.002,90 atau 21,54% dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi belanja untuk Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menganggarkan sebesar Rp2.120.764.717.149,07 dan terealisasi sebesar Rp1.958.300.087.626,28 atau 92,33%. Dibanding dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp2.180.787.073.265,82 belanja mengalami penurunan sebesar Rp222.486.985.639,54 atau turun sebesar 11,36%.

Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024 beserta realisasinya pada beberapa tabel berikut:.

Tabel 3.1.2.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024			Surplus/(Defisit) Rp
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan	2.312.893.732.558,00	2.202.783.004.813,00	95,24	110.110.727.745,00
Belanja	2.447.164.454.481,89	2.180.787.073.265,82	89,11	266.377.381.216,07
Surplus/Defisit	**(134.270.721.923,89)**	**21.995.931.547,18**	**(16,38)**	**(156.266.653.471,07)**
Pembiayaan:				
Penerimaan Pembiayaan	134.270.721.923,89	133.797.118.923,89	99,65	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	**134.270.721.923,89**	**133.797.118.923,89**	**99,65**	**0,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**0,00**	**155.793.050.471,07**	**0,00**	**155.793.050.471,07**

Tabel 3.1.2.2 Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tahun 2025			Surplus/(Defisit) Rp
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan	1.964.971.666.678,00	1.812.439.425.310,10	92,24	152.532.241.367,90
Belanja	2.120.764.717.149,07	1.957.270.101.354,28	92,29	163.494.615.794,79
Surplus/Defisit	**(155.793.050.471,07)**	**(144.830.676.044,18)**	**92,96**	**(10.963.318.496,89)**
Pembiayaan:				
Penerimaan Pembiayaan	155.793.050.471,07	155.793.050.471,07	100,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	**155.793.050.471,07**	**155.793.050.471,07**	**100,00**	**0,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**0,00**	**10.962.374.426,89**	**0,00**	**10.962.374.426,89**

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Realisasi pendapatan sebesar **Rp1.812.439.425.310,10** lebih rendah **Rp152.532.241.367,90** jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar **Rp1.964.971.666.678,00** atau tercapai **92,24**%;

b. Realisasi belanja dan transfer sebesar **Rp1.957.270.101.354,28** lebih rendah **Rp163.494.615.794,79** jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu **Rp2.120.764.717.149,07** atau tercapai **92,29**%**;**

c. Realisasi APBD TA. 2025 terjadi defisit sebesar **Rp(144.830.676.044,18)**. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp155.793.050.471,07** atau sebesar **100,00**%**.** Realisasi Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penerimaan SiLPA Tahun 2025;

d. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp0,00**;

e. Realisasi Pembiayaan Netto sebesar **Rp155.793.050.471,07** atau sebesar **100,00**%**;** dan

f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar **Rp10.962.374.426,89.**

Tabel 3.1.2.3 Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan	1.964.971.666.678,00	1.812.439.425.310,10	92,24	2.202.783.004.813,00
Belanja Daerah	2.120.764.717.149,07	1.957.270.101.354,28	92,29	2.180.787.073.265,82

Sedangkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja setiap SKPD untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1.2.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA. 2025 dan TA. 2024

Kode SKPD	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.964.971.666.678,00	1.812.439.425.310,10	92,24	2.202.783.004.813,00
	Jumlah	**1.964.971.666.678,00**	**1.812.439.425.310,10**	**92,24**	**2.202.783.004.813,00**

Tabel 3.1.2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2025 dan TA. 2024

Kode SKPD	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.206.769.515,24	109.912.481.560,76	97,09	128.767.570.838,63
1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	128.079.176.975,00	120.966.304.129,00	94,45	116.092.881.781,79
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	597.937.653.799,28	474.858.880.198,00	79,42	598.437.296.231,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	21.269.258.940,24	21.240.417.469,00	99,86	17.933.378.120,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	36.352.451.693,24	36.176.655.034,00	99,52	34.144.426.581,00
2.07.3.32.3.29.01.0000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	15.811.457.174,36	15.626.655.501,00	98,83	17.042.033.226,00
2.11.3.28.2.10.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	32.960.752.562,53	32.410.289.794,00	98,33	38.125.806.128,00
2.12.2.13.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	10.533.698.915,28	10.335.457.687,00	98,12	14.216.314.375,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	77.766.753.190,36	60.504.935.220,52	77,8	34.488.301.132,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	20.580.298.296,19	20.505.065.430,00	99,63	31.133.766.281,00
2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	51.967.681.482,16	51.772.726.231,00	99,62	14.041.133.439,00

Kode SKPD	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.979.483.871,00	4.943.002.312,00	99,27	10.128.847.251,00
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	17.790.252.938,60	17.746.540.839,00	99,75	65.135.797.804,00
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	15.463.975.700,24	14.901.065.353,00	96,36	25.486.579.855,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	414.541.922.000,00	413.523.104.212,00	99,75	324.510.272.655,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	181.944.783.481,38	181.680.603.628,00	99,85	32.430.521.944,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	22.895.386.557,24	19.560.273.553,00	85,43	23.427.723.569,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	212.480.768.252,29	209.464.935.465,00	98,58	470.404.863.287,40
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.330.152.514,18	17.852.477.753,00	92,36	18.847.638.408,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	22.453.298.172,48	22.425.133.874,00	99,87	16.442.390.801,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.140.026.141,28	24.057.678.252,00	99,66	67.289.357,000,00
9.03.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	78.278.714.976,50	76.805.417.859,00	98,12	82.260.172.558,00
	Jumlah	**2.120.764.717.149,07**	**1.957.270.101.354,28**	**92,29**	**2.180.787.073.265,82**

3.1.3 Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana-Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Dampak/Manfaat Dana Transfer Bagi Masyarakat

1. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

   a. Dana Transfer Umum (DTU)

   Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer Ke Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, serta Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan Alokasi Dana Transfer Umum sebesar Rp435.232.157.483,63 yang terdiri dari Sumber Pendanaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

   Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer Umum Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.1 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer Umum

Uraian Sumber Dana	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Realisasi (%)
Pendapatan	***423.423.428.000,00***	***412.641.684.500,00***	***423.343.881.000,00***	***102,59***
Dana Bagi Hasil	***20.353.898.000,00***	***9.572.154.500,00***	***20.353.898.000,00***	***212,64***
DBH Pajak PPH	7.844.877.000,00	3.922.438.500,00	7.844.877.000,00	200,00
DBH Pajak PBB	1.539.494.000,00	769.747.000,00	1.539.494.000,00	200,00
DBH SDA Minerba	249.728.000,00	249.728.000,00	249.728.000,00	100,00
Kurang Salur DBH PPh Tahun 2025	50.728.000,00	21.839.000,00	50.728.000,00	232,28
Kurang Salur DBH PBB Tahun 2025	3.436.908.000,00	1.494.913.000,00	3.436.908.000,00	229,91
Kurang Salur DBH Minerba Tahun 2025	7.232.163.000,00	3.113.489.000,00	7.232.163.000,00	232,28
Dana Alokasi Umum	***403.069.530.000,00***	***403.069.530.000,00***	***402.989.983.000,00***	***99,98***
DAU Non Earmark	383.500.983.000,00	383.500.983.000,00	383.500.983.000,00	100,00
DAU Earmark Bidang Pendidikan	1.293.854.000,00	1.293.854.000,00	1.290.000.000,00	99,70
DAU Earmark Bidang Kesehatan	18.274.693.000,00	18.274.693.000,00	18.199.000.000,00	99,59

Uraian Sumber Dana	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Realisasi (%)
DAU Earmark Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan (SiLPA 2024)	**11.808.729.483,63**	**11.808.729.483,63**	**8.884.748.483,63**	***75,24***
Dana Bagi Hasil	***373.881.393,00***	***373.881.393,00***	***373.881.393,00***	***100,00***
DBH Pajak PPH	90.490.755,00	90.490.755,00	90.490.755,00	100,00
DBH Pajak PBB	95.651.960,00	95.651.960,00	95.651.960,00	100,00
DBH SDA Kehutanan IIUPH + SDH	168.131.392,00	168.131.392,00	168.131.392,00	100,00
DBH SDA Minerba	19.607.286,00	19.607.286,00	19.607.286,00	100,00
Dana Alokasi Umum	***11.434.848.090,63***	***11.434.848.090,63***	***8.510.867.090,63***	***74,43***
DAU Non Earmark	8.259.398.977,63	8.259.398.977,63	8.259.398.977,63	100,00
DAU Earmark Gaji PPPK	2.923.981.000,00	2.923.981.000,00	0,00	0,00
DAU Earmark Bidang Pendidikan	60.284.600,00	60.284.600,00	60.284.600,00	100,00
DAU Earmark Bidang Kesehatan	58.170.809,00	58.170.809,00	58.170.809,00	100,00
DAU Earmark Bidang Pekerjaan Umum	133.012.704,00	133.012.704,00	133.012.704,00	100,00
Jumlah	**435.232.157.483,63**	**424.450.413.983,63**	**432.228.629.483,63**	**101,83**

b. Dana Transfer Khusus

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer Ke Daerah dan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan Alokasi Dana Transfer Khusus (Fisik dan Non Fisik) sebesar Rp5.600.999.000,00 yaitu merupakan Sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tidak menganggarkan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Hal ini merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 19 Tahun 2025.

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer Khusus Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.2 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer Khusus

Uraian Sumber Dana	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Realisasi (%)
Pendapatan	***5.348.424.000,00***	***5.348.424.000,00***	***4.266.228.000,00***	***79,77***
DAK Non Fisik	***5.348.424.000,00***	***5.348.424.000,00***	***4.266.228.000,00***	***79,77***
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi	4.066.228.000,00	4.066.228.000,00	4.066.228.000,00	100,00
DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	1.067.196.000,00	1.067.196.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan (SiLPA 2024)	**252.575.000,00**	**252.575.000,00**	**0,00**	***0,00***
DAK Non Fisik	***252.575.000,00***	***252.575.000,00***	***0,00***	***0,00***
DAK Non Fisik - Dana Fasilitasi Penanaman Modal	252.575.000,00	252.575.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.600.999.000,00**	**5.600.999.000,00**	**4.266.228.000,00**	**76,17**

c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer Ke Daerah dan

Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastrukur sebesar Rp1.348.052.344.482,73.

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastrukur Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.3 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Uraian Sumber Dana	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Realisasi (%)
Pendapatan	***1.204.628.727.000,00***	***1.204.628.727.000,00***	***957.221.226.348,86***	***79,46***
Dana Otonomi Khusus	***733.920.465.000,00***	***733.920.465.000,00***	***570.363.771.720,86***	***77,71***
OTSUS Block Grant	325.166.034.000,00	325.166.034.000,00	299.310.905.760,86	92,05
OTSUS Specific Grant Bidang Pendidikan	219.990.030.490,00	219.990.030.490,00	111.813.347.539,00	50,83
OTSUS Specific Grant Bidang Kesehatan	82.050.886.200,00	82.050.886.200,00	74.786.882.606,00	91,15
OTSUS Specific Grant Bidang Pemberdayaan Ekonomi	106.713.514.310,00	106.713.514.310,00	84.452.635.815,00	79,14
Dana Tambahan Infrastruktur	***470.708.262.000,00***	***470.708.262.000,00***	***386.857.454.628,00***	***82,19***
Dana Tambahan Infrastruktur	470.708.262.000,00	470.708.262.000,00	386.857.454.628,00	82,19
Pembiayaan (SiLPA 2024)	**143.423.617.482,73**	**143.423.617.482,73**	**130.565.246.835,00**	***91,03***
Dana Otonomi Khusus	***18.341.340.385,00***	***18.341.340.385,00***	***18.062.771.015,00***	***98,48***
OTSUS Block Grant	1.972.562.052,00	1.972.562.052,00	1.972.562.052,00	100,00
OTSUS Specific Grant Bidang Pendidikan	8.764.250.000,00	8.764.250.000,00	8.764.250.000,00	100,00
OTSUS Specific Grant Bidang Kesehatan	7.604.528.333,00	7.604.528.333,00	7.325.958.963,00	96,34
Dana Tambahan Infrastruktur	***125.082.277.097,73***	***125.082.277.097,73***	***112.502.475.820,00***	***89,94***
Dana Tambahan Infrastruktur	125.082.277.097,73	125.082.277.097,73	112.502.475.820,00	89,94
Jumlah	**1.348.052.344.482,73**	**1.348.052.344.482,73**	**1.087.786.473.183,86**	**80,69**

3.1.4 Pengungkapan *Mandatory Spending*

Mandatory Spending merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengganggarkan *Mandatory Spending* pada beberapa bidang sebagai berikut.

1. **Bidang Pendidikan**

Besaran Alokasi *Mandatory Spending* untuk bidang pendidikan sebesar 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat (1).

Adapun perhitungan pengganggaran Bidang Pendidikan terdapat pada empat SKPD sebagai berikut.

Tabel 3.1.4.1 *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

No.		Komponen Perhitungan / SKPD	Anggaran (Rp)
1.	A.	Urusan Bidang Pendidikan	107.557.009.515,24
	B.	Urusan Bidang Kebudayaan	5.649.760.000,00
	C.	Urusan Bidang Perpustakaan	0,00
	D.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.520.252.938,60
	E.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan	51.880.534.094,40
	E.1	Anggaran Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	3.830.479.945,00
	E.2	Anggaran pada Sub Kegiatan terkait Bidang Pendidikan	48.050.054.149,40

No.	Komponen Perhitungan / SKPD	Anggaran (Rp)
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (A+B+C+D+E)	180.607.556.548,24
3.	Total Belanja Daerah	2.120.764.717.149,07
4.	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	**8,52**

2. Bidang Infrastruktur Daerah

Penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) yaitu DAU dan DBH yang bersifat umum diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).

Adapun komponen perhitungan *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Daerah dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.4.2 *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Daerah

No.	Komponen Perhitungan / SKPD	Anggaran (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	2.120.764.717.149,07
2.	Anggaran Bidang Infrastruktur	916.997.316.493,23
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a. Belanja Bagi Hasil	82.186.900.188,00
	b. Bantuan Keuangan	14.450.000.000,00
	Jumlah (a + b)	96.636.900.188,88
	Selisih (1 – 2)	1.203.767.400.655,84
3.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	481.506.960.262,34

Tabel 3.1.4.3 *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Daerah
Belanja Infrastruktur Pelayanan Daerah

No.	Komponen Perhitungan /SKPD	Anggaran (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	2.120.764.717.149,07
2	a. Belanja Modal:	463.081.557.517,00
	1) Tanah	11.500.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	22.500.537.427,00
	3) Bangunan dan Gedung	16.943.699.968,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	412.137.320.122,00
	5) Aset Tetap Lainnya	0,00
	6) Aset Lainnya	0,00
	b. Belanja Pemeliharaan:	175.016.082.170,00
3.	a. Belanja Hibah	119.670.000.000,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	41.845.000.000,00
	c. Belanja Bantuan Keuangan	14.450.000.000,00
4.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (2+3)	814.062.639.687,00
	Persentase Alokasi (4 / 1) x 100%	**38,39**

3. Bidang Pengawasan

Alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan dianggarkan sekurang-kurangnya 0,90% dari Total Belanja Daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 menganggarkan Kegiatan Penguatan dan Pengawasan sebesar Rp22,453,298,172.48 pada Inspektorat dengan Perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.1.4.4 *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan

No.	Komponen Perhitungan / SKPD	Anggaran (Rp)
1.	Total Anggaran Belanja Daerah	2.120.764.717.149,07
2.	Belanja Daerah Pembinaan dan Pengawasan	**22.453.298.172,48**
3.	**Rasio Anggaran Belanja Pengawasan terhadap Total Belanja Daerah (3 = 2:1 x100%)**	**0,01%**

Tabel 3.1.4.5 Rincian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.379.642.642,48
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	981.563.000,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.272.726.830,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.920.000,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.000.000,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
9.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	8.816.954.000,00
10.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.205.985.400,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
11.	Pendampingan dan Asistensi	2.024.506.300,00
	Jumlah	**22.453.298.172,48**

4. Bidang Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Bidang Kesehatan tidak lagi masuk dalam aturan ***mandatory spending*** **(Alokasi Wajib)** persentase **minimal dari** APBN maupun APBD. Kebijakan ini di ubah agar alokasi anggaran kesehatan menjadi lebih fleksibel, merata serta terintegrasi antara pusat dan daerah. Meskipun secara hukum ***mandatory*** **(wajib)** persentase tertentu dihapus, anggaran kesehatan masih menjadi prioritas dan tetap dianggarkan oleh pemerintah, dan dijelaskan seperti pada tabel di bawah:.

Tabel 3.1.4.6 *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan

No.		Komponen Perhitungan / SKPD	Anggaran (Rp)
1.	A.	Urusan Bidang Kesehatan	126.021.280.975,00
	B.	Belanja di luar Urusan Kesehatan yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Kesehatan	499.998.460,00
	B.1	Anggaran pada Sub Kegiatan terkait Bidang Kesehatan	499.998.460,00
2.		Anggaran Bidang Kesehatan (A+B)	126.521.279.435,00
3.		Total Belanja Daerah	2.120.764.717.149,07
4.		Gaji ASN	8.111.493.297,00
5.		Total Belanja Di Luar Gaji	119.967.683.678,00
6.		Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	**5,97**

3.1.5 Pengungkapan Pencegahan *Stunting*

Penurunan stunting menjadi prioritas nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun **2025–2029**. Target ini bertujuan menurunkan prevalensi stunting secara signifikan sebagai bagian dari agenda pembangunan SDM berkualitas.

Dokumen Strategi Nasional (Stranas), dijabarkan lima **pilar utama** dalam penanganan stunting, yaitu: **1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan Tertinggi Negara, 2) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, 3) Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program, 4) Gizi dan Ketahanan Pangan, dan 5) Pemantauan dan Evaluasi**.

Kaitan dengan Program Pemerintah Pusat dalam percepatan penurunan angka *stunting* Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan lebih serius dalam menyusun Alokasi Anggaran dalam APBD Tahun 2025 oleh karena itu Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendukung Program Pemerintah Pusat sehingga ditahun 2025 Pemda mengganggarkan Pencegahan *Stunting* melalui Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD pada tabel berikut.

Tabel 3.1.5.1 Program dan Kegiatan Pencegahan *Stunting*

Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Tahun 2025	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	297.825.000,00	297.825.000,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6.840.096.000,00	6.840.046.089,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	11.760.750.000,00	7.953.516.100,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	600.000.000,00	596.241.808,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.350.000.000,00	1.345.320.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	200.000.000,00	200.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	323.200.000,00	323.200.000,00
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	550.160.000,00	550.160.000,00
		JUMLAH	**24.222.031.000,00**	**20.406.308.997,00**

3.1.6 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan dari Dana Otsus dan DTI

1. Dana Otsus Block Grant

Alokasi Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan Dana Otonomi Khusus Block Grant Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.6.1 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Block Grant

No.	Klasifikasi Belanja	TA. 2025				TA. 2024			
		Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran	Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran
1	Belanja Administrasi Pemerintahan	220.885.549.000,00	196,841,178,134.00	89,11	67,25	254.909.704.364,00	253.156.656.358,00	99,31	96,62

No.	Klasisfikasi Belanja	TA. 2025				TA. 2024			
		Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran	Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran
2	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	297.038.000,00	99,01	100,00
3	Belanja Infrastruktur Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.000.000,00	3.013.453.019,00	98,61	100,00
4	Belanja Infrastruktur Energi Listrik	750.000.000,00	748.300.000,00	99,77	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Kebudayaan	4.449.880.000,00	4.425.760.627,00	99,46	1,37	1.934.740.000,00	1.934.740.000,00	100,00	100,00
6	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00	100,00	2,69	36.145.209.636,00	36.130.469.000,00	99,96	100,00
7	Belanja Komunikasi Publik	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.515.000,00	1.400.352.960,00	97,01	100,00
8	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.240.000,00	1.013.150.950,00	97,58	100,00
9	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat	15.449.580.00,00	15.061.879.000,00	50,00	4,65	230.987.500,00	230.962.875,00	99,99	100,00
10	Belanja Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,12	369.200.000,00	321.542.750,00	87,09	65,00
11	Belanja Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Penguatan Kelembagaan	525.930.000,00	525.893.000,00	99,99	0,16	610.522.800,00	608.476.589,00	99,66	100,00
13	Belanja Pertanahan	12.731.500.000,00	12.731.500.000,00	100,00	3,92	1.300.044.500,00	1.260.044.500,00	96,92	100,00
14	Belanja Sosial	58.223.595.000,00	56.831.075.000,00	97,61	17,91	20.734.679.200,00	20.878.923.500,00	100,70	100,00
15	Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	3.000.000.000,00	2.995.320.000,00	99,84	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**325.166.034.000,00**	**299.310.905.761,00**	**92,05**	**99,22**	**322.072.843.000,00**	**320.245.810.501,00**	**99,54**	**99,75**

2. Dana Otsus Spesifik Grant

Alokasi Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan Dana Otonomi Khusus Spesifik Grant Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.6.2 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Spesifik Grant

No.	Klasisfikasi Belanja	TA. 2025				TA. 2024			
		Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran	Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran
1	Belanja Pendidikan	219.990.030.490,00	111.813.347.539,00	50,83	28,28	237.739.787.196,00	232.146.180.410,00	97,65	93,75
2	Belanja Kesehatan	82.050.886.200,00	74.786.882.606,00	91,15	19,51	121.994.747.304,00	113.405.392.452,79	92,96	98,64
3	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	106.713.514.310,00	84.452.635.815,00	79,14	25,02	59.025.204.500,00	57.180.261.869,00	96,87	99,16
	TOTAL	**408.754.431.000,00**	**271.052.865.960,00**	**66,31**	**72,81**	**418.759.739.000,00**	**402.731.834.731,79**	**96,17**	**98,89**

3. Dana Tambahan Infrastruktur

Alokasi Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.6.3 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur

No.	Klasisfikasi Belanja	TA. 2025				TA. 2024			
		Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran	Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran
1	Belanja Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.419.750,00	12.188.563.196,00	82,35	86,36
2	Belanja Infrastruktur Air Bersih	14.337.500.000,00	10.514.577.100,00	73,34	2,74	6.010.000.000,00	5.946.200.000,00	98,94	100,00
3	Belanja Infrastruktur Energi LIstrik	2.819.488.560,00	2.819.488.560,00	100,00	0,60	4.405.000.050,00	4.399.378.000,00	99,87	100,00
4	Belanja Infrastruktur Perhubungan	418.111.280.168,00	341.374.262.568,00	81,65	87,86	589.943.910.495,00	471.084.961.231,00	79,85	77,01
5	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	24.840.000.000,00	21.999.126.400,00	88,56	5,28	51.762.718.001,00	48.675.268.500,00	94,04	94,73
6	Belanja Infrastruktur Telekomunikasi	10.599.993.272,00	10.150.000.000,00	50,00	2,25	22.097.386.704,00	21.790.207.380,00	98,61	80,00
	TOTAL	**470.708.262.000,00**	**386.857.454.628,00**	**82,19**	**98,73**	**689.019.435.000,00**	**564.084.578.307,00**	**81,87**	**89,40**

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah dipengaruhi masalah internal maupun ekternal.

Permasalahan internal antara lain: kurangnya SDM, sarana prasarana, kurangnya pengawasan, serta sanksi yang kurang tegas terhadap wajib pajak atau retribusi yang tidak membayar atau terlambat membayar.

3.2.1 Permasalahan/Kendala Pencapaian Pendapatan yang Ditetapkan

Berikut ini permasalahan-permasalahan pendapatan secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Belum semua potensi pendapatan tergali secara optimal;
2. Taksi banyak yang bangkrut, berhenti beroperasi, dan berganti plat hitam/rental mobil;
3. Masih adanya Wajib Pajak yang menunda pembayaran;
4. Kurang terbukanya Wajib Pajak dalam memberikan data riil untuk pemeriksaan pajak;
5. Kurang optimalnya pengawasan di lapangan;
6. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak;
7. Banyak Wajib Pajak yang meminta pembebasan denda atau pengurangan atas pembayaran tunggakan; dan
8. Masih banyaknya jual beli yang dilakukan dibawah tangan;

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk menjaga konsisten dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Penggalian potensi baru PAD dilakukan lebih agresif untuk meningkatkan capaian pendapatan di masa yang akan datang;
2. Penetapan pelayanan prima untuk meningkatkan *interest* masyarakat untuk mengunakan fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah;
3. Pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi perlu ditingkatkan untuk pencapaian yang lebih optimal;
4. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan, meliputi pengenaan denda pada wajib pajak atau retribusi yang tidak dan atau terlambat membayar kewajibannya;
5. Perlu adanya transparansi ke masyarakat dalam pemungutan pajak dan retribusi untuk mempermudah proses perizinan sehingga dapat dihindari birokrasi yang panjang atau pungli yang dilakukan oleh oknum petugas; dan
6. Pemberian sanksi yang tegas kepada petugas yang terlibat secara teknis dalam pemungutan pajak maupun retribusi jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendapatan dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Tingkatkan akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
2. Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
3. Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD;
4. Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD;
5. Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan yang dapat menunjang peningkatan penerimaan Retribusi Daerah, seperti di terminal, pasar, RSUD, serta sarana prasarana pelayanan publik lainnya;
7. Pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;
8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati pembayaran pajak dan retribusi daerah; dan
9. Memaksimalkan koordinasi dan rasa tanggung jawab dari SKPD pengelola PAD.

3.2.2 Permasalahan/Kendala pada Penyerapan Belanja yang Ditetapkan

Permasalahan dalam pelaksanaan Belanja Daerah Tahun 2025 terutama adalah adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal pada urusan tertentu yang rencana alokasinya cukup besar sehingga secara akumulatif berdampak pada besarnya sisa anggaran berjalan.

Permasalahan dalam pelaksanaan penyerapan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih berhubungan dengan keterbatasan SDM, yaitu masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur pengelola keuangan perangkat daerah dalam hal penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan sehingga penyaluran anggaran mengalami keterlambatan;
2. Perubahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer seperti DAK sehingga SKPD pengelola harus melakukan usulan pada perubahan APBD; dan
3. Transfer anggaran pada beberapa bantuan provinsi dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat dilakukan pada akhir tahun sehingga tidak tersedia cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan.
4. Banyak program yang direncanakan di awal tahun baru berjalan atau dilelang di akhir tahun. Akibatnya, anggaran tercatat sebagai sisa (SiLPA) karena belum dibelanjakan, namun kas daerah sebenarnya sudah terpakai untuk menutupi defisit anggaran lainnya atau kegiatan non-prioritas.

3.2.3 Solusi

Menanggulangi permasalahan tersebut upaya yang akan dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kegiatan terutama dalam perencanaan (baik dalam perencanaan kegiatan maupun waktu), pengelolaan kegiatan (penguasaan teknis kegiatan dan keuangan), serta adanya terobosan dalam manajemen pengendalian dan pengawasan sehingga kegiatan bisa terwujud sesuai rencana. Secara makro juga akan terus ditingkatkan manajemen pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil kinerja yang lebih efisien dan efektif sehingga usaha menyejahterakan serta membangun daerah dapat diwujudkan sesuai target yang diamanatkan oleh RPJMD dan masyarakat. Upaya lain yang akan dilakukan adalah melalui peningkatan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terutama menyangkut perkembangan regulasi dan rencana alokasi anggaran transfer dan tugas pembantuan lainnya yang berdampak pada terlaksananya kegiatan secara tepat sasaran dan waktu.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggunjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada BPPKAD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk di konsolidasi atas pelaksanaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya. Entitas Akuntansi yang ada di Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 sebanyak 30 (tiga puluh) yang terdiri dari 14 (empat belas) dinas, 4 (empat) badan, 3 (tiga) sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) SKPKD), 6 (enam) biro dan 1 (satu) kepala daerah. PPKD selaku entitas pelaporan menyusun laporan keuangan daerah dengan cara mengkonsolidasikan laporan dari setiap entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 adalah berdasarkan program dan kegiatan yang diukur sesuai volume kegiatan yang dinilai dengan mata uang rupiah termasuk di dalamnya jika terdapat program atau kegiatan yang bersumber dari bantuan luar negeri yang dibiayai dengan mata uang asing.

4.4 Penarapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset

4.4.1.1 Kas dan Setara Kas

Defenisi Kas dan Setara Kas

a. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai signifikan;

b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;

c. Kas terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah;
2) Kas di Bendahara Penerimaan;
3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
5) Kas Lainnya.

d. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

e. Setara Kas terdiri dari:

1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
3) Klasifikasi kas dan setara kas secara rinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

f. Klasifikasi Kas dan Setara Kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

g. Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

Pengakuan Kas dan Setara Kas:

a. Secara Umum Pengakuan dilakukan:

1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b. Atas dasar butir (b) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan Kas dan Setara Kas, antara lain:

a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan

b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

4.4.1.2 Investasi Jangka Pendek

Definisi Investasi Jangka Pendek

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan

b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

a. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
2) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

b. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah; dan

c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (***cash dividend***) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya; dan

b. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
   1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
      a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
      b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
   2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

a. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar; dan

b. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
   2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
   3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
   4) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
   5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

4.4.1.3 Piutang

Definisi Piutang

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain; dan

c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur

piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Pengakuan Piutang

a. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
   1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
   2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari peraturan perundangan, pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   1) Harus didukung dengan surat ketetapan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan atau naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
   2) Jumlah piutang dapat diukur.

Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, ***commitment fee*** dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pengungkapan Piutang

a. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
    1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
    2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
    3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
    4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
b. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan;
c. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu; dan
d. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.1.4 Beban dibayar dimuka

Definisi Beban Dibayar Dimuka.

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan Beban Dibayar Dimuka.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.4.1.5 Persediaan

Definisi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Klasifikasi Persediaan meliputi:

a. Persediaan Bahan Pakai Habis
    1) Bahan;
    2) Suku Cadang;

3) Alat/Bahan untuk kegiatan kantor;
4) Obat-obatan;
5) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan;
6) Persediaan untuk tujuan strategis/Berjaga-jaga;
7) Natura dan Pakan;
8) Persediaan Penelitian; dan
9) Persediaan dalam Proses.

b. Barang Tak Pakai Habis
1) Komponen; dan
2) Pipa

c. Barang Bekas dipakai komponen bekas dan pipa bekas

Pengakuan Persediaan

a. Persediaan diakui:
1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

a. Metode pencatatan persediaan barang habis pakai, bahan material, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang akan dijual kembali dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Metode pencatatan persediaan obat-obatan, bahan kimia (barang persediaan yang sifatnya kontinyu serta memerlukan *control* yang besar dan penggunaannya sulit diidentifikasi) maka pencatatan persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

b. Persediaan disajikan sebesar:
1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Beban Persediaan

a. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan;

b. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional;

c. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan; dan

d. Persediaan dicatat secara periodik maka pengukuran pemakaian persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.1.6 Investasi Jangka Panjang

Definisi Investasi Jangka Panjang

a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;

c. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan;

d. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen; dan

e. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

a. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh sebagai berikut:
   1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
   2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

b. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
   1) Dividen Tunai;
   2) Dividen Saham; dan
   3) Bagian Laba.

c. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   1) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah); dan
   2) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicacat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

d. Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

e. Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan; dan
   2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi

dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut; dan

b. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

   1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;

   2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;

   3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;

   4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

   5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi;

   6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*); dan

   7) Penilaian Invetasi Pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

      a) metode biaya;

      b) metode ekuitas; dan

      c) metode nilai bersih yang dapat direaslisasikan

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

4.4.1.7 Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;

c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan;

d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;

e. Masa manfaat adalah:
   1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;

g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

h. Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitasyang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan;

i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

j. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

k. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

l. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
   1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
   2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
   3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
   4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

m. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

n. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi; dan

o. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan Aset Tetap

a. Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal;

b. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) Berwujud;
   2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
   6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

c. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap

berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal;

d. Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual;

e. Pengakuan Aset Tetap pada saat Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah; dan

f. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

a. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan;

b. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

c. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;

d. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;

e. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

f. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.7 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

g. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

h. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

i. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penyusutan

a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

b. Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

c. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

4.4.1.8 Dana Cadangan

Definisi Dana Cadangan

a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

b. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga; dan

c. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Pengukuran Dana Cadangan

a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;

b. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;

c. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan; dan

d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

a. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan

b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.1.9 Aset Lainnya

Definisi Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

   1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

   2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

   3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

   4) Aset Tidak Berwujud; dan

5) Aset Lain-lain.

c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K.

e. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

1) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerja sama/kemitraan; dan

2) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerja sama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

f. Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pengakuan Aset Lainnya

a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;

b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain;

c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

1) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

1) Aset Kerja sama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerja sama/kemitraan;

2) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan;

3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai;

4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;

5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang;

6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang;

7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang; dan

8) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya

a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
b. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
c. Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K);
d. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
    1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
    2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerja sama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerja sama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban; dan
    3) Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
e. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya;
f. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap; dan
g. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

a. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
b. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur;
c. Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai;
d. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya;
e. Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
    1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
    2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud; dan
    3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
f. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.4.1.10 Aset Tidak Berwujud (ATB)

Definisi Aset Tidak Berwujud

a. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Yang dimaksudkan Aset Tidak Berwujud didalam kebijakan ini adalah semua aset tidak berwujud yang diperoleh dari penganggaran di dalam APBD Provinsi Papua Pegunungan;

b. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

   1) *Software*. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain; dan

   2) *Lisensi* adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak atau dokumen sah lainnya yang dapat dipersamakan.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

a. Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari;

c. Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi;

d. Nilai minimal untuk dapat diakui dan diukur sebagai Aset Tidak Berwujud yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah); dan

e. Masa manfaat aset tidak berwujud dikategorikan sebagai berikut:

   1) Masa manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten;

   2) Masa manfaat tak terbatas, yaitu untuk merk dagang, *goodwill*, abadi waralaba dan lain sebagainya. Aset dalam kategori ini tidak diamortisasi;

   3) Masa manfaat atas aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut; dan

   4) Biaya yang dikeluarkan atas pemeliharaan aset tidak berwujud tidak dikapitalisasi ke dalam harga perolehan dan tidak menambah masa manfaat.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Berwujud.

Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

a. Masa manfaat dan metode amortisasi;

b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi, dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud; dan

c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

4.4.1.11 Amortisasi Aset Lainnya

Definisi Amortisasi

a. Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi; dan

b. Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan Amortisasi

Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi

a. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus;

b. Masa manfaat amortisasi dapat dijelaskan dalam berikut ini:

Tabel 4.1.1.11 Masa Manfaat Amortisasi

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Aset Tidak Berwujud	
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	20
Royalti	20
Software	5
Lisensi	10
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5

Pengungkapan Amortisasi.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai "Beban Amortisasi".

Pengukuran Amortisasi.

Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari "Aset Tidak Berwujud".

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;

b. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan; dan

c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

4.4.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum; dan

b. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT

Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK):

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek; dan
b. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4.4.2.2 Utang Jangka Pendek Lainnya

Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4.4.2.3 Pendapatan diterima dimuka

Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka.

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka.

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.2.4 Utang Beban

Definisi Utang Beban

a. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*); dan

b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

   1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;

   2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya;

   3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; dan

   4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Beban.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan pengungkapan Utang Beban.

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Definisi Ekuitas

a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan;

b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

c. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

d. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013;

e. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban; dan

f. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan Ekuitas.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran Ekuitas.

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas.

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;

b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

c. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalahselisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan;

e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan; dan

f. Pendapatan LRA terdiri dari:
   1) Pendapatan Asli Daerah – LRA;
   2) Pendapatan Transfer – LRA; dan
   3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan LRA

a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
   1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
   2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
   3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
   4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
   5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan LRA:

a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

a. Kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
    1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
    2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
    3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
    4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4.1 Pendapatan Asli Daerah –LRA

Definisi Pendapatan Asli Daerah –LRA

a. PAD – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah; dan
b. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Pengakuan PAD – LRA.

PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

Pengukuran PAD – LRA.

PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA.

PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.4.2 Pendapatan Transfer-LRA

Definisi Pendapatan Transfer –LRA

Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

a. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD; dan
b. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA.

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA.

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA

a. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (Dana Perimbangan).
b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari:
    1) Pendapatan Hibah – LRA;
    2) Dana Darurat – LRA; dan
    3) Pendapatan Lainnya – LRA.

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD); dan
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

Definisi Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer;
d. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
g. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
h. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
i. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

j. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;

k. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;

l. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;

m. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

n. Belanja Daerah diklasifikasikan menurut:

   1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan

   2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran Belanja

a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran; dan

b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

   1) Belanja Operasi;

   2) Belanja Modal;

   3) Belanja Tidak Terduga; dan

   4) Belanja Transfer.

   dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahunberkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

Definisi

a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi;
c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah;
d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

Pengakuan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
    1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
    2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar; dan
b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Pengukuran Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah

daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan; dan

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Pengungkapan

a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
   2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
   3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
   4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
   2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
   3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
   4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.4.7.1 Pembiayaan

Definisi Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan; dan

b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari trnasksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan.

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengeluaran Pembiayaan.

Definisi Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan; dan
b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.

Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.7.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;
b. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan;
c. Dalam Permendagi Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan;
d. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
    1) Surplus/Defisit – LRA;
    2) Pembiayaan Netto;
    3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan
    4) Perubahan SAL.
e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan;
f. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
g. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan - LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan; dan
h. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan; dan
b. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (onface) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Pelaporan - LO

Definisi Pendapatan – LO

a. Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8); dan
b. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pengakuan Pendapatan – LO

a. Pendapatan–LO diakui pada saat:
    a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan/atau
    b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
b. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
    1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
    2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
    3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
    4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
    5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan pendapatan – LO :

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

    Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

    Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:

    1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

        Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
    2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran Pendapatan-LO

a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

a. Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan; dan
b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
    1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
    2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
    3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
    4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Beban

Definisi Beban

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
b. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO;
c. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
d. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Tranfer, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
e. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
f. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;
g. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
h. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah

kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;

i. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

j. Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

k. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu;

l. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang;

m. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

n. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas;

o. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;

p. Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah; dan

q. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Pengakuan Beban

a. Beban diakui pada:
    1) Saat timbulnya kewajiban;
    2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
    3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;

c. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;

d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/.berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;

e. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
    1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
    2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
    3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

f. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan

beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;

g. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;

h. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya;

i. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;

j. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;

k. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

l. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

    1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;

    2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;

    3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

    4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

    5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan; dan

    6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang

rupiah; dan

b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan Beban

a. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain- lain;
    2) Beban Non Operasional; dan
    3) Beban Tidak Terduga.
b. Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional; dan
c. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
    1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
    2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
    3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada TA 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	214.236.689.404,00	159.503.345.008,10	74,45	171.257.668.881,00
Pendapatan Transfer	1.650.734.977.274,00	1.639.157.854.800,00	99,30	2.031.398.053.932,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	100.000.000.000,00	13.778.225.502,00	13,78	127.282.000,00
Jumlah	**1.964.971.666.678,00**	**1.812.439.425.310,10**	**92,24**	**2.202.783.004.813,00**

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

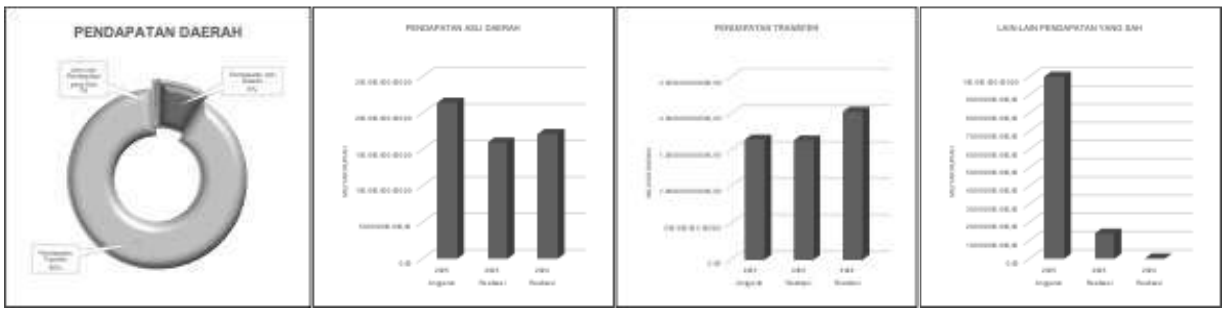

Gambar 5.1.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	184.475.019.128,00	135.326.816.784,00	73,36	165.444.602.582,00
Retribusi Daerah	0,00	27.990.440,00	100,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.761.670.276,00	24.148.537.784,10	81,14	5.813.066.299,00
Jumlah	**214.236.689.404,00**	**159.503.345.008,10**	**74,45**	**171.257.668.881,00**

Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

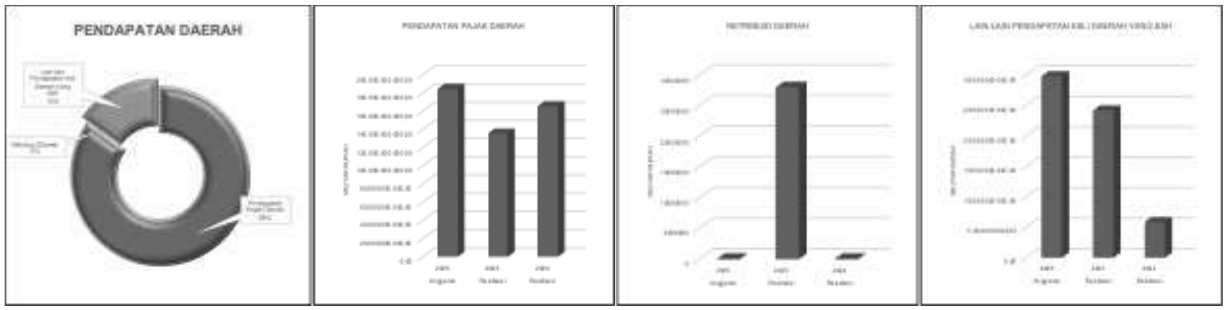

Gambar 5.1.1.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	24.550.879.360,00	6.894.554.000,00	28,08	10.043.181.000,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.863.597.600,00	3.509.622.000,00	27,28	5.313.369.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	10.360.000.000,00	11.482.016.030,00	110,83	14.646.949.929,00
Pajak Air Permukaan	207.200.000,00	149.159.000,00	71,99	174.766.000,00
Pajak Rokok	136.493.342.168,00	113.046.482.899,00	82,82	135.266.336.653,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	244.982.855,00	100,00	0,00
JUMLAH	**184.475.019.128,00**	**135.326.816.784,00**	**73,36**	**165.444.602.582,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp6.894.554.000,00 atau 28,08% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 lebih kecil Rp3.148.627.000,00 atau turun 31,35% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp10.043.181.000,00. Penurunan signifikan ini disebabkan oleh mulai diberlakukannya kebijakan Opsen PKB per tahun 2025 sesuai amanat UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengubah skema bagi hasil menjadi pengalihan sebagian penerimaan pajak secara langsung ke pemerintah kabupaten, sehingga berdampak pada berkurangnya porsi pendapatan PKB yang dicatatkan di tingkat provinsi sebagaimana rincian yang tersaji dalam **Lampiran 5.1.1.1.1a**;
   b. Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp3.509.622.000,00 atau 27,28% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 mengalami penurunan Rp1.803.747.000,00 atau turun 33,95% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.313.369.000,00. Penurunan signifikan ini disebabkan oleh mulai diberlakukannya kebijakan Opsen BBNKB per tahun 2025 sesuai amanat UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengubah skema bagi hasil menjadi pengalihan sebagian penerimaan pajak secara langsung ke pemerintah kabupaten, sehingga berdampak pada berkurangnya porsi pendapatan BBNKB yang dicatatkan di tingkat provinsi sebagaimana rincian yang tersaji dalam **Lampiran 5.1.1.1.1b**;
   c. Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp11.482.016.030,00 atau 110,83% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2025 mengalami penurunan Rp3.164.933.899,00 atau lebih rendah 21,61% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar

Rp14.646.949.929,00. Rincian atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ini disajikan dalam **Lampiran 5.1.1.1.1c**;

d. Realisasi Pajak Air Permukaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp149.159.000,00 atau 71,99% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pajak Air Permukaan TA 2025 mengalami penurunan Rp25.607.000,00 atau turun 14,65% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp174.766.000,00. Seluruh realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan pada TA 2025 diperoleh dari pembayaran pajak oleh PT PLN (Persero) sebagai wajib pajak utama di Provinsi Papua Pegunungan;

e. Realisasi Pajak Rokok Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp113.046.482.899,00 atau 82,82% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pajak Rokok TA 2025 mengalami penurunan Rp22.219.853.754,00 atau lebih rendah 16,43% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp135.266.336.653,00. Rincian atas Pajak Rokok ini disajikan dalam **Lampiran 5.1.1.1.1e**;

f. Realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp244.982.855,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2025 mengalami Kenaikan Rp244.982.855,00 atau lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00. Rincian atas Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ini disajikan dalam **Lampiran 5.1.1.1.1f**.

2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi aturan sebagai berikut:
   a. Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok; dan
   c. Keputusan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi TA 2025.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Usaha	0,00	27.990.440,00	100,00	0,00
JUMLAH	**0,00**	**27.990.440,00**	**100,00**	**0,00**

Penjelasan:

a. Realisasi Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp27.990.440,00 atau 100% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Retribusi Jasa Usaha TA 2025 mengalami Kenaikan Rp27.990.440,00 atau lebih tinggi 100% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00.

b. Seluruh realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut bersumber dari Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

c. Pencapaian ini memiliki makna strategis bagi pemerintah daerah karena pendapatan retribusi ini merupakan yang pertama kali berhasil dibukukan dalam sejarah Provinsi Papua Pegunungan sejak mulai beroperasi. Keberhasilan dalam memungut retribusi ini menandai dimulainya optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivasi fungsi pelayanan publik di lapangan. Peningkatan dari angka nol di tahun sebelumnya menjadi realisasi penuh di tahun 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi kemandirian fiskal serta efektivitas regulasi pemungutan retribusi pada perangkat daerah terkait.

5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Jasa Giro	1.913.189.929,00	1.469.600.002,10	76,81	797.185.525,00
Pendapatan Bunga	621.600.000,00	0,00	0,00	1.420.945.812,89
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	154.695.188,00	100,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	179.226.000,00	100,00	642.157.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	27.226.880.347,00	22.345.016.594,00	82,07	2.952.777.961,11
JUMLAH	**29.761.670.276,00**	**24.148.537.784,10**	**81,14**	**5.813.066.299,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Jasa Giro Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp1.469.600.002,10 atau 76,81% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini berarti Jasa Giro TA 2025 lebih besar Rp672.414.477,10 atau naik 8,65% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp797.185.525,00. Rincian atas Jasa Giro ini disajikan dalam **Lampiran 5.1.1.1.3a**;
   b. Realisasi Pendapatan Bunga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini berarti Pendapatan Bunga TA 2025 lebih kecil Rp1.420.945.812,89 atau lebih rendah 100% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.420.945.812,89. Hal tersebut dikarenakan pada TA 2025 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tidak melakukan penempatan dana daerah pada instrumen deposito perbankan, sehingga tidak terdapat penerimaan dari bunga deposito yang menjadi penyumbang utama pendapatan bunga pada tahun sebelumnya.;
   c. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp154.695.188,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini berarti Pendapatan Bunga TA 2025 lebih besar Rp154.695.188,00 atau lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00. Rincian atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ini disajikan dalam **Lampiran 5.1.1.1.3.c**;
   d. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp179.226.000,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini berarti Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 lebih kecil Rp462.931.000,00 atau turun 72,09% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp642.157.000,00. Rincian atas Pendapatan Denda Pajak Daerah ini disajikan dalam **Lampiran 5.1.1.1.3d;**
   e. Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp22.345.016.594,00 atau 82,07% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini berarti Pendapatan Dari Pengembalian TA 2025 lebih besar Rp19.392.238.632,89 atau lebih tinggi 656,75% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.952.777.961,11. Rincian atas Pendapatan Dari Pengembalian ini disajikan dalam **Lampiran 5.1.1.1.3e.**
2. Pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di atas telah dilandasi aturan dan perjanjian sebagai berikut:
   a. Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 100.3.3.1 / 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekening Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada Bank Papua Cabang Wamena TA 2025;

c. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 100.3.3.1 / 114 Tahun 2025 tentang Penunjukan Bank Papua Cabang Wamena Sebagai Bank Pemegang Kas Daerah sekaligus sebagai salah satu Bank Investasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025.

3. Adapun Rincian pada masing-masing Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diuraikan sebagai berikut:

a. Jasa Giro

Tabel 5.1.1.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Jasa Giro Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (RP)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.913.189.929,00	1.469.600.002,10	76,81	797.185.525,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.913.189.929,00**	**1.469.600.002,10**	**76,81**	**797.185.525,00**

b. Pendapatan Bunga Deposito

Tabel 5.1.1.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Deposito Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	621.600.000,00	0,00	0,00	1.420.945.812,89
	Jumlah	**621.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.945.812,89**

c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Tabel 5.1.1.1.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	154.695.188,00	100,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**154.695.188,00**	**100,00**	**0,00**

d. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Tabel 5.1.1.1.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	174.410.000,00	100,00	622.271.000,00
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	4.816.000,00	100,00	19.886.000,00
	Jumlah	**0,00**	**179.226.000,00**	**100,00**	**642.157.000,00**

e. Pendapatan dari Pengembalian

Tabel 5.1.1.1.3.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	139.225.089,00	100,00	0,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	539.936.482,00	100,00	2.952.777.961,11
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	141.474,00	100,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	424.415,00	100,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	1.985.786,00	100,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	2.902.293,00	100,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	26.626.880.347,00	18.161.973.259,67	68,21	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	600.000.000,00	1.382.822.268,00	230,47	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	2.190.098.819,00	100,00	0,00
	Jumlah	**27.226.880.347,00**	**22.345.016.594,00**	**82,07**	**2.952.777.961,11**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.650.734.977.274,00	1.639.157.854.800,00	99,30	2.031.398.053.932,00
Jumlah	**1.650.734.977.274,00**	**1.639.157.854.800,00**	**99,30**	**2.031.398.053.932,00**

Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

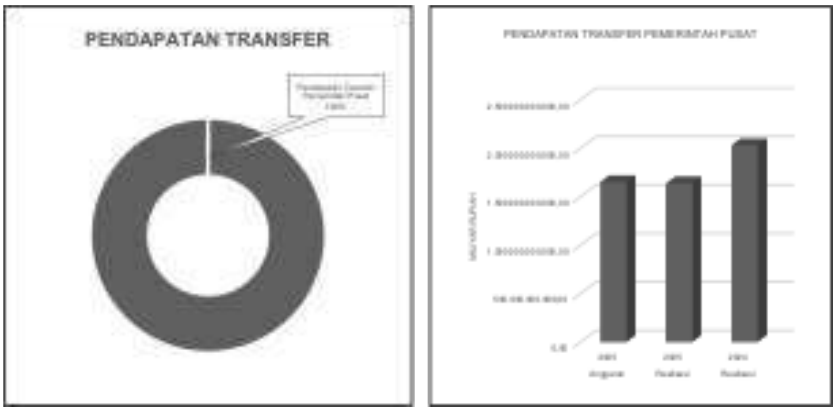

Gambar 5.1.1.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Perimbangan	446.106.250.274,00	434.529.127.800,00	97.40	601.546.036.932,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	1.204.628.727.000,00	1.204.628.727.000,00	100.00	1.429.852.017.000,00
Jumlah	**1.650.734.977.274,00**	**1.639.157.854.800,00**	**99,30**	**2.031.398.053.932,00**

Penjelasan:

1. Rincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	37.688.296.274,00	27.193.369.800,00	72.15	31.196.251.289,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	403.069.530.000,00	403.069.530.000,00	100.00	471.653.541.793,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	95.164.029.850,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.348.424.000,00	4.266.228.000,00	79,77	3.532.214.000,00
Jumlah	**446.106.250.274,00**	**434.529.127.800,00**	**97.40**	**601.546.036.932,00**

Penjelasan:

a. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   1) Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp434,529,127,800.00 atau 97.40% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
   2) Dana Perimbangan TA 2025 mengalami penurunan Rp167.016.909.132,00 atau turun 27,76% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp601.546.036.932,00;
   3) Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.976.402.000,00	2.264.660.000,00	45,51	170.150.000,00
DBH PPh Pasal 21	0,00	3.878.086.500,00	100,00	6.408.708.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.895.605.000,00	66.191.000,00	0,84	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	199.782.400,00	100,00	23.099.358.289,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	24.816.289.274,00	20.784.649.900,00	83,75	1.507.240.100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	10.794.900,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**37.688.296.274,00**	**27.193.369.800,00**	**72.15**	**31.196.251.289,00**

b. Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Alokasi Umum Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAU	383.500.983.000,00	383.500.983.000,00	100,00	439.928.069.793,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.293.854.000,00	1.293.854.000,00	100,00	1.281.787.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18.274.693.000,00	18.274.693.000,00	100,00	14.754.237.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	15.689.448.000,00
Jumlah	**403.069.530.000,00**	**403.069.530.000,00**	**100,00**	**471.653.541.793,00**

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2025 adalah sebesar Rp403.069.530.000,00. Berikut ini rincian penerimaan Dana Alokasi Umum diuraikan sebagai berikut ini:

Tabel 5.1.1.2.1.1.2a Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Alokasi Umum Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	DAU Non *Earmark*	383.500.983.000,00	383.500.983.000,00	100,00
2	DAU *Earmark* Gaji PPPK	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
3	DAU *Earmark* Bidang Pendidikan	1.293.854.000,00	1.293.854.000,00	100,00
4	DAU *Earmark* Bidang Kesehatan	18.274.693.000,00	18.274.693.000,00	100,00
5	DAU *Earmark* Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**403.069.530.000,00**	**403.069.530.000,00**	**79,53**

c. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus fisik Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.098.745.500,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	92.065.284.350,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.164.029.850,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp0,00. Berikut ini rincian penerimaan Dana Alokasi Khusus diuraikan sebagai berikut ini:

Tabel 5.1.1.2.1.1.3a Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus – Fisik Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

d. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1.3b Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus Non fisik Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	1.252.356.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	320.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	4.066.228.000,00	4.066.228.000,00	100,00	1.959.858.000,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	1.067.196.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.348.424.000,00**	**4.266.228.000,00**	**79,77**	**3.532.214.000,00**

2. Rincian Saldo Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	733.920.465.000,00	733.920.465.000,00	100,00	740.832.582.000,00
Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	470.708.262.000,00	470.708.262.000,00	100,00	689.019.435.000,00
Jumlah	**1.204.628.727.000,00**	**1.204.628.727.000,00**	**100,00**	**1.429.852.017.000,00**

Penjelasan:

a. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   1) Realisasi Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp1.204.628.727.000,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.204.628.727.000,00; dan
   2) Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur TA 2025 lebih kecil Rp225.223.290.000,00 atau lebih rendah 15,75% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar 1.429.852.017.000,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	100.000.000.000,00	13.778.225.502,00	13,78	127.282.000,00
Jumlah	**100.000.000.000,00**	**13.778.225.502,00**	**13,78**	**127.282.000,00**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Hibah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000.000,00	13.500.000.000,00	13,50	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	254.128.002,00	100,00	127.282.000,00
Jumlah	**100.000.000.000,00**	**13.754.128.002,00**	**13,75**	**127.282.000,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Perbandingan Capaian Realisasi pada Pendapatan Hibah di TA 2025 dan TA 2024 hanya terdapat pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya yang mengalami kenaikan senilai Rp13.500.000.000,00 atau 100%; dan
   b. Sedangkan untuk Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya mencapai realisasi sebesar Rp254.128.002,00 dan tidak dianggarkan pada TA 2025.
2. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya merupakan kontribusi signifikan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Nduga dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Pengakuan pendapatan ini didasarkan pada Berita Acara Penyaluran Hibah kepada Provinsi Papua Pegunungan (DOB) oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.
3. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.3.1.1 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Hibah – Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Provinsi Papua	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kab. Mamberamo Tengah	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kab. Jayawijaya	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kab. Yahukimo	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kab. Yalimo	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kab. Lanny Jaya	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	25,00	0,00
Kab. Pegunungan Bintang	10.000.000.000,00	7.000.000.000,00	70,00	0,00
Kab. Nduga	10.000.000.000,00	4.000.000.000,00	40,00	0,00
Kab. Tolikara	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**100.000.000.000,00**	**13.500.000.000,00**	**13,50**	**0,00**

Penerimaan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya yang direalisasikan pada TA 2025 sebesar Rp13.500.000.000,00 belum mencapai target yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2025.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	1.546.364.349.076,37	1.479.297.223.169,28	95,66	1.456.515.154.200,82
Belanja Modal	463.081.557.517,00	366.778.176.936,00	79,20	540.558.529.111,00
Belanja Tidak Terduga	14.681.910.366,82	14.681.729.000,00	100,00	53.525.500.000,00
Belanja Transfer	96.636.900.188,88	96.512.972.249,00	99,87	130.187.889.954,00
Jumlah	**2.120.764.717.149,07**	**1.957.270.101.354,28**	**92,29**	**2.180.787.073.265,82**

Komposisi Realisasi Belanja Daerah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

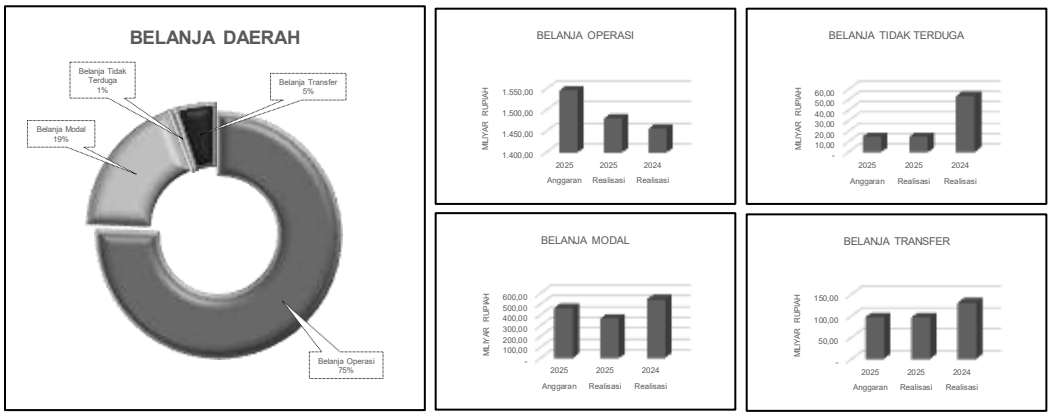

Gambar 5.1.2 Komposisi Realisasi Belanja Daerah TA 2025

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	381.064.123.709,67	378.396.540.066,52	99,30	298.535.200.797,40
Belanja Barang dan Jasa	1.003.785.225.366,70	944.241.925.133,00	94,07	929.988.945.356,63
Belanja Hibah	119.670.000.000,00	114.817.007.969,76	95,94	222.743.958.046,79
Belanja Bantuan Sosial	41.845.000.000,00	41.841.750.000,00	99,99	5.247.050.000,00
Jumlah	**1.546.364.349.076,37**	**1.479.297.223.169,28**	**95,66**	**1.456.515.154.200,82**

Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

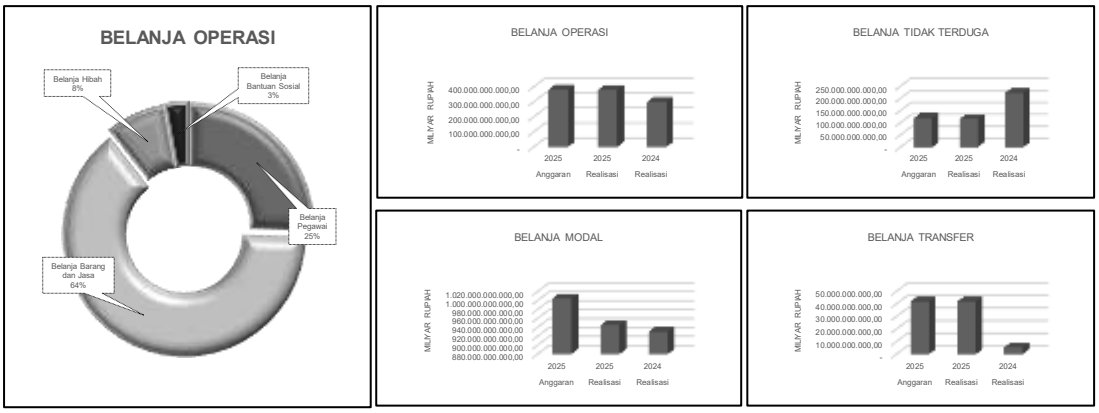

Gambar 5.1.2.1 Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	78.871.054.484,47	78.187.257.883,00	99,13	61.158.047.245,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	84.979.071.477,12	84.439.229.923,52	99,36	134.322.993.787,40
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	19.441.710.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.617.325.390,70	34.573.332.994,00	99,87	6.495.019.200,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	137.890.012,00	97.641.924,00	70,81	70.200.000,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	151.254.312.030,00	151.254.312.030,00	100,00	46.036.120.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	31.204.470.315,38	29.844.765.312,00	95,64	31.011.110.565,00
Jumlah	**381.064.123.709,67**	**378.396.540.066,52**	**99,30**	**298.535.200.797,40**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp378.396.540.066,52 atau 99,30% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
   b. Belanja Pegawai TA 2025 lebih besar Rp79.861.339.269,12 atau lebih tinggi 26,75% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp298.535.200.797,40;
2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1a Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	7.724.487.752,24	7.712.267.295,00	99,84	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.111.493.297,00	8.086.503.268,00	99,69	250.200.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	8.063.443.741,28	8.055.926.329,00	99,91	85.350.000,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	8.514.941.973,24	8.493.851.836,00	99,75	0,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.936.505.693,24	4.920.605.117,00	99,68	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	4.149.356.614,36	4.124.377.710,00	99,40	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	13.176.769.635,20	13.160.581.744,00	99,88	101.360.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	4.505.884.948,28	4.482.243.395,00	99,48	36.490.000,00
9	Dinas Perhubungan	5.268.647.533,36	5.255.324.697,52	99,75	0,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	4.421.201.850,28	4.385.609.479,00	99,19	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	5.419.020.382,16	5.229.202.231,00	96,50	24.800.000,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.245.411.571,00	3.227.236.367,00	99,44	84.240.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5.046.280.938,60	5.024.908.146,00	99,58	0,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	8.301.235.740,24	8.281.986.452,00	99,77	25.370.000,00
15	Sekretariat Daerah	178.197.407.548,00	177.979.459.037,00	99,88	46.787.440.000,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36.822.722.023,98	36.762.521.914,00	99,84	5.515.019.200,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	6.374.136.532,24	6.106.269.341,00	95,80	325.340.000,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	18.127.836.590,59	17.901.430.004,00	98,75	212.902.721.032,40
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.521.110.084,12	4.497.571.819,00	99,48	0,00
20	Inspektorat Daerah	4.379.642.642,48	4.358.090.774,00	99,51	405.760.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.618.033.141,28	3.598.284.252,00	99,45	0,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	38.138.553.476,50	36.752.288.859,00	96,37	31.991.110.565,00
	Jumlah	**381.064.123.709,67**	**378.396.540.066,52**	**99,30**	**298.535.200.797,40**

3. Pada Akun Belanja Pegawai tidak terjadi penyesuaian/koreksi pada realisasi belanja atau nilai pengeluaran SP2D sama dengan nilai Realisasi Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp378.395.595.996,52
4. Realisasi belanja pegawai pada beberapa SKPD di tahun 2024 menunjukkan nilai Rp0,00 dikarenakan sistem penggajian pada periode tersebut masih dilakukan secara terpusat (sentralisasi) melalui Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
5. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
   a. Rincian saldo Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan sebesar Rp78.871.054.484,47 dan direalisasikan pada TA 2025 sebesar Rp78.186.313.813,00 atau mencapai 99,13%;
   b. Rincian saldo Belanja Gaji dan Tunjangan adalah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1b Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	53.913.177.405,68	53.704.914.137,00	99,61	41.201.588.209,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.266.551.577,40	5.187.495.637,00	98,50	4.172.432.435,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	2.308.786.029,16	2.260.470.723,00	97,91	2.134.609.932,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	82.580.080,00	81.380.000,00	98,55	68.540.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.419.811.872,12	2.337.860.159,00	96,61	1.407.920.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.670.522.804,40	5.583.941.985,50	98,47	4.122.405.913,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	243.420.470,48	214.215.523,00	88,00	299.900.022,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.069.795,32	1.169.432,50	56,50	490.461,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.357.277.704,80	1.331.006.280,00	98,06	1.913.000.918,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	196.290.412,68	183.235.487,00	93,35	85.713.709,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	116.562.722,00	83.241.001,00	71,41	257.141.951,00
12	Belanja Tunjangan Khusus*)	7.294.003.610,43	7.218.327.518,00	98,96	5.494.303.695,00
	Jumlah	**78.871.054.484,47**	**78.187.257.883,00**	**99,13**	**61.158.047.245,00**

6. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
   a. Rincian saldo Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan sebesar Rp84.979.071.477,12 dan direalisasikan pada TA 2025 sebesar Rp84.439.229.923,52 atau mencapai 99,36%:
   b. Rincian saldo Belanja Tambahan Penghasilan ASN adalah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1c Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	43.014.163.768,00	42.751.032.140,91	99,39	70.805.145.876,40
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	12.138.786.000,00	12.065.437.617,44	99,40	18.059.047.868,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.931.630.180,00	12.855.844.097,75	99,41	18.154.911.617,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	60.000.000,00	39.524.680,00	65,87	259.496.164,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	16.683.971.066,00	16.597.573.685,42	99,48	27.044.392.262,00
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.520.463,12	129.817.702,00	86,25	0,00
	Jumlah	**84.979.071.477,12**	**84.439.229.923,52**	**99,36**	**134.322.993.787,40**

7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
   a. Rincian saldo Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang dianggarkan Rp0,00 dan direalisasikan pada TA 2025 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%;
   b. Rincian saldo Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1d Rincian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	19.441.710.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.441.710.000,00**

8. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
   a. Rincian saldo Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang dianggarkan sebesar Rp34.617.325.390,70 dan direalisasikan pada TA 2025 sebesar Rp34.573.332.994,00 atau mencapai 99,87%;
   b. Rincian saldo Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1e Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.230.120.080,00	1.226.605.356,00	99,71	202.500.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.155.051,80	61.560.000,00	97,47	5.130.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	147.120.120,00	137.199.790,00	93,26	16.793.280,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	123.538.523,80	122.460.000,00	99,13	20.250.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.950.261.260,00	1.944.605.850,00	99,71	293.625.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	100,00	980.000.000,00
7	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.100.000.450,00	8.100.000.000,00	100,00	1.350.000.000,00
8	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.025.340.229,10	2.025.000.000,00	99,98	675.000.000,00
9	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	12.420.000,00	11.893.138,00	95,76	4.726.720,00
10	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.760.540,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.252.441.110,00	8.234.008.860,00	99,78	1.371.994.200,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.450.168.026,00	9.450.000.000,00	100,00	1.575.000.000,00
	Jumlah	**34.617.325.390,70**	**34.573.332.994,00**	**99,87**	**6.495.019.200,00**

9. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
   a. Rincian saldo Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH yang dianggarkan sebesar Rp137.890.012,00 dan direalisasikan pada TA 2025 sebesar Rp97.641.924,00 atau mencapai 70,81% terdapat pada Sekretariat Daerah; dan
10. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
    a. Rincian saldo Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH yang dianggarkan sebesar Rp151.254.312.030,00 dan direalisasikan pada TA 2025 sebesar Rp151.254.312.030,00 atau mencapai 100,00%; dan
    b. Rincian saldo Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1f Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	840.000.000,00	840.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	150.414.312.030,00	150.414.312.030,00	100,00	46.036.120.000,00
	Jumlah	**151.254.312.030,00**	**151.254.312.030,00**	**100,00**	**46.036.120.000,00**

11. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP
    a. Rincian saldo Belanja Gaji dan Tunjangan MRP dianggarkan sebesar Rp31.204.470.315,38 dan direalisasikan pada TA 2025 sebesar Rp29.911.672.676,00 atau mencapai 95,86%;
    b. Rincian saldo Belanja Gaji dan Tunjangan MRP dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1g Gaji dan Tunjangan MRP Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi MRP	1.203.930.000,00	900.232.636,00	74,77	1.001.695.393,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga MRP	177.811.200,00	142.732.800,00	80,27	155.174.785,00
3	Belanja Tunjangan Beras MRP	307.840.000,08	304.580.250,00	98,94	210.199.744,00
4	Belanja Uang Paket MRP	120.393.000,00	88.519.500,00	73,53	100.169.539,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan MRP	2.337.130.495,48	2.333.177.250,00	99,83	1.452.458.321,00
6	Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP	53.010.000,00	35.091.000,00	66,20	39.708.159,00
7	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP	3.111.790.000,00	2.679.281.010,00	86,10	3.005.086.180,00
8	Belanja Tunjangan Transportasi MRP	11.299.850.000,04	10.867.446.840,00	96,17	12.288.125.952,00
9	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP	176.400.000,00	144.679.836,00	82,02	146.156.823,00
10	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP	12.416.315.619,78	12.349.024.190,00	99,46	12.612.335.669,00
	Jumlah	**31.204.470.315,38**	**29.844.765.312,00**	**95,64**	**31.011.110.565,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Barang	397.944.317.227,40	378.227.810.341,00	95,05	306.054.004.229,00
Belanja Jasa	200.653.039.905,23	191.460.700.496,00	95,42	226.396.315.474,00

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan	175.016.082.170,00	146.484.947.296,00	83,70	159.099.732.017,00
Belanja Perjalanan Dinas	174.941.850.868,07	172.838.531.804,00	98,80	174.217.979.044,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.229.935.196,00	55.229.935.196,00	100,00	64.220.914.592,63
Jumlah	**1.003.785.225.366,70**	**944.241.925.133,00**	**94,07**	**929.988.945.356,63**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat pada Belanja di bawah ini:
   1) Belanja Barang mengalami kenaikan senilai Rp72.173.806.112,00, atau 23,58%;
   2) Belanja Jasa mengalami penurunan senilai Rp34.935.614.978,00, atau (15,43)%;
   3) Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan senilai Rp12.614.784.721,00, atau (7,93)%
   4) Belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan senilai Rp1.379.447.240,00, atau (0,79)%.
   5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami penurunan senilai Rp8.990.979.396,63 atau (14,00)%
2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2a Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.967.794.763,00	70.438.719.296,00	99,25	90.733.724.638,63
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	115.122.683.678,00	110.578.153.861,00	96,05	49.215.778.843,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	224.658.830.870,00	178.400.880.882,00	79,41	188.377.131.535,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	12.754.316.967,00	12.746.565.633,00	99,94	17.138.378.120,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	26.190.946.000,00	26.031.049.917,00	99,39	25.515.776.581,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	8.392.612.000,00	8.259.377.791,00	98,41	10.272.686.614,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	8.277.332.927,33	7.743.058.050,00	93,55	6.027.500.128,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	3.968.621.967,00	3.794.022.292,00	95,60	6.930.308.475,00
9	Dinas Perhubungan	10.889.245.805,00	10.329.148.731,00	94,86	28.520.384.332,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	13.347.389.288,91	13.312.428.794,00	99,74	21.883.664.873,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	8.928.661.100,00	8.926.774.000,00	99,98	7.746.833.439,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.391.922.300,00	1.375.765.945,00	98,84	9.004.142.251,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.457.422.000,00	3.435.082.693,00	99,35	10.084.378.804,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	6.979.499.960,00	6.514.578.901,00	93,34	18.287.636.855,00
15	Sekretariat Daerah	181.350.605.692,00	180.557.481.175,00	99,56	228.102.911.655,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	138.861.691.457,40	138.667.211.714,00	99,86	26.450.102.744,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	16.120.350.025,00	13.053.324.212,00	80,97	22.945.429.569,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	73.805.421.106,00	73.368.804.212,00	99,41	70.935.613.798,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.809.042.430,06	13.354.905.934,00	90,18	18.080.340.308,00
20	Inspektorat Daerah	18.048.680.530,00	18.042.068.100,00	99,96	14.361.302.801,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.321.993.000,00	5.259.394.000,00	98,82	9.126.857.000,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	40.140.161.500,00	40.053.129.000,00	99,78	50.248.061.993,00
	Jumlah	**1.003.785.225.366,70**	**944.241.925.133,00**	**94,07**	**929.988.945.356,63**

3. Belanja Barang
   a. Rincian saldo Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2b Rincian Belanja Barang
Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	371.104.885.700,40	363.592.695.814,00	97,98	305.650.774.229,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	26.839.431.527,00	14.635.114.527,00	54,53	403.230.000,00
Jumlah	**397.944.317.227,40**	**378.227.810.341,00**	**95,05**	**306.054.004.229,00**

   b. Rincian saldo Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 pada masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2c Rincian Belanja Barang pada masing-masing SKPD
Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.236.630.600,00	3.203.620.600,00	98,98	15.145.656.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	56.009.699.133,00	52.845.526.576,00	94,35	9.039.894.912,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	22.943.358.000,00	9.378.580.000,00	40,88	7.428.676.500,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	3.825.980.967,00	3.824.431.967,00	99,96	6.761.329.450,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	21.258.699.000,00	21.135.428.705,00	99,42	19.489.617.500,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.888.751.000,00	1.805.195.000,00	95,58	3.132.441.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	3.254.016.460,00	3.194.906.900,00	98,18	1.690.735.044,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	1.757.867.000,00	1.754.660.000,00	99,82	1.836.626.875,00
9	Dinas Perhubungan	5.914.316.591,00	5.778.865.618,00	97,71	19.612.217.840,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	782.624.000,00	781.371.000,00	99,84	1.084.899.898,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	4.346.287.000,00	4.344.544.000,00	99,96	4.233.000.250,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	622.512.300,00	606.365.000,00	97,41	2.138.778.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	825.070.000,00	825.070.000,00	100,00	6.191.240.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	2.289.368.960,00	2.062.887.450,00	90,11	3.307.801.200,00
15	Sekretariat Daerah	117.175.680.492,00	117.105.842.902,00	99,94	129.592.548.419,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	75.750.231.227,40	75.650.850.550,00	99,87	12.723.457.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	5.099.593.325,00	3.538.764.241,00	69,39	4.947.975.000,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	37.052.381.702,00	36.699.973.297,00	99,05	26.552.519.601,00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.400.429.440,00	2.238.412.900,00	93,25	3.606.318.270,00
20	Inspektorat Daerah	3.255.268.530,00	3.255.264.635,00	100,00	2.282.260.470,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.422.313.000,00	2.421.015.000,00	99,95	1.939.747.000,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	25.833.238.500,00	25.776.234.000,00	99,78	23.316.264.000,00
	Jumlah	**397.944.317.227,40**	**378.227.810.341,00**	**95,05**	**306.054.004.229,00**

4. Belanja Jasa
   a. Rincian saldo Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2d Rincian Belanja Jasa pada masing-masing SKPD
Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	9.700.559.967,00	9.304.290.000,00	95,91	20.019.728.796,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	50.473.068.785,00	49.292.777.285,00	97,66	32.623.053.519,00

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	25.333.829.700,00	21.151.894.790,00	83,49	22.065.888.000,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	7.936.750.000,00	7.930.750.000,00	99,92	8.507.660.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.266.489.000,00	3.249.957.000,00	99,49	2.448.840.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	2.203.600.000,00	2.196.650.000,00	99,68	2.714.509.849,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	3.065.058.467,33	2.789.691.000,00	91,02	2.114.317.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	1.210.489.967,00	1.045.139.967,00	86,34	2.090.375.000,00
9	Dinas Perhubungan	3.374.089.047,00	3.037.677.244,00	90,03	4.678.351.652,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	11.189.880.288,90	11.159.339.838,00	99,73	18.616.755.380,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.791.949.100,00	1.791.850.000,00	99,99	1.606.260.000,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	519.580.000,00	519.580.000,00	100,00	2.456.444.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	450.320.000,00	442.320.000,00	98,22	1.728.800.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	898.892.000,00	886.456.000,00	98,62	1.769.611.000,00
15	Sekretariat Daerah	25.247.258.200,00	24.619.105.613,00	97,51	50.693.211.044,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14.688.669.230,00	14.611.093.164,00	99,47	1.509.250.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	5.708.892.700,00	4.557.218.500,00	79,83	8.064.160.000,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	21.560.315.463,00	21.534.913.295,00	99,88	24.066.597.914,00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.567.227.990,00	3.878.876.800,00	84,93	4.116.640.830,00
20	Inspektorat Daerah	2.569.500.000,00	2.569.500.000,00	100,00	2.037.033.710,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	338.820.000,00	333.820.000,00	98,52	5.184.100.000,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	4.557.800.000,00	4.557.800.000,00	100,00	7.284.727.780,00
	Jumlah	**200.653.039.905,23**	**191.460.700.496,00**	**95,42**	**226.396.315.474,00**

b. Rincian saldo Belanja Jasa adalah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2e Rincian Belanja Jasa Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	71.536.634.188,23	69.740.213.488,00	97,49	104.255.592.059,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.332.594.900,00	42.261.770.000,00	97,53	26.959.711.206,00
3	Belanja Sewa Tanah	370.000.000,00	370.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.245.603.320,00	16.004.319.363,00	98,51	17.475.880.605,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.832.975.497,00	24.581.536.124,00	98,99	29.717.170.970,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.099.400.000,00	5.845.739.800,00	72,17	20.776.570.800,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	31.065.120.000,00	28.002.144.990,00	90,14	21.851.821.501,00
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.170.712.000,00	4.654.976.731,00	90,03	5.359.568.333,00
	Jumlah	**200.653.039.905,23**	**191.460.700.496,00**	**95,42**	**226.396.315.474,00**

5. Belanja Pemeliharaan

a. Rincian saldo Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2f Rincian Belanja Pemeliharaan pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	10.000.000,00	8.000.000,00	80,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	187.643.000,00	187.643.000,00	100,00	74.000.000,00

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	173.905.462.170,00	145.395.049.296,00	83,61	154.028.053.017,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	86.925.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	21.850.000,00
9	Dinas Perhubungan	58.957.000,00	58.957.000,00	100,00	2.275.630.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	9.600.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
15	Sekretariat Daerah	566.500.000,00	566.038.000,00	99,92	161.380.000,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	134.260.000,00	134.260.000,00	100,00	0,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	49.260.000,00	31.000.000,00	62,93	2.239.974.000,00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Inspektorat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	71.320.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**175.016.082.170,00**	**146.484.947.296,00**	**83,70**	**159.099.732.017,00**

b. Rincian saldo Belanja Pemeliharaan adalah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2g Rincian Belanja Pemeliharaan Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	51.596.442.370,00	48.447.185.250,00	93,90	2.275.630.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.051.663.000,00	1.030.941.000,00	98,03	642.639.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.957.000,00	58.957.000,00	100,00	8.686.709.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.309.019.800,00	96.947.864.046,00	79,26	147.494.754.017,00
	Jumlah	**175.016.082.170,00**	**146.484.947.296,00**	**83,70**	**159.099.732.017,00**

6. Belanja Perjalanan Dinas

a. Rincian saldo Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2h Rincian Belanja Perjalanan Dinas pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.892.669.000,00	6.794.873.500,00	98,58	5.446.675.250,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.452.272.760,00	8.252.207.000,00	97,63	7.478.830.412,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.476.181.000,00	2.475.356.796,00	99,97	4.854.514.018,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	991.586.000,00	991.383.666,00	99,98	1.869.388.670,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.645.758.000,00	1.625.664.212,00	98,78	3.490.394.081,00

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	4.300.261.000,00	4.257.532.791,00	99,01	4.395.735.765,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	1.958.258.000,00	1.758.460.150,00	89,80	2.201.198.084,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	981.265.000,00	975.222.325,00	99,38	2.981.456.600,00
9	Dinas Perhubungan	1.541.883.167,00	1.453.648.869,00	94,28	1.954.184.840,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.359.885.000,01	1.356.717.956,00	99,77	2.182.009.595,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.790.425.000,00	2.790.380.000,00	100,00	1.907.573.189,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	249.830.000,00	249.820.945,00	100,00	4.334.920.251,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.100.032.000,00	1.085.692.693,00	98,70	2.154.738.804,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1.756.239.000,00	1.530.235.451,00	87,13	5.323.224.655,00
15	Sekretariat Daerah	37.361.167.000,00	37.266.494.660,00	99,75	41.437.772.192,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	48.422.791.000,00	48.405.268.000,00	99,96	12.217.395.744,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.177.604.000,00	4.823.081.471,00	93,15	9.933.294.569,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	15.143.463.941,00	15.102.917.620,00	99,73	18.076.522.283,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.841.385.000,06	7.237.616.234,00	92,30	10.357.381.208,00
20	Inspektorat Daerah	12.203.912.000,00	12.197.303.465,00	99,95	9.970.688.621,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.545.860.000,00	2.489.559.000,00	97,79	2.003.010.000,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	9.749.123.000,00	9.719.095.000,00	99,69	19.647.070.213,00
	Jumlah	**174.941.850.868,07**	**172.838.531.804,00**	**98,80**	**174.217.979.044,00**

b. Rincian saldo Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp173.086.346.981,00 merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

7. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
   a. Rincian saldo Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2i Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51.127.935.196,00	51.127.935.196,00	100,00	50.121.664.592,63
2	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	21.250.000,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.067.000.000,00	1.067.000.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	2.035.000.000,00	2.035.000.000,00	100,00	7.860.000.000,00
5	Sekretariat Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	6.218.000.000,00
	Jumlah	**55.229.935.196,00**	**55.229.935.196,00**	**100,00**	**64.220.914.592,63**

b. Rincian saldo Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2j Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	53.194.935.196,00	53.194.935.196,00	100,00	56.339.664.592,63
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.035.000.000,00	2.035.000.000,00	100,00	7.881.250.000,00
	Jumlah	**55.229.935.196,00**	**55.229.935.196,00**	**100,00**	**64.220.914.592,63**

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.000.000.000,00	3.975.880.626,86	99,40	47.251.089.046,79
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.700.000.000,00	14.700.000.000,00	100,00	49.986.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	87.950.000.000,00	86.221.127.342,90	98,03	54.212.480.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.250.000.000,00	7.250.000.000,00	100,00	62.295.389.000,00
Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	4.999.000.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.770.000.000,00	2.670.000.000,00	46,27	4.000.000.000,00
Jumlah	**119.670.000.000,00**	**114.817.007.969,76**	**95,94**	**222.743.958.046,79**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp114.817.007.969,76 atau 95,94% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
   b. Belanja Hibah TA 2025 lebih kecil Rp107.926.950.077,03 atau lebih rendah 48,45% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp222.743.958.046,79.
2. Rincian saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.3a Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.500.000.000,00	31.747.007.969,76	92,02	24.410.000.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.300.000.000,00	200.000.000,00	8,70	49.251.089.046,79
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	3.130.000.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	7.200.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	5.649.000.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.220.000.000,00	9.220.000.000,00	100,00	53.703.169.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	48.450.000.000,00	48.450.000.000,00	100,00	21.414.700.000,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	0,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.200.000.000,00	15.200.000.000,00	100,00	57.986.000.000,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**119.670.000.000,00**	**114.817.007.969,76**	**95,94**	**222.743.958.046,79**

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	620.000.000,00	620.000.000,00	100,00	250.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	100,00	3.683.800.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	37.375.000.000,00	37.371.750.000,00	99,99	1.313.250.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**41.845.000.000,00**	**41.841.750.000,00**	**99,99**	**5.247.050.000,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp41.845.000.000,00 atau 99,99% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp41.841.750.000,00; dan
   b. Belanja Bantuan Sosial TA 2025 lebih besar Rp36.594.700.000,00 atau lebih tinggi 697,43% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.247.050.000,00. Signifikansi kenaikan realisasi tersebut dipengaruhi oleh implementasi kebijakan strategis Kepala Daerah untuk pemberian stimulan distribusi barang hasil produksi kepada Orang Asli Papua (OAP). Hal ini dilaksanakan dalam rangka akselerasi program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam prioritas belanja daerah TA 2025
2. Rincian saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.4a Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.225.000.000,00	4.225.000.000,00	100,00	4.997.050.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	37.620.000.000,00	37.616.750.000,00	99,99	250.000.000,00
	Jumlah	**41.845.000.000,00**	**41.841.750.000,00**	**99,99**	**5.247.050.000,00**

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Modal – Tanah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	31.000.000.000,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	22.500.537.427,00	22.266.044.949,00	98,96	33.854.864.903,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	16.943.699.968,00	10.311.158.200,00	60,86	53.115.679.212,00
Belanja Modal - Jalan, Jaringan dan Irigasi	412.137.320.122,00	322.700.973.787,00	78,30	422.086.213.196,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	501.771.800,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**463.081.557.517,00**	**366.778.176.936,00**	**79,20**	**540.558.529.111,00**

Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

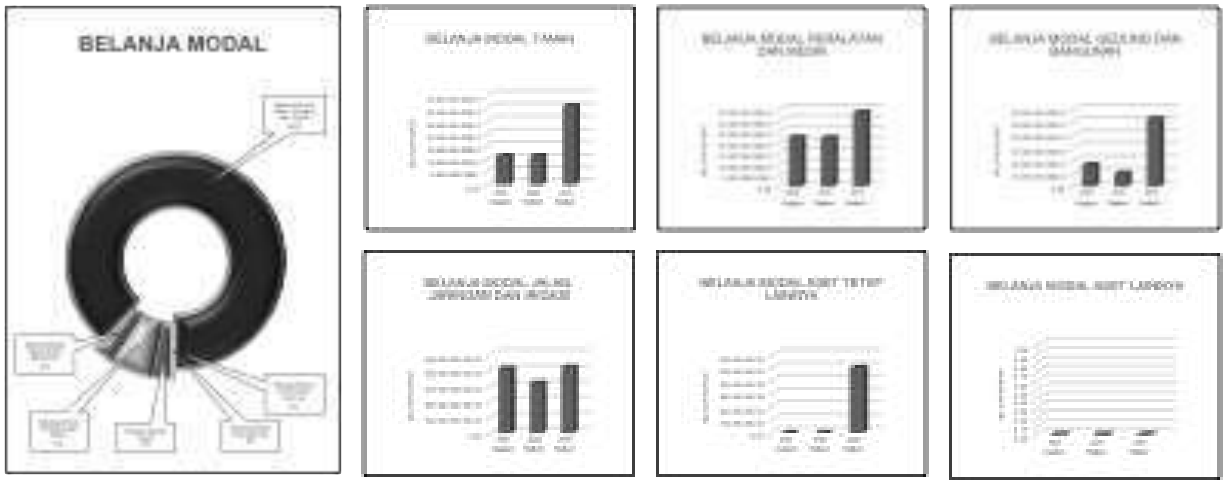

Gambar 5.1.2.2 Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2025

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA. 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14.487.000,00	14.487.000,00	100,00	13.623.846.200,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.545.000.000,00	2.101.647.000,00	82,58	17.375.813.892,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	365.215.379.188,00	288.402.072.987,00	78,97	409.974.814.696,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	795.000.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	501.600.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.269.488.560,00	3.242.900.000,00	99,19	6.769.346.612,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	11.506.650.000,00	11.506.650.000,00	100,00	31.996.946.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	59.192.000,00	59.192.000,00	100,00	49.515.900,00
9	Dinas Perhubungan	61.608.859.852,00	44.920.461.792,00	72,91	5.967.916.800,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	2.811.707.157,00	2.807.027.157,00	99,83	9.250.101.408,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	370.500.000,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	342.150.000,00	340.000.000,00	99,37	1.040.465.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	66.550.000,00	66.550.000,00	100,00	1.348.250.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	183.240.000,00	104.500.000,00	57,03	7.173.573.000,00
15	Sekretariat Daerah	6.543.908.760,00	6.536.164.000,00	99,88	28.205.221.000,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.260.370.000,00	6.250.870.000,00	99,85	465.400.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	400.900.000,00	400.680.000,00	99,95	156.954.000,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	2.228.700.000,00	0,00	0,00	2.853.138.503,00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	767.298.100,00
20	Inspektorat Daerah	24.975.000,00	24.975.000,00	100,00	1.675.328.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	176.500.000,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Jumlah	**463.081.557.517,00**	**366.778.176.936,00**	**79,20**	**540.558.529.111,00**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Tanah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	3.550.000.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	27.450.000.000,00
Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**11.500.000.000,00**	**11.500.000.000,00**	**100,00**	**31.000.000.000,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal–Tanah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp11.500.000.000,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD; dan
   b. Belanja Modal Tanah TA 2025 lebih kecil Rp19.500.000.000,00 atau turun (62,90)% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp31.000.000.000,00.
2. Rincian saldo Belanja Modal-Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD diuraiakan sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.2.1a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	3.550.000.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	27.450.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**11.500.000.000,00**	**11.500.000.000,00**	**100,00**	**31.000.000.000,00**

5.1.2.2.2 Belanja Modal-Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Bantu	59.192.000,00	59.192.000,00	100,00	25.299.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.815.562.600,00	6.802.197.000,00	99,80	13.934.114.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6.650.000,00	6.650.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	876.874.100,00	777.137.792,00	88,63	663.600.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	59.188.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	555.000.000,00	550.400.000,00	99,17	1.329.950.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	1.370.587.000,00	1.359.807.000,00	99,21	633.418.492,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.248.180.000,00	7.244.780.000,00	99,95	5.203.697.918,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	186.681.200,00
Belanja Modal Alat Studio	575.365.660,00	573.766.000,00	99,72	155.670.590,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	2.075.724.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	2.819.488.560,00	2.797.000.000,00	99,20	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	78.240.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	115.868.000,00	115.868.000,00	100,00	8.675.461.203,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.595.957.157,00	1.595.737.157,00	99,99	842.560.500,00
Belanja Modal Alat Pelindung	11.372.350,00	11.310.000,00	99,45	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	69.500.000,00
Jumlah	**22.500.537.427,00**	**22.266.044.949,00**	**98,96**	**33.854.864.903,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal-Peralatan dan Mesin di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp22.266.044.949,00 atau 98,96% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD; dan
   b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2025 lebih kecil Rp11.588.819.954,00 atau turun (34,23)% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp33.854.864.903,00.
2. Rincian saldo Belanja Modal-Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.2a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14.487.000,00	14.487.000,00	100,00	2.207.450.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.045.000.000,00	1.040.397.000,00	99,56	1.743.880.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	485.839.850,00	485.310.000,00	99,89	589.025.500,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	795.000.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	501.600.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.269.488.560,00	3.242.900.000,00	99,19	1.608.017.492,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	6.650.000,00	6.650.000,00	100,00	347.900.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	59.192.000,00	59.192.000,00	100,00	49.515.900,00
9	Dinas Perhubungan	986.079.100,00	886.342.792,00	89,89	899.600.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	2.811.707.157,00	2.807.027.157,00	99,83	5.148.101.408,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	370.500.000,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	342.150.000,00	340.000.000,00	99,37	1.040.465.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	66.550.000,00	66.550.000,00	100,00	148.250.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	183.240.000,00	104.500.000,00	57,03	1.765.470.000,00
15	Sekretariat Daerah	6.543.908.760,00	6.536.164.000,00	99,88	12.753.171.000,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.260.370.000,00	6.250.870.000,00	99,85	465.400.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	400.900.000,00	400.680.000,00	99,95	156.954.000,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	624.438.503,00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	767.298.100,00
20	Inspektorat Daerah	24.975.000,00	24.975.000,00	100,00	1.675.328.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	176.500.000,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Jumlah	**22.500.537.427,00**	**22.266.044.949,00**	**98,96**	**33.854.864.903,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal-Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.640.000.000,00	5.796.315.000,00	87,29	48.666.662.412,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	10.303.699.968,00	4.514.843.200,00	43,82	4.449.016.800,00
Jumlah	**16.943.699.968,00**	**10.311.158.200,00**	**60,86**	**53.115.679.212,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal-Gedung dan Bangunan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp10.311.158.200,00 atau 60,86% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD; dan
   b. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan TA 2025 lebih kecil Rp42.804.521.012,00 atau lebih tinggi 80,59% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp53.115.679.212,00.
2. Rincian saldo Belanja Modal-Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.3a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	10.914.624.400,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.500.000.000,00	1.061.250.000,00	70,75	12.081.933.892,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	5.000.000.000,00	1.488.600.000,00	29,77	0,00
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	761.951.120,00
5	Dinas Perhubungan	8.214.999.968,00	7.761.308.200,00	94,48	5.068.316.800,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
7	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	5.408.103.000,00
8	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	15.452.050.000,00
9	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	2.228.700.000,00	0,00	0,00	2.228.700.000,00
	Jumlah	**16.943.699.968,00**	**10.311.158.200,00**	**60,86**	**53.115.679.212,00**

5.1.2.2.4 Belanja Modal-Jalan Jaringan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Jalan, Jaringan dan Irigasi Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan	277.938.601.228,00	228.379.298.211,00	82,17	349.093.689.630,00
Belanja Modal Jembatan	42.183.547.985,00	29.939.224.376,00	70,97	2.705.852.800,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	7.279.175.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.500.000.000,00	1.474.100.000,00	98,27	8.928.386.500,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	12.916.500.000,00	9.060.577.100,00	70,15	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	77.598.670.909,00	53.847.774.100,00	69,39	30.996.464.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	4.199.046.000,00
Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	4.102.000.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	10.382.221.266,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	4.399.378.000,00
Jumlah	**412.137.320.122,00**	**322.700.973.787,00**	**78,30**	**422.086.213.196,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal–Jalan, Jaringan dan Irigasi di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp322.700.973.787,00 atau 78,30% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD; dan
   b. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi TA 2025 lebih kecil Rp99.385.239.409,00 atau turun 23,55% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp422.086.213.196,00.
2. Rincian saldo Belanja Modal-Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.4a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Jalan, Jaringan dan Irigasi pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2025

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	359.729.539.338,00	286.428.162.987,00	79,62	409.385.789.196,00
2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	4.399.378.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	4.199.046.000,00
4	Dinas Perhubungan	52.407.780.784,00	36.272.810.800,00	69,21	0,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00	0,00	0,00	4.102.000.000,00
	Jumlah	**412.137.320.122,00**	**322.700.973.787,00**	**78,30**	**422.086.213.196,00**

5.1.2.2.5 Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	501.771.800,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.771.800,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD; dan
   b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 lebih kecil Rp501.771.800,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp501.771.800,00.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.5a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	501.771.800,00
2	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.771.800,00**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud				
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - *Goodwill*	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal-Aset Lainnya di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak dianggarkan dan tidak terealisasi di TA 2025 adapun tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00. Rincian saldo Belanja Modal-Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.6a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga TA 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	14.681.910.366,82	14.681.729.000,00	100,00	53.525.500.000,00
Jumlah	**14.681.910.366,82**	**14.681.729.000,00**	**100,00**	**53.525.500.000,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp14.681.729.000,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD; dan
   b. Belanja Tidak Terduga TA 2025 lebih kecil Rp38.843.771.000,00 atau turun (72,57)% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp53.525.500.000,00.
2. Rincian saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3a Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	14.681.910.366,82	14.681.729.000,00	100,00	53.525.500.000,00
	Jumlah	**14.681.910.366,82**	**14.681.729.000,00**	**100,00**	**53.525.500.000,00**

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah–LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4 Anggaran dan Realisasi Transfer Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Transfer Bagi Hasil	82.186.900.188,88	82.062.972.249,00	99,85	106.656.074.529,00
Belanja Bantuan Keuangan	14.450.000.000,00	14.450.000.000,00	100,00	23.531.815.425,00

Jumlah	**96.636.900.188,88**	**96.512.972.249,00**	**99,87**	**130.187.889.954,00**

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4.1 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	82.186.900.188,88	82.062.972.249,00	99,85	106.656.074.529,00
Jumlah	**82.186.900.188,88**	**82.062.972.249,00**	**99,85**	**106.656.074.529,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bagi Hasil di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp82.062.972.249,00 atau 99,85% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yaitu sebesar Rp82.186.900.188,88; dan
   b. Belanja Bagi Hasil TA 2025 lebih kecil Rp24.593.102.280,00 atau lebih rendah (23,06)% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp106.656.074.529,00.
2. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyalurkan dana Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Rincian dana Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:
   a. Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 5.1.2.4.1.1 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Transfer (Rp)
1	Kabupaten Jayawijaya	1.278.402.643,00
2	Kabupaten Yahukimo	175.911.611,00
3	Kabupaten Tolikara	143.276.791,00
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	115.049.064,00
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	120.835.358,00
6	Kabupaten Yalimo	141.612.571,00
7	Kabupaten Nduga	121.897.532,00
8	Kabupaten Lanny Jaya	141.932.613,00
	Jumlah	**2.238.918.183,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan hasil pemungutan atas masa pajak sebelum tahun 2025. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai Opsen PKB baru mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 5 Januari 2025.

   b. Transfer Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 5.1.2.4.1.2 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Transfer (Rp)
1	Kabupaten Jayawijaya	1.189.290.341,00
2	Kabupaten Yahukimo	121.657.443,00
3	Kabupaten Tolikara	130.390.719,00
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	104.058.547,00
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	108.835.358,00
6	Kabupaten Yalimo	128.838.255,00
7	Kabupaten Nduga	110.447.532,00
8	Kabupaten Lanny Jaya	129.136.806,00
	Jumlah	**2.022.655.001,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan hasil pemungutan atas masa pajak sebelum tahun 2025. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai Opsen BBNKB baru mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 5 Januari 2025.

c. Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tabel 5.1.2.4.1.3 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Transfer (Rp)
1	Kabupaten Jayawijaya	2.377.776.327,00
2	Kabupaten Yahukimo	181.799.219,00
3	Kabupaten Tolikara	191.819.649,00
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	139.212.394,00
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	150.485.378,00
6	Kabupaten Yalimo	191.569.138,00
7	Kabupaten Nduga	154.243.039,00
8	Kabupaten Lanny Jaya	191.819.649,00
	Jumlah	**3.578.724.793,00**

d. Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok

Tabel 5.1.2.4.1.4 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Transfer (Rp)
1	Kabupaten Jayawijaya	3.365.880.493,00
2	Kabupaten Yahukimo	4.121.063.852,00
3	Kabupaten Tolikara	3.137.374.828,00
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	1.254.790.693,00
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	1.089.681.601,00
6	Kabupaten Yalimo	1.744.047.598,00
7	Kabupaten Nduga	1.233.702.359,00
8	Kabupaten Lanny Jaya	2.680.363.496,00
	Jumlah	**18.626.904.920,00**

e. Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Tabel 5.1.2.4.1.5 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Transfer (Rp)
1	Kabupaten Jayawijaya	0,00
2	Kabupaten Yahukimo	0,00
3	Kabupaten Tolikara	0,00
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00
6	Kabupaten Yalimo	0,00
7	Kabupaten Nduga	0,00
8	Kabupaten Lanny Jaya	0,00
	Jumlah	**0,00**

f. Transfer Kurang Salur Dana Bagi Hasil Ke Kabupaten TA 2024

Tabel 5.1.2.4.1.6 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Transfer (Rp)
1	Kabupaten Jayawijaya	3.560.697.338,00
2	Kabupaten Yahukimo	4.121.063.852,00
3	Kabupaten Tolikara	3.137.374.828,00
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	1.254.790.693,00
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	1.089.681.601,00
6	Kabupaten Yalimo	1.744.047.598,00
7	Kabupaten Nduga	1.233.702.359,00
8	Kabupaten Lanny Jaya	2.680.363.496,00
	Jumlah	**18.821.721.765,00**

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.4.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Papua Pegunungan T.A 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan	14.450.000.000,00	14.450.000.000,00	100,00	23.531.815.425,00
Jumlah	**14.450.000.000,00**	**14.450.000.000,00**	**100,00**	**23.531.815.425,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
2. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 sebesar Rp14.450.000.000,00 atau 100,00% dari Anggaran tersebut dialokasikan secara spesifik untuk Dana Bantuan Keuangan Khusus Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Tahun 2025. Pelaksanaan belanja ini merujuk pada hasil Berita Acara Rekonsiliasi Penyelesaian Pembiayaan Beasiswa SUP Tahun 2024 guna menjamin keberlangsungan dukungan pendidikan bagi putra-putri daerah.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.1.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	155.793.050.471,07	155.793.050.471,07	100,00	133.797.118.923,89
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**155.793.050.471,07**	**155.793.050.471,07**	**100,00**	**133.797.118.923,89**

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah-Penerimaan Pembiayaan Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	155.793.050.471,07	155.793.050.471,07	100,00	133.797.118.923,89
Jumlah	**155.793.050.471,07**	**155.793.050.471,07**	**100,00**	**133.797.118.923,89**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp155.793.050.471,07 dan terealisasi secara penuh sebesar Rp155.793.050.471,07 atau mencapai 100,00%. Realisasi ini mencerminkan penggunaan seluruh saldo kas sisa perhitungan TA sebelumnya yang telah diaudit dan ditetapkan untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai pengeluaran pembiayaan pada tahun berjalan.
2) Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp133.797.118.923,89, terdapat kenaikan sebesar Rp21.995.931.547,18 atau meningkat sebesar 16,44%. Peningkatan nilai SiLPA ini dipengaruhi oleh

akumulasi efisiensi belanja dan pelampauan target pendapatan pada periode laporan sebelumnya yang kemudian dibukukan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA berjalan. Selain itu, optimalisasi serapan anggaran pada TA 2025 memastikan bahwa seluruh nilai SiLPA yang dianggarkan telah terealisasi sesuai dengan posisinya dalam neraca daerah.

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1.1 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Pelampauan Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	155.793.050.471,07	155.793.050.471,07	100,00	133.797.118.923,89
Jumlah	**155.793.050.471,07**	**155.793.050.471,07**	**100,00**	**133.797.118.923,89**

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah-Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA) TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.1.4 Realisasi Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/(SiKPA) Provinsi Papua Pegunungan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

Uraian	Tahun 2025 Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	**1.964.971.666.678,00**	**1.812.439.425.310,10**	**92,24**	**2.202.783.004.813,00**
Pendapatan Asli Daerah	214.236.689.404,00	159.503.345.008,10	74,45	171.257.668.881,00
Pendapatan Transfer	1.650.734.977.274,00	1.639.157.854.800,00	99,30	2.031.398.053.932,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	100.000.000.000,00	13.778.225.502,00	13,78	127.282.000,00
Belanja Daerah	**2.024.127.816.960,19**	**1.860.757.129.105,28**	**91,93**	**2.050.599.183.311,82**
Belanja Operasi	1.546.364.349.076,37	1.479.297.223.169,28	95,66	1.456.515.154.200,82
Belanja Modal	463.081.557.517,00	366.778.176.936,00	79,20	540.558.529.111,00
Belanja Tidak Terduga	14.681.910.366,82	14.681.729.000,00	100,00	53.525.500.000,00
Transfer Daerah	**96.636.900.188,88**	**96.512.972.249,00**	**99,87**	**130.187.889.954,00**
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	82.186.900.188,88	82.062.972.249,00	99,85	106.656.074.529,00
Transfer Bantuan Keuangan	14.450.000.000,00	14.450.000.000,00	100,00	23.531.815.425,00
Pembiayaan Daerah	**155.793.050.471,07**	**155.793.050.471,07**	**100,00**	**133.797.118.923,89**
Penerimaan Pembiayaan	155.793.050.471,07	155.793.050.471,07	100,00	133.797.118.923,89

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**10.962.374.426,89**	**100,00**	**155.793.050.471,07**

Penjelasan:

1. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.1.4a Rincian Keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Provinsi Papua Pegunungan TA 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	9.931.444.084,89	153.604.329.833,07
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	188.720.638,00
Setara Kas	0,00	0.00
CP Belum disetorkan ke Kas Daerah	0,00	2.000.000.000,00
Kas Lainnya yang di Setorkan di 2026	1.030.930.342,00	0,00
Jumlah	**10.962.374.426,89**	**155.793.050.471,07**

2. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL.

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	153.604.329.833,07	97.233.615.145,78
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	188.720.638,00	2.281.230.529,00
Kas Lainnya	0,00	29.755.876.249,11
Setara Kas	0.00	5.000.000.000,00
CP 2025 Belum disetorkan ke Kas Daerah-Kas Lainnya	2.000.000.000,00	0,00
Jumlah	**155.793.050.471,07**	**134.270.721.923,89**

Saldo di atas merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2025 dan 2024 pada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.

Komposisi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

Gambar 5.2.1 Komposisi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	155.793.050.471,07	133.797.118.923,89

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada TA 2025 dan 2024 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama TA 2025 dan 2024. Untuk saldo SiLPA TA 2025, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan tidak mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2024.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	10.962.374.426,89	155.793.050.471,07

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada TA 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2025. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1.4***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin 5.2.5*** di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Nihil	0,00	(473.603.000,00)
Jumlah	**0,00**	**(473.603.000,00)**

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	9.931.444.084,89	153.604.329.833,07
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	188.720.638,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
CP 2025 Belum disetorkan ke Kas Daerah-Kas Lainnya	0,00	2.000.000.000,00
Kas Lainnya yang di Setorkan di 2026	1.030.930.342,00	0,00
Jumlah	**10.962.374.426,89**	**155.793.050.471,07**

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1.4***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin 5.2.3*** di atas.

Komposisi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

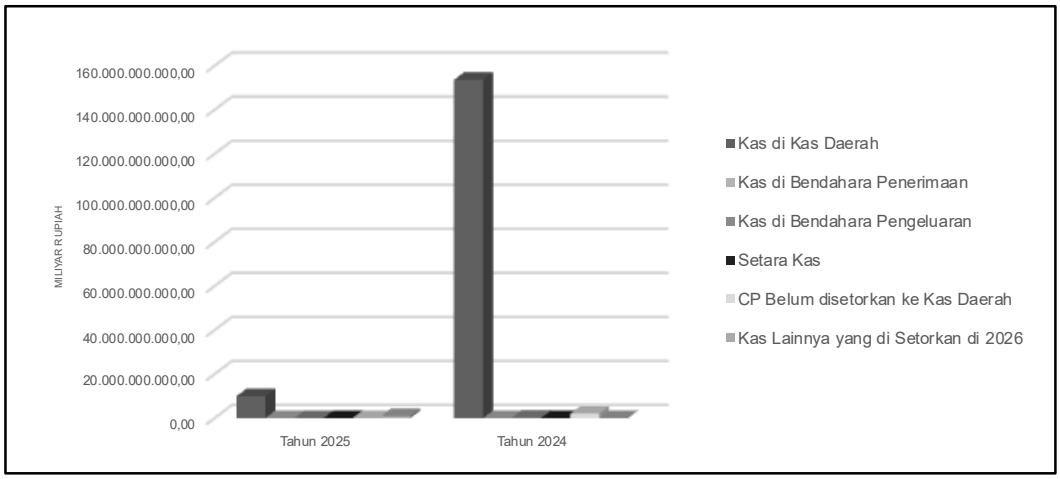

Gambar 5.2.5 Komposisi Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024

5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan struktur yang berkaitan dengan Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca menunjukan bahwa harta yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2025. Neraca Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Aset yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Aset Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	84.860.320.177,38	343.371.131.594,21
Aset Tetap	2.583.444.941.476,01	1.885.906.047.424,24
Aset Lainnya	25.976.005.058,80	53.101.421.657,57
Jumlah	**2.694.281.266.712,19**	**2.282.378.600.676,02**

Komposisi Aset Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

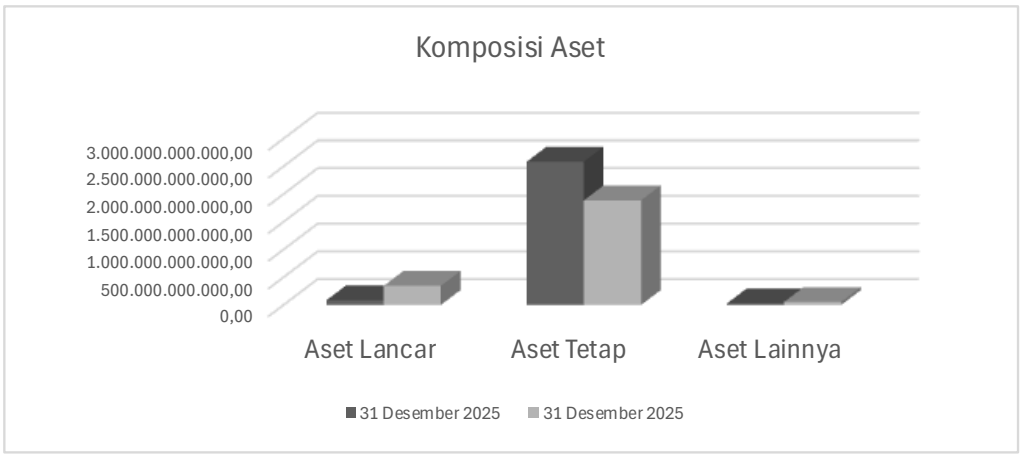

Gambar 5.3.1 Komposisi Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Aset Lancar yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1 Aset Lancar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas dan Setara Kas	11.248.181.539,89	156.596.423.345,07
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	122.860.602,00	5.973.291.499,67
Beban Dibayar Dimuka	0,00	137.513.000,00
Persediaan	73.489.278.035,49	180.663.903.749,47
Jumlah	**84.860.320.177,38**	**343.371.131.594,21**

Komposisi Aset Lancar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Gambar 5.3.1.1 Komposisi Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Kas dan Setara Kas yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	9.931.444.084,89	153.604.329.833,07
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	188.720.638,00
Kas Lainnya	1.316.737.455,00	2.803.372.874,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	**11.248.181.539,89**	**156.596.423.345,07**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Penerimaan Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Daerah TA 2025;
   b. Setor Sisa UP/TU/CP TA 2025 dan tahun-tahun sebelumnya;
   c. Sisa Saldo Tambahan Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan s.d. 31 Desember 2025;
   d. Sisa Saldo LS pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan s.d. 31 Desember 2025;
   e. Utang PFK TA 2024 pada Kas Lainnya yang disetorkan pada Tahun 2025;

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Pengakuan saldo Kas di Kas Daerah dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Kas di Kas Daerah dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.1 Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**153.604.329.833,07**
Penambahan Saldo Kas di Kas Daerah terhadap Neraca:	**1.815.573.445.159,10**
Penyetoran Penerimaan Pendapatan (STS)	1.812.496.098.081,10
Setor CP/Pengembalian Belanja 2025	842.183.929,00
S3TU 2025	22.345.011,00
Setor Sisa Kas Bendahara Pengeluaran 2024	188.720.638,00
Pergeseran Akun Kas Lainnya ke Akun Kas di Kas Daerah	2.000.000.000,00
Koreksi Pajak SP2D Tidak di Posting di Tahun 2025	24.097.500,00
Pengurangan Saldo Kas di Kas Daerah terhadap Neraca:	**1.959.246.330.907,28**
Pengeluaran Belanja (SP2D TU & LS)	1.959.164.616.566,28
Koreksi Saldo Kas di Kas Daerah	80.770.271,00
Koreksi Belanja Gaji dan Tunjangan di Sekretariat Daerah	944.070,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**9.931.444.084,89**

Penjelasan:

a. Rincian Pos Kas di Kas Daerah dalam Neraca diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.1a Rincian Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
BPD Papua 7000102111122 - RKUD Provinsi Papua Pegunungan	647.581.099,22	93.209.058.720,22
BPD Papua 7000102000088 - Kas Penerimaan Provinsi Papua Pegunungan	8.666.724.239,00	4.163.364.712,00
BPD Papua 7000102000033 - Kas Daerah Dana Otsus 1%	0,00	12.487.441.729,00
BPD Papua 7000102000022 - Kas Daerah Dana Otsus 1,25%	0,00	17.971.577.982,85
BPD Papua 7000102000011 - Rekening Otsus Infrastruktur	0,00	25.692.116.418,00
Bank Mandiri 1540020277111 - Otsus Provinsi Papua Pegunungan - Block Grant 1%	106.868.439,24	0,00
Bank Mandiri 1540020277137 - Otsus Provinsi Papua Pegunungan - Spesific Grant 1,25%	230.526.605,22	0,00
Bank Mandiri 1540020277145 - Otsus Provinsi Papua Pegunungan - DTI	218.533.141,59	0,00
Kas di Kas Daerah - Kelebihan Pencairan Tahun 2025 yang disetorkan melewati 31 Desember 2025	61.210.560,62	0,00
Kas di Kas Daerah - Kelebihan Pencairan Tahun 2024 yang disetorkan melewati 31 Desember 2024	0,00	80.770.271,00
Jumlah	**9.931.444.084,89**	**153.604.329.833,07**

b. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2025 beralih ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan PKS Nomor 000.4.7.2.1591/GUB tanggal 10 Juni 2025 dan dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/119/Tahun 2025 terkait penetapan nomor rekening resmi pada Bank Mandiri Cabang Wamena.

c. Penambahan saldo Kas di Kas Daerah terhadap Neraca sebesar Rp1.815.573.445.159,10 dijelaskan sebagai berikut:
   1) Penyetoran Penerimaan Pendapatan (STS) sebesar Rp1.812.496.098.081,10 merupakan Penerimaan Pendapatan Daerah;
   2) Penerimaan Pendapatan atas kelebihan penyetoran Setor Kontra Pos 2025 yang masuk di rekening RKUD sebesar Rp842.183.929,00;
   3) Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Tahun 2025 sebesar Rp22.345.011,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.1b Rincian Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU)
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	Tanggal	SKPD	Nilai (Rp)
1	08/10/2025	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	92.200,00
2	08/10/2025	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.785.810,00
3	20/10/2025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	123.285,00
4	20/10/2025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	135.000,00
5	20/10/2025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	190.000,00
6	20/10/2025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.895,00
7	20/10/2025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.638.792,00
8	20/10/2025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	119.400,00
9	21/10/2025	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	822.799,00
10	22/10/2025	Sekretariat Daerah	137.800,00
11	12/11/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	357.000,00
12	12/11/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51.000,00
13	12/11/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.122.000,00
14	12/11/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.182.000,00
15	12/11/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.633.014,00
16	12/11/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	115.000,00
17	12/11/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	225.216,00
18	12/11/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.000,00
19	12/11/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	847.200,00
20	28/11/2025	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.318.000,00
21	28/11/2025	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	247.600,00
		Jumlah	**22.345.011,00**

Berdasarkan rincian pada tabel di atas, diketahui bahwa dari total nilai S3TU yang diterbitkan pada Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp22.345.011,00, seluruh dana tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Dengan demikian, saldo sisa S3TU per tanggal tersebut adalah sebesar Rp0,00.

4) Penyetoran Sisa Kas Bendahara Pengeluaran 2024 pada tahun 2025 sebesar Rp188.720.638,00 adalah diantaranya sebagai berikut:
   a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp410.000,00;
   b) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp187.861.985,00;
   c) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah sebesar Rp448.653,00;

5) Pergeseran Akun Kas Lainnya ke Akun Kas di Kas Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan Kontra Pos atau Pengembalian Belanja SP2D LS dengan Nomor 1660/SP2D/2025 Tahun 2025 atas Pengadaan Tanah Gedung Farmasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang sudah dicatat di Kas Lainnya di tahun 2024 dan sudah disetor ke Kas Daerah di tahun 2025.

6) Telah terjadi Koreksi Pajak SP2D Tidak di Posting dengan Nomor 95.00/04.0/000488/LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/PR/12/2025 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp24.097.500,00.

d. Pengurangan Kas di Kas Daerah terhadap Neraca sebesar Rp1.959.245.386.837,28 dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengeluaran Kas di Kas Daerah atas SP2D TU & LS sebesar Rp1.959.164.616.566,28, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.1c Rincian Pengeluaran atas SP2D TU dan LS Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	TU (Rp)	LS (Rp)	Total (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	110.914.750.874,76	110.914.750.874,76
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	120.967.304.129,00	120.967.304.129,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	0,00	474.858.985.198,00	474.858.985.198,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	178.358.000,00	21.062.059.469,00	21.240.417.469,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.470.000.000,00	34.710.863.406,00	36.180.863.406,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.033.760.000,00	12.599.161.910,00	15.632.921.910,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00	32.433.116.744,00	32.433.116.744,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	0,00	10.340.102.713,00	10.340.102.713,00
9	Dinas Perhubungan	0,00	60.599.792.445,52	60.599.792.445,52
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00	20.505.065.430,00	20.505.065.430,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	51.783.639.031,00	51.783.639.031,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	4.943.002.312,00	4.943.002.312,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0,00	17.746.540.839,00	17.746.540.839,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	0,00	14.902.223.403,00	14.902.223.403,00
15	Sekretariat Daerah	0,00	315.061.295.551,00	315.061.295.551,00
16	Biro Umum	0,00	26.287.077.581,00	26.287.077.581,00
17	Biro Hukum	0,00	6.562.879.000,00	6.562.879.000,00
18	Biro Organisasi	0,00	2.683.000.000,00	2.683.000.000,00
19	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	0,00	3.359.943.550,00	3.359.943.550,00
20	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	167.018.800,00	4.387.187.260,00	4.554.206.060,00
21	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	55.025.217.000,00	55.025.217.000,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	181.685.072.770,00	181.685.072.770,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	19.797.078.707,00	19.797.078.707,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	0,00	209.464.935.465,00	209.464.935.465,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.023.446.000,00	15.250.178.094,00	18.273.624.094,00
26	Inspektorat Daerah	0,00	22.431.557.409,00	22.431.557.409,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	24.057.678.252,00	24.057.678.252,00
28	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00	76.872.325.223,00	76.872.325.223,00
	Jumlah	**7.872.582.800,00**	**1.951.292.033.766,28**	**1.959.164.616.566,28**

2) Terjadi koreksi Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp80.770.271,00 karena setoran pencairan SP2D ganda dan setoran pajak yang sudah diakui di tahun sebelumnya. Untuk rincian nya terdapat di ***Tabel 5.3.1.1.1.1d***

e. Selisih Saldo Akhir seluruh Rekening Bank Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan Akun Kas di Kas Daerah di Neraca disebabkan oleh Pencairan Ganda SP2D yang belum disetorkan s.d. 31 Desember 2025 dan Pungut Pajak bulan Desember di rekening bank Otsus 1% yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.1d Selisih Saldo Akhir Seluruh Rekening Bank Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	Tgl Transaksi	Nomor SP2D	Nilai Rekening Koran	Nilai SP2D	Setoran	Sisa	Ket
SELISIH SISA SETORAN PENCAIRAN GANDA SP2D TAHUN 2024							
1	30/12/24	95.00/04.0/000091/LS/1.02.2.14.0.0 0.01.0000/P2/12/2024		74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	Setor 14 Maret 2025 & 15 Mei 2025
POTONGAN PAJAK BULAN DESEMBER TAHUN 2024							
1	19/12/24	OB MPN 029598743008133		4.756.757,00	4.756.757,00	0,00	Setor 14 Maret 2025
2	19/12/24	OB MPN 029598743643159		1.513.514,00	1.513.514,00	0,00	Setor 14 Maret 2025
SELISIH SISA SETORAN PENCAIRAN GANDA SP2D TAHUN 2025							
1	02/06/25	0000041/LS/SEKRETARIAT MRP		115.672.018,00	115.672.018,00	0,00	Setor 3 Juni 2025
2	18/12/25	0000075/LS/DISNAKER PSDM		49.922.400,00	49.922.400,00	0,00	Setor 22 Desember 2025
3	17/10/25	- 73/LS/2025- CV ERDIN PAPUA KONSULTAN		31.210.360,00		31.210.360,00	Belum di Setor
SELISIH NILAI REKENING KORAN DENGAN NILAI SP2D TAHUN 2025							
1	16/04/25	0000008/LS/DINAS PERHUBUNGAN	19.136.986,00	19.136.985,52		0,48	Lebih Cair

No.	Tgl Transaksi	Nomor SP2D	Nilai Rekening Koran	Nilai SP2D	Setoran	Sisa	Ket
2	15/10/25	068/LS/2025 - PT VIADOLOROSA BUMI CENDRA	1.110.174.188,00	1.110.174.187,86		0,14	Lebih Cair
3	02/12/25	110/LS/2025 - DINKES P2KB	106.769.200,00	106.769.000,00		200,00	Lebih Cair
4	10/10/25	-162/LA/2025 - CV KABUA BAKI	3.477.500.000,00	3.447.500.000,00		30.000.000,00	Lebih Cair
		TOTAL KESELURUHAN				**61.210.560,62**	

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pengakuan saldo Kas di Bendahara Penerimaan dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***sama dengan*** saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.2 Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**0,00**
Penambahan Kas di Bendahara Penerimaan terhadap Neraca:		**1.812.496.098.081,10**
Penerimaan Pendapatan (TBP)	1.812.496.098.081,10	
Pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan terhadap Neraca:		**1.812.496.098.081,10**
Penyetoran Penerimaan Pendapatan (STS)	1.812.496.098.081,10	
Koreksi Saldo Kas di Bendahara Penerimaan *(Audited)*	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**0,00**

Penjelasan:

1) Pengakuan penerimaan dan penyetoran pendapatan ini ***sama dengan*** dari saldo Pendapatan Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp0,00 (Rp1.812.496.098.081,10 - Rp1.812.496.098.081,10). Rincian Penjelasan Penerimaan Pendapatan dapat dilihat pada Pos Pendapatan Daerah dalam LRA TA 2025 pada ***poin 5.1.1*** yang sudah diungkapkan kedalam Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pengakuan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, ***lebih kecil*** dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp188.720.638,00. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.3 Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**188.720.638,00**
Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran terhadap Neraca:		**1.959.164.616.566,28**
Penerimaan SP2D TU	7.872.582.800,00	
Penerimaan SP2D LS	1.951.292.033.766,28	
Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran terhadap Neraca:		**1.959.353.337.204,28**
Pengeluaran SPJ TU	7.850.237.789,00	
Pengeluaran SPJ LS	1.950.449.849.837,28	
Setoran TU 2025	22.345.011,00	
Setoran LS 2025	842.183.929,00	
Kasbend Setoran LS 2024	188.720.638,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2025		**0,00**

Penjelasan:

a. Rincian Pos Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.3a Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Uang Persediaan	0,00	188.001.985,00
Saldo Tambahan Uang Persediaan	0,00	0,00
Saldo LS Gaji	0,00	0,00
Saldo LS TPP	0,00	0,00
Saldo LS TPP - POL	0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 belum disetor	0,00	201.796.653,00
Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 ke Aset Lainnya	0,00	(201.078.000,00)
Saldo Jasa Giro pada Rek Bendahara Pengeluaran BPPKAD	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**188.720.638,00**

b. Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran terhadap Neraca sebesar Rp1.959.164.616.566,28 dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan SP2D TU sebesar Rp7.872.582.800,00 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.3b Rincian Penerimaan SP2D TU pada Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	0,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	178.358.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.470.000.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.033.760.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	0,00
9	Dinas Perhubungan	0,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	0,00
15	Sekretariat Daerah	0,00
16	Biro Umum	0,00
17	Biro Hukum	0,00
18	Biro Organisasi	0,00
19	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	0,00
20	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	167.018.800,00
21	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	0,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	0,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.023.446.000,00
26	Inspektorat Daerah	0,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00
28	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00
	Jumlah	**7.872.582.800,00**

2) Penerimaan SP2D LS sebesar Rp1.951.292.033.766,28 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.3c Rincian Penerimaan SP2D LS pada Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	110.914.750.874,76
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	120.967.304.129,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	474.858.985.198,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	21.062.059.469,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	34.710.863.406,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	12.599.161.910,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	32.433.116.744,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	10.340.102.713,00
9	Dinas Perhubungan	60.599.792.445,52
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	20.505.065.430,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	51.783.639.031,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.943.002.312,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	17.746.540.839,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	14.902.223.403,00
15	Sekretariat Daerah	315.061.295.551,00
16	Biro Umum	26.287.077.581,00
17	Biro Hukum	6.562.879.000,00
18	Biro Organisasi	2.683.000.000,00
19	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	3.359.943.550,00
20	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	4.387.187.260,00
21	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	55.025.217.000,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	181.685.072.770,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	19.797.078.707,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	209.464.935.465,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.250.178.094,00
26	Inspektorat Daerah	22.431.557.409,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	24.057.678.252,00
28	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	76.872.325.223,00
	Jumlah	**1.951.292.033.766,28**

c. Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran terhadap Neraca sebesar Rp92.212.540.450,00 dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengeluaran SPJ TU sebesar Rp7.850.237.789,00 adalah Pertanggungjawaban Belanja Nihil yang tidak menyebabkan penerimaan kembali pada Kas di Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.3d Rincian Pengeluaran SPJ TU Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	0,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	178.358.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.465.791.628,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.027.493.591,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	0,00
9	Dinas Perhubungan	0,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	0,00
15	Sekretariat Daerah	0,00
16	Biro Umum	0,00

No.	SKPD	Nilai (Rp)
17	Biro Hukum	0,00
18	Biro Organisasi	0,00
19	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	0,00
20	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	166.881.000,00
21	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	0,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	0,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.011.713.570,00
26	Inspektorat Daerah	0,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00
28	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00
	Jumlah	**7.850.237.789,00**

2) Pengeluaran SPJ LS sebesar Rp1.950.449.849.837,28 adalah Pertanggungjawaban Belanja Nihil yang tidak menyebabkan penerimaan kembali pada Kas di Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.3e Rincian Pengeluaran SPJ LS
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	110.912.481.560,76
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	120.967.304.129,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	474.858.880.198,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	21.062.059.469,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	34.710.863.406,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	12.599.161.910,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	32.410.289.794,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	10.335.457.687,00
9	Dinas Perhubungan	60.531.787.150,52
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	20.505.065.430,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	51.772.726.231,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.943.002.312,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	17.746.540.839,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	14.901.065.353,00
15	Sekretariat Daerah	315.061.295.551,00
16	Biro Umum	26.287.077.581,00
17	Biro Hukum	6.562.879.000,00
18	Biro Organisasi	2.683.000.000,00
19	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	3.358.943.750,00
20	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	4.379.777.260,00
21	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	55.025.217.000,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	181.680.603.628,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	19.560.440.965,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	209.464.935.465,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.840.764.183,00
26	Inspektorat Daerah	22.425.133.874,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	24.057.678.252,00
28	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	76.805.417.859,00
	Jumlah	**1.950.449.849.837,28**

3) Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp22.345.011,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.3e Rincian Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	Tanggal	SKPD	Nilai (Rp)
1	08/10/25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	92.200,00

No.	Tanggal	SKPD	Nilai (Rp)
2	08/10/25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.785.810,00
3	20/10/25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	123.285,00
4	20/10/25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	135.000,00
5	20/10/25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	190.000,00
6	20/10/25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.895,00
7	20/10/25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.638.792,00
8	20/10/25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	119.400,00
9	21/10/25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	822.799,00
10	22/10/25	Sekretariat Daerah	137.800,00
11	12/11/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	357.000,00
12	12/11/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51.000,00
13	12/11/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.122.000,00
14	12/11/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.182.000,00
15	12/11/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.633.014,00
16	12/11/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	115.000,00
17	12/11/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	225.216,00
18	12/11/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.000,00
19	12/11/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	847.200,00
20	28/11/25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.318.000,00
21	28/11/25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	247.600,00
		Jumlah	**22.345.011,00**

4) Penyetoran Sisa Uang Belanja Langsung Tahun 2025 sebesar Rp842.183.929,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.3f Rincian Penyetoran Sisa Uang Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	Tanggal	SKPD	Nilai (Rp)
1	18/02/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	331.359,00
2	18/02/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.933.980,00
3	17/03/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	133.212,00
4	18/03/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1.660,00
5	18/03/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	14.694.120,00
6	18/03/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	5.775.000,00
7	18/03/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	9.190.000,00
8	18/03/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	14.708.920,00
9	18/03/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	150.175.600,00
10	18/03/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	3.367.024,00
11	26/03/25	Dinas Perhubungan	559.950,00
12	27/03/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	9.331.805,00
13	27/03/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	17.400.000,00
14	27/03/25	Dinas Perhubungan	3.280.797,00
15	10/04/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.360,00
16	02/05/25	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	66.907.364,00
17	02/06/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.100.000,00
18	02/06/25	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.134.657,00
19	02/06/25	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.134.657,00
20	04/06/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	705.000,00
21	10/06/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	70.000,00
22	19/06/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	134.100,00
23	04/07/25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.469.142,00
24	04/07/25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	4.645.026,00
25	04/07/25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	10.912.800,00
26	24/07/25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	406.000.000,00
27	07/08/25	Dinas Perhubungan	39.279.279,00
28	08/08/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	1.696.475,00

No.	Tanggal	SKPD	Nilai (Rp)
29	03/09/25	Inspektorat Daerah	6.423.535,00
30	16/09/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	6.881.292,00
31	07/10/25	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	999.800,00
32	08/10/25	Dinas Perhubungan	13.085.269,00
33	08/10/25	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	105.000,00
34	17/10/25	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	1.158.050,00
35	17/10/25	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	7.410.000,00
36	20/10/25	Dinas Perhubungan	300.000,00
37	24/10/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	3.550.423,00
38	11/11/25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.828.922,00
39	13/11/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	3.646.250,00
40	13/11/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	3.646.250,00
41	13/11/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	3.646.250,00
42	13/11/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	3.646.250,00
43	13/11/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	555.000,00
44	02/12/25	Dinas Perhubungan	11.500.000,00
45	19/12/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	1.680.000,00
46	19/12/25	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	34.351,00
		Jumlah	**842.183.929,00**

5) Penyetoran Sisa Kas Bendahara Tahun 2024 sebesar 188.720.638,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.3.1.1.1.3g Rincian Penyetoran Sisa Kas Bendahara 2024
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	Tanggal	SKPD	Nilai (Rp)
1	15/01/25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	410.000,00
2	03/03/25	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	187.591.985,00
3	14/05/25	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	270.000,00
4	11/06/25	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	448.653,00
		Jumlah	**188.720.638,00**

5.3.1.1.1.4 Kas Lainnya

Pengakuan Kas Lainnya dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.316.737.455,00 ***lebih kecil*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Kas Lainnya dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.4 Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Kas Lainnya
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**2.803.372.874,00**
Penambahan Kas Lainnya terhadap Neraca:		**1.316.737.455,00**
Pengembalian Belanja yang disetor di Tahun 2026	1.030.930.342,00	
Pengakuan Utang PFK 2025	285.807.113,00	
Pengurangan Kas Lainnya terhadap Neraca:		**2.803.372.874,00**
Penyetoran CP 2025 ke Kas Daerah	2.000.000.000,00	
Penyetoran Saldo Utang PFK 2024	803.372.874,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**1.316.737.455,00**

Penjelasan:

1) Penambahan Kas Lainnya terhadap Neraca sebesar Rp1.316.737.455,00 karena pengembalian belanja yang di setor di tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.000.000,00;
   b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebesar Rp167.412,00;
   c. Dinas Perhubungan sebesar Rp26.851.930,00;
   d. Sekretariat Daerah Sebesar Rp2.911.000,00;
   e. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.000.000.000,00;

f. Pengakuan Utang PFK sebesar Rp285.807.113,00.

2) Pengurangan Kas Lainnya terhadap Neraca sebesar Rp2.775.817.278,00 adalah dijelaskan sebagai berikut:
   a. Penyetoran Kontra Pos Tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00;
   b. Penyetoran Saldo Utang PFK Tahun 2024 sebesar Rp803.372.874,00.

Rincian atas Kas Lainnya Pengeluaran ini disajikan dalam Lampiran 5.3.1.1.1.4.

5.3.1.1.1.5 Setara Kas

Pengakuan Setara Kas dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***sama*** dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Piutang Pajak Daerah oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Pengakuan Piutang Pajak Daerah dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***sama*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Piutang Pajak Daerah, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.2a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**0,00**
Penambahan Piutang Pajak Daerah terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	0,00
Pengurangan Piutang Pajak Daerah terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**0,00**

5.3.1.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	122.860.602,00	5.973.291.499,67
Jumlah	**122.860.602,00**	**5.973.291.499,67**

Penjelasan:

1) Perubahan nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp122.860.602,00. Hal ini menunjukkan adanya

penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp5.973.291.499,67. Saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp122.860.602,00 tersebut merupakan piutang yang bersumber dari Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan rincian terdiri dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp79.684.602,00, pembayaran biaya uang harian panitia perjalanan dinas dalam daerah yang tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp12.000.000,00, serta kekurangan volume pekerjaan pembangunan drainase Tolikara pada Dinas PUPR untuk Paket 2 sebesar Rp5.436.000,00, Paket 3 sebesar Rp5.614.000,00, dan Paket 5 sebesar Rp20.126.000,00.

Rincian atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah ini disajikan dalam Lampiran 5.3.1.1.3.

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban dibayar dimuka oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	137.513.000,00
Jumlah	**0,00**	**137.513.000,00**

Penjelasan:

1. Pengakuan Beban dibayar dimuka dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih sedikit*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban dibayar dimuka, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.4a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2024		**137.513.000,00**
Penambahan Beban Dibayar Dimuka terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Pengurangan Beban Dibayar Dimuka terhadap Neraca:		**137.513.000,00**
Terdapat pembayaran Biaya Hidup kepada Mahasiswa SUP Melebihi Standar Biaya yang telah ditetapkan TA 2024 yang dijadikan Beban Dibayar Dimuka tahun 2025	137.513.000,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**0,00**

Rincian atas Beban Dibayar Dimuka ini disajikan dalam Lampiran 5.3.1.1.4.

5.3.1.1.5 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Persediaan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.5 Persediaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Persediaan	73.489.278.035,49	180.663.903.749,47
Jumlah	**73.489.278.035,49**	**180.663.903.749,47**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya diantaranya diuraikan sebagai berikut:

a. Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Hibah dari Kementerian Kesehatan dan Reklasifikasi Aset Tetap yang menjadi Persediaan;
b. Pemakaian Saldo Persediaan 2025
c. Pengurangan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap.

2. Pengakuan Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Persediaan, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.5a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Persediaan
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**180.663.903.749,47**
Penambahan Persediaan terhadap Neraca:		**219.108.882.713,26**
Reklasifikasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang menjadi Persediaan	426.881.363,50	
Penambahan Persediaan dari Belanja Barang dan Jasa	165.489.863.980,00	
Penambahan Persediaan dari Belanja Hibah	23.268.487.969,76	
Penambahan Persediaan dari Hibah Kementrian Kesehatan	29.923.649.400,00	
Pengurangan Persediaan terhadap Neraca:		**326.283.508.427,24**
Pemakaian Persediaan TA 2025	240.768.095.277,24	
Persediaan yang Reklasifikasi ke Aset Tetap - Tanah	2.275.630.000,00	
Persediaan yang Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	663.600.000,00	
Persediaan yang Reklasifikasi ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	1.423.900.000,00	
Persediaan yang Reklasifikasi ke Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.887.407.000,00	
Persediaan yang Reklasifikasi ke Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.039.011.340,00	
Temuan Kurang Volume Pada Persediaan	742.104.810,00	
Temuan Pemeriksaan Pada Persediaan	7.483.760.000,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**73.489.278.035,49**

Penjelasan:

a. Penambahan Persediaan terhadap Neraca sebesar Rp219.108.882.713,26, dijelaskan sebagai berikut:
   1. Reklasifikasi Aset Tetap TA 2025 yang menjadi Persediaan sebesar Rp426.881.363,50, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.5b Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Persediaan pada masing-masing SKPD
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	104.500.000,00
2	Sekretariat Daerah	245.100.000,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	77.281.363,50
	Jumlah	**426.881.363,50**

   2. Penambahan Persediaan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp165.489.863.980,00;
   3. Penambahan Persediaan dari Belanja Hibah sebesar Rp23.268.487.969,76 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
   4. Penambahan Persediaan dari Hibah Kementrian Kesehatan sebesar Rp29.923.649.400,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Rincian atas Hibah dari Kementrian Kesehatan ini disajikan dalam Lampiran 5.3.1.1.5a

b. Pengurangan Persediaan terhadap Neraca sebesar Rp326.283.508.427,24, dijelaskan sebagai berikut:
   1. Pengurangan Persediaan terhadap Neraca sebesar Rp326.283.508.427,24 merupakan Pemakaian persediaan Tahun 2025 dengan rincian OPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.5c Pemakaian Persediaan per SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37.598.375.753,96
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	87.664.770.396,78
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	59.681.634.300,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	293.062.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	22.738.797.000,00

No.	SKPD	Nilai (Rp)
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	718.686.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	1.950.052.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	679.697.000,00
9	Dinas Perhubungan	17.295.595.040,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	397.889.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	5.704.330.810,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	275.679.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	502.205.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	7.698.615.923,00
15	Sekretariat Daerah	21.952.103.874,00
16	Biro Umum	7.025.918.693,00
17	Biro Hukum	2.225.039.000,00
18	Biro Organisasi	273.658.000,00
19	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	218.871.550,00
20	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	273.645.000,00
21	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	9.428.103.000,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.606.470.413,50
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1.000.115.945,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	23.848.092.513,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	678.089.880,00
26	Inspektorat Daerah	668.786.335,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.371.755.000,00
28	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	513.470.000,00
	Jumlah	**326.283.508.427,24**

c. Rincian Akun Persediaan s.d 31 Desember 2025 sebesar Rp180.663.903.750,05, adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.5d Jenis Persediaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	Nama OPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.497.810.841,80
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bahan Cetak	223.884.600,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	26.204.737.260,00
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	2.934.081.416,00
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Natura	2.662.753.727,69
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	492.345.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	190.545.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Bahan Cetak	115.430.000,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Bahan Komputer	149.600.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	72.000.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	181.745.190,00
12	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	199.350.000,00
13	Biro Umum	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	15.116.880.000,00
14	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	23.448.115.000,00
	Jumlah		**73.489.278.035,49**

Rincian Per Barang atas Persediaan ini disajikan dalam Lampiran 5.3.1.1.5b

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan penempatan dana yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan tidak memiliki investasi jangka panjang non permanen. Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, namun ditempatkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo investasi jangka panjang permanen per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan tidak memiliki investasi jangka panjang permanen. Investasi jangka panjang permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan guna mendukung tujuan strategis pemerintah daerah dalam jangka panjang.

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Aset Tetap yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3 Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	129.644.632.000,00	78.564.500.000,00
Peralatan dan Mesin	106.405.636.948,22	82.126.438.624,88
Gedung dan Bangunan	199.004.198.246,50	55.599.517.613,50
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.949.692.374.543,98	2.302.379.548.278,98
Aset Tetap Lainnya	321.765.215.301,57	290.332.073.261,57
Konstruksi Dalam Pengerjaan	483.443.390.360,88	376.021.703.926,88
Akumulasi Penyusutan	(1.606.510.505.925,14)	(1.299.117.734.281,57)
Jumlah	**2.583.444.941.476,01**	**1.885.906.047.424,24**

Rincian atas Aset Tetap ini disajikan dalam Lampiran 5.3.1.3.

5.3.1.3.1 Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Aset Tetap Tanah oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah Persil	129.644.632.000,00	74.865.000.000,00
Tanah Lapangan	0,00	3.699.500.000,00
Jumlah	**129.644.632.000,00**	**78.564.500.000,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Tanah per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya disebabkan hal-hal berikut:
   a. Pengadaan Aset Tanah Tahun 2025
   b. Hibah Aset Tanah P3D Tahun 2025
   c. Penambahan dari Beban Barang dan Jasa
   d. Penambahan dari Persediaan
2. Pengakuan Aset Tetap Tanah dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.1a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Tanah
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**78.564.500.000,00**
Penambahan Aset Tetap Tanah terhadap Neraca:		**54.580.132.000,00**
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025	11.500.000.000,00	
Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2025	36.602.655.000,00	
Hibah Aset Tanah P3D Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya	4.201.847.000,00	
Reklasifikasi dari Persediaan	2.275.630.000,00	
Pengurangan Aset Tetap Tanah terhadap Neraca:		**(3.500.000.000,00)**
Reklasifikasi Aset Tanah ke Aset Jalan, Jaringan dan irigasi	(3.500.000.000,00)	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**129.644.632.000,00**

Penjelasan:

a. Penambahan Aset Tetap Tanah terhadap Neraca sebesar Rp54.580.132.000,00, adalah dijelaskan sebagai berikut:

   1. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 sebesar Rp11.500.000.000,00 yang terdiri dari:
      a) Pengadaan Tanah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Gunung Susu sebesar Rp11.500.000.000,00 yang direalisasikan pada SKPD sebagai berikut:
         1) Realisasi Pengadaan Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan sebesar Rp11.500.000.000,00;

   2. Hibah Aset Tanah P3D Provinsi Papua sebesar Rp 4.201.847.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
      a) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan untuk Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp 3.000.000.000,00 hibah dari Kabupaten Jayawijaya;
      b) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah atas aset Tanah Lainnya dan Tanah Bangunan Perumahan Rp 1.201.847.000,00;

   3. Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2025 sebesar Rp36.602.655.000,00 dengan merupakan Belanja barang dan jasa untuk Pematangan Lahan KIPP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Pengurangan Aset Tetap Tanah terhadap Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.500.000.000,00 yang merupakan Reklasifikasi Aset Tanah ke Aset Jalan, Jaringan dan irigasi.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2 Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Alat Besar		
Alat Bantu	99.819.580,00	40.627.580,00
Alat Angkutan		
Alat Angkutan Darat Bermotor	46.978.524.567,20	39.788.736.115,73
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12.200.000,00	7.020.000,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	1.440.737.792,00	0,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur		
Alat Ukur	473.600.000,00	123.600.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga		

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Alat Kantor	5.469.933.302,00	3.935.334.302,00
Alat Rumah Tangga	22.995.263.837,84	9.126.472.987,34
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.139.271.200,02	1.014.396.200,02
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		
Alat Studio	3.796.265.250,00	3.681.038.400,00
Alat Komunikasi	137.112.000,00	137.112.000,00
Peralatan Pemancar	53.799.743,75	75.996.743,75
Alat Kedokteran dan Kesehatan		
Alat Kedokteran	2.295.773.575,00	2.291.334.685,00
Alat Kesehatan Umum	397.000.000,00	397.000.000,00
Alat Laboratorium		
Unit Alat Laboratorium	2.344.685.555,00	2.465.424.355,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	12.450.000,00	86.187.400,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	379.260.000,00	379.260.000,00
Alat Persenjataan		
Senjata Api	35.000.000,00	35.000.000,00
Alat Khusus Kepolisian	9.000.000,00	9.000.000,00
Komputer		
Komputer Unit	13.851.879.996,91	14.614.129.423,58
Peralatan Komputer	4.298.752.548,50	3.451.970.432,46
Alat Eksplorasi		
Alat Eksplorasi Topografi	23.088.000,00	23.088.000,00
Alat Keselamatan Kerja		
Alat Pelindung	76.720.000,00	65.410.000,00
Alat Kerja Penerbangan	11.000.000,00	11.000.000,00
Alat Peraga		
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	292.800.000,00
Peralatan Proses/Produksi		
Unit Peralatan Proses/Produksi	5.000.000,00	5.000.000,00
Rambu-rambu		
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	69.500.000,00	69.500.000,00
JUMLAH	**106.405.636.948,22**	**82.126.438.624,88**

Penjelasan:

1) Perubahan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya disebabkan hal-hal berikut:
   a. Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal SKPD Tahun 2025;
   b. Hibah P3D Aset Peralatan dan Mesin P3D Provinsi Papua;
   c. Reklasifikasi yang dari Persediaan dikembalikan lagi di Aset 2025;
   d. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin yang menjadi Belanja Barang dan Jasa-Aset *Extracomptable*; dan
   e. Reklasifikasi Aset Peralatan & Mesin yang menjadi Persediaan 2025.

2) Pengakuan Peralatan dan Mesin dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**82.126.438.624,88**
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin terhadap Neraca:		**32.949.251.553,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	22.266.044.949,00	
Hibah Aset P3D dari Pemerintah Provinsi Papua	730.703.518,00	
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	944.019.036,00	
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	8.344.884.050,00	
Reklasifikasi Persediaan ke Peralatan dan Mesin	663.600.000,00	
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin terhadap Neraca:		**8.670.053.229,66**
Aset Peralatan dan Mesin yang Masuk Persediaan	426.881.363,50	
Aset Extracomptable Tahun 2025	654.659.958,00	
Aset Peralatan dan Mesin di Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	3.881.199.408,16	
Aset Peralatan dan Mesin yang Dihibahkan	3.684.537.000,00	
Aset Peralatan dan Mesin yang menjadi Defisit Non Operasional 2025	22.775.500,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**106.405.636.948,22**

1. Alat Besar

Pengakuan Alat Besar dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***sama*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Alat Besar dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2b Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Besar
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**40.627.580,00**
Penambahan Alat Besar terhadap Neraca:		**59.192.000,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 - Alat Besar	59.192.000,00	
Pengurangan Alat Besar terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**99.819.580,00**

Penjelasan:

a. Tidak ada Penambahan Alat Angkutan terhadap Neraca Tahun 2025.

2. Alat Angkutan

Pengakuan Alat Angkutan dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Alat Angkutan dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2c Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**39.795.756.115,75**
Penambahan Alat Angkutan terhadap Neraca:		**8.871.523.892,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 - Alat Angkutan	7.603.109.792,00	
Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2025	5.550.000,00	
Reklasifikasi dari Persediaan	663.600.000,00	
Hibah dari P3D	599.264.100,00	
Pengurangan Alat Angkutan terhadap Neraca:		**218.692.648,53**
Reklasidikasi Aset Peralatan Mesin – Aset Lain-lain	218.692.648,53	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**48.448.587.359,22**

Penjelasan:

a. Penambahan Alat Angkutan terhadap Neraca sebesar Rp7.603.109.792,00, dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Tahun 2025 pada SKPD sebesar Rp7.603.109.792,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2d Rincian Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.040.397.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	6.650.000,00
3	Dinas Perhubungan	794.262.792,00
4	Sekretariat Daerah	5.592.600.000,00
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.040.397.000,00
	Jumlah	**7.603.109.792,00**

2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Tahun 2025 sebesar Rp5.550.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Reklasifikasi dari Persediaan ke Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Tahun 2025 sebesar Rp663.600.000,00 pada Dinas Perhubungan.
4. Hibah Aset Tanah P3D Provinsi Papua sebesar Rp599.264.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah sebesar Rp522.744.100,00
   b) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp76.520.000,00

b. Pengurangan Alat Angkutan terhadap Neraca sebesar Rp27.672.648,53 dengan rincian sebagai berikut:
   1. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke aset lain-lain di tahun 2025 sebesar Rp218.692.648,53.

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Pengakuan Alat Bengkel dan Alat Ukur dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Alat Bengkel dan Alat Ukur dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2e Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**123.600.000,00**
Penambahan Alat Bengkel dan Alat Ukur terhadap Neraca:		**350.000.000,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 - Alat Bengkel dan Alat Ukur	350.000.000,00	
Pengurangan Alat Bengkel dan Alat Ukur terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**473.600.000,00**

Penjelasan:

Penambahan Alat Bengkel dan Alat Ukur terhadap Neraca sebesar Rp350.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Alat Pertanian

Pengakuan Alat Pertanian dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Alat Pertanian dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2f Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**0,00**
Penambahan Alat Pertanian terhadap Neraca:	**550.400.000,00**

Uraian	Nilai (Rp)	
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 - Alat Pertanian	550.400.000,00	
Pengurangan Alat Pertanian terhadap Neraca:		**550.400.000,00**
Reklasifikasi Aset ke Hibah	445.900.000,00	
Reklasifikasi Aset ke Persediaan	104.500.000,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**0,00**

Penjelasan:

a. Penambahan Alat Pertanian terhadap Neraca sebesar Rp550.400.000,00 adalah Realisasi Belanja Modal SKPD Tahun 2025.

b. Pengurangan Alat Pertanian terhadap Neraca sebesar Rp550.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Hibah Masyarakat di tahun 2025 sebesar Rp445.900.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral.

2. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan di tahun 2025 sebesar Rp104.500.000,00 pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan.

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Pengakuan Alat Kantor dan Rumah Tangga dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2g Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**14.076.203.488,75**
Penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga terhadap Neraca:		**15.087.028.277,24**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	6.262.387.163,24	
Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua	131.439.418,00	
Reklasifikasi Aset dari Gedung dan Bangunan	762.257.646,00	
Reklasifikasi Aset dari Belanja Barang dan Jasa	7.930.944.050,00	
Pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga terhadap Neraca:		**1.923.163.263,50**
Aset *Extracomptable 2025*	258.931.900,00	
Reklasifikasi Aset ke Persediaan	322.381.363,50	
Reklasifikasi Aset ke Aset Lain-Lain	1.341.850.000,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**27.240.068.502,49**

Penjelasan:

a. Penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga terhadap Neraca sebesar Rp15.087.028.277,24 adalah terdiri dari:

1) Realisasi Belanja Modal pada SKPD sebesar Rp6.262.387.163,24; dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2h Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14.487.000,00
2	Dinas Perhubungan	88.830.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.345.320.000,00
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.000.000,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	66.550.000,00

No.	SKPD	Nilai (Rp)
6	Sekretariat Daerah	424.000.000,00
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.899.325.163,24
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	374.900.000,00
9	Inspektorat Daerah	24.975.000,00
	Jumlah	**6.262.387.163,24**

2) Hibah P3D dari Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp131.439.418,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan sebesar Rp97.631.723,00 dan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp33.807.695,00;

3) Reklasifikasi Aset dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp762.257.646,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

4) Reklasifikasi Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.930.944.050,00 pada Inspektorat Daerah sebesar Rp54.945.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp7.462.379.050,00, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp13.620.000,00, dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan sebesar Rp400.000.000,00.

b. Pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga terhadap Neraca sebesar Rp1.923.163.263,50 adalah Terdiri dari:

1) Aset *Extracomptable* sebesar Rp258.931.900,00 pada Inspektorat sebesar Rp11.100.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp120.000.000,00, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp6.660.000,00, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp119.325.000,00, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.846.900,00;

2) Reklasifikasi Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Persediaan sebesar Rp322.381.363,50 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2450.100.000,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp77.281.363,50;

3) Reklasifikasi Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.341.850.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.750.000,00, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.500.000,00, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik sebesar Rp1.330.200.000,00.

6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Pengakuan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2i Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**3.894.147.143,75**
Penambahan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terhadap Neraca:		**4.407.834.716,76**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4.400.064.716,76	
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	7.770.000,00	
Pengurangan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terhadap Neraca:		**3.285.506.150,00**
Aset Extracomptable 2025	14.818.500,00	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Hibah	3.078.197.000,00	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain	174.010.650,00	
Aset Peralatan dan Mesin yang menjadi Defisit Non Operasional 2025	18.480.000,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**5.016.475.710,51**

Penjelasan:

a. Penambahan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terhadap Neraca sebesar Rp4.407.834.716,76 adalah terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2025 sebesar Rp4.400.064.716,76 pada SKPD, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2j Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	72.500.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	2.797.000.000,00
3	Sekretariat Daerah	496.996.000,00
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	974.376.716,76
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	59.192.000,00
	Jumlah	**4.400.064.716,76**

2. Reklasifikasi gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan Mesin - *Peralatan Cetak* sebesar Rp7.770.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Pengurangan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terhadap Neraca sebesar Rp3.285.506.150,00 adalah terdiri dari:

1. Aset *Extracomptable* sebesar Rp14.818.500,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Reklasifikasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke Hibah Masyarakat sebesar Rp3.078.197.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.797.000.000,00, dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung sebesar Rp281.197.000,00;
3. Reklasifikasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke Aset Lain-lain sebesar Rp174.010.650,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.010.650,00 dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp168.000.000,00
4. Aset Peralatan dan Mesin yang menjadi Defisit Non Operasional sebesar Rp18.480.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

7. Alat Kedokteran dan Kesehatan

Pengakuan Alat Kedokteran dan Kesehatan dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.692.773.575,00 atau ***bertambah*** Rp4.438.890,00 dari saldo per 31 Desember 2024.

8. Alat Laboratorium

Pengakuan Alat Laboratorium dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Alat Laboratorium, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2k Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**2.930.871.755,00**
Penambahan Alat Laboratorium terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Pengurangan Alat Laboratorium terhadap Neraca:		**194.476.200,00**
Reklasifikasi Aset Perlatan dan Mesin ke Aset Lain-lain	194.476.200,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2025		**2.736.395.555,00**

Penjelasan:

a. Pengurangan Alat Laboratorium terhadap Neraca sebesar Rp194.476.200,00 terdiri dari:

1) Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain pada opd Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp191.226.200,00;
2) Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.250.000,00.

9. Alat Persenjataan

Pengakuan Alat Persenjataan dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.000.000,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2024.

10. Komputer

Pengakuan Komputer dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Komputer, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2l Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Komputer Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**18.066.099.856,63**
Penambahan Komputer terhadap Neraca:		**3.622.038.277,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 - Komputer	3.088.773.277,00	
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	413.940.000,00	
Reklasifikasi dari Aset Bangunan Gedung Ke Aset Peralatan dan Mesin	119.325.000,00	
Pengurangan Komputer terhadap Neraca:		**2.160.337.467,63**
Aset Extracomptable 2025	336.232.058,00	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin Ke Hibah	160.440.000,00	
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain	1.659.369.909,63	
Aset Peralatan dan Mesin yang menjadi Defisit Non Operasional 2025	4.295.500,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**19.527.800.666,00**

Penjelasan:

a. Penambahan Komputer dalam Neraca sebesar Rp3.622.038.277,00 adalah terdiri dari:

1) Realisasi Belanja Modal SKPD Tahun 2025 sebesar Rp3.088.773.277,00 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2m Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin-Komputer pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	51.500.000,00
2	Dinas Perhubungan	3.250.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.461.707.157,00
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.800.000,00
5	Sekretariat Daerah	1.399.736.120,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	25.780.000,00
	Jumlah	**3.088.773.277,00**

2) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp413.940.000,00 pada Inspektorat Daerah sebesar Rp100.000.000,00 dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung sebesar Rp 389.420.000,00.

3) Reklasifikasi dari Aset Bangunan Gedung Ke Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp119.325.000,00

b. Pengurangan Komputer dalam Neraca sebesar Rp1.690.402.129,63 adalah terdiri dari:

1) Aset *Extracomptable* sebesar Rp 336.232.058,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp36.354.720,00 dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik sebesar Rp299.877.338,00;

2) Reklasifikasi Ke Hibah Masyarakat sebesar Rp160.440.000,00 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung;
3) Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain sebesar Rp 1.659.369.909,63 adalah terdiri dari:
   1. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah sebesar Rp202.962.882,96
   2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp33.072.666,67
   3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp20.500.000,00
   4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp56.378.860,00
   5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp48.740.000,00
   6. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan sebesar Rp42.968.000,00
   7. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp59.500.000,00
   8. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp15.500.000,00
   9. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.013.985.000,00
   10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik sebesar Rp165.762.500,00

11. Alat Eksplorasi

Pengakuan Eksplorasi dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***sama dengan*** dari saldo per 31 Desember 2024. yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2n Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi
Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**23.088.000,00**
Penambahan Komputer terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Pengurangan Komputer terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**23.088.000,00**

12. Alat Keselamatan Kerja

Pengakuan Alat Keselamatan Kerja dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Alat Keselamatan Kerja, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2o Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja
Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**76.410.000,00**
Penambahan Alat Keselamatan Kerja terhadap Neraca:		**11.310.000,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 - Alat Keselamatan Kerja	11.310.000,00	
Pengurangan Alat Keselamatan Kerja terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**87.720.000,00**

Penjelasan:

a. Penambahan Alat Keselamatan Kerja dalam Neraca sebesar Rp11.310.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

13. Alat Peraga

Pengakuan Alat Peraga terhadap Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Alat Peraga, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2p Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Alat Peraga
Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**292.800.000,00**
Penambahan Alat Peraga terhadap Neraca:	**0,00**

Uraian	Nilai (Rp)
Nihil	0,00
Pengurangan Alat Peraga terhadap Neraca:	**292.800.000,00**
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	292.800.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**0,00**

Penjelasan:

a. Penambahan Alat Peraga dalam Neraca sebesar Rp0,00.
b. Pengurangan Alat Peraga dalam Neraca sebesar Rp292.800.000,00 karena Aset di Reklasifikasi ke Aset Lain-lain pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

14. Peralatan Proses/Produksi

Pengakuan Peralatan Proses/Produksi terhadap Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.000.000,00 ini sama dengan dari saldo per 31 Desember 2024. Penambahan Peralatan Proses/Produksi dalam Neraca sebesar Rp44.677.500,00 yang merupakan reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin – *Pallet* pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pengurangan Peralatan Proses/Produksi dalam Neraca sebesar Rp44.677.500,00 yang merupakan Aset *Extracomptable* pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

15. Rambu-rambu

Pengakuan Alat Rambu-rambu terhadap Neraca per 31 Desember 2025 ini ***sama dengan*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Alat Peraga, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.2q Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**69.500.000,00**
Penambahan Alat Peraga terhadap Neraca:	**0,00**
Nihil	0,00
Pengurangan Alat Peraga terhadap Neraca:	**0,00**
Nihil	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**69.500.000,00**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.3 Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bangunan Gedung	180.536.089.746,50	50.524.257.613,50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	18.468.108.500,00	5.075.260.000,00
Jumlah	**199.004.198.246,50**	**55.599.517.613,50**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya disebabkan hal-hal berikut:
   a. Pembangunan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Belanja Modal SKPD Tahun 2025;
   b. Reklasifikasi antar Aset Tetap;
   c. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa;
   d. Reklasifikasi Aset Tetap dari Persediaan;
   e. Utang Aset Gedung dan Bangunan;

f. Hibah Aset Gedung Bangunan P3D Pemerintah Provinsi Papua;
g. Pembayaran Utang Aset Gedung dan Bangunan;
h. Aset Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Pihak Lain;
i. Aset *Extracomptable.*

2. Pengakuan Gedung dan Bangunan dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.3a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**55.599.517.613,50**
Penambahan Gedung dan Bangunan terhadap Neraca:	**145.020.673.369,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	10.311.158.200,00
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa	6.445.378.500,00
Reklasifikasi Gedung dan Bangunan dari JIJ	10.560.000.000,00
Utang Aset Gedung dan Bangunan	3.872.085.000,00
Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua	112.103.279.669,00
Hibah Lainnya dari Kabupaten Jayawijaya	304.872.000,00
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan dari Persediaan	1.423.900.000,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan terhadap Neraca:	**1.615.992.736,00**
Aset *Extracomptable* 2025	14.987.500,00
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	944.019.036,00
Pembayaran Utang Aset 2024	626.243.200,00
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain Lainnya	30.743.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**199.004.198.246,50**

3. Bangunan Gedung

Pengakuan Bangunan Gedung dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Bangunan Gedung, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.3b Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**50.524.257.613,50**
Penambahan Bangunan Gedung terhadap Neraca:	**130.970.838.669,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 - Bangunan Gedung	5.796.315.000,00
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan dari JIJ	10.560.000.000,00
Utang Aset Gedung dan Bangunan	398.685.000,00
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan dari Persediaan	1.423.900.000,00
Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua	112.103.279.669,00
Hibah lainnya	184.872.000,00
Reklasifikasi Belanja Barang dan jasa	503.787.000,00
Pengurangan Bangunan Gedung terhadap Neraca:	**959.006.536,00**
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	944.019.036,00
Aset *Extracomptable* 2025	14.987.500,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**180.536.089.746,50**

Penjelasan:

a. Penambahan Bangunan Gedung terhadap Neraca sebesar Rp130.572.153.669,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Realisasi Belanja Modal SKPD Tahun 2025 sebesar Rp5.796.315.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.3c Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.061.250.000,00
2	Dinas Perhubungan	4.735.065.000,00
	Jumlah	**5.796.315.000,00**

   2) Reklasifikasi Belanja barang dan jasa-Aset Gedung dan Bangunan Kesehatan sebesar Rp503.787.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 353.750.000,00 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp150.037.000,00.
   3) Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp10.560.000.000,00 pada Dinas Perhubungan.
   4) Utang Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp398.685.000,00 pada Pembangunan Shelter Penumpang Kabupaten Tolikara di Dinas Perhubungan sebesar Rp199.325.000,00 dan Pembangunan Shelter di Kabupaten Lani Jaya di Dinas Perhubungan Rp199.360.000,00
   5) Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan dari Persediaan sebesar Rp1.423.900.000,00 pada Dinas Perhubungan.
   6) Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2025 sebesar Rp112.103.279.669,00 dengan rincian sebagai berikut:
      a) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1.094.465.000,00;
      b) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Sebesar Rp 4.997.402.000,00;
      c) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan Sebesar Rp592.620.930,00; dan
      d) Dinas Perhubungan sebesar Rp105.418.791.739,00.
   7) Hibah lainnya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Sebesar Rp184.872.000,00.

b. Pengurangan Bangunan Gedung terhadap Neraca sebesar Rp959.006.536,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp944.019.036,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; dan
   2) Aset *Extracomptable* sebesar Rp14.987.500,00 pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.

4. Tugu Titik Kontrol/Pasti

Pengakuan Tugu Titik Kontrol/Pasti dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Tugu Titik Kontrol/Pasti, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.3d Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Tugu Titik Kontrol/Pasti Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**5.075.260.000,00**
Penambahan Tugu Titik Kontrol/Pasti terhadap Neraca:	**14.049.834.700,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025-Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.514.843.200,00

Uraian	Nilai (Rp)
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa	5.941.591.500,00
Utang Aset Gedung dan Bangunan	3.473.400.000,00
Hibah lainnya	120.000.000,00
Pengurangan Tugu Titik Kontrol/Pasti terhadap Neraca:	**656.986.200,00**
Pembayaran Utang Aset 2024	626.243.200,00
Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain Lainnya	30.743.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**18.468.108.500,00**

Penjelasan:

a. Penambahan Tugu Titik Kontrol/Pasti terhadap Neraca sebesar Rp14.049.834.700,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Realisasi Belanja Modal SKPD Tahun 2025 sebesar Rp4.514.843.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
      a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 1.488.600.000,00;
      b. Dinas Perhubungan sebesar Rp3.026.243.200,00;
   2) Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.941.591.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp495.614.500,00 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp5.445.977.000,00; dan
   3) Hibah lainya Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2025 sebesar Rp120.000.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
   4) Utang Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.473.400.000,00 pada Pembangunan Pagar Pos Jaga Rumah Jabatan Kajati Dan Wakajati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Pengurangan Tugu Titik Kontrol/Pasti terhadap Neraca sebesar Rp626.243.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Aset yang direklasifikasi karena Pembayaran Utang Aset Tahun 2024 yang dikelompokan menggunakan Belanja Modal Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp626.243.200,00.
   2) Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain Lainnya sebesar Rp30.743.000,00 pada Dinas Perhubungan

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Jalan dan Jembatan	2.758.284.668.677,98	2.217.473.063.512,98
Bangunan Air	147.032.947.600,00	59.094.914.500,00
Instalasi	34.075.583.266,00	15.512.395.266,00
Jaringan	10.299.175.000,00	10.299.175.000,00
Jumlah	**2.949.692.374.543,98**	**2.302.379.548.278,98**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya disebabkan hal-hal berikut:
   a. Pembangunan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Belanja Modal SKPD Tahun 2025;

b. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa SKPD yang menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025;
c. Hibah Aset P3D Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025;
d. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan;
e. Reklasifikasi dari Aset Tanah;
f. Reklasifikasi dari Persediaan;
g. Kurang Volume pada Aset;
h. Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Lain-lain;
i. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
j. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan.

2. Pengakuan Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasidalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.4a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**2.302.379.548.278,98**
Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi terhadap Neraca:		**718.473.779.735,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	322.700.973.787,00	
Reklasifikasi dari Aset Tanah	3.500.000.000,00	
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.712.593.570,00	
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa	88.026.533.076,00	
Utang Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	44.540.430.715,00	
Hibah Aset P3D Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025	147.954.237.247,00	
Reklasifikasi dari Persediaan	64.039.011.340,00	
Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi terhadap Neraca:		**71.160.953.470,00**
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	10.560.000.000,00	
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Provinsi	59.634.884.470,00	
Kurang Volume Pada Aset	31.176.000,00	
Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Lain-lain Lainnya	934.893.000,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2025		**2.949.692.374.543,98**

3. Jalan dan Jembatan

Pengakuan Jalan dan Jembatan dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan dan Jembatan dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.4b Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Jalan dan Jembatan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**2.217.473.063.512,98**
Penambahan Jalan dan Jembatan terhadap Neraca:		**595.450.957.535,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	258.318.522.587,00	
Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua	109.383.816.247,00	
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa	76.138.002.826,00	
Utang Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.359.010.965,00	
Reklasifikasi dari Aset Tanah	3.500.000.000,00	
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.712.593.570,00	

Uraian	Nilai (Rp)	
Reklasifikasi dari Persediaan	64.039.011.340,00	
Pengurangan Jalan dan Jembatan terhadap Neraca:		**54.639.352.370,00**
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	10.560.000.000,00	
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	43.365.038.370,00	
Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Lain-lain Lainnya	714.314.000,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**2.758.284.668.677,98**

Penjelasan:

a. Penambahan Jalan dan Jembatan terhadap Neraca sebesar Rp595.450.957.535,00 adalah diuraikan sebagai berikut:
   1) Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp258.318.522.587,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp225.600.756.787,00 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp32.717.765.800,00;
   2) Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2025 sebesar Rp109.383.816.247,00 pada Dinas Perhubungan;
   3) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Jalan dan Jembatan sebesar Rp76.138.002.826,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp74.741.402.826,00 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.396.600.000,00;
   4) Utang Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp36.359.010.965,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   5) Reklasifikasi dari Aset Tanah menjadi Jalan dan Jembatan sebesar Rp3.500.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   6) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Jalan dan Jembatan sebesar Rp47.712.593.570,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
   7) Reklasifikasi dari Persediaan menjadi Jalan dan Jembatan sebesar Rp64.039.011.340,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp51.353.164.300,00 dan Dinas Perhubungan Rp12.685.847.040,00.

b. Pengurangan Jalan dan Jembatan terhadap Neraca sebesar Rp75.845.166.176,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp43.365.038.370,00;
   2) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.560.000.000,00 pada Dinas Perhubungan; dan
   3) Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Lain-lain Lainnya sebesar Rp714.314.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

4. Bangunan Air

Pengakuan Bangunan Air dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Bangunan Air dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.4c Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Bangunan Air
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**59.094.914.500,00**
Penambahan Bangunan Air terhadap Neraca:		**104.459.634.200,00**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 - Bangunan Air	64.382.451.200,00	
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa	11.888.530.250,00	
Utang Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.181.419.750,00	

Uraian	Nilai (Rp)	
Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua	20.007.233.000,00	
Pengurangan Bangunan Air terhadap Neraca:		**16.521.601.100,00**
Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	16.269.846.100,00	
Kurang Volume Pada Aset	31.176.000,00	
Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Lain-lain Lainnya	220.579.000,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**147.032.947.600,00**

Penjelasan:

a. Penambahan Bangunan Air terhadap Neraca sebesar Rp104.459.634.200,00 adalah diuraikan sebagai berikut:
   1) Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp64.382.451.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp60.827.406.200,00 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 3.555.045.000,00;
   2) Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11.888.530.250,00 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
   3) Utang Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp8.181.419.750,00 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; dan
   4) Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2025 sebesar Rp20.007.233.000,00 pada Dinas Perhubungan.
b. Pengurangan Bangunan Air terhadap Neraca sebesar Rp16.521.601.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Reklasifikasi Aset ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp16.269.846.100,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
   2) Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Lain-lain Lainnya sebesar Rp31.176.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; dan
   3) Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Lain-lain Lainnya sebesar Rp220.579.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

5. Instalansi

Pengakuan Instalasi dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Instalasi dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.4d Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Instalasi
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**15.512.395.266,00**
Penambahan Instalasi terhadap Neraca:		**18.563.188.000,00**
Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua	18.563.188.000,00	
Pengurangan Instalasi terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**34.075.583.266,00**

Penjelasan:

Penambahan Instalasi terhadap Neraca sebesar Rp18.563.188.000,00 adalah Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral.

6. Jaringan

Pengakuan Instalasi dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***sama dengan*** saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Instalasi dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.4e Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-jaringan
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**10.299.175.000,00**
Penambahan Instalasi terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Pengurangan Instalasi terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**10.299.175.000,00**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Aset Tetap Lainnya oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.5 Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Bahan Perpustakaan	31.904.155.040,00	471.013.000,00
Aset Tetap Renovasi	289.861.060.261,57	289.861.060.261,57
Jumlah	**321.765.215.301,57**	**290.332.073.261,57**

Penjelasan:

1. Bahan Perpustakaan

Pengakuan Bahan Perpustakaan dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dengan saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Bahan Perpustakaan dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.5a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Bahan Perpustakaan
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**471.013.000,00**
Penambahan Bahan Perpustakaan terhadap Neraca:		**29.475.712.213,00**
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa	14.839.178.040,00	
Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua	16.593.964.000,00	
Pengurangan Bahan Perpustakaan terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**31.904.155.040,00**

Penjelasan:

a. Penambahan Bahan Perpustakaan terhadap Neraca sebesar Rp31.904.155.040,00 dengan rincian sebagai berikut :
   1) Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp14.839.178.040,00 dengan rincian sebagai berikut:
      1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebesar Rp792.950.000,00;
      2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.984.000.000,00;
      3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp9.458.228.040,00;

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.185.000.000,00;
5. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 419.000.000,00;

2) Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 16.593.964.000,00

2. Aset Tetap Renovasi
Pengakuan Aset Tetap Renovasi dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini *sama dengan* dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Renovasi dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.5b Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Aset Tetap Renovasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**289.861.060.261,57**
Penambahan Bahan Perpustakaan terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Pengurangan Bahan Perpustakaan terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**289.861.060.261,57**

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.6 Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	483.443.390.360,88	376.021.703.926,88
Jumlah	**483.443.390.360,88**	**376.021.703.926,88**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya disebabkan reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun 2025;

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan
Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.6a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**15.917.681.969,00**
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan terhadap Neraca:		**8.887.407.000,00**
Reklasifikasi dari Persediaan	8.887.407.000,00	
Reklasifikasi Belanja Barang & Jasa	0,00	
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**24.805.088.969,00**

Penjelasan:

a) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan terhadap Neraca dari Reklasifikasi dari Persediaan Berupa Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Wamena pada Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp8.887.407.000,00;

3. Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.6b Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**360.104.021.957,88**
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan terhadap Neraca:		**138.371.873.004,00**
Reklasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	59.634.884.470,00	
Reklasifikasi Belanja Barang & Jasa	27.005.105.920,00	
Hibah Aset dari P3D	51.731.882.614,00	
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan terhadap Neraca:		**47.712.593.570,00**
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	47.712.593.570,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**458.638.301.391,88**

Penjelasan:

a) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi terhadap Neraca sebesar Rp138.371.873.004,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Reklasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp59.634.884.470,00;
   2) Reklasifikasi Belanja Barang & Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp26.138.754.420,00; dan
   3) Penambahan Hibah Aset dari P3D sebesar Rp51.731.882.614,00 pada Dinas Perhubungan.
b) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi terhadap Neraca sebesar Rp47.712.593.570,00 disebabkan Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan yang merupakan Kontrak Pos dari Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Akumulasi Penyusutan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38.264.749.822,77)	(22.064.570.482,87)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(32.841.527.861,76)	(7.261.746.476,27)
Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan, dan Irigasi	(1.535.404.228.240,61)	(1.269.791.417.322,44)
Jumlah	**(1.606.510.505.925,14)**	**(1.299.117.734.281,57)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Penyusutan Tahun 2025; dan

b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

2. Pengakuan Akumulasi Penyusutan Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.7a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**(1.299.117.734.281,57)**
Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terhadap Neraca:		**(307.392.771.643,57)**
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(127.940.011.859,08)	
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025	(179.452.759.784,49)	
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**(1.606.510.505.925,14)**

Penjelasan:

a. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terhadap Neraca sebesar (Rp1.601.837.908.967,72) adalah dijelaskan sebagai berikut:
   1) Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap sebesar (Rp127.940.011.859,08) terdiri dari:
      a) Koreksi Akumulasi Penyusutan dari Perlatan dan Mesin pada:
         - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah sebesar Rp73.315.242,96;
         - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan sebesar (Rp76.147.723,00);
         - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp201.161.878,00;
         - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp24.820.861,52;
         - Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp191.226.200,00;
         - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp72.978.000,00;
         - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp32.793.689,00;
         - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp24.370.000,00;
         - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung sebesar Rp103.600.000,00;
         - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebasar Rp25.031.250,00;
         - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp7.750.000,00; dan
         - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik sebesar Rp266.040.000,00.
      b) Koreksi Akumulasi Penyusutan dari Gedung dan Bangunan pada:
         - Dinas Perhubungan sebesar (Rp20.590.368.826,16);
         - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah sebesar (Rp1.195.779.480,00);
         - Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan sebesar (Rp350.228.800,00);
         - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan sebesar (Rp47.409.674,40); dan
         - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp584.089.360,00.
      c) Koreksi Akumulasi Penyusutan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada:
         - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp17.186.070.540,00;
         - Dinas Perhubungan sebesar (Rp119.474.804.613,00); dan
         - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar (Rp4.998.519.764,00).
   2) Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp179.452.759.784,49 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3.7b Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

SKPD	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	JUMLAH
	Rp	Rp	Rp	Rp
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	563.022.885,12	-	-	563.022.885,12
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.699.561.464,85	464.086.437,55	-	2.163.647.902,40
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	659.522.460,09	109.152.290,00	151.230.318.718,65	151.998.993.468,74
Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	237.810.300,00	-	-	237.810.300,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	180.119.000,00	-	-	180.119.000,00
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	297.348.857,40	-	574.064.150,00	871.413.007,40
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	182.866.453,30	31.852.432,60	419.904.600,00	634.623.485,90
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	438.829.555,00	-	-	438.829.555,00
Dinas Perhubungan	322.500.079,20	2.666.965.454,78	5.896.169.612,50	8.885.635.146,48
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.110.804.059,35	-	205.100.000,00	1.315.904.059,35
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	208.750.700,00	-	-	208.750.700,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.931.000,00	-	-	350.931.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	102.595.400,00	24.000.000,00	-	126.595.400,00
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	201.229.000,00	46.499.300,00	-	247.728.300,00
Sekretariat Daerah	7.319.150.159,50	210.898.100,00	-	7.530.048.259,50
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.342.152.091,62	-	-	1.342.152.091,62
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	279.076.500,00	6.097.440,00	-	285.173.940,00
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	699.187.052,97	420.532.510,00	-	1.119.719.562,97
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	321.579.720,00	-	-	321.579.720,00
Inspektorat Daerah	385.007.100,00	-	-	385.007.100,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	129.071.400,00	-	-	129.071.400,00
Sekretariat Majelis Rakyat Papua	116.003.500,00	-	-	116.003.500,00
Jumlah	**17.147.118.738,41**	**3.980.083.964,93**	**158.325.557.081,15**	**179.452.759.784,49**

Tabel 5.3.1.3.7c Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

SKPD	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	JUMLAH
	Rp	Rp	Rp	Rp
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(1.589.178.835,10)	0,00	0,00	(1.589.178.835,10)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(4.087.411.075,47)	(918.753.255,82)	0,00	(5.006.164.331,29)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	(1.620.667.636,37)	(109.152.290,00)	(1.403.100.676.451,11)	(1.404.830.496.377,48)
Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	(633.930.898,01)	0,00	0,00	(633.930.898,01)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(418.307.000,00)	0,00	0,00	(418.307.000,00)
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	(806.222.627,80)	0,00	(5.682.568.364,00)	(6.488.790.991,80)
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	(448.605.229,02)	(219.262.205,00)	(839.809.200,00)	(1.507.676.634,02)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	(1.226.948.885,00)	0,00	0,00	(1.226.948.885,00)
Dinas Perhubungan	(586.770.679,20)	(23.314.265.480,94)	(125.370.974.225,50)	(149.272.010.385,64)
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	(1.820.985.418,94)	0,00	(410.200.000,00)	(2.231.185.418,94)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	(539.552.100,00)	0,00	0,00	(539.552.100,00)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(749.677.244,95)	0,00	0,00	(749.677.244,95)

SKPD	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	JUMLAH
	Rp	Rp	Rp	Rp
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	(257.916.200,00)	(48.000.000,00)	0,00	(305.916.200,00)
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	(493.344.000,00)	(568.998.100,00)	0,00	(1.062.342.100,00)
Sekretariat Daerah	(16.243.776.097,00)	(421.796.200,00)	0,00	(16.665.572.297,00)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(1.555.127.251,62)	0,00	0,00	(1.555.127.251,62)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	(635.141.000,00)	(6.097.440,00)	0,00	(641.238.440,00)
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	(2.206.602.205,29)	(7.235.202.890,00)	0,00	(9.441.805.095,29)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(784.394.440,00)	0,00	0,00	(784.394.440,00)
Inspektorat Daerah	(872.741.300,00)	0,00	0,00	(872.741.300,00)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(343.639.200,00)	0,00	0,00	(343.639.200,00)
Sekretariat Majelis Rakyat Papua	(343.810.499,00)	0,00	0,00	(343.810.499,00)
Jumlah	**(38.264.749.822,77)**	**(32.841.527.861,76)**	**(1.535.404.228.240,61)**	**(1.606.510.505.925,14)**

5.3.1.4 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Aset Lainnya yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4 Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	6.230.501.893,00	5.384.627.510,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.399.951.382,60)	(2.153.851.004,00)
Aset Lain-lain	23.145.454.548,40	32.536.246.877,57
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	0,00	17.334.398.274,00
Jumlah	**25.976.005.058,80**	**53.101.421.657,57**

Rincian atas Aset Lainnya ini disajikan dalam Lampiran 5.3.1.4.

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Tagihan Jangka Panjang oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya disebabkan pergeseran Aset Lancar-Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral atas temuan pada tahun 2024;
2. Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.1a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Tagihan Jangka Panjang-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai Rp	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**0,00**
Penambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**0,00**

Penjelasan:
Penambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Neraca sebesar Rp201.078.000,00 adalah Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral atas temuan pada tahun 2024.
Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Neraca sebesar Rp1.767.508.000,00 terdiri dari:

a. Nilai cicilan pengembalian pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp400.000.000,00; dan
b. Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke Aset Lain-lain Lainnya sebesar Rp1.367.508.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp679.324.000,00;
    2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp522.184.000,00; dan
    3. Sekretariat Daerah sebesar Rp166.000.000,00.

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Aset Tidak Berwujud oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kajian	5.384.627.510,00	5.384.627.510,00
Software	845.874.383,00	0,00
Jumlah	**6.230.501.893,00**	**5.384.627.510,00**

Penjelasan:

1. Pengakuan Aset Tidak Berwujud - Kajian dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini *sama dengan* saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Tidak Berwujud - Kajian dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.2a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**5.384.627.510,00**
Penambahan Aset Tidak Berwujud - Kajian terhadap Neraca:		**398.000.000,00**
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	845.874.383,00	
Pengurangan Aset Tidak Berwujud - Kajian terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	

Uraian	Nilai
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**6.230.501.893,00**

Penjelasan:

Aset Tidak Berwujud - Software terhadap Neraca sebesar Rp845.874.383,00 adalah Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Sekretariat Daerah sebesar Rp398.000.000,00 dan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik sebesar Rp447.874.383,00.

5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.399.951.382,60)	(2.153.851.004,00)
Jumlah	**(3.399.951.382,60)**	**(2.153.851.004,00)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya disebabkan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025;
2. Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud dalam Neraca Tahun 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo Tahun 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.3a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai Rp	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**(2.153.851.004,00)**
Penambahan Akumulasi Amortisasi ATB terhadap Neraca:		**(1.246.100.378,60)**
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.246.100.378,60)	
Pengurangan Akumulasi Amortisasi ATB terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**(3.399.951.382,60)**

Penjelasan:

Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud terhadap Neraca sebesar (Rp1.246.100.378,60) adalah Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Kajian Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar (Rp1.076.925.502,00) dan pada Sekretariat Daerah Sebesar (Rp79.600.000,00) dan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik (Rp89.574.876,60).

5.3.1.4.4 Aset Lain – Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Aset Lain-Lain oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.4 Aset Lain - Lain Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lain – Lain	23.145.454.548,40	32.536.246.877,57
Jumlah	**23.145.454.548,40**	**32.536.246.877,57**

Penjelasan:

1. Pengakuan Aset Lain-Lain dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar dari*** saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.4a Rincian Penjelasan Aset Lain - Lain Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**32.536.246.877,57**
Penambahan Aset Lain-lain Lainnya terhadap Neraca:	**7.135.627.953,16**
Pengakuan Aset Lain-lain Lainnya	7.135.627.953,16
Pengurangan Aset Lain-lain Lainnya terhadap Neraca:	**16.526.420.282,33**
Koreksi atas Penerimaan dari Temuan BPK RI TA 2024	16.526.420.282,33
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**23.145.454.548,40**

Penjelasan:

a. Penambahan Aset Lain-lainnya sebesar Rp7.135.627.953,16 sebagai berikut:

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp3.547.436.908,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.4b Reklasifikasi ke Aset Lain - Lain Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	63.495.315,20
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	323.720.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	67.889.510,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	48.740.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.013.985.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	42.968.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.330.200.000,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	62.750.000,00
9	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	191.226.200,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	15.500.000,00
11	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	386.962.882,96
		3.547.436.908,16

2) Pengakuan Aset Lain-lainnya sebesar Rp3.641.285.245,00 merupakan reklasifikasi dari beban barang dan jasa, Beban Hibah, Kas di Kas Daerah, Aset Lainnya – Tagihan Jangka Panjang, dan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.4c Reklasifikasi ke Aset Lain - Lain Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025

Nama OPD	Akun Reklasifikasi	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Beban Gaji Pokok PNS	36.469.600,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Beban Gaji Pokok PNS	3.523.600,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Beban Gaji Pokok PNS	40.438.200,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Beban Gaji Pokok PNS	51.194.900,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Beban Gaji Pokok PNS	7.809.600,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Beban Gaji Pokok PNS	5.444.200,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Beban Gaji Pokok PNS	13.948.500,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Beban Gaji Pokok PNS	14.094.400,00

Nama OPD	Akun Reklasifikasi	Nilai (Rp)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Beban Gaji Pokok PNS	9.784.500,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Beban Gaji Pokok PNS	3.616.400,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	156.000.000,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Beban Perjalanan Dinas Biasa	75.947.958,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Jalan Provinsi	411.144.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Jalan Provinsi	102.960.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Provinsi	200.210.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Bangunan Pembawa Air Kotor	110.164.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bangunan Pembawa Air Kotor	110.415.000,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	Beban Jasa Tenaga Ahli	60.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Beban Gaji Pokok PNS	5.653.600,00
Dinas Perhubungan	Pagar	30.743.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Peralatan Jaringan	39.050.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Peralatan Jaringan	126.712.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Beban Gaji Pokok PNS	11.659.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.266.152,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.783.055,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Beban Gaji Pokok PNS	31.715.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	673.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Beban Gaji Pokok PNS	3.242.800,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18.725.480,00
Biro Hukum	Beban Gaji Pokok PNS	7.375.600,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peralatan Studio Video dan Film	56.000.000,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peralatan Studio Video dan Film	56.000.000,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peralatan Studio Video dan Film	56.000.000,00
Sekretariat Majelis Rakyat Papua	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	500.000.000,00
Sekretariat Majelis Rakyat Papua	Beban Makanan dan Minuman Rapat	300.000.000,00
Sekretariat Majelis Rakyat Papua	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	233.600.000,00
	JUMLAH	**3.588.191.045,00**

b. Pengurangan Aset Lain-lainnya sebesar Rp16.526.420.282,33 karena Koreksi atas Temuan Penerimaan dari Temuan BPK RI TA 2024.

5.3.1.4.5 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.6 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	0,00	17.334.398.274,00
Jumlah	**0,00**	**17.334.398.274,00**

Penjelasan:

1. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)
   Pengakuan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.6a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**17.334.398.274,00**
Penambahan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) terhadap Neraca:		**0,00**
Nihil	0,00	
Pengurangan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) terhadap Neraca:		**17.334.398.274,00**
Pencairan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	17.334.398.274,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**0,00**

Penjelasan:

a. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melakukan pencairan Saldo Dana TDF 2024 sebesar Rp17.334.398.274,00.
b. Per 31 Desember 2025 Saldo Akhir Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp0,00.

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Kewajiban yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2 Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	74.938.132.021,00	9.357.957.600,23
Jumlah	**74.938.132.021,00**	**9.357.957.600,23**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	285.807.113,00	803.372.874,00
Utang Belanja	57.699.220.163,00	8.554.584.726,23
Utang Jangka Pendek Lainnya	16.953.104.745,00	0,00
Jumlah	**74.938.132.021,00**	**9.357.957.600,23**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya disebabkan hal-hal berikut:
   a. Penyetoran Utang Pajak Tahun 2024;
   b. Pembayaran Utang Belanja;
   c. Pengakuan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
2. Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Utang Perhitungan

Pihak Ketiga (PFK) yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang PPh 21	36.730.000,00	2.460.000,00
Utang PPh 22	27.806.504,00	160.750.255,00
Utang PPh 23	65.359.391,00	168.109.044,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	3.500.000,00	0,00
Utang PPN Pusat	152.411.218,00	472.053.575,00
Jumlah	**285.807.113,00**	**803.372.874,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dibandingkan nilai tahun sebelumnya disebabkan karena pengakuan dan pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagaimana di jelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.3.2.1.1a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal per 1 Januari 2025		**803.372.874,00**
Penambahan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terhadap Neraca:		**285.807.113,00**
Pemotongan PFK Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 - Belum Setor	285.807.113,00	
Pengurangan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terhadap Neraca:		**803.372.874,00**
Penyetoran Utang PFK Bendahara Pengeluaran	803.372.874,00	
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**285.807.113,00**

Penjelasan:

a. Penambahan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terhadap Neraca sebesar Rp313.362.709,00 adalah terdiri dari:
   1) Utang PFK Tahun 2025 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1b Rincian Utang PFK masing-masing OPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No.	OPD	Total (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	2.613.700,00
2	Biro Organisasi	43.270.028,00
3	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	7.080.725,00
4	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	63.804.705,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	30.593.218,00
6	Inspektorat Daerah	9.780.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.825.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	35.256.858,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	77.882.879,00
10	Sekretariat Daerah	10.700.000,00
	Jumlah	**285.807.113,00**

Rincian atas Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ini disajikan dalam Lampiran 5.3.2.1.

5.3.2.1.2 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Utang Belanja yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.2 Utang Belanja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Belanja Barang dan Jasa	7.601.274.198,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.872.085.000,00	626.243.200,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.225.860.965,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	7.928.341.526,23
Jumlah	**57.699.220.163,00**	**8.554.584.726,23**

Penjelasan:

1. Pengakuan Utang Belanja dalam Neraca per 31 Desember 2025 ini ***lebih besar*** dari saldo per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan pengakuan dan pembayaran Utang Belanja dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berukut:

Tabel 5.3.2.1.2a Rincian Penjelasan Mutasi Saldo Utang Belanja Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	**8.554.584.726,23**
Penambahan Utang Belanja terhadap Neraca:	**57.699.220.163,00**
Pengakuan Utang Belanja Tahun Anggaran 2025	57.699.220.163,00
Pengurangan Utang Belanja terhadap Neraca:	**8.554.584.726,23**
Pembayaran Kurang Salur Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024	7.928.341.526,00
Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	626.243.200,00
Koreksi Utang Belanja	0,23
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**57.699.220.163,00**

2. Saldo Akhir Utang Belanja Tahun 2025 sebesar Rp57.699.220.163,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.2b Rincian Utang Belanja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025

No	OPD	Nama Rekening	Keterangan	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Provinsi	Pencatatan Utang Peningkatan Jalan Wogi Wenan	3.806.250.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	Pencatatan Utang Pekerjaan Pembangunan Drainase Kobakma Paket 1	694.295.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	Pencatatan Utang Pekerjaan Pembangunan Drainase Tolikara Paket 1	208.250.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	Pencatatan Utang Drainase Lanny Jaya Paket 5	1.386.910.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	Pencatatan Utang Drainase Kota Tiom Paket 5	1.046.465.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	Pencatatan Utang Drainase Kota Wamena	780.780.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	Pencatatan Utang Drainase Lanny Jaya Paket 4	693.000.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	Pencatatan Utang Belanja Jalan dari Gunung Susu sebelum kali tembus Hom-hom	6.692.700.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	Pencatatan Utang Belanja Pembangunan Jalan Tiom - Dimba - Tolikara	2.078.825.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	Pencatatan Utang Belanja Jalan Usku-Kesnar-Teraplu	3.685.990.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	Pencatatan Utang Pembangunan Jembatan Gelokbeam - Gamelia (Lanny Jaya)	3.517.504.365,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	Pencatatan Utang Pembangunan Jembatan Kali-toli	7.014.000.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	Pencatatan Utang Pembangunan Jembatan Kurip - Bewani	1.932.000.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	Pencatatan Utang Pagar dan Pos Jaga Rumah Jabatan Kejati dan Wakajati	3.473.400.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	Pencatatan Utang Pembangunan Ruas Jalan Ibele	3.710.691.600,00
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	Pencatatan Utang Pembangunan Spam di Kota Elelim	988.400.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	Pencatatan Utang Pembangunan Talud Kantor Gubernur	2.383.319.750,00
18	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	Pencatatan Utang Peningkatan Jalan Kantor Distrik Pelebaga Kampung Heatnem	3.302.600.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	Pencatatan Utang Rehabilitasi Jembatan Kulagaima (Jembatan Bailey)	618.450.000,00

No	OPD	Nama Rekening	Keterangan	Nilai
20	Dinas Perhubungan	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Pencatatan Utang Pembangunan Shelter Penumpang di Kabupaten Lanny Jaya	199.360.000,00
21	Dinas Perhubungan	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Pencatatan Utang Pembangunan Shelter Penumpang di Kabupaten Tolikara	199.325.000,00
22	Dinas Perhubungan	Utang Belanja ModalJalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	Pencatatan Utang Pembangunan Bandar Udara Wamena Runway 15	7.875.000.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pencatatan Utang Pembangunan RLH Program Relokasi Kawasan Kantor Gubernur Paket 12	82.040.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pencatatan Utang Pembangunan RLH Program Relokasi Kawasan Kantor Gubernur Paket 14	410.200.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pencatatan Utang Pembangunan RLH Program Relokasi Kawasan Kantor Gubernur Paket 5	410.480.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pencatatan Utang Pembangunan RLH Program Relokasi Kawasan Kantor Gubernur Paket 9	410.200.000,00
27	Dinas Perhubungan	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Pencatatan Utang atas pengadaan Perahu/Longboat feet 40PK dan kelengkapan	98.784.448,00
		Jumlah		**57.699.220.163,00**

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Tabel 5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	16.953.104.745,00	0,00
Jumlah	**16.953.104.745,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah dengan nilai sebesar Rp16.953.104.745,00, yang bersumber dari pengakuan kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025.

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Ekuitas yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.3 Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Ekuitas	2.619.343.134.691,19	2.273.020.643.075,79
Jumlah	**2.619.343.134.691,19**	**2.273.020.643.075,79**

Penjelasan:

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam neraca ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada ***poin 5.6.4***.

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Pendapatan Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah – LO	137.003.633.226,10	125.435.529.682,00
Pendapatan Transfer – LO	1.621.823.456.526,00	1.998.028.760.206,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	377.322.660.950,00	1.895.182.871.635,02
Jumlah	**2.136.149.750.702,10**	**4.018.647.161.523,02**

Komposisi Pendapatan Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

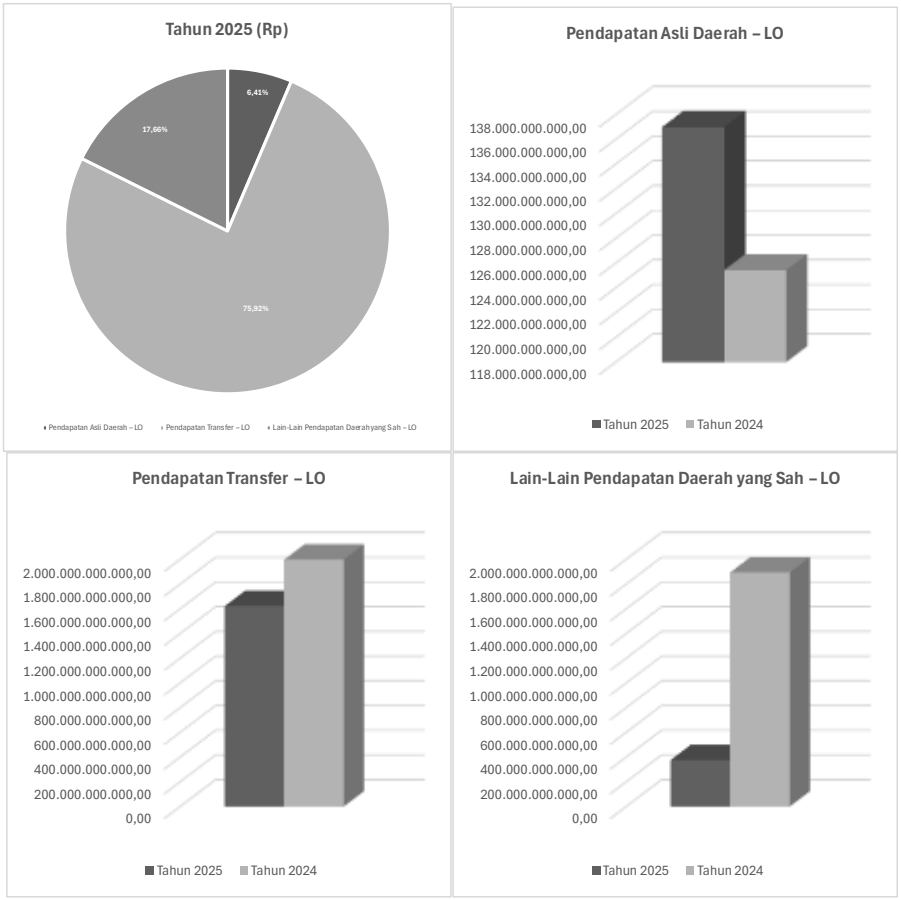

Gambar 5.4.1 Komposisi Pendapatan Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	135.326.816.784,00	120.022.463.383,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	27.990.440,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	1.648.826.002,10	5.413.066.299,00
Jumlah	**137.003.633.226,10**	**125.435.529.682,00**

Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

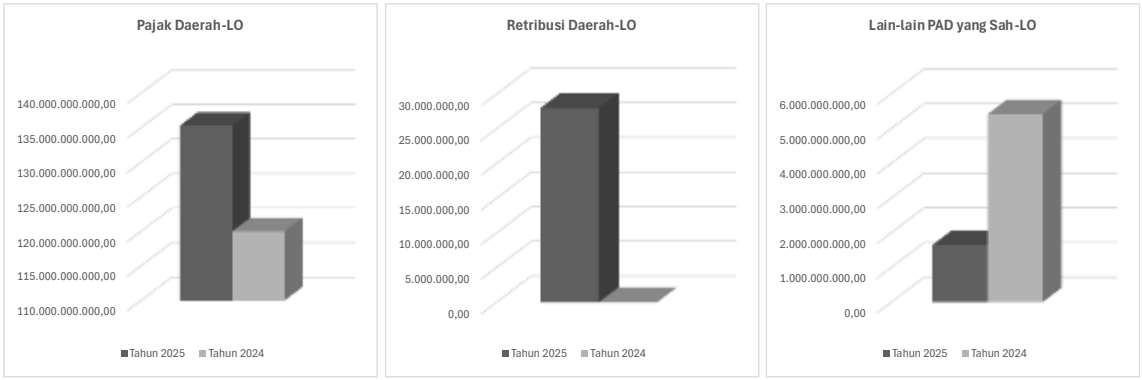

Gambar 5.4.1.1 Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	6.894.554.000,00	10.043.181.000,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	3.509.622.000,00	5.313.369.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	11.482.016.030,00	14.646.949.929,00
Pajak Air Permukaan-LO	149.159.000,00	174.766.000,00
Pajak Rokok–LO	113.046.482.899,00	89.844.197.454,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	244.982.855,00	0,00
Jumlah	**135.326.816.784,00**	**120.022.463.383,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 yang meliputi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan , Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah– LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Usaha-LO	27.990.440,00	0,00
Jumlah	**27.990.440,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 hanya terdiri dari Retribusi Jasa Usaha.
   b. Seluruh realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut bersumber dari Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jasa Giro – LO	1.469.600.002,10	797.185.525,00
Pendapatan Bunga – LO	0,00	1.420.945.812,89
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	179.226.000,00	642.157.000,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00	2.552.777.961,11
Jumlah	**1.648.826.002,10**	**5.413.066.299,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang meliputi, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda atas Pajak Kendaraan Bermotor PKB dan Pendapatan Denda BBNKB.
   Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2025 ini ***lebih kecil dari*** saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp22.499.711.782,00 (Rp1.648.826.002,10 - Rp24.148.537.784,10). Perbedaan ini timbul akibat adanya penerimaan kas dari penyelesaian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian, yang secara akrual (LO) tidak lagi diakui sebagai pendapatan periode berjalan namun diakui sebagai penerimaan pada LRA. Detail mengenai transaksi tersebut terlampir pada dokumen pendukung ***Lampiran 5.3.1.1.3.***
2. Jasa Giro – LO adalah Jasa Giro pada Rekening Kas Daerah sebesar Rp1.475.870.273,10, dan Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp0,00;
3. Pendapatan Bunga – LO adalah Pendapatan Bunga atas Penempatan Deposito sebesar Rp0,00; dan
4. Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.3.1 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO		
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	174.410.000,00	622.271.000,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	4.816.000,00	19.886.000,00
Jumlah	**179.226.000,00**	**642.157.000,00**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui

oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO Provinsi Papua Pegunungan

Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.621.823.456.526,00	1.998.028.760.206,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	0,00	0,00
Jumlah	**1.621.823.456.526,00**	**1.998.028.760.206,00**

Komposisi Pendapatan Transfer - LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

Gambar 5.4.1.2 Komposisi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– LO Provinsi Papua Pegunungan

Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Perimbangan – LO		
DBH PBB-LO	2.264.660.000,00	170.150.000,00
DBH PPh Pasal 21-LO	3.878.086.500,00	6.408.708.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	66.191.000,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent -LO	199.782.400,00	1.721.606.356,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	3.450.251.626,00	2.332.773.100,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	0,00	10.794.900,00
DAU-LO	383.500.983.000,00	427.110.995.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	1.293.854.000,00	1.281.787.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	18.274.693.000,00	14.754.237.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	0,00	15.689.448.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	3.098.745.500,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	92.065.284.350,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	200.000.000,00	320.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi-LO	4.066.228.000,00	1.959.858.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	1.252.356.000,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO		
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO	733.920.465.000,00	740.832.582.000,00
Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua-LO	470.708.262.000,00	0,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO	0,00	689.019.435.000,00
Jumlah	**1.621.823.456.526,00**	**1.998.028.760.206,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO meliputi, Dana Perimbangan – LO, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO; dan
   b. Pengakuan realisasi/pencairan Saldo Dana Bagi Hasil TDF per 31 Desember 2024.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2025 sebesar Rp17.334.398.274,00 (Rp1.621.823.456.526,00 - Rp1.639.157.854.800,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.1a Rincian Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan LRA

Uraian	Nilai (Rp)	
Selisih LO – LRA		**(17.334.398.274,00)**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
Pengakuan Dana Bagi Hasil TDF Tahun 2025	0,00	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
Realisasi/Pencairan Saldo Dana Bagi Hasil TDF Tahun 2024	(17.334.398.274,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(17.334.398.274,00)**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah– LO Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah – LO	377.322.660.950,00	1.895.182.871.635,02
Jumlah	**377.322.660.950,00**	**1.895.182.871.635,02**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	29.923.649.400,00	14.951.508.473,34
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	347.120.786.048,00	1.880.104.081.161,68
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	278.225.502,00	127.282.000,00
Jumlah	**377.322.660.950,00**	**1.895.182.871.635,02**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah-LO dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya;
2. Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 sebesar Rp377.322.660.950,00 terdiri dari:
   a. Hibah dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp29.923.649.400,00. Rincian lebih lanjut disajikan dalam ***Lampiran 5.3.1.1.5a***.
   b. Hibah P3D Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp333.620.786.018 dengan rincian sebagai berikut:
      - Aset Tanah Sebesar Rp 4.201.847.000;
      - Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 730.703.488;
      - Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 112.408.151.669;
      - Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 147.954.237.247;
      - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 16.593.964.000; dan
      - Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 51.731.882.614.
   c. Hibah dari Kabupaten sebesar Rp13.500.000.000,00.
   d. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp278.225.502,00
3. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp363.544.435.448,00 (Rp377.322.660.950,00 - Rp13.778.225.502,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.1a Rincian Penjelasan Selisih Pendapatan Hibah – LO dan LRA

Uraian	Nilai (Rp)	
Selisih LO – LRA		
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		0,00
Nihil	0,00	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		363.544.435.418,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – Hibah Kementerian Kesehatan	29.923.649.400,00	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – Hibah P3D	333.620.786.018,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(363.544.435.448,00)**

5.4.2 Beban Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Beban Operasional Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pegawai	378.105.851.409,52	298.505.440.145,40
Beban Barang dan Jasa	836.800.475.359,24	762.825.839.601,20
Beban Hibah	104.128.521.448,00	211.720.212.516,75
Beban Bantuan Sosial	41.841.750.000,00	5.247.050.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	180.698.860.163,09	160.440.760.873,98
Jumlah	**1.541.575.458.379,85**	**1.438.739.303.137,33**

Komposisi Beban Operasional Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

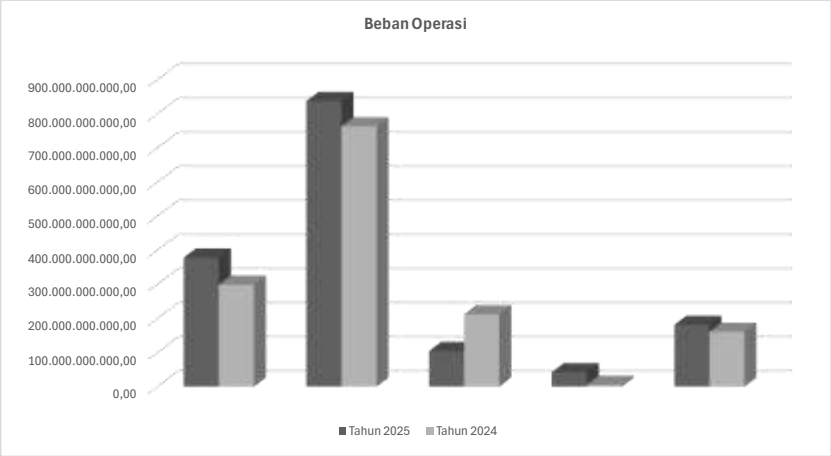

Gambar 5.4.2 Komposisi Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024

5.4.2.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1 Beban Pegawai Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	77.940.343.913,00	61.158.047.245,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	84.395.455.236,52	134.293.233.135,40
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	19.441.710.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	34.573.332.994,00	6.495.019.200,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	97.641.924,00	70.200.000,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	151.254.312.030,00	46.036.120.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan MRP	29.844.765.312,00	31.011.110.565,00
Jumlah	**378.105.851.409,52**	**298.505.440.145,40**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan penambahan Beban Pegawai Tahun 2024 yang terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan, Beban Honorarium, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
2. Nilai pengakuan Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) TA 2025 tercatat sebesar Rp378.105.851.409,52. Nilai tersebut berbeda dengan akumulasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025 yang sebesar Rp378.064.757.209,52, di mana terdapat selisih sebesar Rp605.606.135,00.

Tabel 5.4.2.1a Rincian Penjelasan Selisih Beban Pegawai – LO dan LRA

Uraian	Nilai (Rp)	
Selisih LO – LRA		
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Beban Pegawai terhadap LRA :		**0,00**
Nihil	0,00	
Pengurangan Beban Pegawai terhadap LRA :		**605.606.135,00**
Kontra Pos Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.269.314,00	
Kontra Pos Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	4.645.026,00	
Kontra Pos Pada Dinas Perhubungan	3.280.797,00	
Kontra Pos Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	10.912.800,00	
Kontra Pos Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.469.142,00	
Kontra Pos Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	223.377.105,00	
Kontra Pos Pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua	66.907.364,00	
Koreksi Temuan Pemeriksaan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	39.993.200,00	
Koreksi Temuan Pemeriksaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	146.330.700,00	
Koreksi Temuan Pemeriksaan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	5.653.600,00	
Koreksi Temuan Pemeriksaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	15.925.152,00	
Koreksi Temuan Pemeriksaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	52.498.055,00	
Koreksi Temuan Pemeriksaan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.968.280,00	
Koreksi Temuan Pemeriksaan pada Biro Hukum	7.375.600,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(605.606.135,00)**

5.4.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 hanya terdapat di SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah. Berikut ini merupakan rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.1 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	53.458.000.167,00	41.201.588.209,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	5.187.495.637,00	4.172.432.435,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	2.260.470.723,00	2.134.609.932,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	81.380.000,00	68.540.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.337.860.159,00	1.407.920.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	5.583.941.985,50	4.122.405.913,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	214.215.523,00	299.900.022,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	1.169.432,50	490.461,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.331.006.280,00	1.913.000.918,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	183.235.487,00	85.713.709,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	83.241.001,00	257.141.951,00
Beban Tunjangan Khusus*)	7.218.327.518,00	5.494.303.695,00
Jumlah	**77.940.343.913,00**	**61.158.047.245,00**

5.4.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2024 hanya terdapat di SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah. Berikut ini merupakan rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.2 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.707.257.453,91	70.775.385.224,40
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	12.065.437.617,44	18.059.047.868,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.855.844.097,75	18.154.911.617,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	39.524.680,00	259.496.164,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	16.597.573.685,42	27.044.392.262,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	129.817.702,00	0,00
Jumlah	**84.395.455.236,52**	**134.293.233.135,40**

5.4.2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini merupakan jabaran Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.3a Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	185.000.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	654.000.000,00
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	0,00	211.500.000,00
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	0,00	17.126.525.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	328.660.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00	114.000.000,00
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	372.000.000,00
8	Inspektorat Daerah	0,00	1.146.000.000,00
9	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	0,00	1.250.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	4.091.000.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	11.700.000,00
12	Sekretariat Daerah	0,00	751.680.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**19.441.710.000,00**

Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.3b Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Honorarium	0,00	24.834.440.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	158.875.000,00
Jumlah	**0,00**	**24.993.315.000,00**

5.4.2.1.4 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Berikut ini merupakan jabaran Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.4a Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada Masing-Masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	150.414.312.030,00	46.036.120.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	840.000.000,00	0,00
	Jumlah	**151.254.312.030,00**	**46.036.120.000,00**

Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.4b Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	840.000.000,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	150.414.312.030,00	46.036.120.000,00
Jumlah	**151.254.312.030,00**	**46.036.120.000,00**

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Barang	439.308.335.046,24	246.127.357.593,59
Beban Jasa	168.389.851.873,00	224.492.856.825,98
Beban Pemeliharaan	1.063.941.000,00	56.134.145.158,00
Beban Perjalanan Dinas	172.670.899.244,00	171.988.078.431,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	55.367.448.196,00	64.083.401.592,63
Jumlah	**836.800.475.359,24**	**762.825.839.601,20**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Barang dan Jasa yang meliputi Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
   b. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap;
   c. Reklasifikasi Aset *Extracomptable*.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp107.441.449.773,76 (Rp836.800.475.359,24 – Rp944.241.925.133,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2a Rincian Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa – LO dan Belanja Barang dan Jasa – LRA

Uraian	Nilai (Rp)	
Selisih LO – LRA		
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Beban LO:		**241.575.255.735,24**
Pemakaian Persediaan 2024	240.768.095.277,24	
Beban Dibayar Dimuka	137.513.000,00	
Aset Extracomptable pada Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	654.659.958,00	
Aset Extracomptable pada Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	14.987.500,00	
Pengurangan Beban LO:		**349.016.705.509,00**
Pengembalian Belanja di Tahun 2026	79.684.602,00	
Reklasifikasi ke Persediaan	165.489.863.980,00	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap - Tanah	36.602.655.000,00	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	8.344.884.050,00	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	6.445.378.500,00	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.026.533.076,00	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	14.839.178.040,00	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.005.105.920,00	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	845.874.383,00	
Kekurangan Volume Barang dan Jasa	1.337.547.958,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(107.441.449.773,76)**

Komposisi Beban Barang dan Jasa Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

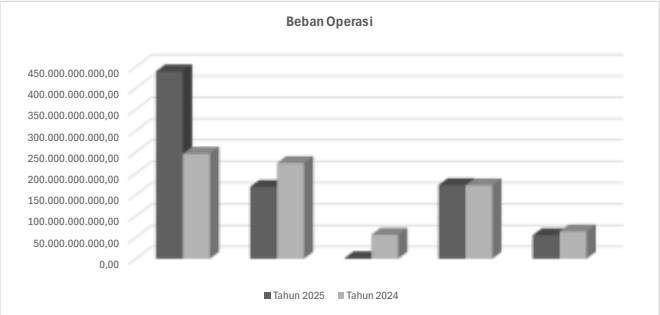

Gambar 5.4.2.2 Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

5.4.2.2.1 Beban Barang

Berikut ini merupakan jabaran Beban Barang di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.1a Beban Barang pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	40.202.944.353,96	13.433.872.180,80
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	88.382.509.832,78	14.256.812.674,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1.402.475.000,00	7.164.805.013,51
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	3.824.431.967,00	6.761.329.450,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	22.671.883.705,00	19.418.225.955,10
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.815.504.900,00	2.759.603.162,16
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	2.794.906.900,00	1.690.735.044,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	1.103.690.000,00	1.836.626.875,00
9	Dinas Perhubungan	643.745.618,00	18.834.184.840,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.081.248.338,00	1.141.780.738,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	5.670.694.000,00	2.233.000.250,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	606.365.000,00	2.138.778.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	825.070.000,00	6.191.240.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	8.231.659.873,00	3.307.801.200,00
15	Sekretariat Daerah	88.831.750.384,00	49.069.907.515,00
16	Biro Umum	14.459.690.718,00	11.017.436.216,02
17	Biro Hukum	4.366.912.000,00	4.792.776.379,00
18	Biro Organisasi	787.638.000,00	1.472.806.000,00
19	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	584.351.750,00	1.604.844.000,00
20	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	1.028.410.000,00	2.227.641.000,00
21	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	1.326.616.000,00	-738.673.040,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	75.898.630.133,50	12.829.206.700,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	3.538.764.241,00	4.820.475.000,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	36.714.960.797,00	26.700.052.701,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.238.412.900,00	3.623.818.270,00
26	Inspektorat Daerah	3.111.419.635,00	2.282.260.470,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.421.015.000,00	1.939.747.000,00
28	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	24.742.634.000,00	23.316.264.000,00
	Jumlah	**439.308.335.046,24**	**246.127.357.593,59**

Rincian Beban Barang di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.1b Rincian Beban Barang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	437.159.769.449,24	245.366.932.538,59
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.148.565.597,00	760.425.055,00
Jumlah	**439.308.335.046,24**	**246.127.357.593,59**

5.4.2.2.2 Beban Jasa

Berikut ini merupakan jabaran Beban Jasa di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.2a Beban Jasa pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	9.304.290.000,00	18.739.728.796,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	46.152.777.285,00	32.408.713.519,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	6.322.407.550,00	21.764.538.000,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	7.930.750.000,00	8.507.660.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.064.957.000,00	2.448.840.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.777.650.000,00	2.988.875.450,98
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	2.729.691.000,00	2.114.317.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	1.045.139.967,00	1.935.775.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.239.140.244,00	4.671.603.402,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	10.711.465.455,00	18.616.755.380,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.791.850.000,00	1.606.260.000,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	519.580.000,00	2.456.444.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	442.320.000,00	1.728.800.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	886.456.000,00	1.769.611.000,00
15	Sekretariat Daerah	13.715.198.750,00	15.396.600.000,00
16	Biro Umum	4.229.948.863,00	9.475.462.244,00
17	Biro Hukum	1.701.900.000,00	1.994.250.000,00
18	Biro Organisasi	683.000.000,00	1.311.820.000,00
19	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	406.040.000,00	181.780.000,00
20	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	1.219.818.000,00	1.927.140.000,00
21	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	2.265.200.000,00	20.406.158.800,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14.611.093.164,00	1.509.250.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	3.764.268.500,00	7.956.160.000,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	21.534.913.295,00	24.066.597.914,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.878.876.800,00	4.116.640.830,00
26	Inspektorat Daerah	2.569.500.000,00	2.037.033.710,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	333.820.000,00	5.184.100.000,00
28	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	4.557.800.000,00	7.171.941.780,00
	Jumlah	**168.389.851.873,00**	**224.492.856.825,98**

Rincian Beban Jasa di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.2b Rincian Beban Jasa Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Jasa Kantor	69.232.339.105,00	102.389.048.040,98
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	42.261.770.000,00	26.959.711.206,00
Beban Sewa Tanah	370.000.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	16.004.319.363,00	17.364.680.605,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	24.581.536.124,00	30.067.170.970,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.189.019.300,00	20.088.905.050,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.095.891.250,00	21.851.821.501,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.654.976.731,00	5.771.519.453,00
Jumlah	**168.389.851.873,00**	**224.492.856.825,98**

5.4.2.2.3 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan jabaran Beban Pemeliharaan di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.3a Beban Pemeliharaan pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8.000.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	187.643.000,00	74.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	33.000.000,00	53.331.822.158,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20.000.000,00	86.925.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	30.000.000,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	19.000.000,00	21.850.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	15.000.000,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	74.000.000,00
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	15.000.000,00	9.600.000,00
10	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	0,00	27.000.000,00
11	Sekretariat Daerah	70.000.000,00	0,00
12	Biro Umum	496.038.000,00	71.380.000,00
13	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	90.000.000,00
14	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	3.762.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	134.260.000,00	0,00
16	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	31.000.000,00	2.242.486.000,00
17	Inspektorat Daerah	20.000.000,00	71.320.000,00
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15.000.000,00	0,00
	JUMLAH	**1.063.941.000,00**	**56.134.145.158,00**

Rincian Beban Pemeliharaan di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.3b Rincian Beban Pemeliharaan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.030.941.000,00	648.913.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	8.686.709.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.000.000,00	46.798.523.158,00
Jumlah	**1.063.941.000,00**	**56.134.145.158,00**

5.4.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan jabaran Beban Perjalanan Dinas di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.4a Beban Perjalanan Dinas pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6.794.873.500,00	4.823.894.250,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.164.259.042,00	7.110.677.745,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2.475.356.796,00	4.854.514.018,00
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	991.383.666,00	1.869.388.670,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.625.664.212,00	3.490.394.081,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	4.257.532.791,00	4.149.735.765,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	1.758.460.150,00	2.201.198.084,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	975.222.325,00	2.981.456.600,00
9	Dinas Perhubungan	1.453.648.869,00	1.954.184.840,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	1.356.717.956,00	2.182.009.595,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	2.790.380.000,00	1.907.573.189,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	249.820.945,00	4.334.920.251,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.085.692.693,00	2.154.738.804,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	1.530.235.451,00	5.323.224.655,00
15	Sekretariat Daerah	37.266.494.660,00	41.435.372.192,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	48.405.268.000,00	12.216.176.744,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	4.743.396.869,00	9.159.332.069,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	15.102.917.620,00	18.076.522.283,00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.237.616.234,00	10.141.995.762,00

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
20	Inspektorat Daerah	12.197.303.465,00	9.970.688.621,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.489.559.000,00	2.003.010.000,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	9.719.095.000,00	19.647.070.213,00
	JUMLAH	**172.670.899.244,00**	**171.988.078.431,00**

Rincian Beban Perjalanan Dinas di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.4b Rincian Beban Perjalanan Dinas Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	169.809.196.244,00	171.988.078.431,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.861.703.000,00	0,00
Jumlah	**172.670.899.244,00**	**171.988.078.431,00**

5.4.2.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat

Berikut ini merupakan jabaran Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.5a Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51.265.448.196,00	57.438.282.085,00
2	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	(7.454.130.492,37)
3	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00	21.250.000,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.067.000.000,00	0,00
5	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	2.035.000.000,00	7.860.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	1.000.000.000,00	6.218.000.000,00
	JUMLAH	**55.367.448.196,00**	**64.083.401.592,63**

Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.5b Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	53.332.448.196,00	56.202.151.592,63
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.035.000.000,00	7.881.250.000,00
Jumlah	**55.367.448.196,00**	**64.083.401.592,63**

5.4.2.3 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.3 Beban Hibah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	441.637.000,00	28.393.089.046,79
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	103.686.884.448,00	183.327.123.469,96
Jumlah	**104.128.521.448,00**	**211.720.212.516,75**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah yang merupakan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini ***berbeda*** dengan saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 karena di reklasifikasi ke persediaan sebesar Rp23.268.487.969,76.

5.4.2.3.1 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Berikut ini merupakan jabaran Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.3.1a Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	441.637.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	28.393.089.046,79
	Jumlah	**441.637.000,00**	**28.393.089.046,79**

Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.3.1b Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	441.637.000,00	28.393.089.046,79
Jumlah	**441.637.000,00**	**28.393.089.046,79**

5.4.2.3.2 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Berikut ini merupakan jabaran Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.3.2a Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8.478.520.000,00	24.636.283.393,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	200.000.000,00	2.000.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	8.796.680.000,00	0,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.000.000.000,00	3.130.000.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.242.900.000,00	0,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	2.000.000.000,00	7.200.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	98.784.448,00	1.424.100.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00	1.425.600.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	5.399.000.000,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	9.220.000.000,00	53.703.169.000,00
11	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	0,00	595.673.076,96
12	Sekretariat Daerah	48.450.000.000,00	25.827.298.000,00
13	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	7.000.000.000,00	0,00
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15.200.000.000,00	57.986.000.000,00
	JUMLAH	**103.686.884.448,00**	**183.327.123.469,96**

Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.3.2b Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.700.000.000,00	54.624.881.393,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	66.928.520.000,00	54.212.480.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.388.364.448,00	64.895.089.000,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	4.999.000.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.670.000.000,00	4.595.673.076,96
Jumlah	**103.686.884.448,00**	**183.327.123.469,96**

5.4.2.4 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah

Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.4 Beban Bantuan Sosial Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.850.000.000,00	3.683.800.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	620.000.000,00	250.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	37.371.750.000,00	1.313.250.000,00
Jumlah	**41.841.750.000,00**	**5.247.050.000,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 yang terdiri dari Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya); dan
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini ***sama*** dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2025 Rp41.841.750.000,00.

Komposisi Beban Bantuan Sosial Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

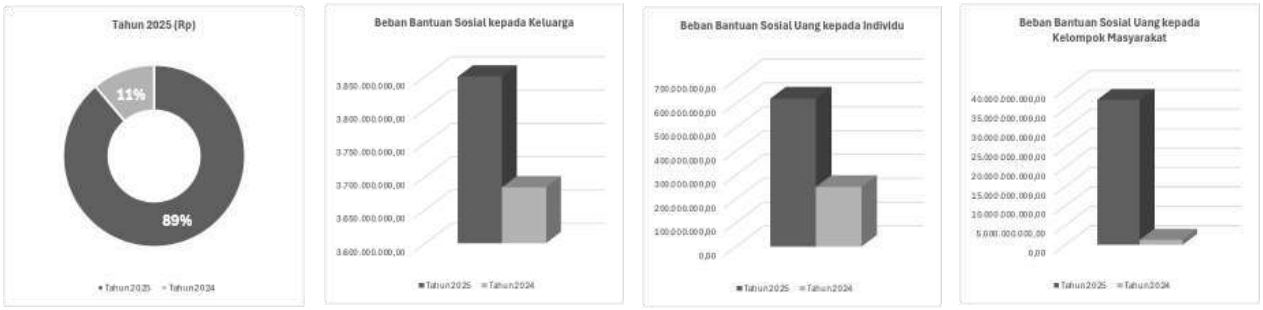

Gambar 5.4.2.4 Komposisi Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

5.4.2.4.1 Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga

Berikut ini merupakan jabaran Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.4.1a Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga pada masing-masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.850.000.000,00	3.683.800.000,00
	Jumlah	**3.850.000.000,00**	**3.683.800.000,00**

Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.4.1b Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.850.000.000,00	3.683.800.000,00
Jumlah	**3.850.000.000,00**	**3.683.800.000,00**

5.4.2.4.2 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Berikut ini merupakan jabaran Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.4.2a Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu pada Masing-Masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	620.000.000,00	250.000.000,00
	Jumlah	**620.000.000,00**	**250.000.000,00**

Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.4.2b Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	170.000.000,00	250.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	450.000.000,00	0,00
Jumlah	**620.000.000,00**	**250.000.000,00**

5.4.2.4.3 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Berikut ini merupakan jabaran Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat di masing-masing SKPD Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.4.3a Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat pada Masing-Masing SKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	375.000.000,00	1.313.250.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	36.996.750.000,00	0,00
	Jumlah	**37.371.750.000,00**	**1.313.250.000,00**

Rincian Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.4.3b Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	37.371.750.000,00	1.313.250.000,00
Jumlah	**37.371.750.000,00**	**1.313.250.000,00**

5.4.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.147.118.738,41	13.007.336.686,49
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.980.083.964,93	1.111.990.352,27
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringans	158.325.557.081,15	145.244.508.333,22
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.246.100.378,60	1.076.925.502,00
Jumlah	**180.698.860.163,09**	**160.440.760.873,98**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud;

2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca; dan
3. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini :

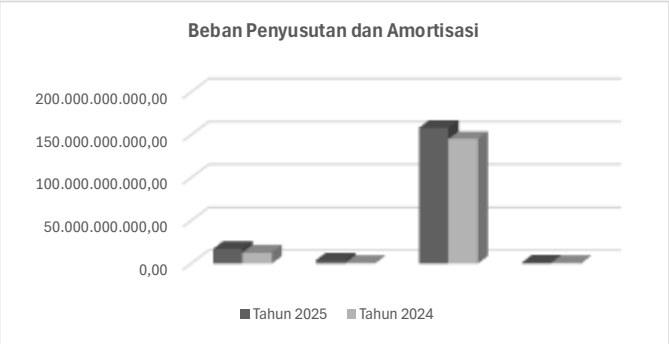

Gambar 5.4.2.5 Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

5.4.2.6 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.6 Beban Transfer Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bagi Hasil	91.087.735.468,00	114.584.416.055,23
Beban Bantuan Keuangan	14.450.000.000,00	23.531.815.425,00
Jumlah	**105.537.735.468,00**	**138.116.231.480,23**

5.4.2.6.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.6.1 Beban Bagi Hasil Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten	91.087.735.468,00	114.584.416.055,23
Jumlah	**91.087.735.468,00**	**114.584.416.055,23**

Penjelasan:

1. Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2025 menyajikan saldo yang berbeda dengan Belanja Bagi Hasil dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025.

Tabel 5.4.2.6.1a Rincian Penjelasan Selisih Beban Bagi Hasil – LO dan LRA

Uraian	Nilai (Rp)	
Nilai Belanja Bagi Hasil - LRA		**82.062.972.249,00**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Beban Bagi Hasil terhadap LO:		**16.953.104.745,00**
Pengakuan Utang Transfer DBH Kurang Salur 2025	16.953.104.745,00	
Pengurangan Beban Bagi Hasil terhadap LO:		**7.928.341.526,00**
Pembayaran Kurang Salur Dana Bagi Hasil	7.928.341.526,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**91.087.735.468,00**

5.4.2.6.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.6.2 Beban Bantuan Keuangan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	14.450.000.000,00	23.531.815.425,00
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah	**14.450.000.000,00**	**23.531.815.425,00**

5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Surplus Non Operasional Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.4 Defisit Non Operasional Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - LO	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	92.324.380,00	143.587.000,00
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	**92.324.380,00**	**143.587.000,00**

5.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Pos Luar Biasa Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Luar Biasa		
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
Beban Tidak Terduga	14.681.729.000,00	53.525.500.000,00
Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	**14.681.729.000,00**	**53.525.500.000,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Pos Luar Biasa merupakan Beban Tidak Terduga Tahun 2025; dan
2. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2025 ini ***sama*** dengan saldo Belanja Luar Biasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp14.681.729.000,00.

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.4.6 Surplus/(Defisit) – LO Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kegiatan Operasional		
Pendapatan Daerah – LO	**2.136.149.750.702,10**	**4.018.647.161.523,02**
Pendapatan Asli Daerah – LO	137.003.633.226,10	125.435.529.682,00
Pendapatan Transfer – LO	1.621.823.456.526,00	1.998.028.760.206,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	377.322.660.950,00	1.895.182.871.635,02
Beban Daerah	**1.647.113.193.847,85**	**1.576.855.534.617,56**
Beban Operasi	1.360.876.598.216,76	1.278.298.542.263,35
Beban Penyusutan dan Amortisasi	180.698.860.163,09	160.440.760.873,98
Beban Transfer	105.537.735.468,00	138.116.231.480,23
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	**489.036.556.854,25**	**2.441.791.626.905,46**
Kegiatan Non - Operasional		
Surplus Non - Operasional		
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Defisit Non - Operasional		
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	92.324.380,00	143.587.000,00
Pos Luar Biasa		
Pendapatan Luar Biasa		
Beban Luar Biasa	14.681.729.000,00	53.525.500.000,00
Jumlah Surplus	**474.262.503.474,25**	**2.388.122.539.905,46**

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***poin 5.6.2***.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.812.439.425.310,10	2.202.783.004.813,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.590.491.924.418,28	1.640.228.544.154,82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**221.947.500.891,82**	**562.554.460.658,18**

Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Operasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

Gambar 5.5.1 Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	**135.326.816.784,00**	**165.444.602.582,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.894.554.000,00	10.043.181.000,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.509.622.000,00	5.313.369.000,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	11.482.016.030,00	14.646.949.929,00
Pajak Air Permukaan	149.159.000,00	174.766.000,00
Pajak Rokok	113.046.482.899,00	135.266.336.653,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	244.982.855,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah	**27.990.440,00**	**0,00**
Retribusi Jasa Usaha	27.990.440,00	0,00
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	**24.148.537.784,10**	**5.813.066.299,00**
Jasa Giro	1.469.600.002,10	797.185.525,00
Pendapatan Bunga	0,00	1.420.945.812,89
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	828.826.618,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	154.695.188,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	179.226.000,00	642.157.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	21.516.189.976,00	2.952.777.961,11
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	**1.639.157.854.800,00**	**2.031.398.053.932,00**
Dana Perimbangan	434.529.127.800,00	601.546.036.932,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	1.204.628.727.000,00	1.429.852.017.000,00
Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Bagi Hasil	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	**13.778.225.502,00**	**127.282.000,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	13.500.000.000,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	278.225.502,00	127.282.000,00
Jumlah	**1.812.439.425.310,10**	**2.202.783.004.813,00**

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pembayaran Belanja Pegawai	**378.396.540.066,52**	**298.535.200.797,40**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	78.187.257.883,00	61.158.047.245,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	84.439.229.923,52	134.322.993.787,40
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	19.441.710.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.573.332.994,00	6.495.019.200,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	97.641.924,00	70.200.000,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	151.254.312.030,00	46.036.120.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	29.844.765.312,00	31.011.110.565,00
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	**944.241.925.133,00**	**929.988.945.356,63**
Belanja Barang	378.227.810.341,00	306.054.004.229,00
Belanja Jasa	191.460.700.496,00	226.396.315.474,00
Belanja Pemeliharaan	146.484.947.296,00	159.099.732.017,00
Belanja Perjalanan Dinas	172.838.531.804,00	174.217.979.044,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.229.935.196,00	64.220.914.592,63
Pembayaran Belanja Hibah	**114.817.007.969,76**	**222.743.958.046,79**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.975.880.626,86	47.251.089.046,79
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	110.841.127.342,90	175.492.869.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	**41.841.750.000,00**	**5.247.050.000,00**
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	620.000.000,00	250.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.850.000.000,00	3.683.800.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	37.371.750.000,00	1.313.250.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga	**14.681.729.000,00**	**53.525.500.000,00**
Belanja Tak Terduga	14.681.729.000,00	53.525.500.000,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil	**82.062.972.249,00**	**106.656.074.529,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	82.062.972.249,00	106.656.074.529,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	**14.450.000.000,00**	**23.531.815.425,00**
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	14.450.000.000,00	23.531.815.425,00
Jumlah	**1.590.491.924.418,28**	**1.640.228.544.154,82**

5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	366.778.176.936,00	540.558.529.111,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(366.778.176.936,00)**	**(540.558.529.111,00)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain - Lain	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	**0,00**	**0,00**
Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Perolehan Tanah	**11.500.000.000,00**	**31.000.000.000,00**
Belanja Modal Tanah Persil	11.500.000.000,00	31.000.000.000,00
Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	**22.266.044.949,00**	**33.854.864.903,00**
Belanja Modal Alat Besar	59.192.000,00	25.299.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.585.984.792,00	14.597.714.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	350.000.000,00	59.188.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	550.400.000,00	1.329.950.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.626.787.000,00	6.023.797.610,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.370.766.000,00	2.231.394.590,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	1.711.605.157,00	9.518.021.703,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	11.310.000,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	69.500.000,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	**10.311.158.200,00**	**53.115.679.212,00**
Belanja Modal Bangunan Gedung	5.796.315.000,00	48.666.662.412,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.514.843.200,00	4.449.016.800,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	**322.700.973.787,00**	**422.086.213.196,00**
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	258.318.522.587,00	351.799.542.430,00
Belanja Modal Bangunan Air	64.382.451.200,00	47.204.025.500,00
Belanja Modal Instalasi	0,00	8.301.046.000,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	14.781.599.266,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	**0,00**	**501.771.800,00**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	501.771.800,00
Perolehan Aset Lainnya	**0,00**	**0,00**
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud - *Goodwill*	0,00	0,00
Jumlah	**366.778.176.936,00**	**540.558.529.111,00**

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan Pinjaman Daerah	**0,00**	**0,00**
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	**0,00**	**0,00**
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	**0,00**	**0,00**
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	**0,00**	**0,00**
Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk TA 2025. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	107.210.741.073,23	251.091.166.303,77
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	106.052.950.777,23	221.716.383.163,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**1.157.790.296,00**	**29.374.783.140,11**

Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

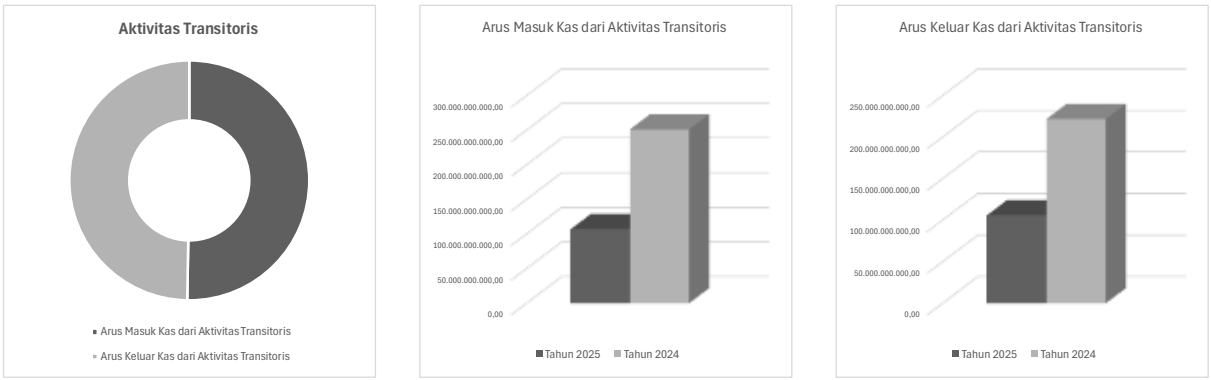

Gambar 5.5.4 Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	104.946.518.296,23	118.167.415.882,66
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	0,00	101.088.440.296,00
Penerimaan Kembali UP 2024/2025	188.720.638,00	2.079.433.876,00
Penerimaan Kembali Kas Bendahara penerimaan 2024/2025	0,00	0,00
Kiriman Uang Masuk	2.000.000.000,00	29.755.876.249,11
Jumlah	**107.135.238.934,23**	**251.091.166.303,77**

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	104.946.518.296,23	118.167.415.882,66
Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	0,00	101.276.442.281,00
Koreksi Saldo Awal Kas Daerah	0,00	272.525.000,00
Kiriman Uang Keluar	1.030.930.342,00	2.000.000.000,00
Jumlah	**105.977.448.638,23**	**221.716.383.163,66**

Koreksi Saldo Awal Kas Daerah Tahun 2024 terjadi karena ada selisih sisa setoran pencairan ganda SP2D Tahun 2023, berikut penjelasan, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5.4.3 Penjelasan Koreksi Saldo Awal Kas Daerah pada Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024

No.	Tgl Transaksi	Nomor SP2D	Nilai SP2D	Setoran	Reklasifikasi	Ket
SELISIH SISA SETORAN PENCAIRAN GANDA SP2D TAHUN 2023						
1	28/12/2023	4103/SP2D/2023	643.500.000,00	568.900.000,00	74.600.000,00	Sisa Potongan Pajak, Reklasifikasi ke Defisit Non Operasional-LO
2	28/12/2023	4104/SP2D/2023	481.750.500,00	425.050.500,00	56.700.000,00	Sisa Potongan Pajak, Reklasifikasi ke Defisit Non Operasional-LO
3	28/12/2023	4108/SP2D/2023	141.225.000,00	0,00	141.225.000,00	Belum Setor, Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Lainnya
TOTAL KESELURUHAN					**272.525.000,00**	

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	221.947.500.891,82	562.554.460.658,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(366.778.176.936,00)	-540.558.529.111,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.157.790.296,00	29.374.783.140,11
Jumlah	**(143.672.885.748,18)**	**51.370.714.687,29**

Komposisi Kenaikan/(Penurunan) Kas Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

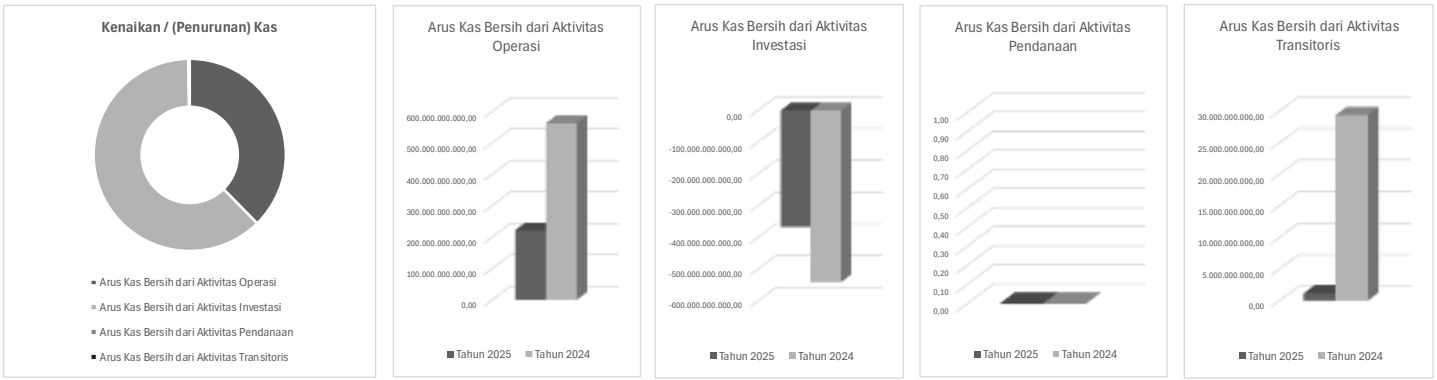

Gambar 5.5.5 Komposisi Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun 2025 dan 2024

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.6 Saldo Awal Kas Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	153.604.329.833,07	102.233.615.145,78
Jumlah	**153.604.329.833,07**	**102.233.615.145,78**

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

Pada Tahun 2025 tidak terjadi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sehingga nilai yang tersaji dalam Laporan Arus Kas sebesar Rp0,00. Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.8 Saldo Akhir Kas Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Akhir Kas Di Fungsi Perbendaharaan	9.931.444.084,89	153.604.329.833,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	188.720.638,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Lainnya	1.316.737.455,00	2.803.372.874,00
Saldo Kas Akhir	**11.248.181.539,89**	**156.596.423.345,07**

Komposisi Saldo Akhir Kas Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:

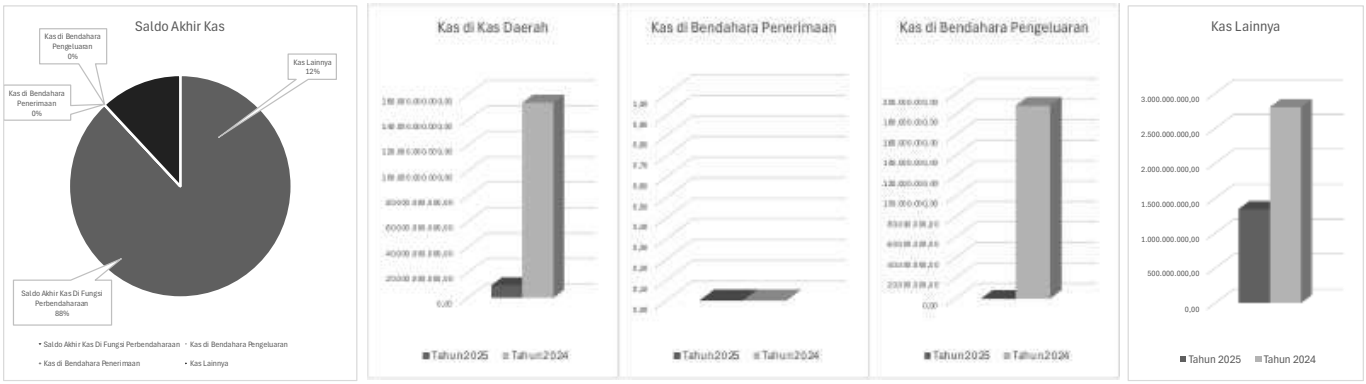

Gambar 5.5.8 Komposisi Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.6.1 Ekuitas Awal Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	**2.273.020.643.075,79**	**952.908.303.381,66**

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/(Defisit) – LO	**474.262.503.474,25**	**2.388.122.539.905,46**

Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada ***poin 5.4.6***.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	0,00	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	0,00	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi	0,00	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	0,00	(315.553.415,14)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	0,23	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Penyusutan Aset Tetap	(127.940.011.859,08)	(1.067.694.646.791,19)
Jumlah Dampak Kumulatif	**(127.940.011.858,85)**	**(1.068.010.200.211,33)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun

sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset Tetap dan Akumulasi Aset Tetap Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.3.1 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Nama OPD	Nama Rekening	Keterangan	Nilai
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	Koreksi Utang Belanja	0,23
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(313.647.640,00)
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(52.334.372,00)
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(97.631.723,00)
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(1.195.779.480,00)
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(350.228.800,00)
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(47.409.674,40)
Dinas Perhubungan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(20.590.368.826,16)
Dinas Perhubungan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(119.474.804.613,00)
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(4.998.519.764,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(11.337.214.370,00)
		Mutasi Tambah Koreksi Nilai Ekuitas	**(158.457.939.262,33)**
Nama OPD	**Nama Rekening**	**Keterangan**	**Nilai**
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(386.962.882,96)
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(21.484.000,00)
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(253.496.250,00)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(24.820.861,52)
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(191.226.200,00)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(72.978.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(32.793.689,00)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(24.370.000,00)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(103.600.000,00)
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(25.031.250,00)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(7.750.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(266.040.000,00)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(584.089.360,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Koreksi Saldo Awal - Penyusutan Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(28.523.284.910,00)
		Mutasi Kurang Koreksi Nilai	**(30.517.927.403,48)**
		Jumlah Dampak Kumulatif	**(127.940.011.859,08)**

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Ekuitas Akhir	**2.619.343.134.691,19**	**2.273.020.643.075,79**

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu provinsi Indonesia Bagian Timur yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Pemekaran ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 dimana wilayah Provinsi Papua Pegunungan mencakup Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahukimo. Kabupaten Jayawijaya merupakan ibukota Provinsi Papua Pegunungan.

Provinsi Papua Pegunungan secara astronomis terletak antara 3º45'-4 º2' Lintang Selatan dan 138º3'-139 º4' Bujur Timur. Provinsi Papua Pegunungan pada bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Keerom; pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat; pada sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini; dan pada sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Mimika.

Provinsi Papua Pegunungan memiliki luas wilayah mencapai 51.213,33 km² yang terbagi menjadi 8 kabupaten. Kabupaten Yahukimo merupakan wilayah terluas yang menempati 31,96 persen dari total luas Papua Pegunungan atau seluas 16.365,94 km², sebaiknya Kabupaten Lanny Jaya merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil, yaitu seluas 2.339,78 km² atau menempati 4,57 persen wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Terdapat 1 stasiun pengamatan di 1 kabupaten yang digunakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk mengukur iklim di Provinsi Papua Pegunungan. Pengamatan yang dilakukan di stasiun tersebut mencakup pengukuran suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, tekanan udara, jumlah curah hujan, jumlah hari hujan, dan penyinaran matahari.

Provinsi Papua Pegunungan merupakan daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang bervariasi di tiap daerahnya. Berdasarkan pencatatan di Stasiun Meteorologi Wamena Jayawijaya, pada tahun 2023, curah hujan tercatat sebesar 273,00 mm dan jumlah hari hujan tercatat sebanyak 28 hari.

Selanjutnya kelembaban udara minimum tercatat sebesar 30 persen dan maksimum sebesar 98 persen. Sementara tekanan udara bervariasi antara 828,00 mb sampai 837,90 mb. Adapun penyinaran matahari di Papua Pegunungan pada tahun 2023 mencapai 3,62 jam.

Suhu udara suatu tempat ditentukan oleh penyinaran matahari, tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut, dan sifat permukaan bumi. Suhu udara terendah di Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2023 terjadi di Stasiun Meteorologi Wamena Jayawijaya sebesar 15,20 ºC. Sebaliknya, suhu tinggi mencapai 27,80 ºC.

6.2 Visi dan Misi

Visi Provinsi Papua Pegunungan merupakan gambaran masa depan yang diharapkan dan menjadi cita-cita bersama seluruh pemangku kepentingan untuk diwujudkan dalam lima tahun mendatang. Sebagai salah satu Provinsi baru di Indonesia, Papua Pegunungan memerlukan visi yang mampu mengarahkan upaya pembangunan menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Adapun Visi Provinsi Papua Pegunungan adalah **"Mewujudkan Provinsi Papua Pegunungan BERSINAR",** dengan Misi sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan berbudaya, dalam lingkungan sosial yang inklusif.
2. Terwujudnya kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
3. Terbangunnya infrastruktur yang merata, berkualitas dan terintegrasi dalam mengurangi keterisolasian dengan memperhatikan aspek lingkungan.

4. Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing melalui pemanfaatan sumber daya lokal, investasi, serta peningkatan ketahanan pangan.

6.3 Organisasi dan Kelembagaan

Penataan Kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat startegis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Penataan kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sesuai dengan Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut makan telah disahkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Pegunungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Pegunungan, dengan susunan SKPD berjumlah 22 SKPD yang terbagi menjadi 14 Dinas Daerah, 4 Badan, 1 Sekretariat Daerah dengan 6 Biro dan Kepala Daerah serta Sekretariat DPRP dan Sekretariat MPRP dan 1 Inspektorat Daerah. Adapun SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
14. Dinas Pertanian, Pangan, Keluatan dan Perikanan.
15. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
16. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
19. Inspektorat Daerah.
20. Sekretariat Daerah
    a. Biro Umum.
    b. Biro Organisasi.
    c. Biro Hukum.
    d. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
    e. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
    f. Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat.
21. Sekretariat DPRP
22. Sekretariat MRPP

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab VI, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025, diketahui bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 telah berjalan sesuai arahan kebijakan yang ditetapkan, meskipun realisasinya beluam mencapai 100%. Hal ini mencerminkan upaya nyata Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel.
2. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyusunan CaLK ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai terkait pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan ini terdiri atas:
   a. Laporan Realisasi Anggaran
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
   c. Neraca
   d. Laporan Operasional
   e. Laporan Arus Kas
   f. Laporan Perubahan Ekuitas
   g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   Seluruh laporan tersebut secara komprehensif menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi, perubahan Saldo Anggaran Lebih, posisi keuangan, aktivitas operasional keuangan, kondisi kas secara objektif, serta perubahan ekuitas. Dengan demikian, laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai pelaksanaan APBD serta kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.
4. Pendapatan-LRA Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025:
   - Target Pendapatan 1.964.971.666.678,00
   - Realisasi Pendapatan 1.812.439.425.310,10
   - Kurang realisasi pendapatan **152.532.241.367,90**
5. Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025:
   - Total belanja dan transfer yang dianggarkan 2.120.764.717.149,07
   - Realisasi belanja dan transfer 1.957.270.101.354,28
   - Kurang realisasi belanja dan transfer **163.494.615.794,79**
6. Realisasi Belanja Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025:
   - Belanja Modal 366.778.176.936,00
   - Belanja Tak Terduga 14.681.729.000,00
   - Transfer 96.512.972.249,00
7. Realisasi Pembiayaan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025:
   - Penerimaan Pembiayaan 155.793.050.471,07
   - Pengeluaran Pembiayaan 0,00
   - Pembiayaan Netto 155.793.050.471,07

8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 10.962.374.426,89
9. Saldo Anggaran Lebih Akhir 10.962.374.426,89
10. Neraca Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Per 31 Desember 2025:
    - Total Aset 2.694.281.266.712,19
    - Total Kewajiban 74.938.132.021,00
    - Total Ekuitas 2.619.343.134.691,19
11. Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025:
    - Pendapatan LO 2.136.149.750.702,10
    - Beban LO 1.647.113.193.847,85
    - Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasi (92.324.380,00)
    - Pos Luar Biasa (14.681.729.000,00)
    - Surplus/Defisit LO 474.262.503.474,25
12. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025:
    - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 221.947.500.891,82
    - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (366.778.176.936,00)
    - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00
    - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 1.157.790.296,00
    - Kenaikan/(Penurunan) Kas (143.672.885.748,18)
    - Saldo Awal Kas 153.604.329.833,07
    - Koreksi Kas Tahun Berjalan 0,00
    - Kas Lainnya 0,00
    - Saldo Akhir Kas di Fungsi Perbendaharaan 9.931.444.084,89
    - Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00
    - Kas di Bendahara Penerimaan 0,00
    - Kas Lainnya 1.316.737.455,00
    - Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan 11.248.181.539,89

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kami berharap penyampaian laporan ini dapat memenuhi prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas, serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Kami menyakini bahwa secara bertahap akan terwujud tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setipa tugas, karya dan pengabdian kita semua. Amin

GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN,

Dr. (H.C.) JOHN TABO, S.E., M.B.A.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.1.1.1.1a - Rincian atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Nama Rekening	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	2.164.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.131.000,00	0,00	2.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.000,00	0,00	0,00	0,00	1.856.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	22.172.000,00	31.158.000,00	18.299.000,00	1.831.000,00	17.230.000,00	20.236.000,00	16.253.000,00	13.442.000,00	166.972.000,00	25.238.000,00	20.574.000,00	44.410.000,00	397.815.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	128.000,00	0,00	3.093.000,00	1.872.000,00	1.780.000,00	3.523.000,00	200.000,00	0,00	679.000,00	704.000,00	3.545.000,00	1.923.000,00	17.447.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634.000,00	0,00	0,00	0,00	5.634.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	31.208.000,00	5.182.000,00	5.786.000,00	15.960.000,00	1.528.000,00	28.966.000,00	29.710.000,00	12.816.000,00	0,00	0,00	37.533.000,00	125.475.000,00	294.164.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	42.038.000,00	54.863.000,00	63.368.000,00	52.763.000,00	35.455.000,00	56.556.000,00	45.818.000,00	98.033.000,00	204.100.000,00	99.950.000,00	91.937.000,00	135.312.000,00	980.193.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	10.382.000,00	12.955.000,00	18.081.000,00	8.596.000,00	21.104.000,00	8.900.000,00	14.786.000,00	19.124.000,00	18.219.000,00	15.464.000,00	18.247.000,00	39.262.000,00	205.120.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	841.000,00	0,00	2.457.000,00	0,00	0,00	5.126.000,00	3.140.000,00	1.255.000,00	1.236.000,00	14.055.000,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	11.119.000,00	0,00	536.000,00	0,00	452.000,00	0,00	1.140.000,00	1.155.000,00	0,00	4.250.000,00	1.292.000,00	80.231.000,00	100.175.000,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	0,00	5.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.000,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	0,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	0,00	6.058.000,00	0,00	559.000,00	9.851.000,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759.000,00	0,00	0,00	0,00	5.759.000,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	2.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850.000,00	14.091.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	26.892.000,00	41.913.000,00	14.731.000,00	33.680.000,00	19.530.000,00	18.565.000,00	30.974.000,00	42.614.000,00	53.852.000,00	56.787.000,00	61.284.000,00	59.309.000,00	460.131.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	19.832.000,00	61.685.000,00	67.682.000,00	34.727.000,00	39.912.000,00	25.348.000,00	26.575.000,00	110.588.000,00	126.889.000,00	84.308.000,00	63.921.000,00	159.880.000,00	821.347.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	1.644.000,00	0,00	0,00	0,00	17.228.000,00	0,00	12.890.000,00	1.292.000,00	1.199.000,00	3.716.000,00	37.969.000,00

Nama Rekening	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	3.923.000,00	7.011.000,00	5.926.000,00	3.587.000,00	4.606.000,00	6.696.000,00	165.065.000,00	7.400.000,00	19.889.000,00	11.680.000,00	144.058.000,00	620.988.000,00	1.000.829.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	0,00	0,00	7.140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.922.000,00	3.754.000,00	2.280.000,00	0,00	8.221.000,00	0,00	24.317.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	98.876.000,00	38.565.000,00	146.865.000,00	41.840.000,00	82.436.000,00	94.855.000,00	82.010.000,00	147.843.000,00	161.156.000,00	66.693.000,00	114.940.000,00	159.600.000,00	1.235.679.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.000,00	0,00	0,00	0,00	1.742.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00	0,00	0,00	1.404.000,00	15.767.000,00	19.453.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	0,00	0,00	14.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689.000,00	0,00	0,00	0,00	21.980.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	4.192.000,00	55.550.000,00	8.691.000,00	33.989.000,00	7.391.000,00	0,00	0,00	0,00	4.207.000,00	2.239.000,00	0,00	0,00	116.259.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	341.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.000,00	0,00	0,00	1.151.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	59.954.000,00	50.917.000,00	65.666.000,00	65.912.000,00	49.430.000,00	41.583.000,00	51.851.000,00	101.726.814,00	130.707.000,00	69.383.000,00	56.492.000,00	92.793.000,00	836.414.814,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	86.000,00	268.000,00	294.000,00	1.096.000,00	725.000,00	438.000,00	3.768.000,00	134.000,00	1.352.000,00	2.799.000,00	2.154.000,00	704.000,00	13.818.000,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	9.998.000,00	1.912.000,00	665.000,00	742.000,00	2.367.000,00	1.253.000,00	3.766.000,00	894.000,00	3.458.000,00	3.032.000,00	39.484.000,00	69.612.000,00	137.183.000,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	168.000,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	7.302.000,00	504.000,00	0,00	0,00	280.000,00	8.763.000,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.000,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	6.364.000,00
PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00

Nama Rekening	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	9.825.000,00	0,00	185.000,00	13.450.000,00	12.600.000,00	41.014.000,00	88.214.000,00
TOTAL	**357.307.000,00**	**371.266.000,00**	**443.898.000,00**	**297.538.000,00**	**287.395.000,00**	**313.803.000,00**	**503.042.000,00**	**572.194.000,00**	**934.794.000,00**	**467.618.000,00**	**680.140.000,00**	**1.665.559.000,00**	**6.894.554.000,00**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.1.1.1.1b - Rincian atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Nama Rekening	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	232.080.000,00	34.740.000,00	36.477.000,00	182.385.000,00	0,00	358.560.000,00	106.740.000,00	146.460.000,00	35.580.000,00	0,00	0,00	177.300.000,00	1.310.322.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	147.360.000,00	0,00	95.880.000,00	0,00	12.480.000,00	62.400.000,00	12.480.000,00	52.578.000,00	16.140.000,00	0,00	61.668.000,00	49.320.000,00	510.306.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	24.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	7.440.000,00	46.080.000,00	18.180.000,00	21.294.000,00	50.940.000,00	57.120.000,00	19.560.000,00	89.760.000,00	41.520.000,00	40.320.000,00	41.760.000,00	131.460.000,00	565.434.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0,00	14.940.000,00	66.480.000,00	16.500.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	130.380.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	80.256.000,00	43.656.000,00	83.715.000,00	73.475.000,00	58.518.000,00	33.682.000,00	46.728.000,00	21.396.000,00	82.092.000,00	45.192.000,00	45.360.000,00	75.744.000,00	689.814.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	1.506.000,00
BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	98.400.000,00	0,00	13.680.000,00	0,00	35.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500.000,00	0,00	0,00	274.860.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
TOTAL	**590.316.000,00**	**139.416.000,00**	**314.412.000,00**	**293.654.000,00**	**168.978.000,00**	**511.762.000,00**	**185.508.000,00**	**320.514.000,00**	**176.838.000,00**	**213.012.000,00**	**148.788.000,00**	**446.424.000,00**	**3.509.622.000,00**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.1.1.1.1c - Rincian atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Bulan	PBBKB Bahan Bakar Bensin	PBBKB Bahan Bakar Solar	Total	No Surat Penetapan dari Pertamina Patra Niaga
Januari	670.350.920,00	587.883.875,00	1.258.234.795,00	No. 022/PNDB00000/2025-S4
Februari	691.252.825,00	451.403.406,00	1.142.656.231,00	No. 163/PNDB00000/2025-S4
Maret	693.096.163,00	347.380.837,00	1.040.477.000,00	No. 266/PNDB00000/2025-S4
April	426.663.096,00	285.856.561,00	712.519.657,00	No. 398/PNDB00000/2025-S4
Mei	446.140.084,00	273.889.007,00	720.029.091,00	No. 476/PNDB00000/2025-S4
Juni	546.824.273,00	303.952.975,00	850.777.248,00	No. 524/PNDB00000/2025-S4
Juli	431.738.853,00	214.265.910,00	646.004.763,00	No. 569/PNDB00000/2025-S4
Agustus	581.736.285,00	446.368.060,00	1.028.104.345,00	No. 626/PNDB00000/2025-S4
September	468.530.911,00	343.946.882,00	812.477.793,00	No. 660/PNDB00000/2025-S4
Oktober	0,00	915.258.717,00	915.258.717,00	No. 865/PNDB00000/2025-S4
November	0,00	1.117.779.919,00	1.117.779.919,00	No. 901/PNDB00000/2025-S4
Desember	0,00	1.237.696.471,00	1.237.696.471,00	No. 929/PNDB00000/2025-S4
Total	**4.956.333.410,00**	**6.525.682.620,00**	**11.482.016.030,00**	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.1.1.1.1e - Rincian atas Pajak Rokok

Nama Rekening	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	44.428.723.914,00	0,00	0,00	0,00	24.781.571.474,00	0,00	26.531.506.005,00	0,00	17.304.681.506,00	113.046.482.899,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.428.723.914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.781.571.474,00**	**0,00**	**26.531.506.005,00**	**0,00**	**17.304.681.506,00**	**113.046.482.899,00**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.1.1.1.1f - Rincian atas Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

No.	Pemerintah Daerah	Nilai Transfer (Rp)
1	Kabupaten Jayawijaya	133.580.475,00
2	Kabupaten Yahukimo	0,00
3	Kabupaten Tolikara	111.402.380,00
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00
6	Kabupaten Yalimo	0,00
7	Kabupaten Nduga	0,00
8	Kabupaten Lanny Jaya	0,00
	Jumlah	**244.982.855,00**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.1.1.1.3a - Rincian atas Jasa Giro

No	Keterangan	Bank	Nama Rek Bank	Tgl Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total Saldo
1	JSA GIRO 1 2025 7000102111122	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	68.719.370,00	-	68.719.370,00
2	JSA GIRO DARI 7000102000001 7000102000001	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	49.771,00	-	68.769.141,00
3	JSA GIRO DARI 7000102000006 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	4.109,00	-	68.773.250,00
4	JSA GIRO DARI 7000102000009 7000102000009	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	18.214,00	-	68.791.464,00
5	JSA GIRO DARI 7000102000011 7000102000011	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	16.365.520,00	-	85.156.984,00
6	JSA GIRO DARI 7000102000017 7000102000017	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	1.369,00	-	85.158.353,00
7	JSA GIRO DARI 7000102000018 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	10.952,00	-	85.169.305,00
8	JSA GIRO DARI 7000102000022 7000102000022	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	11.447.618,00	-	96.616.923,00
9	JSA GIRO DARI 7000102000029 7000102000029	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	18.078,00	-	96.635.001,00
10	JSA GIRO DARI 7000102000033 7000102000033	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	7.954.321,00	-	104.589.322,00
11	JSA GIRO DARI 7000102000066 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	92.643,00	-	104.681.965,00
12	JSA GIRO DARI 7000102000088 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	31/01/25	3.310.669,00	-	107.992.634,00
13	JSA GIRO 2 2025 7000102111122	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	26.334.087,00	-	134.326.721,00
14	JSA GIRO DARI 7000102000001 7000102000001	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	13.379,00	-	134.340.100,00
15	JSA GIRO DARI 7000102000003 7000102000003	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	17.120,00	-	134.357.220,00
16	JSA GIRO DARI 7000102000004 7000102000004	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	98.280,00	-	134.455.500,00
17	JSA GIRO DARI 7000102000006 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	73.962,00	-	134.529.462,00
18	JSA GIRO DARI 7000102000007 7000102000007	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	2.824,00	-	134.532.286,00
19	JSA GIRO DARI 7000102000008 7000102000008	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	4.108,00	-	134.536.394,00
20	JSA GIRO DARI 7000102000011 7000102000011	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	14.781.760,00	-	149.318.154,00
21	JSA GIRO DARI 7000102000014 7000102000014	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	24.642,00	-	149.342.796,00
22	JSA GIRO DARI 7000102000017 7000102000017	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	2.738,00	-	149.345.534,00
23	JSA GIRO DARI 7000102000018 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	6.845,00	-	149.352.379,00
24	JSA GIRO DARI 7000102000020 7000102000020	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	20.540,00	-	149.372.919,00
25	JSA GIRO DARI 7000102000021 7000102000021	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	15.425,00	-	149.388.344,00
26	JSA GIRO DARI 7000102000022 7000102000022	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	10.339.784,00	-	159.728.128,00
27	JSA GIRO DARI 7000102000024 7000102000024	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	1.910,00	-	159.730.038,00
28	JSA GIRO DARI 7000102000025 7000102000025	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	2.739,00	-	159.732.777,00
29	JSA GIRO DARI 7000102000026 7000102000026	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	21.912,00	-	159.754.689,00
30	JSA GIRO DARI 7000102000033 7000102000033	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	6.999.616,00	-	166.754.305,00
31	JSA GIRO DARI 7000102000036 7000102000036	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	6.867,00	-	166.761.172,00
32	JSA GIRO DARI 7000102000066 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	72.797,00	-	166.833.969,00
33	JSA GIRO DARI 7000102000088 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	3.836.269,00	-	170.670.238,00
34	JSA GIRO DARI 7000102000333 7000102000333	01 RKUD	BANK PAPUA	28/02/25	17.039,00	-	170.687.277,00
35	JSA GIRO 3 2025 7000102111122	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	7.414.723,00	-	178.102.000,00
36	JSA GIRO DARI 7000102000001 7000102000001	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	18.183,00	-	178.120.183,00
37	JSA GIRO DARI 7000102000002 7000102000002	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	6.284,00	-	178.126.467,00
38	JSA GIRO DARI 7000102000003 7000102000003	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	9.514,00	-	178.135.981,00
39	JSA GIRO DARI 7000102000004 7000102000004	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	66.072,00	-	178.202.053,00
40	JSA GIRO DARI 7000102000006 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	3.391,00	-	178.205.444,00
41	JSA GIRO DARI 7000102000007 7000102000007	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	34.683,00	-	178.240.127,00
42	JSA GIRO DARI 7000102000008 7000102000008	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	25.785,00	-	178.265.912,00

No	Keterangan	Bank	Nama Rek Bank	Tgl Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total Saldo
43	JSA GIRO DARI 7000102000009 7000102000009	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	1.780,00	-	178.267.692,00
44	JSA GIRO DARI 7000102000010 7000102000010	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	86.879,00	-	178.354.571,00
45	JSA GIRO DARI 7000102000011 7000102000011	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	10.160.024,00	-	188.514.595,00
46	JSA GIRO DARI 7000102000013 7000102000013	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	84.066,00	-	188.598.661,00
47	JSA GIRO DARI 7000102000014 7000102000014	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	10.264,00	-	188.608.925,00
48	JSA GIRO DARI 7000102000015 7000102000015	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	3.766,00	-	188.612.691,00
49	JSA GIRO DARI 7000102000016 7000102000016	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	14.582,00	-	188.627.273,00
50	JSA GIRO DARI 7000102000017 7000102000017	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	2.297,00	-	188.629.570,00
51	JSA GIRO DARI 7000102000018 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	10.798,00	-	188.640.368,00
52	JSA GIRO DARI 7000102000019 7000102000019	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	14.335,00	-	188.654.703,00
53	JSA GIRO DARI 7000102000020 7000102000020	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	24.383,00	-	188.679.086,00
54	JSA GIRO DARI 7000102000021 7000102000021	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	24.717,00	-	188.703.803,00
55	JSA GIRO DARI 7000102000022 7000102000022	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	4.958.853,00	-	193.662.656,00
56	JSA GIRO DARI 7000102000025 7000102000025	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	2.876,00	-	193.665.532,00
57	JSA GIRO DARI 7000102000026 7000102000026	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	2.397,00	-	193.667.929,00
58	JSA GIRO DARI 7000102000033 7000102000033	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	1.198.787,00	-	194.866.716,00
59	JSA GIRO DARI 7000102000036 7000102000036	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	36.322,00	-	194.903.038,00
60	JSA GIRO DARI 7000102000055 7000102000055	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	18.421,00	-	194.921.459,00
61	JSA GIRO DARI 7000102000066 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	577.186,00	-	195.498.645,00
62	JSA GIRO DARI 7000102000088 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	713.759,00	-	196.212.404,00
63	JSA GIRO DARI 7000102000111 7000102000111	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	17.757,00	-	196.230.161,00
64	JSA GIRO DARI 7000102000333 7000102000333	01 RKUD	BANK PAPUA	31/03/25	2.037,00	-	196.232.198,00
65	JSA GIRO 4 2025 7000102111122	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	9.187.685,00	-	205.419.883,00
66	JSA GIRO DARI 7000102000001 7000102000001	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	165.243,00	-	205.585.126,00
67	JSA GIRO DARI 7000102000003 7000102000003	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	5.594,00	-	205.590.720,00
68	JSA GIRO DARI 7000102000006 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	4.284,00	-	205.595.004,00
69	JSA GIRO DARI 7000102000007 7000102000007	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	11.792,00	-	205.606.796,00
70	JSA GIRO DARI 7000102000008 7000102000008	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	15.764,00	-	205.622.560,00
71	JSA GIRO DARI 7000102000010 7000102000010	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	45.885,00	-	205.668.445,00
72	JSA GIRO DARI 7000102000011 7000102000011	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	3.091.559,00	-	208.760.004,00
73	JSA GIRO DARI 7000102000013 7000102000013	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	250.425,00	-	209.010.429,00
74	JSA GIRO DARI 7000102000014 7000102000014	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	16.210,00	-	209.026.639,00
75	JSA GIRO DARI 7000102000017 7000102000017	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	8.940,00	-	209.035.579,00
76	JSA GIRO DARI 7000102000018 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	68.480,00	-	209.104.059,00
77	JSA GIRO DARI 7000102000022 7000102000022	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	2.247.606,00	-	211.351.665,00
78	JSA GIRO DARI 7000102000026 7000102000026	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	1.964,00	-	211.353.629,00
79	JSA GIRO DARI 7000102000033 7000102000033	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	184.333,00	-	211.537.962,00
80	JSA GIRO DARI 7000102000055 7000102000055	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	20.670,00	-	211.558.632,00
81	JSA GIRO DARI 7000102000066 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	127.207,00	-	211.685.839,00
82	JSA GIRO DARI 7000102000088 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	698.949,00	-	212.384.788,00
83	JSA GIRO DARI 7000102000111 7000102000111	01 RKUD	BANK PAPUA	30/04/25	45.270,00	-	212.430.058,00
84	JSA GIRO 5 2025 7000102111122	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	4.957.425,00	-	217.387.483,00
85	JSA GIRO DARI 7000102000001 7000102000001	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	365.057,00	-	217.752.540,00
86	JSA GIRO DARI 7000102000002 7000102000002	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	4.509,00	-	217.757.049,00
87	JSA GIRO DARI 7000102000003 7000102000003	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	40.338,00	-	217.797.387,00
88	JSA GIRO DARI 7000102000004 7000102000004	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	2.694,00	-	217.800.081,00
89	JSA GIRO DARI 7000102000006 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	23.866,00	-	217.823.947,00
90	JSA GIRO DARI 7000102000007 7000102000007	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	7.016,00	-	217.830.963,00
91	JSA GIRO DARI 7000102000008 7000102000008	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	7.555,00	-	217.838.518,00

No	Keterangan	Bank	Nama Rek Bank	Tgl Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total Saldo
92	JSA GIRO DARI 7000102000009 7000102000009	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	19.048,00	-	217.857.566,00
93	JSA GIRO DARI 7000102000010 7000102000010	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	1.591,00	-	217.859.157,00
94	JSA GIRO DARI 7000102000011 7000102000011	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	173.847,00	-	218.033.004,00
95	JSA GIRO DARI 7000102000013 7000102000013	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	45.906,00	-	218.078.910,00
96	JSA GIRO DARI 7000102000014 7000102000014	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	3.948,00	-	218.082.858,00
97	JSA GIRO DARI 7000102000015 7000102000015	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	11.701,00	-	218.094.559,00
98	JSA GIRO DARI 7000102000016 7000102000016	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	6.099,00	-	218.100.658,00
99	JSA GIRO DARI 7000102000017 7000102000017	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	6.849,00	-	218.107.507,00
100	JSA GIRO DARI 7000102000018 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	1.770,00	-	218.109.277,00
101	JSA GIRO DARI 7000102000019 7000102000019	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	12.452,00	-	218.121.729,00
102	JSA GIRO DARI 7000102000020 7000102000020	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	7.032,00	-	218.128.761,00
103	JSA GIRO DARI 7000102000021 7000102000021	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	106.597,00	-	218.235.358,00
104	JSA GIRO DARI 7000102000022 7000102000022	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	403.975,00	-	218.639.333,00
105	JSA GIRO DARI 7000102000025 7000102000025	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	15.688,00	-	218.655.021,00
106	JSA GIRO DARI 7000102000033 7000102000033	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	131.980,00	-	218.787.001,00
107	JSA GIRO DARI 7000102000036 7000102000036	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	39.382,00	-	218.826.383,00
108	JSA GIRO DARI 7000102000055 7000102000055	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	5.934,00	-	218.832.317,00
109	JSA GIRO DARI 7000102000066 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	50.990,00	-	218.883.307,00
110	JSA GIRO DARI 7000102000088 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	395.947,00	-	219.279.254,00
111	JSA GIRO DARI 7000102000111 7000102000111	01 RKUD	BANK PAPUA	31/05/25	35.065,00	-	219.314.319,00
112	JSA GIRO 6 2025 7000102111122	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	4.313.759,00	-	223.628.078,00
113	JSA GIRO DARI 7000102000001 7000102000001	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	110.119,00	-	223.738.197,00
114	JSA GIRO DARI 7000102000002 7000102000002	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	4.677,00	-	223.742.874,00
115	JSA GIRO DARI 7000102000003 7000102000003	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	8.029,00	-	223.750.903,00
116	JSA GIRO DARI 7000102000004 7000102000004	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	38.044,00	-	223.788.947,00
117	JSA GIRO DARI 7000102000006 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	23.741,00	-	223.812.688,00
118	JSA GIRO DARI 7000102000007 7000102000007	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	51.578,00	-	223.864.266,00
119	JSA GIRO DARI 7000102000008 7000102000008	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	5.414,00	-	223.869.680,00
120	JSA GIRO DARI 7000102000009 7000102000009	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	9.529,00	-	223.879.209,00
121	JSA GIRO DARI 7000102000010 7000102000010	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	34.417,00	-	223.913.626,00
122	JSA GIRO DARI 7000102000011 7000102000011	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	17.793,00	-	223.931.419,00
123	JSA GIRO DARI 7000102000013 7000102000013	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	99.003,00	-	224.030.422,00
124	JSA GIRO DARI 7000102000014 7000102000014	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	11.004,00	-	224.041.426,00
125	JSA GIRO DARI 7000102000015 7000102000015	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	81.480,00	-	224.122.906,00
126	JSA GIRO DARI 7000102000016 7000102000016	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	4.470,00	-	224.127.376,00
127	JSA GIRO DARI 7000102000017 7000102000017	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	31.830,00	-	224.159.206,00
128	JSA GIRO DARI 7000102000018 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	5.484,00	-	224.164.690,00
129	JSA GIRO DARI 7000102000019 7000102000019	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	20.593,00	-	224.185.283,00
130	JSA GIRO DARI 7000102000020 7000102000020	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	13.502,00	-	224.198.785,00
131	JSA GIRO DARI 7000102000021 7000102000021	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	5.119,00	-	224.203.904,00
132	JSA GIRO DARI 7000102000022 7000102000022	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	30.339,00	-	224.234.243,00
133	JSA GIRO DARI 7000102000025 7000102000025	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	1.591,00	-	224.235.834,00
134	JSA GIRO DARI 7000102000033 7000102000033	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	74.628,00	-	224.310.462,00
135	JSA GIRO DARI 7000102000036 7000102000036	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	3.530,00	-	224.313.992,00
136	JSA GIRO DARI 7000102000055 7000102000055	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	5.957,00	-	224.319.949,00
137	JSA GIRO DARI 7000102000066 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	312.023,00	-	224.631.972,00
138	JSA GIRO DARI 7000102000088 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	604.309,00	-	225.236.281,00
139	JSA GIRO DARI 7000102000111 7000102000111	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	4.398,00	-	225.240.679,00
140	JSA GIRO DARI 7000102000333 7000102000333	01 RKUD	BANK PAPUA	30/06/25	1.533,00	-	225.242.212,00

No	Keterangan	Bank	Nama Rek Bank	Tgl Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total Saldo
141	JSA GIRO 7 2025 7000102111122	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	16.712.137,00	-	241.954.349,00
142	JSA GIRO DARI 7000102000001 7000102000001	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	21.322,00	-	241.975.671,00
143	JSA GIRO DARI 7000102000002 7000102000002	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	5.199,00	-	241.980.870,00
144	JSA GIRO DARI 7000102000004 7000102000004	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	46.708,00	-	242.027.578,00
145	JSA GIRO DARI 7000102000006 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	18.600,00	-	242.046.178,00
146	JSA GIRO DARI 7000102000007 7000102000007	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	5.542,00	-	242.051.720,00
147	JSA GIRO DARI 7000102000009 7000102000009	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	26.553,00	-	242.078.273,00
148	JSA GIRO DARI 7000102000010 7000102000010	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	49.279,00	-	242.127.552,00
149	JSA GIRO DARI 7000102000011 7000102000011	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	8.707.614,00	-	250.835.166,00
150	JSA GIRO DARI 7000102000013 7000102000013	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	282.195,00	-	251.117.361,00
151	JSA GIRO DARI 7000102000014 7000102000014	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	9.056,00	-	251.126.417,00
152	JSA GIRO DARI 7000102000016 7000102000016	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	9.725,00	-	251.136.142,00
153	JSA GIRO DARI 7000102000017 7000102000017	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	9.339,00	-	251.145.481,00
154	JSA GIRO DARI 7000102000018 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	34.636,00	-	251.180.117,00
155	JSA GIRO DARI 7000102000019 7000102000019	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	51.322,00	-	251.231.439,00
156	JSA GIRO DARI 7000102000020 7000102000020	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	13.266,00	-	251.244.705,00
157	JSA GIRO DARI 7000102000021 7000102000021	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	32.326,00	-	251.277.031,00
158	JSA GIRO DARI 7000102000025 7000102000025	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	77.607,00	-	251.354.638,00
159	JSA GIRO DARI 7000102000036 7000102000036	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	7.190,00	-	251.361.828,00
160	JSA GIRO DARI 7000102000055 7000102000055	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	13.833,00	-	251.375.661,00
161	JSA GIRO DARI 7000102000066 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	129.754,00	-	251.505.415,00
162	JSA GIRO DARI 7000102000088 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	1.274.556,00	-	252.779.971,00
163	JSA GIRO DARI 7000102000111 7000102000111	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	8.020,00	-	252.787.991,00
164	JSA GIRO DARI 7000102000333 7000102000333	01 RKUD	BANK PAPUA	31/07/25	4.146,00	-	252.792.137,00
165	JSA GIRO 8 2025 7000102111122	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	14.313.806,00	-	267.105.943,00
166	JSA GIRO DARI 7000102000003 7000102000003	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	4.726,00	-	267.110.669,00
167	JSA GIRO DARI 7000102000004 7000102000004	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	64.011,00	-	267.174.680,00
168	JSA GIRO DARI 7000102000006 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	14.871,00	-	267.189.551,00
169	JSA GIRO DARI 7000102000008 7000102000008	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	5.466,00	-	267.195.017,00
170	JSA GIRO DARI 7000102000009 7000102000009	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	7.020,00	-	267.202.037,00
171	JSA GIRO DARI 7000102000010 7000102000010	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	60.963,00	-	267.263.000,00
172	JSA GIRO DARI 7000102000018 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	27.603,00	-	267.290.603,00
173	JSA GIRO DARI 7000102000020 7000102000020	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	110.490,00	-	267.401.093,00
174	JSA GIRO DARI 7000102000025 7000102000025	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	58.218,00	-	267.459.311,00
175	JSA GIRO DARI 7000102000026 7000102000026	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	8.925,00	-	267.468.236,00
176	JSA GIRO DARI 7000102000029 7000102000029	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	3.318,00	-	267.471.554,00
177	JSA GIRO DARI 7000102000055 7000102000055	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	8.352,00	-	267.479.906,00
178	JSA GIRO DARI 7000102000066 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	25.434,00	-	267.505.340,00
179	JSA GIRO DARI 7000102000088 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	31/08/25	2.339.251,00	-	269.844.591,00
180	JSA GIRO 9 2025	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	4.414.605,00	-	274.259.196,00
181	JSA GIRO DARI 7000102000001	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	293.862,00	-	274.553.058,00
182	JSA GIRO DARI 7000102000003	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	23.368,00	-	274.576.426,00
183	JSA GIRO DARI 7000102000004	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	3.457,00	-	274.579.883,00
184	JSA GIRO DARI 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	1.437,00	-	274.581.320,00
185	JSA GIRO DARI 7000102000007	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	3.893,00	-	274.585.213,00
186	JSA GIRO DARI 7000102000009	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	4.494,00	-	274.589.707,00
187	JSA GIRO DARI 7000102000013	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	14.612,00	-	274.604.319,00
188	JSA GIRO DARI 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	12.327,00	-	274.616.646,00
189	JSA GIRO DARI 7000102000020	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	68.834,00	-	274.685.480,00

No	Keterangan	Bank	Nama Rek Bank	Tgl Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total Saldo
190	JSA GIRO DARI 7000102000021	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	9.901,00	-	274.695.381,00
191	JSA GIRO DARI 7000102000025	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	45.072,00	-	274.740.453,00
192	JSA GIRO DARI 7000102000026	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	20.825,00	-	274.761.278,00
193	JSA GIRO DARI 7000102000028	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	4.110,00	-	274.765.388,00
194	JSA GIRO DARI 7000102000055	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	35.075,00	-	274.800.463,00
195	JSA GIRO DARI 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	71.794,00	-	274.872.257,00
196	JSA GIRO DARI 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	30/09/25	313.333,00	-	275.185.590,00
197	JSA GIRO 10 2025	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	61.783.289,00	-	336.968.879,00
198	JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	287.070,00	-	337.255.949,00
199	7000102000001 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	12.202,00	-	337.268.151,00
200	7000102000002 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	10.001,00	-	337.278.152,00
201	7000102000003 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	24.296,00	-	337.302.448,00
202	7000102000004 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	27.631,00	-	337.330.079,00
203	7000102000006 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	85.555,00	-	337.415.634,00
204	7000102000007 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	26.104,00	-	337.441.738,00
205	7000102000008 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	13.274,00	-	337.455.012,00
206	7000102000009 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	10.895,00	-	337.465.907,00
207	7000102000010 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	28.840,00	-	337.494.747,00
208	7000102000013 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	255.931,00	-	337.750.678,00
209	7000102000014 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	28.227,00	-	337.778.905,00
210	7000102000015 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	11.832,00	-	337.790.737,00
211	7000102000016 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	27.841,00	-	337.818.578,00
212	7000102000017 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	13.017,00	-	337.831.595,00
213	7000102000018 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	122.936,00	-	337.954.531,00
214	7000102000019 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	458.557,00	-	338.413.088,00
215	7000102000020 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	61.608,00	-	338.474.696,00
216	7000102000021 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	48.200,00	-	338.522.896,00
217	7000102000026 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	28.767,00	-	338.551.663,00
218	7000102000029 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	39.774,00	-	338.591.437,00
219	7000102000036 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	29.010,00	-	338.620.447,00
220	7000102000055 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	115.407,00	-	338.735.854,00
221	7000102000066 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	784.428,00	-	339.520.282,00
222	7000102000088 JSA GIRO DARI	01 RKUD	BANK PAPUA	31/10/25	1.673,00	-	339.521.955,00
223	Trf BMRIIDJA skngw1607707 OTSUS PROVINSI PAPUA	01 RKUD	BANK PAPUA	06/11/25	95.203.151,00	-	434.725.106,00
224	Trf BMRIIDJA skngw1607708 OTSUS PROVINSI PAPUA	01 RKUD	BANK PAPUA	06/11/25	1.312.470,00	-	436.037.576,00
225	Trf BMRIIDJA skngw1607709 OTSUS PROVINSI PAPUA	01 RKUD	BANK PAPUA	06/11/25	734.122,00	-	436.771.698,00
226	Trf BMRIIDJA skngw1607710 OTSUS PROVINSI PAPUA	01 RKUD	BANK PAPUA	06/11/25	88.588.584,00	-	525.360.282,00
227	Trf BMRIIDJA skngw1607711 OTSUS PROVINSI PAPUA	01 RKUD	BANK PAPUA	06/11/25	2.195.159,00	-	527.555.441,00
228	Trf BMRIIDJA skngw1607712 OTSUS PROVINSI PAPUA	01 RKUD	BANK PAPUA	06/11/25	88.221.752,00	-	615.777.193,00
229	Trf BMRIIDJA skngw1607713 OTSUS PROVINSI PAPUA	01 RKUD	BANK PAPUA	06/11/25	3.593,00	-	615.780.786,00
230	Trf BMRIIDJA skngw1607714 OTSUS PROVINSI PAPUA	01 RKUD	BANK PAPUA	06/11/25	10.702.450,00	-	626.483.236,00
231	Trf BMRIIDJA skngw1607715 OTSUS PROVINSI PAPUA	01 RKUD	BANK PAPUA	06/11/25	11.371.882,00	-	637.855.118,00
232	Trf BMRIIDJA skngw1607716 OTSUS PROVINSI PAPUA	01 RKUD	BANK PAPUA	06/11/25	70.451.521,00	-	708.306.639,00
233	JSA GIRO 11 2025	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	9.877.345,00	-	718.183.984,00
234	JSA GIRO DARI 7000102000001	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	521.495,00	-	718.705.479,00
235	JSA GIRO DARI 7000102000002	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	2.892,00	-	718.708.371,00
236	JSA GIRO DARI 7000102000003	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	53.811,00	-	718.762.182,00
237	JSA GIRO DARI 7000102000004	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	6.838,00	-	718.769.020,00
238	JSA GIRO DARI 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	11.143,00	-	718.780.163,00

No	Keterangan	Bank	Nama Rek Bank	Tgl Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total Saldo
239	JSA GIRO DARI 7000102000007	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	7.412,00	-	718.787.575,00
240	JSA GIRO DARI 7000102000008	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	44.922,00	-	718.832.497,00
241	JSA GIRO DARI 7000102000009	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	14.514,00	-	718.847.011,00
242	JSA GIRO DARI 7000102000010	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	3.082,00	-	718.850.093,00
243	JSA GIRO DARI 7000102000013	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	53.063,00	-	718.903.156,00
244	JSA GIRO DARI 7000102000014	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	4.176,00	-	718.907.332,00
245	JSA GIRO DARI 7000102000015	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	7.408,00	-	718.914.740,00
246	JSA GIRO DARI 7000102000017	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	5.407.809,00	-	724.322.549,00
247	JSA GIRO DARI 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	27.356,00	-	724.349.905,00
248	JSA GIRO DARI 7000102000019	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	18.435,00	-	724.368.340,00
249	JSA GIRO DARI 7000102000020	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	93.042,00	-	724.461.382,00
250	JSA GIRO DARI 7000102000021	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	28.703,00	-	724.490.085,00
251	JSA GIRO DARI 7000102000028	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	308.219,00	-	724.798.304,00
252	JSA GIRO DARI 7000102000036	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	3.578,00	-	724.801.882,00
253	JSA GIRO DARI 7000102000055	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	20.252,00	-	724.822.134,00
254	JSA GIRO DARI 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	107.207,00	-	724.929.341,00
255	JSA GIRO DARI 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	4.349.829,00	-	729.279.170,00
256	JSA GIRO DARI 7000102000111	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	3.346,00	-	729.282.516,00
257	JSA GIRO DARI 7000102000333	01 RKUD	BANK PAPUA	30/11/25	118.728,00	-	729.401.244,00
258	JSA GIRO 12 2025 7000102111122	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	14.363.485,00	-	743.764.729,00
259	JSA GIRO DARI 7000102000001 7000102000001	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	526.304,00	-	744.291.033,00
260	JSA GIRO DARI 7000102000002 7000102000002	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	5.378,00	-	744.296.411,00
261	JSA GIRO DARI 7000102000003 7000102000003	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	447.364,00	-	744.743.775,00
262	JSA GIRO DARI 7000102000004 7000102000004	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	2.796.226,00	-	747.540.001,00
263	JSA GIRO DARI 7000102000006 7000102000006	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	42.736,00	-	747.582.737,00
264	JSA GIRO DARI 7000102000007 7000102000007	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	53.441,00	-	747.636.178,00
265	JSA GIRO DARI 7000102000008 7000102000008	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	1.528,00	-	747.637.706,00
266	JSA GIRO DARI 7000102000009 7000102000009	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	69.460,00	-	747.707.166,00
267	JSA GIRO DARI 7000102000010 7000102000010	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	56.665,00	-	747.763.831,00
268	JSA GIRO DARI 7000102000013 7000102000013	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	146.252,00	-	747.910.083,00
269	JSA GIRO DARI 7000102000014 7000102000014	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	819.160,00	-	748.729.243,00
270	JSA GIRO DARI 7000102000015 7000102000015	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	38.072,00	-	748.767.315,00
271	JSA GIRO DARI 7000102000016 7000102000016	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	4.090,00	-	748.771.405,00
272	JSA GIRO DARI 7000102000017 7000102000017	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	2.072.071,00	-	750.843.476,00
273	JSA GIRO DARI 7000102000018 7000102000018	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	68.724,00	-	750.912.200,00
274	JSA GIRO DARI 7000102000019 7000102000019	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	206.317,00	-	751.118.517,00
275	JSA GIRO DARI 7000102000020 7000102000020	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	28.081,00	-	751.146.598,00
276	JSA GIRO DARI 7000102000021 7000102000021	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	150.345,00	-	751.296.943,00
277	JSA GIRO DARI 7000102000025 7000102000025	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	14.276,00	-	751.311.219,00
278	JSA GIRO DARI 7000102000026 7000102000026	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	68.216,00	-	751.379.435,00
279	JSA GIRO DARI 7000102000029 7000102000029	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	76.915,00	-	751.456.350,00
280	JSA GIRO DARI 7000102000036 7000102000036	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	7.790,00	-	751.464.140,00
281	JSA GIRO DARI 7000102000055 7000102000055	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	44.588,00	-	751.508.728,00
282	JSA GIRO DARI 7000102000066 7000102000066	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	246.934,00	-	751.755.662,00
283	JSA GIRO DARI 7000102000088 7000102000088	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	8.024.387,00	-	759.780.049,00
284	JSA GIRO DARI 7000102000111 7000102000111	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	24.023,00	-	759.804.072,00
285	JSA GIRO DARI 7000102000333 7000102000333	01 RKUD	BANK PAPUA	31/12/25	43.954,00	-	759.848.026,00
286	JSA GIRO 1 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/01/25	3.310.669,00	-	763.158.695,00
287	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/01/25	-	3.310.669,00	759.848.026,00

No	Keterangan	Bank	Nama Rek Bank	Tgl Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total Saldo
288	JSA GIRO 2 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	28/02/25	3.836.269,00	-	763.684.295,00
289	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	28/02/25	-	3.836.269,00	759.848.026,00
290	JSA GIRO 3 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/03/25	713.759,00	-	760.561.785,00
291	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/03/25	-	713.759,00	759.848.026,00
292	JSA GIRO 4 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	30/04/25	698.949,00	-	760.546.975,00
293	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	30/04/25	-	698.949,00	759.848.026,00
294	JSA GIRO 5 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/05/25	395.947,00	-	760.243.973,00
295	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/05/25	-	395.947,00	759.848.026,00
296	JSA GIRO 6 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	30/06/25	604.309,00	-	760.452.335,00
297	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	30/06/25	-	604.309,00	759.848.026,00
298	JSA GIRO 7 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/07/25	1.274.556,00	-	761.122.582,00
299	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/07/25	-	1.274.556,00	759.848.026,00
300	JSA GIRO 8 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/08/25	2.339.251,00	-	762.187.277,00
301	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/08/25	-	2.339.251,00	759.848.026,00
302	JSA GIRO 9 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	30/09/25	313.333,00	-	760.161.359,00
303	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	30/09/25	-	313.333,00	759.848.026,00
304	JSA GIRO 10 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/10/25	784.428,00	-	760.632.454,00
305	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/10/25	-	784.428,00	759.848.026,00
306	JSA GIRO 11 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	30/11/25	4.349.829,00	-	764.197.855,00
307	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	30/11/25	-	4.349.829,00	759.848.026,00
308	JSA GIRO 12 2025 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/12/25	8.024.387,00	-	767.872.413,00
309	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000088	02 PAD	BANK PAPUA	31/12/25	-	8.024.387,00	759.848.026,00
310	JSA GIRO 1 2025 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	31/01/25	7.954.321,00	-	767.802.347,00
311	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	31/01/25	-	7.954.321,00	759.848.026,00
312	JSA GIRO 2 2025 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	28/02/25	6.999.616,00	-	766.847.642,00
313	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	28/02/25	-	6.999.616,00	759.848.026,00
314	JSA GIRO 3 2025 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	31/03/25	1.198.787,00	-	761.046.813,00
315	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	31/03/25	-	1.198.787,00	759.848.026,00
316	JSA GIRO 4 2025 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	30/04/25	184.333,00	-	760.032.359,00
317	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	30/04/25	-	184.333,00	759.848.026,00
318	JSA GIRO 5 2025 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	31/05/25	131.980,00	-	759.980.006,00
319	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	31/05/25	-	131.980,00	759.848.026,00
320	JSA GIRO 6 2025 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	30/06/25	74.628,00	-	759.922.654,00
321	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000033	03 OTSUS1%	BANK PAPUA	30/06/25	-	74.628,00	759.848.026,00
322	BUNGA REKENING	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	31/07/25	3.592,96	-	759.851.618,96
323	BUNGA	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	31/08/25	10.702.449,76	-	770.554.068,72
324	Bunga	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	30/09/25	11.371.881,65	-	781.925.950,37
325	Bunga	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	31/10/25	70.451.521,25	-	852.377.471,62
326	JASAGIROOTSUSPROVPAPUAPEGBG1%JUL	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	06/11/25	-	3.593,00	852.373.878,62
327	JASAGIROOTSUSPROVPAPUAPEG1%AGU	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	06/11/25	-	10.702.450,00	841.671.428,62
328	JASAGIROOTSUSPROVPAPUAPEG1%SEP	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	06/11/25	-	11.371.882,00	830.299.546,62
329	JASAGIROOTSUSPROVPAPUAPEG1%OKT	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	06/11/25	-	70.451.521,00	759.848.025,62
330	Biaya adm	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	30/11/25	-	25.000,00	759.823.025,62
331	Bunga	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	30/11/25	122.534.962,71	-	882.357.988,33
332	Biaya Adm	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	31/12/25	-	25.000,00	882.332.988,33
333	Bunga	03 OTSUS1%	BANK MANDIRI	31/12/25	81.731.136,91	-	964.064.125,24
334	JSA GIRO 1 2025 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	31/01/25	11.447.618,00	-	975.511.743,24
335	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	31/01/25	-	11.447.618,00	964.064.125,24
336	JSA GIRO 2 2025 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	28/02/25	10.339.784,00	-	974.403.909,24

No	Keterangan	Bank	Nama Rek Bank	Tgl Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Total Saldo
337	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	28/02/25	-	10.339.784,00	964.064.125,24
338	JSA GIRO 3 2025 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	31/03/25	4.958.853,00	-	969.022.978,24
339	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	31/03/25	-	4.958.853,00	964.064.125,24
340	JSA GIRO 4 2025 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	30/04/25	2.247.606,00	-	966.311.731,24
341	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	30/04/25	-	2.247.606,00	964.064.125,24
342	JSA GIRO 5 2025 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	31/05/25	403.975,00	-	964.468.100,24
343	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	31/05/25	-	403.975,00	964.064.125,24
344	JSA GIRO 6 2025 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	30/06/25	30.339,00	-	964.094.464,24
345	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000022	04 OTSUS1,25%	BANK PAPUA	30/06/25	-	30.339,00	964.064.125,24
346	BUNGA REKENING	04 OTSUS1,25%	BANK MANDIRI	31/07/25	61.991.761,11	-	1.026.055.886,35
347	BUNGA	04 OTSUS1,25%	BANK MANDIRI	31/08/25	58.483.299,18	-	1.084.539.185,53
348	Bunga	04 OTSUS1,25%	BANK MANDIRI	30/09/25	2.195.159,29	-	1.086.734.344,82
349	Bunga	04 OTSUS1,25%	BANK MANDIRI	31/10/25	88.221.751,61	-	1.174.956.096,43
350	-JASAGIROOTSUSPROVPAPUAPEGSG1,25%	04 OTSUS1,25%	BANK MANDIRI	06/11/25	-	2.195.159,29	1.172.760.937,14
351	-JASAGIROOTSUSPROVPAPUAPEGSG1,25%	04 OTSUS1,25%	BANK MANDIRI	06/11/25	-	88.221.751,61	1.084.539.185,53
352	Biaya Adm	04 OTSUS1,25%	BANK MANDIRI	30/11/25	-	25.000,00	1.084.514.185,53
353	Bunga	04 OTSUS1,25%	BANK MANDIRI	30/11/25	106.316.307,78	-	1.190.830.493,31
354	Biaya Adm	04 OTSUS1,25%	BANK MANDIRI	31/12/25	-	25.000,00	1.190.805.493,31
355	Bunga	04 OTSUS1,25%	BANK MANDIRI	31/12/25	41.617.396,20	-	1.232.422.889,51
356	JSA GIRO 1 2025 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	31/01/25	16.365.520,00	-	1.248.788.409,51
357	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	31/01/25	-	16.365.520,00	1.232.422.889,51
358	JSA GIRO 2 2025 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	28/02/25	14.781.760,00	-	1.247.204.649,51
359	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	28/02/25	-	14.781.760,00	1.232.422.889,51
360	JSA GIRO 3 2025 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	31/03/25	10.160.024,00	-	1.242.582.913,51
361	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	31/03/25	-	10.160.024,00	1.232.422.889,51
362	JSA GIRO 4 2025 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	30/04/25	3.091.559,00	-	1.235.514.448,51
363	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	30/04/25	-	3.091.559,00	1.232.422.889,51
364	JSA GIRO 5 2025 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	31/05/25	173.847,00	-	1.232.596.736,51
365	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	31/05/25	-	173.847,00	1.232.422.889,51
366	JSA GIRO 6 2025 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	30/06/25	17.793,00	-	1.232.440.682,51
367	JSA GIRO KE 7000102111122 7000102000011	05 DTI	BANK PAPUA	30/06/25	-	17.793,00	1.232.422.889,51
368	BUNGA REKENING	05 DTI	BANK MANDIRI	21/07/25	95.203.150,94	-	1.327.626.040,45
369	BUNGA	05 DTI	BANK MANDIRI	31/08/25	1.312.470,28	-	1.328.938.510,73
370	Bunga	05 DTI	BANK MANDIRI	30/09/25	734.122,17	-	1.329.672.632,90
371	Bunga	05 DTI	BANK MANDIRI	31/10/25	88.588.584,13	-	1.418.261.217,03
372	JASAGIROOTSUSPROVPAPUADTIJULI	05 DTI	BANK MANDIRI	06/11/25	-	95.203.151,00	1.323.058.066,03
373	JASAGIROOTSUSPROVPAPUADTIAGUST	05 DTI	BANK MANDIRI	06/11/25	-	1.312.470,00	1.321.745.596,03
374	JASAGIROOTSUSPAPUADTISEPT	05 DTI	BANK MANDIRI	06/11/25	-	734.122,00	1.321.011.474,03
375	JASAGIROOTSUSPAPUADTIOKTOB	05 DTI	BANK MANDIRI	06/11/25	-	88.588.584,00	1.232.422.890,03
376	Biaya adm	05 DTI	BANK MANDIRI	30/11/25	-	25.000,00	1.232.397.890,03
377	Bunga	05 DTI	BANK MANDIRI	30/11/25	161.680.989,96	-	1.394.078.879,99
378	Biaya Administrasi Bank	05 DTI	BANK MANDIRI	30/12/25	-	25.000,00	1.394.053.879,99
379	Bunga Bank	05 DTI	BANK MANDIRI	30/12/25	75.546.122,11	-	1.469.600.002,10
	Total						**1.469.600.002,10**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.1.1.1.3c - Rincian atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Nama Transaksi	Nilai	Tanggal Setor
1	Sts Denda Keterlambatan Penyelesaian Pkrjan Pemb Jln Wonogi-Jigongga No Kontrak 600/062/Apbd/Fsk/Pupr/2024 Pt Koteka Putra/ Pupr	22.015.351,00	12-Mar-25
2	Str Denda Ketrlmbt Peny Pkrjan Pemb Jln Karubaga-Umagi-Mamit No.600/068/Apbdp/Fsk/Pupr/2024 Cv Ay Konstruksi / D. Pupr	14.403.243,00	12-Mar-25
3	Sts Denda Rlmbtn Peny Pkrjan Pemb Jln Relokasi Pengusi Kenyam Dist Krepkuri No. 600/075/Apbdp/Fsk/Pupr/2024 Pt. Aquila Berlian P	19.322.602,00	12-Mar-25
4	Sts Denda Ktrlmbtn Peny Pkrjan Pemb Jln Yiginua-Niname No.600/053/Apbdp/Fsk/Pupr/2024 Pt. Glory Intan Gemilang/ D. Pupr	44.229.122,00	12-Mar-25
5	Str Denda Keterlambatan Penyesuaian Pekerjaan Peningkatan Jalan Irian Bawah No.600/020/Apbdp/Fsk/Pupr/2024 Pt.Nire Anggenoen	54.724.870,00	14-Mar-25
	Jumlah	**154.695.188,00**	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.1.1.1.3d - Rincian atas Pendapatan Denda Pajak Daerah

Nama Rekening	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	3.957.000,00	1.503.000,00	804.000,00	646.000,00	830.000,00	7.000,00	618.000,00	45.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	8.447.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	563.000,00	775.000,00	1.402.000,00	3.572.000,00	1.314.000,00	0,00	3.324.000,00	161.000,00	0,00	2.918.000,00	0,00	0,00	14.029.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	0,00	0,00	0,00	244.000,00	1.677.000,00	117.000,00	375.000,00	537.000,00	0,00	2.102.000,00	1.307.000,00	0,00	6.359.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	162.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	3.153.000,00	5.374.000,00	5.835.000,00	3.157.000,00	265.000,00	0,00	1.109.000,00	52.000,00	0,00	964.000,00	0,00	0,00	19.909.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1.138.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	2.679.000,00	187.000,00	1.651.000,00	111.000,00	0,00	4.579.000,00	177.000,00	7.000,00	11.922.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.000,00	7.264.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	9.330.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	9.698.000,00	10.060.000,00	16.605.000,00	3.286.000,00	0,00	0,00	30.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.755.000,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	128.000,00	0,00	0,00	2.447.000,00	1.255.000,00	9.508.000,00	6.618.000,00	720.000,00	0,00	1.520.000,00	101.000,00	0,00	22.297.000,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	10.069.000,00	2.796.000,00	4.045.000,00	4.681.000,00	2.419.000,00	3.968.000,00	3.549.000,00	1.675.000,00	0,00	1.844.000,00	565.000,00	13.000,00	35.624.000,00

Nama Rekening	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.000,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	81.000,00	46.000,00	0,00	865.000,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	0,00	130.000,00	0,00	42.000,00	34.000,00	94.000,00	116.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	0,00	444.000,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.000,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	90.000,00	0,00	9.000,00	196.000,00	0,00	66.000,00	90.000,00	0,00	64.000,00	129.000,00	0,00	644.000,00
TOTAL	**28.872.000,00**	**20.936.000,00**	**28.713.000,00**	**19.583.000,00**	**10.768.000,00**	**19.009.000,00**	**30.015.000,00**	**3.871.000,00**	**0,00**	**15.095.000,00**	**2.344.000,00**	**20.000,00**	**179.226.000,00**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.1.1.1.3e - Rincian atas Pendapatan Dari Pengembalian

No	Nama Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Akhir	Tanggal Setor	Keterangan
1	Setoran Atas Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	19.740,00	0,00	19.740,00	03 Februari 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
2	Setoran Sisa Up/Gu Nihil Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	28 Februari 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
3	Setoran Sisa Atas Sub Kegiatan Pengawasan Kegiatan Hulu Migas Dlm Rngka Penyampaikan Laporan Lipsting Thn Anggran 2024	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	28 Februari 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
4	Setoran Sisa Atas Sub Kegiatan Advoksi Dan Musyawara Penetapan Thn Anggran 2024	1.301.013,00	0,00	1.301.013,00	28 Februari 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
5	Setoran Sisa Atas Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun Anggran 2024	7.000,00	0,00	7.000,00	28 Februari 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
6	Setoran Sisa Tu Atas Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik,Sosial Ekonomi Bagi Penduduk Setempat Dan Transmigrasi Thn24	965.200,00	0,00	965.200,00	28 Februari 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
7	Setoran Sisa Atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1.131.200,00	0,00	1.131.200,00	28 Februari 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
8	Setoran Sisa Atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rakor	591.500,00	0,00	591.500,00	28 Februari 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
9	Set. Sisa Sub Keg. Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keu. & Permodalan Pd Dinas Koperasi	355.140,00	0,00	355.140,00	03 Maret 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
10	Set. Sisa Sub Keg. Peningkatan Pemahaman & Pengetahuan Umkm Serta Kapasitas & Kompetensi Sdm Umkm & Kewirausahaan Melalui Pendid	400.000,00	0,00	400.000,00	03 Maret 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
11	Set. Sisa Sub Keg. Pemantauan Harga Dan Stok Brg Kebthn Pokok & Brg Penting Pd Pelaku Usaha Distribusi Brg Lintas Kab/Kota Pd Di	184.940,00	0,00	184.940,00	03 Maret 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
12	Set. Sisa Tu Sub Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Pd Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian & Perdag	243.620,00	0,00	243.620,00	03 Maret 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
13	Set. Sisa Sub Keg. Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan & Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	542.632,00	0,00	542.632,00	03 Maret 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
14	Set. Sisa Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Tenaga Kerja T.A 2024	200.000,00	0,00	200.000,00	04 Maret 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
15	Setoran Pendobelan Sp2D Tahun Anggaran 2024	64.768.018,00	0,00	64.768.018,00	14 Maret 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang

No	Nama Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Akhir	Tanggal Setor	Keterangan
16	Setoran Sisa Atas Ls Cv Nggu	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	19 Maret 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
17	Setoran Sisa Atas Ls Cv. Yabume	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00	19 Maret 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
18	Set Atas Pengembalian Suku Bunga Giro Hibah Pemilihan Kpla Daerah(Pilkada) Ta 2024/Panji Sera Wijaya	1.476.477,00	0,00	1.476.477,00	25 Maret 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah
19	Kasda April 2025	28.428.100,00	0,00	28.428.100,00	11 April 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
20	Set. Ats Kekurangan Vol. Pekerjaan Pada Sub. Keg. Penyediaan Tempat Penampungan Pengunsi Kopel Iii Pelksn. Cv. Kobakma T.A 2024	64.105.729,00	0,00	64.105.729,00	02 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
21	Setoran Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik / Dinkes Ta 2025 / Nur Dahlia	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	08 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
22	Setoran Sisa Tu Dari Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan Dprd Pada Sekertariat Dprd Provinsi Papua Pengunungan 2024	831.000,00	0,00	831.000,00	09 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
23	Set Atas Kkrng Vol Pkjan Pd Sub Keg Pnydiaan Tmpt Pnmpngn Pngsi Kopel I Pelksn Pkrjn Cv. Dinal, Pd Dinsol Pppa Prov Pp Ta 2024	18.085.816,00	0,00	18.085.816,00	09 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
26	Biaya Lebih Bayar Perjadin An Ibrahim Rumere	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	09 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
24	Biaya Lebih Bayar Perjadin An Delfisar	960.000,00	0,00	960.000,00	09 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
25	Lebih Bayar Gaji An.Wellem Bilangla'Bi Tahun 2024	2.731.652,00	0,00	2.731.652,00	09 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
27	Setoran Hasil Temuan Bpk-Ri Nomor X.700/981/Gub/Ppp/Iv/2024 Perjalanan Dinas An. Luis Itlay Ta.2023 / D. Pupr	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	09 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
33	Aris Randa,Se	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
44	Sts Kelebihan Byr Keg Korrdinasi Dan Perencanaan Tata Ruang Pd Sub Keg Penyusunan Rtrw Prov Ppiig Uncen / D. Pupr	232.500.000,00	0,00	232.500.000,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa (Jasa Konsultansi)
45	Debora Gomboby Pengembalian Uang Penginapan	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
34	Sts Penginapan An. Elva Thana Keg Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah / Baperida	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
42	Sts Penginapan An. Jeannie Setiyanti Siagian Keg Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pemb Perangkat Daerah/Baperida	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
29	Setoran Atas Pengembalian Belanja Pengadaan Komputer & Printer Pada Dinas Tenaga Kerja T.A 2024	111.700.000,00	0,00	111.700.000,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang

No	Nama Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Akhir	Tanggal Setor	Keterangan
41	Setoran Atas Kegiatan Pelatihan Komputer Untuk Oap Pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024	108.018.018,00	0,00	108.018.018,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
43	Sts Peng Keg Koordinasi &Pelaksanaan Fasilitas & Evaluasi Rap Otsus Kab Th 2024 An. Jhohanita R. Rumangun By Penginapan/Baperida	12.493.750,00	0,00	12.493.750,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
28	Sts Peng Keg Koordinasi & Pelaksanaan Fasilitas & Evaluasi Rap Otsus Kab Th 2024 An.Jeffri Donni Sianturi By Penginapan/Baperida	12.493.750,00	0,00	12.493.750,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
30	Sts Peng Keg Koordinasi & Pelaksanaan Fasilitas & Evaluasi Rap Otsus Kab Th 2024 An.Jusmiati Pondan By Penginapan/Baperida	14.743.750,00	0,00	14.743.750,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
31	Sts Peng Keg Koordinasi & Pelaksanaan Fasilitas & Evaluasi Rap Otsus Kab Th 2024 An.Merianus Hesegem By Penginapan/Baperida	12.493.750,00	0,00	12.493.750,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
32	Sts Peng Keg Koordinasi & Pelaksanaan Fasilitas & Evaluasi Rap Otsus Kab Th 2024 An. Mis Wanimbo, Sh By Penginapan/Baperida	16.493.750,00	0,00	16.493.750,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
35	Sts Peng Keg Koordinasi & Pelaksanaan Fasilitas & Evaluasi Rap Otsus Kab Th 2024 An. Danny Dwi Sanjaya By Penginapan/Baperida	13.243.750,00	0,00	13.243.750,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
36	Set Hsl Konfr Trkt Klbhn Pmbyrn Rmns Ny Lmnghsng Prsnl. Tman Bpk-Ri Nop Bapk/Lkpd.Provpp/Terinci/05/2025 Prcnn Mstrpln Ta. 2024	6.748.250,00	0,00	6.748.250,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa (Jasa Konsultansi/Masterplan)
37	Setoran Atas Pengembalian Ke;Ebihan Belanja Tagihan Listrik Ta 2024 Pada Sek Mrp Papua Pegunungan	112.786.000,00	0,00	112.786.000,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
38	Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Betlehem Ta 2024 Cv Cenrdawasih Dinas Pupr	71.907.518,00	0,00	71.907.518,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
39	Pengembalian Dana Belanja Obat Ta.2024 Dinas Kesehatan Prov Papua Pegunungan	24.816.690,00	0,00	24.816.690,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
40	Pengembalian Belanja Obat Ta.2024 Dinas Kesehatan Prov Papua Pegunungan	119.698.746,00	0,00	119.698.746,00	14 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
46	Set. Atas Pengembalian Perhitungan Pajak Doubel Posting Sp2D 0091/Ls Tgl 30/12/2024 Pel. Cv.Yik Yamara Konsultan Pada Dinkes Ppp	9.731.982,00	0,00	9.731.982,00	15 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
48	Pengembalian Blj Kekurangan Volume Pekerjaan Rehab Gedung & Pagar Kantor Gubernur Pelaksana Cv Tigasa / Biro Umum	173.825.824,00	0,00	173.825.824,00	15 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
47	Setoran Sisa Tu Atas Kegiatan Pendataan Oap Di 5 Wilayah Adat Pada Kegiatan Bahan Makan/Minum Dan Sewa Gedung Pertemuan 2024	154.600.000,00	0,00	154.600.000,00	15 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
49	Kelebihan Pembayaran Gaji Pns Yg Menjabat Sbg Plt Pada Sek Mrp An.Eloi Wakur Thn 2024	4.645.026,00	0,00	4.645.026,00	15 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

No	Nama Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Akhir	Tanggal Setor	Keterangan
50	Pengembalian Kegiatan Monitoring Bidang Infrastuktur Thn 2024 An. Juliana Siep Dll. Pda Perencanaan Pembagunan Daerah	35.900.000,00	0,00	35.900.000,00	19 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
51	Sts Pt Bennatin Surya Cipta Kso&Pt. Faya Kuntura Agung Konsultindo Keg. Penyelenggaraan Jalan Prov Dan Jembatan Ta 2024 D.Pupr	68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	20 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa (Jasa Konsultansi)
52	Sts Temuan Bpk Ri : Kurang Volume Pekerjaan Pemb Jalan Ruas Mugi-Wamena Soba Ta 2024 Pt. Karsa Cipta Raya / Dinas Pupr	674.791.000,00	0,00	674.791.000,00	20 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
54	Sts Pengembalian Hasil Temuan Bpk-Ri: Kelebihan Byr Pt. Sapta Akusara Anagata Jln Ruas Bolakme(Tagime)-Kelila-Bokondini/ D. Pupr	2.050.648.647,00	0,00	2.050.648.647,00	21 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
53	Sts Pengembalian Realisasi Tiaga Kegiatan Pd Dinaker Sdm Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Pada Disnaker Sdm Ta 2024	618.837.838,00	0,00	618.837.838,00	21 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
55	Set. Atas Sub Keg. Pengelolaan Mutasi Asn Perjalanan Dinas Dlm Rangka Koord. Usulan Kuota Peralihan Thp Ii Daerah Otonomi Baru	19.851.122,00	0,00	19.851.122,00	21 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
56	Sts Pengembalian Blj Untuk Dijual/Diserahkan Kpd Masy (Pemb Ganti Rugi Rmh & Tanaman) Ta 2024 / D. Perhubungan	778.033.000,00	0,00	778.033.000,00	22 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
57	Pemgembalian Ats Sub Kegiatan Pendataan Orang Asli Papua 5 Wilayah Adat Untuk Perjalanan Dnas An. Roberd B Sayori Thn 2024	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	26 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
58	Hasil Tindak Lanjut Bpk-Ri Ats Kurang Pekerjaan Jln Irian Bawwah Pt Niren Angge Noen Dinas Pupr 2024	237.940.000,00	0,00	237.940.000,00	26 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
59	Sts Kekurangan Vol Pekrjaan Jln Ruas Jln Yali (Smk Yapesli) Sub Keg Kreknstrksi Ta.2024 Cv.Aanian Jaya/D.Pupr	113.851.000,00	0,00	113.851.000,00	26 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
62	Set Pengembalian Kelbhan Gaji Peg A/N Lina Kogoya Biro Pemerintahan Prov Papua Pegunungan/Titus Kogoya	52.473.150,00	0,00	52.473.150,00	27 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
61	Sts Peng Sub Keg Penyedia Pendidik Tenaga Kependidikan Oap Sd Di Papua Sub Keg Honor Keg Plthn Gaji Guru Kontrak / D.Pendidikan	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	27 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
60	Sts Peng Keg Pertng Jwban Blj Keg Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Peny Dok Bapperida Tdk Sesuai An. Gerson W Ta 2024	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	27 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
64	Set. Hsl Temuan Bpk -Ri No. X.700/981/Gub/Ppp/Vi/2024 Atas Perhtgn Kekurgn Vol.Ats Peker. Pemb. Jln Ruas Eragayam-Kbm Pt.Bintang	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
63	Sts Pengembalian Sub Keg Pengelolaan Pelayanan Gizi Kesehatan Masy Ta 2024 / Dinkes Prov Papua Peg	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
65	Sts Pem Jln Ruas Mugi-Yogosem Ta 2024 Pel Pt.Gloria Papua Permai Prov Pp Dins Pupr	207.485.000,00	0,00	207.485.000,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan

No	Nama Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Akhir	Tanggal Setor	Keterangan
72	Setoran Sub Kgtn Promosi Asn Jalan Dinas An. Kusuma S.I. Sirait Dlm Rngka Knsltsi Job Fit Ptppp / 6-12 Okt 2024	19.678.937,00	0,00	19.678.937,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
66	Sts Mutsi Pejlnan Dins An.Eliap Wetipo Dlm Rngka Asisten & Supervsi Daerah Dob Ppp Tgl 19/25 Juli 2024 Tasikmalaya Jw Barat	17.261.100,00	0,00	17.261.100,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
67	Sts Perjlnan Dns An.Daret Markus Oudil,Stp Dari Daerah 8 Kab Dob Tgl 1-7 Agus 2024 Pd Kem Dlm Negeri Jakarta Pd Bkpsdm	20.422.050,00	0,00	20.422.050,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
68	Sts Pejlnan Dns An.Arman Asso,A.Md,.Ip Mutasi Bg Asn Dr Daerah 8 Kab Ke Dob Tgl 1-7 Agus 2024 Dlm Negri Di Jkt Pd Bkpsdm	20.231.250,00	0,00	20.231.250,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
69	Sts Mutasi Asn Dins A.N Kusuma S.Irbarra Surait Dr Daerah 8 Kab Ke Dob Tgl 1-7 Agus 2024 Pd Kem Dlm Negeri Din Jkt Pd Bkpsdm	20.032.550,00	0,00	20.032.550,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
70	Sts Asn Perjln Dns An.Arman Asso Pel Job Fit Jbtn Pimpinan Tinggi Pratama Prvpp Tgl 6-12 Okt 2024 An.Kusuma S.I Sirait,St Bkpsdm	19.678.937,00	0,00	19.678.937,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
71	Set. Hsl Tindaklanjut Bpk-Ri Ats Kekurgn Vol Pekerj. Ats Pekerj Pembangunan Jln Ruas Pugima-Pugi-Maima Ta 2024 Cv. Sellah Jaya	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
73	Sts Sub Keg. Pegelolaan Mutasi Asn Perjadin Koord. Usulan Kuota Peralihan Thp Iii Dob Tgl 7-12 Juli 2024 An. Eliap Wetipo	20.179.900,00	0,00	20.179.900,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
74	Sts Mutasi Asn Perjadin An. Arman Asso Keg.Ass Dan Sprv Mutasi Pjb Definitif Pd Dob 19-25Jul 2024 Di Tasikmalaya Jabar Bkpsdm Pe	19.372.800,00	0,00	19.372.800,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
75	Sts Mutasi Asn Perjadin An.Juli Lestar Keg.Ass Dan Sprv Mutasi Pjb Definitif Pd Dob 19-25Jul 2024 Di Tasikmalaya Jabar Bkpsdm Pe	19.362.800,00	0,00	19.362.800,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
76	Sts Mutasi Asn Perjadin Dlm Rangka Koord Usulan Kouta Peralihan Thp Iii Dob Prov. Papua Tgl 7-12 Juli 2024 An. Pasifikus Saul	19.314.000,00	0,00	19.314.000,00	28 Mei 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
77	Hutang Kasda Juni 2025	10.407.100,00	0,00	10.407.100,00	11 Juni 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
78	[Atm]Prima_Trf_4097669911020000_008_132_1540010817777_6282 397028118 7000102111122	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	13 Juni 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
79	[Atm]Prima_Trf_4097669911020000_008_132_1540010817777_6281 356774749 7000102111122	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	13 Juni 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
80	[Atm]Prima_Trf_4097669911020000_008_132_1540010817777_6282 217522560 7000102111122	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	13 Juni 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
81	[Atm]Prima_Trf_4097669911020000_008_132_1540010817777_6281 344282367 7000102111122	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	13 Juni 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang

No	Nama Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Akhir	Tanggal Setor	Keterangan
82	Set Pt Nesta Makeradi/ Pupr Prov Papua	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	19 Juni 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
83	Kelibahan Bayar Gaji An Naela Itlay Ta 2024 Pd Diskominfo	13.471.200,00	0,00	13.471.200,00	25 Juni 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
84	Set Sisa Untuk Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangungan Jln Ruas, Mugi -Werimasoba Pada Dines Pupr Pt Kinaya Lian Indah	429.933.000,00	0,00	429.933.000,00	26 Juni 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
85	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Rsud Wamena Dis Kesesehatan	227.074.000,00	0,00	227.074.000,00	30 Juni 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
86	Setiran Hasil Tindak Lanjut Bpk-Ri Ats Kekurangan Volume Pekerjaan Pd Pemb Jln Ruas Yahuli Lawe Thn Anggrn 2024 Pd Pt Cucu Wali	2.466.024.000,00	0,00	2.466.024.000,00	30 Juni 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
88	Set Pengembalian Hsl Lap Pemeriksaan Bpk - Ri At. Klbh Pem Gaji Pegawai An. Etina Yikwa, S,Ikom T. A. 2024 Pd Dns Komunikasi	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	02 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
87	Set At Pngblian Hsl Lhp Bpk - Ri Pd Pkrja Jasa Penusn Plan (Blk) Prov Pp Dinas Tenaga Kerja T.A 2024	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	02 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
89	Set Atas Pngembalain Hasil Lhp Bpk Ri Pd Keg Osn T.A 2024 Dinas Pendidikan Kebudayaan Prov Pp	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	02 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
95	Temuan Pengembalian Dilingkungan Pemerintahan Prov Papua Pegunungan An Luis Itlay Nomor Rek 7000202441269 Dinas Pupr	12.331.366,00	0,00	12.331.366,00	04 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
96	Temuan Pengembalian Dilingkungan Pemerintahan Prov Papua Pegunungan An Roos Issiboset Itlay Nomor Rek 7000201232916 Dinas Pupr	12.798.457,00	0,00	12.798.457,00	04 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
92	Temuan Pengembalian Dilingkungan Pemerintahan Prov Papua Pegunungan An Irwanto F Halitopo Nomor Rek 7000202080605 Setda	33.047.017,00	0,00	33.047.017,00	04 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
90	Temuan Pengembalian Dilingkungan Pemerintahan Prov Papua Pegunungan An Gersom Wetapo Nomor Rek 7000201224111 Bapperida	27.950.549,00	0,00	27.950.549,00	04 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
91	Pengembalian Hasil Lhp Bpk-Ri Pada Kegiatan Osn Tahun 2024 An Yoel Giban Norek 7000201231704 Pada Dinas Pendidikan	12.798.458,00	0,00	12.798.458,00	04 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
93	Setoran Tindak Lanjut Bpk-Ri Atas Kegiatan Gizi Masyarakat An Paulina Hendrika Hamberi No Rek 7000202310185 Ta 2024 Pada Dinkes	19.951.733,00	0,00	19.951.733,00	04 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
94	Setoran Tindak Lanjut Bpk-Ri Atas Kegiatan Gizi Masyarakat Am Darby Kiwo Norek 7000202040575 Ta 2024 Pada Dinkes	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	04 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
98	Sisa Temuan Lhp Bpk - Ri Sewa Gedung Tempat Pertemuan Sekwan Prov Papua Pegunungan 2024	270.000,00	0,00	270.000,00	07 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa

No	Nama Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Akhir	Tanggal Setor	Keterangan
100	Sisa Temuan Lhp Bpk - Ri Belanja Makan Dan Minum Tamu Sekwan Prov Papua Pengunungan 2024	680.000,00	0,00	680.000,00	07 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
101	Sisa Temuan Lhp Bpk - Ri Untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sekwan Prov Papua Pegunungan 2024	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	07 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
105	Sisa Temuan Lhp Bpk -Ri Keg Pembvahasan Perubahan Kua Dan Ppas Belanja Makan, Minum Tamu Sekwan Prov Papua Pegunungan 2024	400.000,00	0,00	400.000,00	07 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
97	Sisa Temuan Lhp Bpk-Ri Dari Pembahasan Kua Dan Ppas Untuk Belanja Makan,Minum Tamu Sekwan Prov Papua Pengunungan 2024	400.000,00	0,00	400.000,00	07 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
103	Sisa Temuan Lhp Bpk-Ri Keg Dialok Dan Kordinasi Dprd Dan Pemda Untuk Belanja Perjadin Sekwan Prov Papua Pegunungan 2024	6.540.000,00	0,00	6.540.000,00	07 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
104	Sisa Temuan Lhp Bpk-Ri Keg Dialok Dan Koordinasi Pim Dprd Dengan Pemda Untuk Sewa Gedung Pertemuan Sekwan Prov Papua Pegunungan	300.000,00	0,00	300.000,00	07 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
99	Sisa Temuan Lhp Bpk-Ri Keg Dialok Dan Pim Dprd Dengan Pemda Unruk Sewa Kendaraan Penumpang Sekwan Prov Papua Pengunungan 2024	350.000,00	0,00	350.000,00	07 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
102	Sisa Temuan Lhp Bpk-Ri Keg Dialok Dan Koor Pim Dprd Dengan Penda Untuk Bel Makan,Minum Tamu Sekwan Prov Papua Pegunungan 2024	150.000,00	0,00	150.000,00	07 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
106	Set. Peng. Ats Sub Keg. Pendataan Oap Di 5 (Lima) Wilayah Adat U/ Perjalanan Dinas An. Lendi Weya,Sp Ta 2024, Pd Dinas Dukcapil	960.000,00	0,00	960.000,00	11 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
107	Set. Peng. Ats Sub Keg. Pendataan Oap Di 5 (Lima) Wilayah Adat U/ Perjalanan Dinas An.Pendi Yikwa,Sp Ta 2024, Pd Dinas Dukcapil	960.000,00	0,00	960.000,00	11 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
108	Set. Peng. Ats Sub Keg. Pendataan Oap Di 5 (Lima) Wilayah Adat U/Perjalanan Dinas An.Ovalina Nauw,Sp Ta 2024, Pd Dinas Dukcapil	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	11 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
109	Set. Peng. Ats Sub Keg. Pendataan Oap Di 5 (Lima) Wilayah Adat U/ Perjalanan Dns An.Selti Pagewang,Sp Ta 2024,Pd Dinas Dukcapil	600.000,00	0,00	600.000,00	11 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
110	Set. Peng. Ats Sub Keg. Pendataan Oap Di 5 (Lima) Wilayah Adat U/ Perjalanan Dinas An.Marthen P ,Sp Ta 2024, Pd Dinas Dukcapil	600.000,00	0,00	600.000,00	11 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
111	Set. Peng. Ats Sub Keg. Pendataan Oap Di 5 (Lima) Wilayah Adat U/ Perjalanan Dinas An.Adolfina S ,Sp Ta 2024, Pd Dinas Dukcapil	600.000,00	0,00	600.000,00	11 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

No	Nama Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Akhir	Tanggal Setor	Keterangan
112	Pngblian Hsl Lhp Bpk Ri Pd Pkrj Jasa Pnysun Mstr Plan Pmbngnn Blk Prov Pp Pd Dinas Tenaga Kerja T.A 2024	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	15 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa (Jasa Konsultansi/Masterplan)
113	Set. Hsl Tindak Ljt Bpk-Ri Ats Kekurgn Vol Pek Ats Peker. Pening Jln Lingkar Kmpg Pugima Ta 2024 Pel.Cv.Royal Construction Ppru	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	17 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
114	Set Hsl Tl Bpk Ri Ats Kekurgn Vol Pekerj. Pd Keg Pemb. Padat Karya Paket 84 Cv. Domena Pratama Jaya Ta 2024 Pd Dinas Puprr Pp	5.135.300,00	0,00	5.135.300,00	22 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
115	Set Hsl Tl Bpk Ri Ats Kekurgn Vol Pekerj Pd Keg. Pemb. Padat Karaya Paket 87 Cv. Domena Pratama Jaya Ta 2024 Pd Dinas Puprr Pp	5.352.900,00	0,00	5.352.900,00	22 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
116	Pt Nesata Makaredi/Setoran Hsl Tndk Lanjut Bpk Ri(Pemb Angs 2)Kkrangan Vol Pkrjaan Pmbgnn Jln Dlm Kwsn Kmps Uniba Dr Dinas Pupr	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	23 Juli 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
118	Pengebalian Peningkatan Jalan Kampung Pugima 2024 Oleh Cv Royal Contruction Ppru Pada Dinas Pupr Prov Papua Pengunungan	87.460.000,00	0,00	87.460.000,00	01 Agustus 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
119	Set. Tl Bpk -Ri No. 700.2/1678/Gub Tgl 18 Juni 2025 Ats Keg. Gisi Masyarakat An. Paulina Hendrika Hamberi,S.Kep,Nurs Ta 2024	102.431.934,00	0,00	102.431.934,00	01 Agustus 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
117	Set. Atas Pengembalian Kekurangan Vol Peker. Pengembangan Lap. Volly Dan Fasilitas Penunjang Ta 2024 Pelaksana Cv. Mesi Pilamo	110.402.000,00	0,00	110.402.000,00	01 Agustus 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
120	Set Atas Pengembalian Hasil Bpk Ri Pd Keg Osn T.A 2024 An. Yoel Giban Pd Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov Papua Pegunungan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	04 Agustus 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
121	Temuan Bpk Ri No.25.B/Lhp/Xix.Jyp/05/2024 Ats Kekur Vol Peng Sarana Dan Prasarana Pencegahan Ta 2023 , Cv Meriam Keakwa	679.413.433,00	0,00	679.413.433,00	07 Agustus 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
122	Set Atas Pengembalian Kekurangan Vol Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal Walesi Ta. 2024 Pelaksana Cv. Tigasa Pd Biro Umum	384.145.000,00	0,00	384.145.000,00	08 Agustus 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
123	Dinas Pupr/Pt Nesata Makeradi/Set Hsl Tem Bpk Ri(Cicilan Ke3)Ats Kkrungn Vol Pkrjaan Pmbngunan Jln Dlm Kwsn Kampus Uniba Ta 202	308.235.000,00	0,00	308.235.000,00	20 Agustus 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
124	Temuan Bpk Ri Atas Kekurangan Vol. Pd Pekerj Pemb Jln Ruas Kimbim-Wogi-Wosiala Oleh Cv. Biro Jasa Technical Pd Dinas Pupr Prov	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	21 Agustus 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
125	Temuan Bpk_Ri Atas Kekurangan Vol. Pd Pemb. Jln Ruas Pugima-Pugi-Maima Oleh Cv. Sellah Jaya Pd Dinas Pupr Prov Pp Ta. 2024	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	03 September 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan

No	Nama Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Akhir	Tanggal Setor	Keterangan
126	Temuan Bpk-Ri (Cicilan Ke Dua) Ats Kekurg. Vol Pd Pembgn Jl Padat Karya Pkt 87 Cv Domena Pratama Jaya Pd Dns Pupr Pp Ta 2024	5.352.900,00	0,00	5.352.900,00	09 September 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
127	Temuan Bpk-Ri (Cicilan Ke Dua) Ats Kekurg. Vol Pd Pembgn Jl Padat Karya Pkt 84 Cv Domena Pratama Jaya Pd Dns Pupr Pp Ta 2024	5.135.300,00	0,00	5.135.300,00	09 September 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
128	Dinas Pupr/Pt Nesata Makeradi/Set Ke 4 Ats Kkurngan Vol Pek Jln Dlm Kwsn Kampus Uniba Th 2024	308.235.000,00	0,00	308.235.000,00	26 September 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
129	Tindak Lnjt Bpk-Ri No.700.2/1678/Gub, 18 Juni 2025 Atas Kgtn Gisi Masyarakat An.Paulina H. Hamberi Ta.2024 Pada Dinas Kesehatan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	10 Oktober 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
130	Pengembalian Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua An Roos Issiboset Itlay	12.798.457,00	0,00	12.798.457,00	10 Oktober 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
131	Sts No 001/Sts/Setda/Xi/2025	11.451.249,00	0,00	11.451.249,00	15 Oktober 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
132	Konsultan Pengembalian Hasil Lhp	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	17 Oktober 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
133	Temuan Bpk-Ri (Cicil Ke 4) Ats Kekur. Vol Pd	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	24 Oktober 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
134	Agne Nahadi/Pt Nesata Makeradi/Strn Kekrgn	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	29 Oktober 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
135	Uniba Thn 2024 Agne Nahadi/Pt Nesata	308.235.000,00	0,00	308.235.000,00	29 Oktober 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
136	Pt Nesata Makeradi/Strn Kembl Uniba Ta 202	4.472.919.000,00	0,00	4.472.919.000,00	31 Oktober 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
137	[Atm]Atmb_Trf_5029963600491448_5642004498964_132_70001021 11122_Kcp_Hawai_Sentani_____Sentani_Ppa_Id	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	05 November 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
138	Hutang Kasda Nov 2025	6.224.636,00	0,00	6.224.636,00	06 November 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
139	Stn Tdk Ljt Bpk - Ri No . 700.2/1678/Gb Tgl 18 Jn 2025 Ats Kg Gs Ms An.Paulina Hendrika Hamberi,S,K,N Ta 2024 Pd Dns Ksh Prv Pgu	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	25 November 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
140	Setoran Hasil Temuan Bpk-Ri Pada Pt. Sapta Akusara Anagata	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	09 Desember 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
141	Pengembalian Dilingkungan Pemerintah Prvovinsi Papua Pengunungan An Roos Issiboset Itlay	5.400.769,00	0,00	5.400.769,00	19 Desember 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

No	Nama Transaksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Akhir	Tanggal Setor	Keterangan
142	Setoran Pengembalian Tpp Tw Iv An Gerson Wetapo	12.798.456,00	0,00	12.798.456,00	19 Desember 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
143	Bri Kanca Abepura/Pengembalian Utang Iuran Pmk/Dobel Jan-Nov 2025 Program Pensiun	2.902.293,00	0,00	2.902.293,00	30 Desember 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
144	Pengembalian Utang Iuran Pmk/Jan-Nov 2025 Prog Tht/Bri Kanca Abepura	1.985.786,00	0,00	1.985.786,00	30 Desember 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
145	Pengembalian Utang Iuran Pmk/Dobel Jan-Nov 2025 Program Jkm	424.415,00	0,00	424.415,00	30 Desember 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
146	Pengembalian Utang Iuran Pmk/Dobel Jan-Nov 2025 Program Jkk	141.474,00	0,00	141.474,00	30 Desember 2025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
147	Setoran Pendobelan Sp2D Tahun Anggaran 2024	0,00	64.768.018,00	(64.768.018,00)		Koreksi Pendapatan terkait Pengakuan Selisih Saldo Awal Kas Daerah Tahun 2024
148	Set. Atas Pengembalian Perhitungan Pajak Doubel Posting Sp2D 0091/Ls Tgl 30/12/2024 Pel. Cv.Yik Yamara Konsultan Pada Dinkes Ppp	0,00	9.731.982,00	(9.731.982,00)		Koreksi Pendapatan terkait Pengakuan Selisih Saldo Awal Kas Daerah Tahun 2024
	Jumlah	**22.419.516.594,00**	**74.500.000,00**	**22.345.016.594,00**		

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.3.1.1.1.3 - Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

No	Nama OPD	Saldo Awal 2025	Mutasi	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	187.861.985,00	187.861.985,00	0,00	Sudah di Setorkan	3 Maret 2025
2	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (PPKD)	448.653,00	448.653,00	0,00	Sudah di Setorkan	11 Juni 2025
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	410.000,00	410.000,00	0,00	Sudah di Setorkan	15 Januari 2025

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.3.1.1.1.4 - Rekapitulasi Kas Lainnya per 31 Desember 2025

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Pengembalian Belanja yang di Setor Tahun 2026	04/02/26	
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah		0,00	167.412,00	0,00	167.412,00	Pengembalian Belanja yang di Setor Tahun 2026	14/01/26	
3	Dinas Perhubungan		0,00	439.548,00	0,00	439.548,00	Pengembalian Belanja yang di Setor Tahun 2026	26/01/26	
4	Dinas Perhubungan		0,00	9.112.382,00	0,00	9.112.382,00	Pengembalian Belanja yang di Setor Tahun 2026	27/01/26	
5	Dinas Perhubungan		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	Pengembalian Belanja yang di Setor Tahun 2026	27/01/26	
6	Dinas Perhubungan		0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	Pengembalian Belanja yang di Setor Tahun 2026	02/02/26	
7	Dinas Perhubungan		0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	Pengembalian Belanja yang di Setor Tahun 2026	02/02/26	
8	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral		0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	Pengakuan utang PFK		
9	Biro Organisasi		0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	Pengakuan utang PFK		
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00	Pengakuan utang PFK		
11	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat		0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	Pengakuan utang PFK		
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		0,00	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	Pengakuan utang PFK		
13	Inspektorat Daerah		0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	Pengakuan utang PFK		

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		0,00	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00	Pengakuan utang PFK		
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		0,00	3.355.135,00	0,00	3.355.135,00	Pengakuan utang PFK		
16	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral		0,00	184.500,00	0,00	184.500,00	Pengakuan utang PFK		
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		0,00	11.981.981,00	0,00	11.981.981,00	Pengakuan utang PFK		
18	Biro Organisasi		0,00	11.313.200,00	0,00	11.313.200,00	Pengakuan utang PFK		
19	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	349.455,00	0,00	349.455,00	Pengakuan utang PFK		
20	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat		0,00	438.715,00	0,00	438.715,00	Pengakuan utang PFK		
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		0,00	183.518,00	0,00	183.518,00	Pengakuan utang PFK		
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		0,00	7.297.400,00	0,00	7.297.400,00	Pengakuan utang PFK		
23	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral		0,00	871.200,00	0,00	871.200,00	Pengakuan utang PFK		
24	Sekretariat Daerah		0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	Pengakuan utang PFK		
25	Biro Organisasi		0,00	15.323.708,00	0,00	15.323.708,00	Pengakuan utang PFK		
26	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	793.600,00	0,00	793.600,00	Pengakuan utang PFK		
27	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat		0,00	5.642.883,00	0,00	5.642.883,00	Pengakuan utang PFK		
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		0,00	20.500.600,00	0,00	20.500.600,00	Pengakuan utang PFK		
29	Inspektorat Daerah		0,00	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	Pengakuan utang PFK		

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
30	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Pengakuan utang PFK		
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	Pengakuan utang PFK		
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		0,00	24.604.323,00	0,00	24.604.323,00	Pengakuan utang PFK		
33	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral		0,00	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	Pengakuan utang PFK		
34	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		0,00	65.900.898,00	0,00	65.900.898,00	Pengakuan utang PFK		
35	Biro Organisasi		0,00	3.233.120,00	0,00	3.233.120,00	Pengakuan utang PFK		
36	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	2.562.670,00	0,00	2.562.670,00	Pengakuan utang PFK		
37	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat		0,00	53.623.107,00	0,00	53.623.107,00	Pengakuan utang PFK		
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		0,00	1.134.100,00	0,00	1.134.100,00	Pengakuan utang PFK		
39	Sekretariat Daerah		0,00	517.000,00	0,00	517.000,00	Sisa Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel		
40	Sekretariat Daerah		0,00	2.394.000,00	0,00	2.394.000,00	Sisa Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		
41	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	Hibah Kepada Yayasan Yanpetra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 yang belum tersalurkan		

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
							dan disetorkan kembali ke RKUD		
42	Dinas Kesehatan		2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	Masuk ke Kas di Kas Daerah	06/01/25	
43	Kepala Daerah	Pph 23	18.018.018,00	0,00	18.018.018,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	078D100R6F80JM1E
44	Kepala Daerah	Pph 23	5.405.405,00	0,00	5.405.405,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	22B440T8M9QD3EQ6
45	Kepala Daerah	Pph 23	5.405.405,00	0,00	5.405.405,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	4690C74753R41P9D
46	Kepala Daerah	Pph 23	1.801.802,00	0,00	1.801.802,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	EECAE2M3LUV63I6F
47	Kepala Daerah	Pph 23	9.009.009,00	0,00	9.009.009,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	7F1362M3LUV66547
48	Kepala Daerah	Pph 23	9.009.009,00	0,00	9.009.009,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	BA9A200R6F811GE3
49	Kepala Daerah	PPh 22	13.513.514,00	0,00	13.513.514,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	392F367PL98NUKM6
50	Kepala Daerah	PPN	99.099.099,00	0,00	99.099.099,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	56E1467PL98O215U
51	Kepala Daerah	PPN	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	866862M3G2NISPR2
52	Kepala Daerah	PPh 22	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	FCAE667PFD13MCFV
53	Kepala Daerah	PPN	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	B4B1867PFD13U5IH
54	Kepala Daerah	PPh 22	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	A864E67PFD140FQG
55	Kepala Daerah	PPh 22	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	65122OOROJODAIPN
56	Kepala Daerah	PPh 22	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	2OVFF2M3G2NIEG92
57	Kepala Daerah	Pph 23	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	74AC82M3G2NINO4E
58	Kepala Daerah	PPN	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	OEFEEOOROJOEOUJF
59	Kepala Daerah	PPh 22	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	B6EDC2M3G2NJ6O7B
60	Kepala Daerah	PPN	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	5A38C746V7JHRMB7
61	Kepala Daerah	PPh 22	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	4869E746V7JHK5OC
62	Kepala Daerah	PPh 22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	5ED5B1PMO857J62F
63	Kepala Daerah	PPh 22	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	235153IGVTAOTJGC
64	Kepala Daerah	PPh 22	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	DF8512M3G2NKA1DR
65	Kepala Daerah	PPh 22	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	2361D4EUFNSDF130
66	Kepala Daerah	PPh 22	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	95167OT8GDIROOQB
67	Kepala Daerah	PPh 22	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	DBF33OOROJOFGTPP

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
68	Kepala Daerah	Pph 23	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	7999C2M3G2NKQESI
69	Kepala Daerah	PPh 22	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	Sudah di Setor	18/02/25	17B61OOROJOFMLDR
70	Kepala Daerah	PPh 21	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	25/02/25	A88E200R0J6V5HLS
71	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 22	121.622,00	0,00	121.622,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	734C706QQJ83ARLH
72	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 22	405.405,00	0,00	405.405,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	423B31VLQHGIN5S5
73	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 22	405.405,00	0,00	405.405,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	6B2C66DPAF69R50G
74	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 23	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	2FC3B7A6R5TS66TR
75	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 23	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	552946DPBTLG7PJ5
76	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 22	658.784,00	0,00	658.784,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	447555HBR9RHS3NC
77	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPN	891.892,00	0,00	891.892,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	D016C06QSLNL2AMJ
78	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPN	2.972.973,00	0,00	2.972.973,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	C05F23OGPTTRR6AD
79	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPN	2.972.973,00	0,00	2.972.973,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	3AC435HBPLG0Q17C
80	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPN	4.831.081,00	0,00	4.831.081,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	B125D4KUA3AR74RS
81	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 23	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	05/03/25	45B6606QRE4GIPG3
82	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.702.703,00	0,00	2.702.703,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	9DE0A74753SUKU3A
83	Sekretariat Daerah	PPN	19.819.820,00	0,00	19.819.820,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	01A3F74753T52O5S
84	Sekretariat Daerah	PPh 23	5.405.405,00	0,00	5.405.405,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	06A2B4EULK5POF59
85	Sekretariat Daerah	PPh 23	9.009.009,00	0,00	9.009.009,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	8E58A4EULK5SPAM2
86	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.702.703,00	0,00	2.702.703,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	56B054EULK5PUAI0
87	Sekretariat Daerah	PPN	19.819.820,00	0,00	19.819.820,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	CD2F94EULK5Q2H90
88	Sekretariat Daerah	PPh 23	5.405.405,00	0,00	5.405.405,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	FC2422M3LV11CM4A
89	Sekretariat Daerah	PPh 23	7.207.207,00	0,00	7.207.207,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	F08B667PL9AJ4O16
90	Sekretariat Daerah	PPh 22	675.676,00	0,00	675.676,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	DE9AB5BC5EOFAG1I
91	Sekretariat Daerah	PPN	4.954.955,00	0,00	4.954.955,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	65DCF3IH5PJM9U1M

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
92	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.027.027,00	0,00	2.027.027,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	C36041PM64EQRCU5
93	Sekretariat Daerah	PPN	14.864.865,00	0,00	14.864.865,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	AC42974753T5FCEM
94	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.824.324,00	0,00	2.824.324,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	AEAE367PL9AK1472
95	Sekretariat Daerah	PPN	20.711.712,00	0,00	20.711.712,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	484395BC5EO7OJR8
96	Sekretariat Daerah	PPh 23	3.603.604,00	0,00	3.603.604,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	99BDD0T8M9S9SOQV
97	Sekretariat Daerah	PPh 23	3.603.604,00	0,00	3.603.604,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	C4C6E5BC5EO82RVS
98	Sekretariat Daerah	PPh 23	2.702.703,00	0,00	2.702.703,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	F637C1PM64EMK3T6
99	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.364.865,00	0,00	2.364.865,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	4E3FF67PL9AKT6KE
100	Sekretariat Daerah	PPN	17.342.342,00	0,00	17.342.342,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	6E1E20T8M9SAM0CO
101	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.364.865,00	0,00	2.364.865,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	487360T8M9SAQKUE
102	Sekretariat Daerah	PPN	17.342.342,00	0,00	17.342.342,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	BE4291PM64ENBVJF
103	Sekretariat Daerah	PPh 23	18.018.018,00	0,00	18.018.018,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	002325BC5EO93DTQ
104	Sekretariat Daerah	PPh 23	9.009.009,00	0,00	9.009.009,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	B59D71PM64EKK42B
105	Sekretariat Daerah	PPh 23	5.405.405,00	0,00	5.405.405,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	74D0A74753T283MV
106	Sekretariat Daerah	PPh 23	3.603.604,00	0,00	3.603.604,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	1FCCE4EULK5T7ASN
107	Sekretariat Daerah	PPh 22	10.135.135,00	0,00	10.135.135,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	81FA167PL9AMAPKR
108	Sekretariat Daerah	PPN	74.324.324,00	0,00	74.324.324,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	94D2A2M3LV15LVNA
109	Sekretariat Daerah	PPh 23	18.018.018,00	0,00	18.018.018,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	9C1C000R6FA0JM5O
110	Sekretariat Daerah	PPh 22	4.729.430,00	0,00	4.729.430,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	42EB65BC5EOB7V7E
111	Sekretariat Daerah	PPN	34.684.685,00	0,00	34.684.685,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	A39EF0T8M9SDAT73
112	Sekretariat Daerah	PPh 22	675.676,00	0,00	675.676,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	D91804EULK5QGJJS
113	Sekretariat Daerah	PPN	4.954.955,00	0,00	4.954.955,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	8C6E62M3LV11RARK
114	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.027.027,00	0,00	2.027.027,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	6704D0T8M9S96HTR
115	Sekretariat Daerah	PPN	14.864.865,00	0,00	14.864.865,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	CB5155BC5EO7CD7L
116	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.702.703,00	0,00	2.702.703,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	5427567PL9AOH2NC
117	Sekretariat Daerah	PPN	19.819.820,00	0,00	19.819.820,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	DC5FA3IH5PJD6GTC
118	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.027.027,00	0,00	2.027.027,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	93E542M3LV16ICS9
119	Sekretariat Daerah	PPN	14.864.865,00	0,00	14.864.865,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	DBDB574753T4OQP9

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
120	Sekretariat Daerah	PPh 22	4.729.430,00	0,00	4.729.430,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	812FB1PM64ER7OGK
121	Sekretariat Daerah	PPN	34.684.685,00	0,00	34.684.685,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	BABEF2M3LV17V6GO
122	Sekretariat Daerah	PPh 23	2.702.703,00	0,00	2.702.703,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	A8EE14EULK60U1NK
123	Sekretariat Daerah	PPh 23	13.513.514,00	0,00	13.513.514,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	E81F474753T6GONM
124	Sekretariat Daerah	PPh 23	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	5A8F61PM64ES6NL7
125	Sekretariat Daerah	PPN	4.954.955,00	0,00	4.954.955,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	1B8812M3LV16CT5L
126	Sekretariat Daerah	PPh 22	675.676,00	0,00	675.676,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	3339D67PL9ANS0U4
127	Sekretariat Daerah	PPN	4.954.955,00	0,00	4.954.955,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	350244EULK61NP2P
128	Sekretariat Daerah	PPh 22	675.676,00	0,00	675.676,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	3E7B53IH5PJLEN1O
129	Sekretariat Daerah	PPN	7.396.432,00	0,00	7.396.432,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	0152274753T7LR7M
130	Sekretariat Daerah	PPh 22	1.013.514,00	0,00	1.013.514,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	1B8A167PL9ARBQ19
131	Sekretariat Daerah	PPN	4.954.955,00	0,00	4.954.955,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	10F940T8M9SGCR18
132	Sekretariat Daerah	PPh 22	675.676,00	0,00	675.676,00	0,00	Sudah di Setor	02/05/25	D4C465BC5EOEGVK0
133	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	PPN	4.786.486,00	0,00	4.786.486,00	0,00	Sudah di Setor	07/03/25	8BC0606H20686UIK
134	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	PPh 22	652.703,00	0,00	652.703,00	0,00	Sudah di Setor	07/03/25	28C203O71AFPQGVM
135	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPh 21	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	Sudah di Setor	03/03/25	A5EB41VC1L9JPP30
136	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPh 21	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	Sudah di Setor di Tahun 2024		
137	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPh 22	1.738.689,00	0,00	1.738.689,00	0,00	Sudah di Setor di Tahun 2024		
138	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPh 23	2.173.188,00	0,00	2.173.188,00	0,00	Sudah di Setor di Tahun 2024		
139	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPN	21.183.719,00	0,00	21.183.719,00	0,00	Sudah di Setor di Tahun 2024		

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
	Total		**2.803.372.874,00**	**1.316.737.455,00**	**2.803.372.874,00**	**1.316.737.455,00**			

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.3.1.1.3 - Rekapitulasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Setoran
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	64.105.728,53	0,00	64.105.728,53	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	8 Mei 2025
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	18.085.816,37	0,00	18.085.816,37	0,00	Sudah di Setor	09 Mei 2025
4	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	Sudah di Setor	09 Mei 2025
5	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	Sudah di Setor	09 Mei 2025
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.731.652,00	0,00	2.731.652,00	0,00	Sudah di Setor	09 Mei 2025
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	13 Mei 2025
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	13 Mei 2025
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	Sudah di Setor	13 Mei 2025
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	13 Mei 2025
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	13 Mei 2025
12	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	119.698.746,00	0,00	119.698.746,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
13	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.819.690,53	0,00	24.819.690,53	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	232.500.000,00	0,00	232.500.000,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	71.907.517,80	0,00	71.907.517,80	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
16	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	108.018.018,02	0,00	108.018.018,02	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
17	Dinas Perhubungan	6.748.250,00	0,00	6.748.250,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	16.493.750,00	0,00	16.493.750,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	13.243.750,00	0,00	13.243.750,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	14.743.750,00	0,00	14.743.750,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	12.493.750,00	0,00	12.493.750,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	12.493.750,00	0,00	12.493.750,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	12.493.750,00	0,00	12.493.750,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Setoran
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
30	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	112.786.000,00	0,00	112.786.000,00	0,00	Sudah di Setor	14 Mei 2025
31	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	94.150.000,00	0,00	94.150.000,00	0,00	Sudah di Setor	15 Mei 2025
32	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	17.550.000,00	0,00	17.550.000,00	0,00	Sudah di Setor	15 Mei 2025
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	154.600.000,00	0,00	154.600.000,00	0,00	Sudah di Setor	15 Mei 2025
34	Biro Umum	173.825.823,80	0,00	173.825.823,80	0,00	Sudah di Setor	15 Mei 2025
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
39	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
40	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
41	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
42	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
43	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
45	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
47	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
48	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
49	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	19 Mei 2025
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	674.791.000,00	0,00	674.791.000,00	0,00	Sudah di Setor	20 Mei 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Setoran
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	0,00	Sudah di Setor	20 Mei 2025
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.866.213.472,62	0,00	1.866.213.472,62	0,00	Sudah di Setor	21 Mei 2025
54	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	618.837.838,00	0,00	618.837.838,00	0,00	Sudah di Setor	21 Mei 2025
55	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.851.122,00	0,00	19.851.122,00	0,00	Sudah di Setor	21 Mei 2025
56	Dinas Perhubungan	778.033.000,00	0,00	778.033.000,00	0,00	Sudah di Setor	22 Mei 2025
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	113.851.000,00	0,00	113.851.000,00	0,00	Sudah di Setor	26 Mei 2025
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	237.940.000,00	0,00	237.940.000,00	0,00	Sudah di Setor	26 Mei 2025
59	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.678.937,00	0,00	19.678.937,00	0,00	Sudah di Setor	28 Mei 2025
60	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.678.937,00	0,00	19.678.937,00	0,00	Sudah di Setor	28 Mei 2025
61	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.032.550,00	0,00	20.032.550,00	0,00	Sudah di Setor	28 Mei 2025
62	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.231.250,00	0,00	20.231.250,00	0,00	Sudah di Setor	28 Mei 2025
63	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.422.050,00	0,00	20.422.050,00	0,00	Sudah di Setor	28 Mei 2025
64	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.261.100,00	0,00	17.261.100,00	0,00	Sudah di Setor	28 Mei 2025
65	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.362.800,00	0,00	19.362.800,00	0,00	Sudah di Setor	28 Mei 2025
66	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.372.800,00	0,00	19.372.800,00	0,00	Sudah di Setor	28 Mei 2025
67	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.314.000,00	0,00	19.314.000,00	0,00	Sudah di Setor	28 Mei 2025
68	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.179.900,00	0,00	20.179.900,00	0,00	Sudah di Setor	28 Mei 2025
69	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	79.684.602,00	0,00	79.684.602,00		
70	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
71	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	0,00	5.436.000,00	0,00	5.436.000,00		
72	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	0,00	5.614.000,00	0,00	5.614.000,00		
73	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	0,00	20.126.000,00	0,00	20.126.000,00		
	Total	**5.973.291.499,67**	**122.860.602,00**	**5.973.291.499,67**	**122.860.602,00**		

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.3.1.1.4 - Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

Pembayaran Biaya Hidup kepada Mahasiswa SUP Melebihi Standar Biaya Yang Telah Ditetapkan						
No	Universitas/Lembaga Pendidikan	Data Mahasiswa			Jenjang Pendidikan	Dibayar di Tahun 2025
		Nama	NIK	NIM		
1	Universitas Kristen Maranatha	RRW	9102015205030002	2290050	S1	20.000.000,00
2	Universitas Kristen Satya Wacana	LMAB	9111020410030003	802022149	S1	20.000.000,00
3	Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura	RDD	9121054303030002		D.III	12.500.000,00
4	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas	YM	9113031611750001	2054201011	S1	7.500.000,00
5	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas	SI	9113521203000001	2054201018	S1	7.500.000,00
6	Universitas Cenderawasih	GSSY	9102014409030004	2021051064021	S1	22.500.000,00
7	Universitas Cenderawasih	PY	9122042001010002	2021071014088	S1	10.000.000,00
8	Universitas Muhammadiyah Papua	NU	9112135311200001	202160018	S1	2.500.000,00
9	Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura	FW	9123074107960001	19211018	S1	7.500.000,00
10	Politeknik Negeri Manado	YW	9114360703011001	20043177	S1	7.500.000,00
11	Universitas Pembangunan Indonesia	YY	9114040107990043	207920208	S1	7.513.000,00
12	Poltekes Kesehatan Kemenkes Manado	TB	9114041609060001	714840121095	S1	12.500.000,00
Total						**137.513.000,00**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.3.1.1.5a - Rincian atas Hibah dari Kementrian Kesehatan

NO	NAMA OBAT	SATUAN HARGA	PENERIMAAN	TOTAL HARGA
	VAKSIN			
1	Serum Anti Bisa Ular	57.344.820,00	2	114.689.640,00
2	Hb0 (Vecon)	39.516,00	6.000	237.096.000,00
3	Hb0 (Vecon)	39.516,00	3.750	148.185.000,00
4	Hbo	31.480,00	2.480	78.070.400,00
5	Vaksin MR + Pelarut MR	229.729,00	5.160	1.185.401.640,00
6	Vaksin Rotavac + Droper Rotavac	240.709,00	2.324	559.407.716,00
7	Vaksin Polio Oral + Droper OPV	22.256,00	8.980	199.858.880,00
8	Vaksin polio Oral + Droper OPV	25.740,00	3.020	77.734.800,00
9	Vaksin BCG+Pelarut BCG	97.557,00	5.000	487.785.000,00
10	Vaksin Pentavac	197.982,00	2.500	494.955.000,00
11	Vaksin HPV	174.387,00	5.058	882.049.446,00
12	Vaksin IPV	158.116,00	506	80.006.696,00
13	Vaksin IPV	172.182,00	950	163.572.900,00
14	Vaksin PCV	191.339,00	2.477	473.946.703,00
15	Vaksin TD	36.334,00	2.799	101.698.866,00
16	Vaksin TD	36.334,00	155	5.631.770,00
17	Vaksin NOPV2 + Droper NOPV2	15.516,00	1.632	25.322.112,00
18	Vaksin Combe Five	229.170,00	1.500	343.755.000,00
19	ADS 0,5 ML	1.156,00	134.699	155.712.044,00
20	ADS 5 ML	1.576,00	10.945	17.249.320,00
21	Vaksin Rabivax-S + Pelarut	149.522,00	50	7.476.100,00
22	Vaksin Heksavalet/Hexasiil	810.811,00	347	281.351.417,00
23	Vaksin Heksavalet/Hexasiil	810.811,00	1.391	1.127.838.101,00
24	Vaksin Heksavalet/Hexasiil	810.811,00	893	724.054.223,00
25	Vaksin Heksavalet/Hexasiil	810.811,00	1.830	1.483.784.130,00
	PROGRAM HEPATITIS			
1	Hepatitis B Imun Globin/HBIG	1.389.500,00	250	347.375.000,00
	PROGRAM HIV			
1	Abacavir 300 mg	373.800,00	164	61.303.200,00
2	Abacavir (120)/Lamivudin(60)	43.423,00	100	4.342.300,00
3	Abacavir (120)/Lamivudin(60)	43.600,00	150	6.540.000,00

NO	NAMA OBAT	SATUAN HARGA	PENERIMAAN	TOTAL HARGA
4	Dolutegravir 50 mg	133.200,00	238	31.701.600,00
5	Dolutegravir 50 mg	141.360,00	150	21.204.000,00
6	Dolutegravir 10 mg	63.779,00	60	3.826.740,00
7	Isoniazid 300 mg	430,00	212	91.160,00
8	Kondom	740,00	1.000	740.000,00
9	Lamivudin 150 mg	98.400,00	232	22.828.800,00
10	Lopinavir 100/Ritonavir 25	85.260,00	20	1.705.200,00
11	Lopinavir 100/Ritonavir 25	300.000,00	30	9.000.000,00
12	Lopinavir 200/Ritonavir 50	823.560,00	51	42.001.560,00
13	Indec HIV 1/2 & Sifilis Combo	15.446,00	10.350	159.866.100,00
14	Indec HIV 1/2 & Sifilis Combo	14.320,00	7.300	104.536.000,00
15	Fast Clear RDT 2, Ab 3 Line	7.400,00	1.075	7.955.000,00
16	Fast Clear RDT 2, Ab 3 Line	6.400,00	3.000	19.200.000,00
17	RDT Sifilis/Imoq	4.385,00	4.400	19.294.000,00
18	Viral Load-Xpert HIV	394.500,00	1.070	422.115.000,00
19	RDT HIV 1 Virocheck	164.100,00	464	76.142.400,00
20	RDT HIV 3	186.350,00	57	10.621.950,00
21	RDT HIV 3	176.250,00	40	7.050.000,00
22	Tenofovir 300/Lamivudin 300/Efavirenz 600	109.500,00	180	19.710.000,00
23	Tenofovir 300/Lamivudin 300/Efavirenz 600	207.000,00	1.974	408.618.000,00
24	Tenofovir 300/Lamivudin 300/Efavirenz 600	207.000,00	7.808	1.616.256.000,00
25	Tenofovir 300/Lamivudin 300/Doluteravir 50	107.100,00	6.502	696.364.200,00
26	Vit B 6 25 mg	4.884,00	2	9.768,00
27	Vit B 6 25 mg	61.000,00	21	1.281.000,00
28	Flukonazole 150 mg	4.051,00	520	2.106.520,00
29	Benzatin Penisilin 2,4 jt IU	43.892,00	540	23.701.680,00
30	Zidovudin 100 mg	116.640,00	30	3.499.200,00
31	Zidovudin sirup	32.906,00	5	164.530,00
32	Sulfametoksazole Trimetoprin	40.800,00	57	2.325.600,00
33	Zidovudin/Lamivudin(300/150)	216.300,00	450	97.335.000,00
34	Zidovudin/Lamivudin(300/150)	273.000,00	368	100.464.000,00
35	Zidovudin/Lamivudin(60/30 mg)	25.844,00	150	3.876.600,00
36	TDF 300/FTC 200	130.500,00	118	15.399.000,00
37	DBS Test	26.833,00	60	1.609.980,00
38	RPR Antigen	420.000,00	9	3.780.000,00
39	Fastclear Q HIV/Sifilis Combo	161.250,00	46	7.417.500,00
40	Isoniazid 300/Rifapentin 300(3HP)	178.780,00	100	17.878.000,00

NO	NAMA OBAT	SATUAN HARGA	PENERIMAAN	TOTAL HARGA
	PROGRAM TB			
1	Clofazimine 50 mg	7.008,00	1.400	9.811.200,00
2	Clofazimine 100 mg	7.893,00	500	3.946.500,00
3	Clofazimine 100 mg	8.308,00	2.000	16.616.000,00
4	Etambutol 400 mg	500,00	10.080	5.040.000,00
5	Ethionamid 250 mg	1.513,00	1.500	2.269.500,00
6	Ziehl Nelsen	177.766,00	184	32.708.944,00
7	Isoniazid 100 mg	1.378,00	6.000	8.268.000,00
8	Isoniazid 300 mg/RO	435,00	2.500	1.087.500,00
9	Linezolid 150 mg	4.859,00	400	1.943.600,00
10	Linezolid 150 mg	4.859,00	800	3.887.200,00
11	Linezolid 600 mg	3.522,00	1.900	6.691.800,00
12	Linezolid 600 mg	3.522,00	700	2.465.400,00
13	Levofloksasin 250 mg	405,00	3.000	1.215.000,00
14	Levofloksasin 500 mg	700,00	7.800	5.460.000,00
15	Levofloksasin 500 mg	700,00	2.100	1.470.000,00
16	Rifampisin 75/Isoniazid 50	208.320,00	36.288	7.559.516.160,00
17	OAT Kat 1	707.625,00	439	310.647.375,00
18	OAT kat I	829.936,00	260	215.783.360,00
19	OAT Kat 1	829.936,00	133	110.381.488,00
20	OAT Kat 1	829.936,00	149	123.660.464,00
21	OAT Kategori Anak	404.102,00	582	235.187.364,00
22	OAT Kategori Anak	478.500,00	160	76.560.000,00
23	Pirazinamid 500 mg	346,00	2.300	795.800,00
24	Pirazinamid 500 mg	334,00	6.000	2.004.000,00
25	Bedaquiline 100 mg	21.711,00	752	16.326.672,00
26	Bedaquiline 20 mg	6.907,00	900	6.216.300,00
27	Cycloserine 250 mg	4.040,00	1.200	4.848.000,00
28	Cycloserine 250 mg	4.040,00	1.500	6.060.000,00
29	Isoniazid 300/Rifapentin 300(3HP)	4.294,00	1.080	4.637.520,00
30	Isoniazid 300/Rifapentin 300(3HP)	4.774,00	720	3.437.280,00
31	Tuberkulin/Mantoux test	548.000,00	185	101.380.000,00
32	PPD Tuberkulin 5TU/0,1	119.837,00	360	43.141.320,00
33	Catride x pert MTB/RIF	137.000,00	2.000	274.000.000,00
34	Catride x pert MTB/RIF	142.500,00	500	71.250.000,00
35	Catride x pert MTB/RIF	189.500,00	1.450	274.775.000,00
36	Catride x pert MTB/RIF	189.500,00	550	104.225.000,00

NO	NAMA OBAT	SATUAN HARGA	PENERIMAAN	TOTAL HARGA
37	Catride x pert MTB/RIF	189.400,00	1.400	265.160.000,00
38	Vit B6 50 mg	400,00	3.000	1.200.000,00
39	Rifampisin 450 mg tab	3.500,00	1.000	3.500.000,00
40	Paket OAT Kat I (Kombipak)	1.740.816,00	33	57.446.928,00
41	Moxyfloxacin 400 mg tab	4.000,00	1.600	6.400.000,00
42	Moxyfloxacin 400 mg tab	3.663,00	1.000	3.663.000,00
43	Pretomanid 200 mg tab	21.706,00	2.574	55.871.244,00
44	Truenat MTB Plus	253.000,00	250	63.250.000,00
45	Truenat MTB Plus	170.430,00	5.850	997.015.500,00
	PROGRAM FILARIASIS			
1	Albendazole 400 mg	59.400,00	1.000	59.400.000,00
2	Dietil Carbamasin /DEC tab 100 mg	51.000,00	1.500	76.500.000,00
	PROGRAM KUSTA			
1	MDT MB Anak	35.105,00	50	1.755.250,00
2	MDT MB Adult	1.000,00	250	250.000,00
3	RPR Antigen	280.000,00	100	28.000.000,00
4	Azitromicyn 500 mg	2.911,00	2.000	5.822.000,00
	PROGRAM DIARE			
1	Garam Oralit	49.100,00	300	14.730.000,00
	PROGRAM MALARIA			
1	DHP/Frimal tab 40 mg/320 mg	32.400,00	22.732	736.516.800,00
2	DHP/Frimal tab 40 mg/320 mg	33.642,00	30.454	1.024.533.468,00
3	Primakuin tab	37.500,00	1.409	52.837.500,00
4	Primakuin tab	59.399,00	894	53.102.706,00
5	D-Artepp(DHP) dispersible tab 20 mg/160 mg	63.534,00	3.450	219.192.300,00
6	D-Artepp(DHP) dispersible tab 20 mg/160 mg	68.616,00	1.050	72.046.800,00
7	Artesunat Injeksi	88.989,00	5.660	503.677.740,00
8	Artesunat Injeksi	94.124,00	2.160	203.307.840,00
9	Paket pemeriksaan malaria	782.217,00	5	3.911.085,00
10	RDT Combo Malaria	263.380,00	400	105.352.000,00
11	RDT Combo Malaria	415.000,00	4.279	1.775.785.000,00
	PROGRAM GIZI			
1	VIT A 100.000 IU	21.200,00	410	8.692.000,00
2	VIT A 200.000 IU	46.700,00	410	19.147.000,00
			TOTAL	**29.923.649.400,00**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.3.1.1.5b - Rincian Per Barang atas Persediaan

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat**					1.497.810.841,80	
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persedian Buku baca PAUD untuk diserahkan ke Kabupaten Lani Jaya	Eksemplar	2.730	78.378,38	213.972.977,40	
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persedian Buku baca PAUD untuk diserahkan ke Kabupaten Tolikara	Eksemplar	2.730	78.378,38	213.972.977,40	
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persedian Buku baca PAUD untuk diserahkan ke Kabupaten Mambramo Tengah	Eksemplar	2.730	78.378,38	213.972.977,40	
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persedian Buku baca PAUD untuk diserahkan ke Kabupaten Yalimo	Eksemplar	2.730	78.378,38	213.972.977,40	
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persedian Buku baca PAUD untuk diserahkan ke Kabupaten Yahukimo	Eksemplar	2.730	78.378,38	213.972.977,40	
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persedian Buku baca PAUD untuk diserahkan ke Kabupaten Nduga	Eksemplar	2.730	78.378,38	213.972.977,40	
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persedian Buku baca PAUD untuk diserahkan ke Kabupaten Pegunungan Bintang	Eksemplar	2.730	78.378,38	213.972.977,40	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	**Bahan Cetak**					223.884.600,00	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bahan Cetak	Buku KIA	Buah	1.558	143.700,00	223.884.600,00	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	**Obat**					26.204.737.260,00	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Hb0 (Hepatitis Anak)	Vial	500	26.378,00	13.189.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Hb0 (Vecon)	Vial	3.500	39.516,00	138.306.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Hb0 (Vecon)	Vial	3.750	39.516,00	148.185.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Hbo	Vial	2.480	31.480,00	78.070.400,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin MR + Pelarut MR	Vial	740	229.729,00	169.999.460,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin Rotavac + Droper Rotavac	Vial	1.128	240.709,00	271.519.752,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin polio Oral + Droper OPV	Vial	2.060	25.740,00	53.024.400,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin BCG+Pelarut BCG	Vial	2.960	97.557,00	288.768.720,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin Pentavac	Vial	2.400	197.982,00	475.156.800,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin HPV	vial	7.858	163.773,00	1.286.928.234,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin HPV	vial	5.058	174.387,00	882.049.446,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin IPV	vial	6	158.116,00	948.696,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin IPV	vial	150	172.182,00	25.827.300,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin PCV	vial	785	191.339,00	150.201.115,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin PCV	vial	2.477	191.339,00	473.946.703,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin TD	vial	2.029	36.334,00	73.721.686,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin TD	vial	55	36.334,00	1.998.370,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin Combe Five	Vial	236	229.170,00	54.084.120,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	ADS 0,5 ML	pcs	133.199	1.156,00	153.978.044,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	ADS 5 ML	pcs	10.845	1.576,00	17.091.720,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin Rabivax-S + Pelarut	Vial	40	149.522,00	5.980.880,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin Heksavalet/Hexasiil	Vial	47	810.811,00	38.108.117,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin Heksavalet/Hexasiil	Vial	1.041	810.811,00	844.054.251,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin Heksavalet/Hexasiil	Vial	93	810.811,00	75.405.423,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vaksin Heksavalet/Hexasiil	Vial	1.830	810.811,00	1.483.784.130,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Hepatitis B Imun Globin/HBIG	Test	132	1.389.500,00	183.414.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	HBsAg Test	ktk 25 test	45	97.475,00	4.386.375,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Hepatitis C	test	750	7.923,00	5.942.250,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Tenofovir 300 mg	btl 30	60	69.840,00	4.190.400,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Healgen HBsAB Singe Buffer	ktk 50	13	525.000,00	6.825.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Abacavir 300 mg	btl @60	2	373.800,00	747.600,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Abacavir (120)/Lamivudin(60)	btl@30	64	43.600,00	2.790.400,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Efavirenz 600 mg	btl @60	2.090	525.000,00	1.097.250.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Isoniazid 300 mg	ktk 100	52	435,00	22.620,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Isoniazid 300 mg	ktk 100	212	430,00	91.160,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Kondom	pcs	500	740,00	370.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Lopinavir 100/Ritonavir 25	btl 60	29	300.000,00	8.700.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Lopinavir 200/Ritonavir 50	btl 120	5	823.560,00	4.117.800,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Pyrimetamine 25 mg	ktk 100	35	133.000,00	4.655.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Indec HIV 1/2 & Sifilis Combo	test	15.500	15.446,00	239.413.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Indec HIV 1/2 & Sifilis Combo	test	7.300	14.320,00	104.536.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Fast Clear RDT 2, Ab 3 Line	test	425	6.400,00	2.720.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	GB Rapid HIV 1/2	ktk@25	12	263.785,00	3.165.420,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Viral Load-Xpert HIV	test	70	394.500,00	27.615.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	RDT HIV 1 Virocheck	ktk 25 test	71	164.100,00	11.651.100,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Tenofovir fumarate 300 mg	btl 30	447	67.200,00	30.038.400,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Tenofovir 300/Lamivudin 300/Efavirenz 600	btl 30	688	207.000,00	142.416.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Tenofovir 300/Lamivudin 300/Efavirenz 600	btl 30	3.641	207.000,00	753.687.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Tenofovir 300/Lamivudin 300/Doluteravir 50	btl 30	908	107.100,00	97.246.800,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vit B 6 25 mg	ktk 200	5	4.884,00	24.420,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vit B 6 25 mg	ktk 200	21	61.000,00	1.281.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Benzatin Penisilin 2,4 jt IU	vial	30	43.892,00	1.316.760,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Zidovudin 100 mg	btl 60	23	116.640,00	2.682.720,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Sulfametoksazole Trimetoprin	ktk 100	141	50.172,00	7.074.252,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Sulfametoksazole Trimetoprin	ktk 100	42	40.800,00	1.713.600,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Zidovudin/Lamivudin(300/150)	btl@60 tab	202	216.300,00	43.692.600,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Zidovudin/Lamivudin(300/150)	btl@60 tab	196	273.000,00	53.508.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Zidovudin/Lamivudin(60/30 mg)	btl@60 tab	134	25.844,00	3.463.096,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	DBS Test	test	20	26.833,00	536.660,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Fastclear Q HIV/Sifilis Combo	kotak@25 test	46	161.250,00	7.417.500,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Isoniazid 300/Rifapentin 300(3HP)	kotak 100	86	178.780,00	15.375.080,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Clofazimine 50 mg	tablet	510	7.008,00	3.574.080,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Clofazimine 100 mg	tablet	1.500	8.308,00	12.462.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Etambutol 400 mg	tablet	3.628	500,00	1.814.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Ethionamid 250 mg	tablet	1.380	1.513,00	2.087.940,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Ziehl Nelsen	paket	13	180.600,00	2.347.800,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Ziehl Nelsen	paket	154	177.766,00	27.375.964,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Isoniazid 100 mg	tablet	3.500	1.378,00	4.823.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Isoniazid 300 mg/RO	tablet	800	435,00	348.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Levofloksasin 100 mg	ktk 100	5	204.600,00	1.023.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Linezolid 150 mg	tablet	800	4.859,00	3.887.200,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Levofloksasin 500 mg	tablet	6.918	700,00	4.842.600,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Levofloksasin 500 mg	tablet	2.100	700,00	1.470.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Rifampisin 75/Isoniazid 50	tablet	35.280	208.320,00	7.349.529.600,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	OAT Kat 1	paket	4.434	707.625,00	3.137.609.250,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	OAT kat I	paket	68	829.936,00	56.435.648,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	OAT Kat 1	paket	133	829.936,00	110.381.488,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	OAT Kat 1	paket	149	829.936,00	123.660.464,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	OAT Kategori Anak	Paket	1.143	404.102,00	461.888.586,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	OAT Kategori Anak	Paket	160	478.500,00	76.560.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Pirazinamid 500 mg	tablet	3.800	334,00	1.269.200,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Bedaquiline 100 mg	tablet	2.444	21.711,00	53.061.684,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Bedaquiline 20 mg	tablet	600	6.907,00	4.144.200,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Cycloserine 250 mg	tablet	86	4.040,00	347.440,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Cycloserine 250 mg	tablet	1.500	4.040,00	6.060.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Isoniazid 300/Rifapentin 300(3HP)	tablet	168	4.294,00	721.392,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Isoniazid 300/Rifapentin 300(3HP)	tablet	720	4.774,00	3.437.280,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Tuberkulin/Mantoux test	vial	185	548.000,00	101.380.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	PPD Tuberkulin 5TU/0,1	vial	60	119.837,00	7.190.220,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Catride x pert MTB/RIF	test	100	142.500,00	14.250.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Catride x pert MTB/RIF	test	250	189.500,00	47.375.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Catride x pert MTB/RIF	test	50	189.500,00	9.475.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Catride x pert MTB/RIF	test	1.400	189.400,00	265.160.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Catride X Pert MTB/XDR	test	60	258.000,00	15.480.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Container steril	pot	23.600	2.185,00	51.566.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vit B6 50 mg	tablet	1.000	400,00	400.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Masker N95	ktk@20	5	468.540,00	2.342.700,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Paket OAT Kat I (Kombipak)	paket	30	1.740.816,00	52.224.480,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Moxyfloxacin 400 mg tab	tablet	110	4.000,00	440.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Truenat MTB Plus	paket	150	253.000,00	37.950.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Truenat MTB Plus	paket	5.850	170.430,00	997.015.500,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Dietil Carbamasin /DEC tab 100 mg	ktk 100	1.720	46.200,00	79.464.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Dietil Carbamasin /DEC tab 100 mg	ktk 100	1.500	51.000,00	76.500.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	MDT MB Anak	Blister	70	35.105,00	2.457.350,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	MDT MB Adult	Blister	90	1.000,00	90.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	RDT Frambusia	ktk 25	44	152.500,00	6.710.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	RPR Antigen	kotak 100	100	280.000,00	28.000.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Azitromicyn 500 mg	Tablet	2.000	2.911,00	5.822.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Garam Oralit	ktk 100	90	49.100,00	4.419.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	DHP/Frimal tab 40 mg/320 mg	ktk 9	4.781	33.642,00	160.842.402,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Primakuin tab	ktk 100	17	37.500,00	637.500,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Primakuin tab	ktk 100	3	59.399,00	178.197,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Artesunat Injeksi	ampul	600	88.989,00	53.393.400,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Artesunat Injeksi	ampul	95	94.124,00	8.941.780,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Paket pemeriksaan malaria	paket	2	782.217,00	1.564.434,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	RDT Combo Malaria	ktk@25	83	263.380,00	21.860.540,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	RDT Combo Malaria	ktk@25	3.949	415.000,00	1.638.835.000,00	Hibah Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	KETOKONAZOL TAB	Tablet	450	449,00	202.050,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	TETRASIKLIN 500 MG	Kapsul	39.880	537,00	21.415.560,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	MELOKSIKAM TAB 7,5 MG	Tablet	4.100	154,00	631.400,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	ANTALGIN TAB/METAMIZOLE 500 MG	Tablet	199.900	268,00	53.573.200,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	SIMVASTATIN 20 MG	Tablet	13.700	218,00	2.986.600,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	CEFADROKSIL SIRUP	Botol	1.450	9.950,00	14.427.500,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	ERITROMISIN SIRUP	Botol	1.300	14.543,00	18.905.900,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	PREDNISON TAB 5 MG	Tablet	4.900	123,00	602.700,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	GLIBENKLAMID 5 MG	Tablet	38.800	196,00	7.604.800,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	METILERGOMETRIN MALEAT	Tablet	5.000	343,00	1.715.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Antasida tablet	tablet	41.300	328,00	13.546.400,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Bedak salisil	pcs	488	6.500,00	3.172.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Chlorfeniramin Maleat (CTM) tablet	tablet	80.064	450,00	36.028.800,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Gentian Violet	botol	4.630	2.775,00	12.848.250,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Kloramfenikol salp kulit Bufacetin/Farscol cream	tube	2.568	6.750,00	17.334.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Kloramfenikol salp mata / Erlamicetin SM	tube	2.985	13.125,00	39.178.125,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Ketokonazole krim	tube	3.223	10.200,00	32.874.600,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Gliseril Guayakolat/Guaifinesin tablet	TAB	136.600	90,00	12.294.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Garam oralit	SACET	17.400	525,00	9.135.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Gentamicin salep kulit	TUBE	720	4.275,00	3.078.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	ICTIOL SALP	POT	508	7.688,00	3.905.504,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Captopril 12,5 mg	Tab	6.800	200,00	1.360.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Omeprazole inj	Vial	791	20.000,00	15.820.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Doksisiklin tab	Tab	1.900	825,00	1.567.500,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Aminofilin tab 200 mg	Tab	22.500	900,00	20.250.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Penicillin inj 3 jt IU	Ampul	200	40.000,00	8.000.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Vit B6 tab	Tab	22.900	160,00	3.664.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Sefiksim tab 200 mg	Tab	6.200	3.180,00	19.716.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Sefiksim tab 100 mg	Tab	6.000	1.500,00	9.000.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Ciprofloksasin 500 mg tab	Tab	78.800	1.275,00	100.470.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Clindamisin tab 300 mg	Tab	800	1.860,00	1.488.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Amoksilin 500 mg	tab	53.600	638,00	34.196.800,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Glukosa 5 % lart infus	Btl	808	17.000,00	13.736.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Zinc sirup	Btl	680	9.000,00	6.120.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Pot dahak	Pot	300	3.500,00	1.050.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Rivanol 300 ml	Botol	95	15.424,00	1.465.280,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Alkohol 70% 1L	Botol	150	48.299,00	7.244.850,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Gel Ultrasonic	Tube	77	28.565,00	2.199.505,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Kapas pembalut 250 gr	Roll	148	47.662,00	7.053.976,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Kapas pembalut 100 gr	Roll	500	21.258,00	10.629.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Kapas pembalut 500 gr	Roll	50	83.324,00	4.166.200,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Masker Headloop	ktk@50	186	77.280,00	14.374.080,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Apron standard	Pcs	60	416.920,00	25.015.200,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Infus set anak	Set	750	10.220,00	7.665.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Kasa hidrofil 4 x 15 cm	Roll	1.295	3.920,00	5.076.400,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Kasa hidrofil 2 x 80 cm	Roll	1.730	12.884,00	22.289.320,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Alat suntik 1 cc	pcs	4.000	1.715,00	6.860.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Sarung tangan stril no.7	pasang	1.000	7.488,00	7.488.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Sarung tangan stril no.7,5	pasang	4.250	7.488,00	31.824.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Sarung tangan stril no.8	pasang	5.000	7.488,00	37.440.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Blood lancet	Set	77	26.460,00	2.037.420,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Urine bag	Set	800	9.940,00	7.952.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	IV. Cateter 24 G	Set	900	8.260,00	7.434.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	IV. Cateter 22 G	Set	895	8.260,00	7.392.700,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	IV. Cateter 20 G	Set	830	8.260,00	6.855.800,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	IV. Cateter 18 G	Set	990	8.260,00	8.177.400,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Infus set dewasa	Set	325	10.220,00	3.321.500,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Silk 2/0	ktk@12	168	85.050,00	14.288.400,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Silk 3/0	ktk@12	198	85.050,00	16.839.900,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Lisol	Botol	88	76.560,00	6.737.280,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Alat suntik 3 ml	ktk@100	54	68.065,00	3.675.510,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Kasa hidrofil steril 40/40	lembar	1.450	5.828,00	8.450.600,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Plester 1,25 x 4,5	roll	337	30.000,00	10.110.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Plester 5 x 2 /plesterin	roll	989	79.947,00	79.067.583,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Strip pemeriksaan Hb (Nesco)	set	18	340.000,00	6.120.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Plastik obat 12 x 8 cm	bungkus 100	180	20.250,00	3.645.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Plastik obat. 7 x 10 cm	bungkus 100	270	11.700,00	3.159.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Plastik obat 10 x 15 cm	bungkus 100	300	18.000,00	5.400.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Kertas puyer	pack@500 lbr	99	37.500,00	3.712.500,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Sendok obat	pcs	297	1.125,00	334.125,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Nurse cup	box	26	83.000,00	2.158.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Formalin	botol 1000 ml	14	250.000,00	3.500.000,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Hypafix 5 cm x 5 m	roll	92	187.104,00	17.213.568,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat	Etil klorida spray	botol	95	241.425,00	22.935.375,00	Pengadaan BMHP Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	**Obat-obatan Lainnya**					2.934.081.416,00	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Deksametason tab	tablet	19.000	150,00	2.850.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Na diklofenac 50 mg	tablet	50.000	230,00	11.500.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Parasetamol tab 500 mg	tablet	3.800	227,00	862.600,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Parasetamol tab 500 mg	tablet	55.900	227,00	12.689.300,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Salbutamol 2 mg	tablet	10.500	220,00	2.310.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metformin 850	tablet	11.000	468,00	5.148.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Amlodipin 10 mg	tablet	1.200	566,00	679.200,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Amlodipin 10 mg	tablet	13.800	566,00	7.810.800,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Amoksilin 500 mg	tablet	130.000	750,00	97.500.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Betametason krim	tube	150	3.000,00	450.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Betametason krim	tube	75	3.000,00	225.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Betametason krim	tube	175	3.000,00	525.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Betametason krim	tube	1.600	3.000,00	4.800.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Cefadroksil 500 mg	tablet	25.000	1.220,00	30.500.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Setirizin 10 mg	tablet	50.000	533,00	26.650.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Siprofloksasin 500 mg	tablet	54.400	625,00	34.000.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Siprofloksasin 500 mg	tablet	600	625,00	375.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Klindamisin 300 mg	tablet	10.000	1.453,00	14.530.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Deksametason injeksi	ampul	2.000	2.089,00	4.178.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metronidazol 500 mg	tablet	20.000	356,00	7.120.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Paraseatmol infus	botol	140	24.707,00	3.458.980,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Parasetamol sirup	botol	1.698	5.500,00	9.339.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Aqua pro inj	botol	480	5.934,00	2.848.320,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Vit k inj	ampul	410	7.135,00	2.925.350,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Amoksilin sirup	botol	800	7.433,00	5.946.400,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sefotaksim inj 1GR	ampul	500	11.822,00	5.911.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sefotaksim inj 1GR	ampul	100	11.822,00	1.182.200,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Omeprazol inj	ampul	400	21.693,00	8.677.200,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Ambroksol sirup	botol	1.100	9.950,00	10.945.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sefiksim 200 mg	tablet	1.860	2.698,00	5.018.280,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sefiksim 200 mg	tablet	990	2.698,00	2.671.020,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sefiksim 200 mg	tablet	12.150	2.698,00	32.780.700,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Lidokain 2% injeksi	ampul	400	1.662,00	664.800,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Kotrimoksasol sirup	botol	800	6.145,00	4.916.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Ibuprofen sirup	botol	1.000	8.150,00	8.150.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Ambroksol 30 mg	tablet	70.000	330,00	23.100.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Asam mefenamat 500 mg	tablet	78.400	335,00	26.264.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Nurse cup	kotak	40	55.350,00	2.214.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Alkohol swab	kotak	700	16.200,00	11.340.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Blood lancet	kotak	100	19.409,00	1.940.900,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sarung tangan 6,5	kotak	193	640.260,00	123.570.180,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sarung tangan 6,5	kotak	17	640.260,00	10.884.420,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sarung tangan 7,5	kotak	54	640.260,00	34.574.040,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sarung tangan 7,5	kotak	44	640.260,00	28.171.440,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sarung tangan 7,5	kotak	102	640.260,00	65.306.520,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Masker ear loop	kotak	140	48.000,00	6.720.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Masker ear loop	kotak	210	48.000,00	10.080.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Antasida tablet	tablet	20.000	105,00	2.100.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Ca laktat	tablet	45.000	91,00	4.095.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Alopurinol 100 mg	tablet	118.800	232,00	27.561.600,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Alopurinol 100 mg	tablet	1.200	232,00	278.400,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Zinc 20 mg	tablet	10.000	255,00	2.550.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Benzatin penisilin 2,4 iu	ampul	300	66.600,00	19.980.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Epinefrin inj	ampul	900	5.828,00	5.245.200,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Antasida sirup	botol	300	5.000,00	1.500.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Aminoflin 200 mg	tablet	9.000	296,00	2.664.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Vit A 100.000	kapsul	12.500	750,00	9.375.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Ranitidin 150 g	tablet	40.000	212,00	8.480.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Cimetidin 200 mg	tablet	6.800	520,00	3.536.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Cimetidin 200 mg	tablet	13.200	520,00	6.864.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metamizole injeksi	ampul	2.880	11.740,00	33.811.200,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metamizole injeksi	ampul	930	11.740,00	10.918.200,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metamizole injeksi	ampul	190	11.740,00	2.230.600,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Aseptik gel pembersih tangan	botol	52	38.425,00	1.998.100,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Pov iod 300 ml	botol	143	46.676,00	6.674.668,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sarung tangan non steril S	kotak	198	55.633,00	11.015.334,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sarung tangan non steril M	kotak	100	61.849,00	6.184.900,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Apron standard	kotak	30	128.671,00	3.860.130,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Ultrasonic gel	botol	30	20.602,00	618.060,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Dermafix Tulle	kotak	50	43.512,00	2.175.600,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metformin 500 mg	kotak	150	132.867,00	19.930.050,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Prednison tablet	kotak	70.000	305,00	21.350.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Salep 2-4	kotak	135	148.000,00	19.980.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Salep 2-4	kotak	15	148.000,00	2.220.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Difenhidramin inj	kotak	20	642.700,00	12.854.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Furosemid inj	kotak	10	157.630,00	1.576.300,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	GG tab	kotak	350	66.000,00	23.100.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Salbutamol 4 mg	kotak	100	41.635,00	4.163.500,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Zinc sirup	botol	300	52.180,00	15.654.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Ibuprofen 400 mg	kotak	600	100.687,00	60.412.200,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Hidrokortison krim	tube	700	25.185,00	17.629.500,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	OBH sirup	botol	915	10.550,00	9.653.250,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	OBH sirup	botol	250	10.550,00	2.637.500,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Simvastatin 10 mg	kotak	250	36.363,00	9.090.750,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	RL infus	botol	140	26.147,00	3.660.580,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	RL infus	botol	100	26.147,00	2.614.700,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	NaCl infus	botol	240	24.579,00	5.898.960,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	NaCl infus	botol	60	24.579,00	1.474.740,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Captopril 25 mg	kotak	90	70.000,00	6.300.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Meloksikam 7,5 mg	kotak	70	170.284,00	11.919.880,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Vit B komp	kotak	1.160	37.800,00	43.848.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Asiklovir krim	kotak	25	457.890,00	11.447.250,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Vit C 50 mg tab	kotak	1.200	37.800,00	45.360.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Asiklovir 400 mg tab	kotak	250	108.851,00	27.212.750,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Glukosa 10% infus	botol	200	43.500,00	8.700.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Glukosa 10% infus	botol	300	43.500,00	13.050.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Kloramfenikol tetes mata	botol	400	62.500,00	25.000.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Kotrimoksasol 480 mg tab	kotak	500	112.014,00	56.007.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Gentamisin tts mata	botol	400	46.350,00	18.540.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Omeprazol 20 mg tab	kotak	250	41.203,00	10.300.750,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Test strip asam urat (Nesco)	botol	220	239.800,00	52.756.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Test strip kolesterol (Nesco)	botol	280	452.800,00	126.784.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Test strip glukosa (Nesco)	botol	220	205.600,00	45.232.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Sarung tangan non steril L	kotak	300	59.052,00	17.715.600,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Rapid sifilis	kotak	40	585.000,00	23.400.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Permetrin krim	ktk@16 tube	200	173.984,00	34.796.800,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Benzatatin pennisilin 1,2 jt IU	kotak@10 vaial	19	666.000,00	12.654.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Vit k1 inj 2 mg	ampul	300	7.135,00	2.140.500,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Ampisilin inj	ampul	490	13.235,00	6.485.150,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metronidazole infus	botol	220	19.765,00	4.348.300,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Oksitosin inj	ampul	1.000	3.297,00	3.297.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Oksitosin inj	ampul	1.100	3.297,00	3.626.700,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Kalsium glukonat inj 10%	ampul	48	18.820,00	903.360,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Mg sulfat 40%	ampul	145	6.227,00	902.915,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Mg sulfat 20%	ampul	27	5.470,00	147.690,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	kloramfenikol SM 1%	tube	3.504	11.294,00	39.574.176,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Tablet tambah darah (Ibu Hamil)	tablet	50.000	320,00	16.000.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Tablet tambah darah (Ibu Hamil)	tablet	153.600	320,00	49.152.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Tablet tambah darah (anemia ringan)	tablet	65.000	320,00	20.800.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Tablet tambah darah (anemia ringan)	tablet	25.000	320,00	8.000.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Tablet tambah darah (anemia ringan)	tablet	30.000	320,00	9.600.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Tablet tambah darah (Nifas)	tablet	15.000	320,00	4.800.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Tablet tambah darah (Nifas)	tablet	5.000	320,00	1.600.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Tablet Tambah darah (Rematri)	tablet	1.445.500	320,00	462.560.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Vit A 200.000 IU	kapsul	46.000	1.375,00	63.250.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2025
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	RL larutan infus	btl 50 ml	87	8.498,00	739.326,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Kotrimoksasol 480 mg	tablet	31.900	341,00	10.877.900,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metronidazol 500 mg	tablet	9.500	357,00	3.391.500,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Atorvastatin 20 mg	tablet	3.000	1.395,00	4.185.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Hidrokortison krim	tube	672	3.220,00	2.163.840,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Mikonazol krim	tube	308	4.505,00	1.387.540,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Asiklovir 400 mg	tablet	450	932,00	419.400,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Benzatin penisillin 2,4 jt IU inj	vial	130	66.600,00	8.658.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Epinefrin injeksi	vial	120	5.828,00	699.360,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Zinc tablet 20 mg	tablet	40.000	397,00	15.880.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metamizole injeksi	vial	2.000	3.885,00	7.770.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Natrium diklofenac 25 mg	tablet	12.500	244,00	3.050.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Betametason krim	tube	4.800	2.026,00	9.724.800,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Cefixim 200 mg	tablet	15.000	1.705,00	25.575.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Ranitidine 25 mg/ml inj	vial	7.480	2.400,00	17.952.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Domperidon sirup	botol	50	7.700,00	385.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Cefadroksil 500 mg	tablet	19.300	960,00	18.528.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Kloramfenikol tetes telinga 3 %	botol	1.176	11.385,00	13.388.760,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Omeprazol injeksi 40 mg	ampul	1.200	56.600,00	67.920.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Amitriptilin tab sal 25 mg	Tablet	2.500	205,00	512.500,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Amoksisilin drops 100 mg/ml	Botol @20 ml	420	48.555,00	20.393.100,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Amoksisilin sir forte 250 mg/5 ml	Botol 60 ml	100	68.591,00	6.859.100,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Amoksisilin sir kering 125 mg/5 ml	Botol	422	18.866,00	7.961.452,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Atorvastatin 20 mg	ktk 50	59	329.050,00	19.413.950,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Deksametason inj 5 mg/ml (i.v/i.m.)	Ampul	25	11.261,00	281.525,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Domperidon susp 5 mg/5 ml	Botol @60 ml	900	28.080,00	25.272.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Gentamisin salep mata 0,3%	Tube	12	75.904,00	910.848,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Kaptopril tab 12,5 mg	Tablet	2.000	1.755,00	3.510.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Klindamisin kaps 300 mg	Tablet	7.000	4.095,00	28.665.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Kloramfenikol tts mata 0,5%	Botol	40	29.981,00	1.199.240,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metformin tab 500 mg	Tablet	2.000	585,00	1.170.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metformin tab 850 mg	Tablet	9.000	951,00	8.559.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Meloksikam 7,5 mg tab	Tablet	3.000	2.779,00	8.337.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Natrium diklofenak tab 50 mg	Tablet	9.500	790,00	7.505.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Omeprazol kaps 20 mg	Tablet	12.000	907,00	10.884.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Asiklovir krim	Tube	430	9.653,00	4.150.790,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Test strip glukosa (merk :Nesco)	btl	12	145.958,00	1.751.496,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Test strip Kolestrol (Merk : Nesco)	btl	8	251.550,00	2.012.400,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Pirantel pamoat 125 mg tab	Tablet	700	24.773,00	17.341.100,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Amlodipine tab 10 mg	Tablet	850	2.091,00	1.777.350,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Difenhidramine injeksi	Ampul	620	7.999,00	4.959.380,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Aqua pro injeksi	flacon	646	34.650,00	22.383.900,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Parasetamol infus	Botol	10	36.225,00	362.250,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Aminofilin injeksi	Ampul	1.490	26.700,00	39.783.000,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Glukosa 10% larutan infus	Botol	80	17.971,00	1.437.680,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Glukosa 5% larutan infus	Botol	80	23.929,00	1.914.320,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Serum ATS	Ampul	50	444.589,00	22.229.450,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Tablet Tambah Darah (remaja putri)	Ktk 100	319	28.900,00	9.219.100,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Tablet Tambah Darah (ibu hamil)	ktk 100	764	28.900,00	22.079.600,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Oksitosin inj 10 IU/ml	ampul	6	3.297,00	19.782,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Kalsium Glukonat inj 10%	ampul	72	18.597,00	1.338.984,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Metilergometrin injeksi	ampul	30	3.890,00	116.700,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	MgSO4%	btl	40	5.661,00	226.440,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Vitamin K injeksi	ampul	1.670	3.818,00	6.376.060,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Levotiroksin 50 mcg tab	Tablet	400	759,00	303.600,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Obat-obatan Lainnya	Diazepam injeksi	ampul	20	1.920,00	38.400,00	Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2024
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	**Natura**			-		2.662.753.727,69	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Natura	SGM Eksplor Gain Optigrow	Kotak	7.808	187.999,59	1.467.900.798,81	

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Natura	SGM ANANDA GAIN 100 400gr	Kotak	4.600	200.500,41	922.301.886,06	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Natura	SGM Bunda	Kotak	2.370	115.000,44	272.551.042,82	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat**					7.976.105.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Khusus Beserta PSU	Paket	1	492.345.000,00	492.345.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 1	Paket	1	410.462.500,00	410.462.500,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 2	Paket	1	287.140.000,00	287.140.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 3	Paket	1	586.500.000,00	586.500.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 4	Paket	1	586.300.000,00	586.300.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 5	Paket	1	175.920.000,00	175.920.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 6	Paket	1	410.515.000,00	410.515.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 7	Paket	1	586.350.000,00	586.350.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 8	Paket	1	410.340.000,00	410.340.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 9	Paket	1	1.230.907.500,00	1.230.907.500,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 10	Paket	1	410.200.000,00	410.200.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 11	Paket	1	590.000.000,00	590.000.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 12	Paket	1	503.960.000,00	503.960.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 13	Paket	1	410.200.000,00	410.200.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 14	Paket	1	175.800.000,00	175.800.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rumah Layak Huni Paket 15	Paket	1	586.000.000,00	586.000.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Unit Air Baku Gereja Putikelek	Paket	1	123.165.000,00	123.165.000,00	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	**Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya**					190.545.000,00	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Pembangunan Asrama	Paket	1	996.150.000,00	996.150.000,00	Sudah diserahkan dengan BAST No : 400.9/01/BAST-PARSLH/DS/PPP/2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Pembangunan Barak Paket 1	Paket	1	1.492.880.000,00	1.492.880.000,00	Sudah diserahkan dengan BAST No : 400.9/02/BAST-PARSLH/DS/PPP/2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Pembangunan Barak Paket 2	Paket	1	1.484.880.000,00	1.484.880.000,00	Sudah diserahkan dengan BAST No : 400.9/05/BAST-PARSLH/DS/PPP/2026

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Pembangunan Barak Paket 3	Paket	1	1.483.880.000,00	1.483.880.000,00	Sudah diserahkan dengan BAST No : 400.9/08/BAST-PARSLH/DS/PPP/2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Pembangunan Barak Paket 4	Paket	1	1.483.980.000,00	1.483.980.000,00	Sudah diserahkan dengan BAST No : 400.9/11/BAST-PARSLH/DS/PPP/2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Pembangunan Barak Paket 5	Paket	1	1.485.380.000,00	1.485.380.000,00	Sudah diserahkan dengan BAST No : 400.9/15/BAST-PARSLH/DS/PPP/2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Tenda Pengungsi Korban	Unit	15	11.975.000,00	179.625.000,00	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Terpal Biasa	Unit	13	840.000,00	10.920.000,00	
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	**Bahan Cetak**					115.430.000,00	
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Bahan Cetak	Clening Kit Evolis	Buah	11	1.200.000,00	13.200.000,00	Sudah diserahkan ke Kab Pegunungan Bintang sebanyak 3 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Tolikara sebanyak 6 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Jayawijaya sebanyak 3 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Bahan Cetak	Clening Kit Fargo	Buah	16	1.080.000,00	17.280.000,00	Sudah diserahkan ke Kab Pegunungan Bintang sebanyak 4 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Tolikara sebanyak 3 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Jayawijaya sebanyak 4 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Bahan Cetak	Film HDP	Buah	27	2.250.000,00	60.750.000,00	Sudah diserahkan ke Kab Pegunungan Bintang sebanyak 6 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Tolikara sebanyak 5 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Jayawijaya sebanyak 7 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Bahan Cetak	Ribbon Evoli	Buah	11	2.200.000,00	24.200.000,00	Sudah diserahkan ke Kab Pegunungan Bintang sebanyak 6 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Tolikara sebanyak 3 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Jayawijaya sebanyak 7 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	**Bahan Komputer**					149.600.000,00	
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Bahan Komputer	Ribbon Color	Buah	34	4.400.000,00	149.600.000,00	Sudah diserahkan ke Kab Pegunungan Bintang sebanyak 5 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Tolikara sebanyak 4 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Jayawijaya sebanyak 4 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat**					72.000.000,00	
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Starlink	Buah	6	12.000.000,00	72.000.000,00	Sudah diserahkan ke Kab Pegunungan Bintang sebanyak 1 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Tolikara sebanyak 1 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026 Sudah diserahkan ke Kab Jayawijaya sebanyak 1 buah dengan BASTB NO : 400.12/48/IV/2026
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	**Perabot Kantor**					-	
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Perabot Kantor	Linggis	Buah	200	300.000,00	60.000.000,00	
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Perabot Kantor	Parang	Buah	170	350.000,00	59.500.000,00	
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Perabot Kantor	Plastik Sampah	Buah	290	80.000,00	23.200.000,00	
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Perabot Kantor	Sekop	Buah	250	200.000,00	50.000.000,00	
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Perabot Kantor	Sapu Lidi	Buah	350	60.000,00	21.000.000,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat**					923.850.000,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesin Roasting Kopi	Unit	1	79.879.920,00	79.879.920,00	

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesin Penggiling Kopi	Unit	1	19.997.655,00	19.997.655,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesin Rontok Padi	Unit	4	9.999.990,00	39.999.960,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesin Penggiling Padi	Unit	4	67.749.960,00	270.999.840,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesin Rajang Pengiris Bawang Merah Listrik	Unit	11	6.999.660,00	76.996.260,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesin Spinner Peniris Bawang	Unit	11	7.999.770,00	87.997.470,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Wajan	Unit	12	1.999.110,00	23.989.320,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Kompor	Unit	12	1.699.410,00	20.392.920,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Sutil	Unit	10	549.450,00	5.494.500,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Saringan Minyak	Unit	11	374.625,00	4.120.875,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesin Perontok Jagung	Unit	8	7.999.770,00	63.998.160,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesing Penggiling Jagung	Unit	8	9.999.990,00	79.999.920,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesin Pakan Ternak	unit	10	4.999.440,00	49.994.400,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesin Cacah Multifungsi	Unit	10	4.999.440,00	49.994.400,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Mesin Mixer Pakan Ternak	Unit	10	4.999.440,00	49.994.400,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	**Obat**					199.350.000,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	Aquadest 25 ml	Botol	865	6.660,00	5.760.900,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	Colibact 50 ml	Botol	70	95.793,00	6.705.510,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	Injectavit / Injectamin 100 ml	Botol	100	220.446,00	22.044.600,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	Ivomec Super 50 ml	Botol	35	755.751,00	26.451.285,00	

NAMA OPD	NAMA PERSEDIAAN	NAMA BARANG	SATUAN	SISA STOK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	Limoxin 100 ml	Botol	72	195.693,00	14.089.905,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	G mx LA 100 ml	Botol	140	209.235,00	29.292.900,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	Vet Oxy LA 50 ml	Botol	100	115.440,00	11.544.000,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	Vet Oxy SB 50 ml	Botol	100	104.895,00	10.489.500,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	Wonder Invermes 50 ml	Botol	100	377.955,00	37.795.500,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	Vaksin Hog Cholera	Dosis	4.000	6.227,10	24.908.400,00	
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Obat	Vaksin Ayam (ND)	Dosis	2.500	4.107,00	10.267.500,00	
Biro Umum	**Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya**					15.116.880.000,00	
Biro Umum	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Rehabilitasi Gedung dan Pembangunan Pagar Kantor Gubernur	Paket	1	5.959.780.000,00	5.959.780.000,00	
Biro Umum	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Rehabilitasi Ruang Rapat Gubernur	Paket	1	1.997.350.000,00	1.997.350.000,00	
Biro Umum	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Rehabilitasi Ruang Sekda Dan Asisten	Paket	1	1.508.150.000,00	1.508.150.000,00	
Biro Umum	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0954/SP2D/2024	Paket	1	900.600.000,00	900.600.000,00	
Biro Umum	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0951/SP2D/2024	Paket	1	1.192.600.000,00	1.192.600.000,00	
Biro Umum	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0949/SP2D/2024	Paket	1	3.558.400.000,00	3.558.400.000,00	
Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	**Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya**					32.335.522.000,00	
Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Pembangunan Lapangan Pendidikan	Paket	1	23.448.115.000,00	23.448.115.000,00	
Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Wamena	Paket	1	8.887.407.000,00	8.887.407.000,00	

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.3.1.3 - Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025

1. Mutasi Aset Tetap Berdasarkan Sub Rincian Objek

No	Kode Rekening	Uraian Rekening	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025
1	***1.3.01***	***Tanah***	***78.564.500.000,00***	***54.580.132.000,00***	***3.500.000.000,00***	***129.644.632.000,00***
2	1.3.01.01	Tanah	78.564.500.000,00	54.580.132.000,00	3.500.000.000,00	129.644.632.000,00
3	1.3.01.01.01	Tanah Persil	75.064.500.000,00	54.580.132.000,00	0,00	129.644.632.000,00
4	1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	5.250.000.000,00	2.275.630.000,00	0,00	7.525.630.000,00
5	1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	69.814.500.000,00	52.304.502.000,00	0,00	122.119.002.000,00
6	1.3.01.01.03	Lapangan	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00
7	1.3.01.01.03.0007	Tanah untuk Jalan	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00
8	***1.3.02***	***Peralatan dan Mesin***	***82.126.438.624,88***	***32.949.251.553,00***	***8.670.053.229,66***	***106.405.636.948,22***
9	1.3.02.01	Alat Besar	40.627.580,00	59.192.000,00	0,00	99.819.580,00
10	1.3.02.01.03	Alat Bantu	40.627.580,00	59.192.000,00	0,00	99.819.580,00
11	1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	35.627.580,00	59.192.000,00	0,00	94.819.580,00
12	1.3.02.01.03.0005	Pompa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
13	1.3.02.02	Alat Angkutan	39.795.756.115,73	8.854.398.892,00	218.692.648,54	48.431.462.359,19
14	1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	39.788.736.115,73	7.401.461.100,00	211.672.648,54	46.978.524.567,19
15	1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.085.500.000,00	7.003.800.500,00	184.000.000,00	38.905.300.500,00
16	1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.077.800.000,00	0,00	0,00	2.077.800.000,00
17	1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.595.136.115,73	397.660.600,00	27.672.648,54	2.965.124.067,19
18	1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	3.030.300.000,00	0,00	0,00	3.030.300.000,00
19	1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7.020.000,00	12.200.000,00	7.020.000,00	12.200.000,00
20	1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
21	1.3.02.02.02.0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	0,00
22	1.3.02.02.02.0004	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
23	1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	1.440.737.792,00	0,00	1.440.737.792,00
24	1.3.02.02.03.0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	379.200.000,00	0,00	379.200.000,00
25	1.3.02.02.03.0005	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	1.061.537.792,00	0,00	1.061.537.792,00
26	1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	123.600.000,00	350.000.000,00	0,00	473.600.000,00
27	1.3.02.03.03	Alat Ukur	123.600.000,00	350.000.000,00	0,00	473.600.000,00
28	1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	123.600.000,00	0,00	0,00	123.600.000,00
29	1.3.02.03.03.0021	Alat Ukur Lainnya	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
30	1.3.02.04	Alat Pertanian	0,00	550.400.000,00	592.150.000,00	(41.750.000,00)
31	1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	0,00	550.400.000,00	592.150.000,00	(41.750.000,00)
32	1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	0,00	550.400.000,00	550.400.000,00	(0,00)

No	Kode Rekening	Uraian Rekening	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025
33	1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.076.203.489,36	17.451.428.114,00	1.923.163.263,50	29.604.468.339,86
34	1.3.02.05.01	Alat Kantor	3.935.334.302,00	1.534.599.000,00	0,00	5.469.933.302,00
35	1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	81.450.000,00	0,00	0,00	81.450.000,00
36	1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	379.447.000,00	0,00	0,00	379.447.000,00
37	1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.708.892.182,00	38.850.000,00	0,00	1.747.742.182,00
38	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.765.545.120,00	1.495.749.000,00	0,00	3.261.294.120,00
39	1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	9.126.472.987,34	15.733.679.114,00	1.864.888.263,50	22.995.263.837,84
40	1.3.02.05.02.0001	Mebel	4.372.644.989,07	5.395.775.518,00	33.456.900,00	9.734.963.607,07
41	1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	49.400.000,00	0,00	0,00	49.400.000,00
42	1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	1.328.126.000,51	10.709.946,00	5.500.000,00	1.333.335.946,51
43	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	164.143.400,00	124.775.000,00	0,00	288.918.400,00
44	1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
45	1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.164.758.597,76	9.795.359.050,00	1.822.531.363,50	11.137.586.284,26
46	1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	44.000.000,00	407.059.600,00	0,00	451.059.600,00
47	1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.014.396.200,02	183.150.000,00	58.275.000,00	1.139.271.200,02
48	1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	0,00	160.950.000,00	0,00	160.950.000,00
49	1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	30.120.000,00	0,00	7.215.000,00	22.905.000,00
50	1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	951.826.200,02	0,00	51.060.000,00	900.766.200,02
51	1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	6.050.000,00	22.200.000,00	0,00	28.250.000,00
52	1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00
53	1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.894.147.143,75	3.378.536.000,00	3.285.506.150,00	3.987.176.993,75
54	1.3.02.06.01	Alat Studio	3.681.038.400,00	581.536.000,00	466.309.150,00	3.796.265.250,00
55	1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	404.985.650,00	4.270.000,00	20.829.150,00	388.426.500,00
56	1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	3.256.552.750,00	314.200.000,00	445.480.000,00	3.125.272.750,00
57	1.3.02.06.01.0003	Peralatan Studio Gambar	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
58	1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	0,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00
59	1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	255.296.000,00	0,00	255.296.000,00
60	1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	137.112.000,00	0,00	0,00	137.112.000,00
61	1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	137.112.000,00	0,00	0,00	137.112.000,00
62	1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	75.996.743,75	2.797.000.000,00	2.819.197.000,00	53.799.743,75
63	1.3.02.06.03.0007	Peralatan Antena HF/SW	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
64	1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00
65	1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	49.496.743,75	2.797.000.000,00	2.819.197.000,00	27.299.743,75
66	1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.688.334.685,00	4.438.890,00	0,00	2.692.773.575,00
67	1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	2.291.334.685,00	4.438.890,00	0,00	2.295.773.575,00
68	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	778.226.658,00	4.438.890,00	0,00	782.665.548,00
69	1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	45.558.000,00	0,00	0,00	45.558.000,00
70	1.3.02.07.01.0006	Alat Kedokteran THT	1.169.225.397,00	0,00	0,00	1.169.225.397,00

No	Kode Rekening	Uraian Rekening	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025
71	1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	94.698.630,00	0,00	0,00	94.698.630,00
72	1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
73	1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung	55.780.000,00	0,00	0,00	55.780.000,00
74	1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	144.246.000,00	0,00	0,00	144.246.000,00
75	1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	397.000.000,00	0,00	0,00	397.000.000,00
76	1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	397.000.000,00	0,00	0,00	397.000.000,00
77	1.3.02.08	Alat Laboratorium	2.930.871.755,00	0,00	152.726.200,00	2.778.145.555,00
78	1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	2.465.424.355,00	0,00	78.988.800,00	2.386.435.555,00
79	1.3.02.08.01.0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	20.838.400,00	0,00	20.838.400,00	0,00
80	1.3.02.08.01.0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	205.000.000,00	0,00	0,00	205.000.000,00
81	1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	134.379.092,00	0,00	0,00	134.379.092,00
82	1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
83	1.3.02.08.01.0016	Alat Laboratorium Hematologi	95.419.650,00	0,00	33.862.400,00	61.557.250,00
84	1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	1.599.699.213,00	0,00	41.750.000,00	1.557.949.213,00
85	1.3.02.08.01.0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	24.288.000,00	0,00	24.288.000,00	0,00
86	1.3.02.08.01.0055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	357.800.000,00	0,00	0,00	357.800.000,00
87	1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
88	1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	86.187.400,00	0,00	73.737.400,00	12.450.000,00
89	1.3.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	12.450.000,00	0,00	0,00	12.450.000,00
90	1.3.02.08.03.0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	73.737.400,00	0,00	73.737.400,00	0,00
91	1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	379.260.000,00	0,00	0,00	379.260.000,00
92	1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	379.260.000,00	0,00	0,00	379.260.000,00
93	1.3.02.09	Alat Persenjataan	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
94	1.3.02.09.01	Senjata Api	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
95	1.3.02.09.01.0010	Senjata Lain-Lain	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
96	1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
97	1.3.02.09.04.0007	Alsus Fotografi Kepolisian	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
98	1.3.02.10	Komputer	18.066.099.856,04	2.244.870.157,00	2.160.337.467,63	18.150.632.545,41
99	1.3.02.10.01	Komputer Unit	14.614.129.423,58	310.218.000,00	1.072.467.426,67	13.851.879.996,91
100	1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	291.930.000,00	0,00	0,00	291.930.000,00
101	1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	14.322.199.423,58	310.218.000,00	1.072.467.426,67	13.559.949.996,91
102	1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	3.451.970.432,46	1.934.652.157,00	1.087.870.040,96	4.298.752.548,50
103	1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	13.938.000,00	0,00	0,00	13.938.000,00
104	1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
105	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	2.783.251.832,46	412.945.000,00	617.934.702,96	2.578.262.129,50
106	1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	614.780.600,00	1.521.707.157,00	469.935.338,00	1.666.552.419,00
107	1.3.02.11	Alat Eksplorasi	23.088.000,00	0,00	0,00	23.088.000,00
108	1.3.02.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	23.088.000,00	0,00	0,00	23.088.000,00

No	Kode Rekening	Uraian Rekening	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025
109	1.3.02.11.01.0002	Ukur/Instrumen	23.088.000,00	0,00	0,00	23.088.000,00
110	1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	76.410.000,00	11.310.000,00	0,00	87.720.000,00
111	1.3.02.15.02	Alat Pelindung	65.410.000,00	11.310.000,00	0,00	76.720.000,00
112	1.3.02.15.02.0001	Baju Pengaman	65.410.000,00	11.310.000,00	0,00	76.720.000,00
113	1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
114	1.3.02.15.04.0004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
115	1.3.02.16	Alat Peraga	292.800.000,00	0,00	292.800.000,00	0,00
116	1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	292.800.000,00	0,00	292.800.000,00	0,00
117	1.3.02.16.01.0003	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	292.800.000,00	0,00	292.800.000,00	0,00
118	1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	5.000.000,00	44.677.500,00	44.677.500,00	5.000.000,00
119	1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5.000.000,00	44.677.500,00	44.677.500,00	5.000.000,00
120	1.3.02.17.01.0020	Solid Material Handling Equipment	5.000.000,00	44.677.500,00	44.677.500,00	5.000.000,00
121	1.3.02.18	Rambu-rambu	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00
122	1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00
123	1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00
124	***1.3.03***	***Gedung dan Bangunan***	***55.599.517.613,50***	***145.020.673.369,00***	***1.615.992.736,00***	***199.004.198.246,50***
125	1.3.03.01	Bangunan Gedung	50.524.257.613,50	130.970.838.669,00	959.006.536,00	180.536.089.746,50
126	1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.382.032.613,50	127.058.343.669,00	959.006.536,00	174.481.369.746,50
127	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	11.105.167.700,00	83.404.500,00	0,00	11.188.572.200,00
128	1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	1.094.465.000,00	0,00	1.094.465.000,00
129	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	22.733.340.913,50	2.106.722.000,00	0,00	24.840.062.913,50
130	1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	9.041.155.000,00	0,00	0,00	9.041.155.000,00
131	1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.230.500.000,00	0,00	0,00	1.230.500.000,00
132	1.3.03.01.01.0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	122.981.271.739,00	944.019.036,00	122.037.252.703,00
133	1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	2.703.750.000,00	0,00	0,00	2.703.750.000,00
134	1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	184.872.000,00	0,00	184.872.000,00
135	1.3.03.01.01.0034	Bangunan Gedung Pabrik	0,00	592.620.930,00	0,00	592.620.930,00
136	1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.568.119.000,00	0,00	0,00	1.568.119.000,00
137	1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.142.225.000,00	3.912.495.000,00	0,00	6.054.720.000,00
138	1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	0,00	2.698.800.000,00	0,00	2.698.800.000,00
139	1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	2.142.225.000,00	293.150.000,00	0,00	2.435.375.000,00
140	1.3.03.01.02.0008	Flat/Rumah Susun	0,00	920.545.000,00	0,00	920.545.000,00
141	1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.075.260.000,00	14.049.834.700,00	656.986.200,00	18.468.108.500,00
142	1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	5.075.260.000,00	14.049.834.700,00	656.986.200,00	18.468.108.500,00
143	1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.075.260.000,00	14.049.834.700,00	656.986.200,00	18.468.108.500,00
145	***1.3.04***	***Jalan, Jaringan, dan Irigasi***	***2.302.379.548.278,98***	***767.823.971.041,00***	***120.511.144.776,00***	***2.949.692.374.543,98***
146	1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	2.217.473.063.512,98	632.553.085.341,00	91.741.480.176,00	2.758.284.668.677,98
147	1.3.04.01.01	Jalan	1.969.509.766.745,78	572.279.669.094,00	73.870.792.670,00	2.467.918.643.169,78

No	Kode Rekening	Uraian Rekening	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025
148	1.3.04.01.01.0002	Jalan Provinsi	1.352.818.287.481,68	416.095.640.007,00	48.128.792.670,00	1.720.785.134.818,68
149	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	616.691.479.264,10	0,00	0,00	616.691.479.264,10
150	1.3.04.01.01.0008	Landasan Pacu Pesawat Terbang	0,00	156.184.029.087,00	25.742.000.000,00	130.442.029.087,00
151	1.3.04.01.02	Jembatan	247.963.296.767,20	60.273.416.247,00	17.870.687.506,00	290.366.025.508,20
152	1.3.04.01.02.0002	Jembatan pada Jalan Provinsi	91.995.247.386,20	60.273.416.247,00	17.870.687.506,00	134.397.976.127,20
153	1.3.04.01.02.0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten	155.968.049.381,00	0,00	0,00	155.968.049.381,00
154	1.3.04.02	Bangunan Air	59.094.914.500,00	116.707.697.700,00	28.769.664.600,00	147.032.947.600,00
155	1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	18.899.350.000,00	14.227.850.000,00	0,00	33.127.200.000,00
156	1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	14.628.550.000,00	0,00	0,00	14.628.550.000,00
157	1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi	4.270.800.000,00	14.227.850.000,00	0,00	18.498.650.000,00
158	1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	31.781.140.500,00	21.481.333.000,00	0,00	53.262.473.500,00
159	1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	30.869.004.000,00	1.474.100.000,00	0,00	32.343.104.000,00
160	1.3.04.02.04.0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	912.136.500,00	20.007.233.000,00	0,00	20.919.369.500,00
161	1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	959.500.000,00	12.034.577.100,00	7.420.766.100,00	5.573.311.000,00
162	1.3.04.02.06.0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	959.500.000,00	10.394.766.100,00	7.420.766.100,00	3.933.500.000,00
163	1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	1.639.811.000,00	0,00	1.639.811.000,00
164	1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	7.454.924.000,00	68.963.937.600,00	21.348.898.500,00	55.069.963.100,00
165	1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	68.963.937.600,00	21.348.898.500,00	47.615.039.100,00
166	1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	7.454.924.000,00	0,00	0,00	7.454.924.000,00
167	1.3.04.03	Instalasi	15.512.395.266,00	18.563.188.000,00	0,00	34.075.583.266,00
168	1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	11.313.349.266,00	0,00	0,00	11.313.349.266,00
169	1.3.04.03.01.0001	Instalasi Air Permukaan	931.128.000,00	0,00	0,00	931.128.000,00
170	1.3.04.03.01.0002	Instalasi Air Sumber/Mata Air	10.382.221.266,00	0,00	0,00	10.382.221.266,00
171	1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	4.199.046.000,00	0,00	0,00	4.199.046.000,00
172	1.3.04.03.03.0003	Bangunan Penampung Sampah	4.199.046.000,00	0,00	0,00	4.199.046.000,00
173	1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	18.563.188.000,00	0,00	18.563.188.000,00
174	1.3.04.03.05.0003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	0,00	15.778.783.000,00	0,00	15.778.783.000,00
175	1.3.04.03.05.0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	2.784.405.000,00	0,00	2.784.405.000,00
176	1.3.04.04	Jaringan	10.299.175.000,00	0,00	0,00	10.299.175.000,00
177	1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	1.797.797.000,00	0,00	0,00	1.797.797.000,00
178	1.3.04.04.01.0003	Jaringan Cabang Distribusi	1.797.797.000,00	0,00	0,00	1.797.797.000,00
179	1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	4.399.378.000,00	0,00	0,00	4.399.378.000,00
180	1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	4.399.378.000,00	0,00	0,00	4.399.378.000,00
181	1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	4.102.000.000,00	0,00	0,00	4.102.000.000,00
182	1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	4.102.000.000,00	0,00	0,00	4.102.000.000,00
184	***1.3.05***	***Aset Tetap Lainnya***	***290.332.073.261,57***	***31.433.142.040,00***	***0,00***	***321.765.215.301,57***
185	1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	471.013.000,00	31.433.142.040,00	0,00	31.904.155.040,00
186	1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	471.013.000,00	31.433.142.040,00	0,00	31.904.155.040,00

No	Kode Rekening	Uraian Rekening	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025
187	1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
188	1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
189	1.3.05.01.01.0011	Buku Laporan	431.013.000,00	31.433.142.040,00	0,00	31.864.155.040,00
190	1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	289.861.060.261,57	0,00	0,00	289.861.060.261,57
191	1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	289.861.060.261,57	0,00	0,00	289.861.060.261,57
192	1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	289.861.060.261,57	0,00	0,00	289.861.060.261,57
193	***1.3.06***	***Konstruksi Dalam Pengerjaan***	***376.021.703.926,88***	***204.484.471.310,00***	***97.062.784.876,00***	***483.443.390.360,88***
194	1.3.06.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	15.917.681.969,00	8.887.407.000,00	0,00	24.805.088.969,00
195	1.3.06.04.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	15.917.681.969,00	8.887.407.000,00	0,00	24.805.088.969,00
196	1.3.06.04.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.917.681.969,00	0,00	0,00	15.917.681.969,00
197	1.3.06.04.01.0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	8.887.407.000,00	0,00	8.887.407.000,00
198	1.3.06.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	360.104.021.957,88	105.621.872.776,00	82.012.867.706,00	383.713.027.027,88
199	1.3.06.05.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	360.104.021.957,88	77.103.963.176,00	69.764.804.206,00	367.443.180.927,88
200	1.3.06.05.01.0002	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Provinsi	351.337.612.806,12	44.051.275.670,00	51.894.116.700,00	343.494.771.776,12
201	1.3.06.05.01.0008	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	0,00	15.182.000.000,00	0,00	15.182.000.000,00
202	1.3.06.05.01.0012	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	8.766.409.151,76	17.870.687.506,00	17.870.687.506,00	8.766.409.151,76
203	1.3.06.05.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air	0,00	28.517.909.600,00	12.248.063.500,00	16.269.846.100,00
204	1.3.06.05.02.0045	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	7.420.766.100,00	1.985.600.000,00	5.435.166.100,00
205	1.3.06.05.02.0051	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	21.097.143.500,00	10.262.463.500,00	10.834.680.000,00
206	1.3.06.05.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan	0,00	7.420.766.100,00	0,00	7.420.766.100,00
207	1.3.06.05.04.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	0,00	7.420.766.100,00	0,00	7.420.766.100,00
208	1.3.06.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	0,00	8.741.351.500,00	15.049.917.170,00	(6.308.565.670,00)
209	1.3.06.06.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	8.741.351.500,00	15.049.917.170,00	(6.308.565.670,00)
210	1.3.06.06.07.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	8.741.351.500,00	15.049.917.170,00	(6.308.565.670,00)
211	***1.3.07***	***Akumulasi Penyusutan***	***(1.299.117.734.281,57)***	***32.269.247.372,98***	***339.662.019.016,55***	***(1.606.510.505.925,14)***
212	1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22.064.570.482,84)	1.565.332.967,98	17.765.512.307,91	(38.264.749.822,77)
213	1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.261.746.476,27)	584.704.220,00	26.164.485.605,49	(32.841.527.861,76)
214	1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.269.791.417.322,46)	30.119.210.185,00	295.732.021.103,15	(1.535.404.228.240,61)
TOTAL (1+8+124+145+184+193+211)			**1.885.906.047.424,24**	**1.268.560.888.685,98**	**571.021.994.634,21**	**2.583.444.941.476,01**

2. Mutasi Aset Tetap - Tanah Berdasarkan SKPD

Kode SKPD	SKPD	Saldo Awal 2025	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31 Des 2025
1-01.0-00.0-00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.500.000.000,00	0,00	0,00	10.500.000.000,00
1-02.2-14.0-00.01.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.550.000.000,00	0,00	0,00	3.550.000.000,00
1-03.0-00.0-00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.500.000.000,00	36.602.655.000,00	3.500.000.000,00	36.602.655.000,00
1-05.0-00.0-00.01.00	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
1-06.2-08.0-00.01.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
2-07.3-29.0-00.01.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
2-11.2-10.3-28.01.00	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	60.374.500.000,00	14.500.000.000,00	0,00	74.874.500.000,00
2-12.2-13.0-00.01.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00
2-15.0-00.0-00.01.00	Dinas Perhubungan	0,00	2.275.630.000,00	0,00	2.275.630.000,00
2-16.2-20.0-00.01.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17.3-30.3-31.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18.0-00.0-00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
2-19.3-26.0-00.01.00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00	0,00
3-27.2-09.0-00.01.00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.01	Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.02	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.03	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.04	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.05	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.06	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
4-02.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5-01.5-05.0-00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5-02.0-00.0-00.01.00	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	640.000.000,00	1.201.847.000,00	0,00	1.841.847.000,00
5-03.0-00.0-00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
6-01.0-00.0-00.01.00	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8-01.0-00.0-00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9-02.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**78.564.500.000,00**	**54.580.132.000,00**	**3.500.000.000,00**	**129.644.632.000,00**

3. Mutasi Aset Tetap - Peralatan Dan Mesin Berdasarkan SKPD

Kode SKPD	SKPD	Saldo Awal 2025	Bertambah 2025	Berkurang 2025	Saldo Akhir 31 Des 2024	Saldo Akhir Penyusutan 31 Des 2025	Nilai Buku 31 Des 2025
1-01.0-00.0-00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.954.888.666,32	14.487.000,00	63.495.315,20	2.905.880.351,22	1.589.178.835,24	1.316.701.515,98
1-02.2-14.0-00.01.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.885.329.805,98	1.984.416.036,00	375.057.500,00	10.494.688.342,00	4.087.411.075,50	6.407.277.266,50
1-03.0-00.0-00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.623.733.732,01	485.310.000,00	67.889.510,00	3.041.154.221,50	1.620.667.636,52	1.420.486.584,98
1-05.0-00.0-00.01.00	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	1.461.043.200,01	0,00	0,00	1.461.043.200,00	633.930.898,00	827.112.302,00
1-06.2-08.0-00.01.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	781.910.000,00	0,00	48.740.000,00	733.170.000,00	418.307.000,00	314.863.000,00
2-07.3-29.0-00.01.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	2.307.739.492,00	3.353.227.695,00	4.258.731.900,00	1.402.235.287,00	806.222.627,80	596.012.659,20
2-11.2-10.3-28.01.00	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	719.922.733,04	504.281.723,00	42.968.000,00	1.181.236.456,00	448.605.228,60	732.631.227,40
2-12.2-13.0-00.01.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	2.358.765.900,00	373.132.000,00	441.637.000,00	2.290.260.900,00	1.226.948.885,00	1.063.312.015,00
2-15.0-00.0-00.01.00	Dinas Perhubungan	679.114.000,00	1.549.942.792,00	0,00	2.229.056.792,00	586.770.679,20	1.642.286.112,80
2-16.2-20.0-00.01.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	4.172.699.568,01	2.807.027.157,00	1.800.135.338,00	5.179.591.387,00	1.820.985.418,95	3.358.605.968,05
2-17.3-30.3-31.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	911.092.000,00	0,00	0,00	911.092.000,00	539.552.100,00	371.539.900,00
2-18.0-00.0-00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.513.824.000,05	340.000.000,00	0,00	1.853.824.000,00	749.677.245,00	1.104.146.755,00
2-19.3-26.0-00.01.00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	467.114.000,00	66.550.000,00	62.750.000,00	470.914.000,00	257.916.200,00	212.997.800,00
3-27.2-09.0-00.01.00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1.007.166.200,00	118.120.000,00	295.726.200,00	829.560.000,00	493.344.000,00	336.216.000,00
4-01.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Daerah	2.779.636.950,00	8.383.375.050,00	365.100.000,00	10.797.912.000,00	3.445.844.167,00	7.352.067.833,00
4-01.0-00.0-00.01.01	Biro Umum	36.039.259.085,00	5.592.600.000,00	0,00	41.631.859.085,00	11.225.145.893,00	30.406.713.192,00
4-01.0-00.0-00.01.02	Biro Hukum	245.700.000,00	0,00	0,00	245.700.000,00	105.450.000,00	140.250.000,00
4-01.0-00.0-00.01.03	Biro Organisasi	468.473.000,00	0,00	0,00	468.473.000,00	288.116.550,00	180.356.450,00
4-01.0-00.0-00.01.04	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	389.522.000,01	22.568.000,00	0,00	412.090.000,00	265.916.192,00	146.173.808,00
4-01.0-00.0-00.01.05	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	714.940.000,02	0,00	0,00	714.940.000,00	329.221.795,00	385.718.205,00
4-01.0-00.0-00.01.06	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	1.038.351.000,00	0,00	0,00	1.038.351.000,00	584.081.500,00	454.269.500,00
4-09.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	661.788.300,00	6.250.870.000,00	434.259.583,50	6.478.398.716,50	1.555.127.251,62	4.923.271.464,88
5-01.5-05.0-00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	873.094.000,00	400.680.000,00	15.500.000,00	1.258.274.000,00	635.141.000,00	623.133.000,00
5-02.0-00.0-00.01.01	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	3.290.827.892,43	522.744.100,00	386.962.882,96	3.426.609.110,00	2.206.602.205,33	1.220.006.904,67
5-03.0-00.0-00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.405.348.100,00	0,00	0,00	1.405.348.100,00	784.394.440,00	620.953.660,00
6-01.0-00.0-00.01.00	Inspektorat Daerah	2.329.786.000,00	179.920.000,00	11.100.000,00	2.498.606.000,00	872.741.300,00	1.625.864.700,00
8-01.0-00.0-00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	539.780.000,00	0,00	0,00	539.780.000,00	343.639.200,00	196.140.800,00
9-02.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	505.589.000,00	0,00	0,00	505.589.000,00	343.810.499,00	161.778.501,00
TOTAL		**82.126.438.624,88**	**32.949.251.553,00**	**8.670.053.229,66**	**106.405.636.948,22**	**38.264.749.822,77**	**68.140.887.125,46**

4. Mutasi Aset Tetap - Gedung Dan Bangunan Berdasarkan SKPD

Kode SKPD	SKPD	Saldo Awal 2025	Bertambah 2025	Berkurang 2025	Saldo Akhir 31 Des 2025	Saldo Akhir Penyusutan 31 Des 2025	Nilai Buku 31 Des 2025
1-01.0-00.0-00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-02.2-14.0-00.01.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.733.340.913,50	1.415.000.000,00	944.019.036,00	23.204.321.877,50	918.753.255,82	22.285.568.621,68
1-03.0-00.0-00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	5.457.614.500,00	0,00	5.457.614.500,00	109.152.290,00	5.348.462.210,00
1-05.0-00.0-00.01.00	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-06.2-08.0-00.01.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-07.3-29.0-00.01.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-11.2-10.3-28.01.00	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	1.000.000.700,00	592.620.930,00	0,00	1.592.621.630,00	219.262.205,00	1.373.359.425,00
2-12.2-13.0-00.01.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-15.0-00.0-00.01.00	Dinas Perhubungan	2.846.560.000,00	131.158.698.939,00	656.986.200,00	133.348.272.739,00	23.314.265.480,94	110.034.007.258,06
2-16.2-20.0-00.01.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17.3-30.3-31.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18.0-00.0-00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-19.3-26.0-00.01.00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	48.000.000,00	1.152.000.000,00
3-27.2-09.0-00.01.00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1.230.500.000,00	1.094.465.000,00	0,00	2.324.965.000,00	568.998.100,00	1.755.966.900,00
4-01.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.01	Biro Umum	10.544.905.000,00	0,00	0,00	10.544.905.000,00	421.796.200,00	10.123.108.800,00
4-01.0-00.0-00.01.02	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.03	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.04	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.05	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.06	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-09.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-01.5-05.0-00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	304.872.000,00	0,00	304.872.000,00	6.097.440,00	298.774.560,00
5-02.0-00.0-00.01.01	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	16.044.211.000,00	4.997.402.000,00	14.987.500,00	21.026.625.500,00	7.235.202.890,00	13.791.422.610,00
5-03.0-00.0-00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-01.0-00.0-00.01.00	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-01.0-00.0-00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-02.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**55.599.517.613,50**	**145.020.673.369,00**	**1.615.992.736,00**	**199.004.198.246,50**	**32.841.527.861,76**	**166.162.670.384,74**

5. Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi Dan Jaringan Berdasarkan SKPD

Kode SKPD	SKPD	Saldo Awal 2025	Bertambah 2025	Berkurang 2025	Saldo Akhir 31 Des 2025	Saldo Akhir Penyusutan 31 Des 2025	Nilai Buku 31 Des 2025
1-01.0-00.0-00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-02.2-14.0-00.01.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-03.0-00.0-00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.289.679.124.278,98	520.164.284.648,00	45.418.953.470,00	2.764.424.455.456,98	1.403.100.676.451,11	1.361.323.779.005,87
1-05.0-00.0-00.01.00	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-06.2-08.0-00.01.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-07.3-29.0-00.01.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	4.399.378.000,00	18.563.188.000,00	0,00	22.962.566.000,00	5.682.568.364,00	17.279.997.636,00
2-11.2-10.3-28.01.00	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	4.199.046.000,00	0,00	0,00	4.199.046.000,00	839.809.200,00	3.359.236.800,00
2-12.2-13.0-00.01.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-15.0-00.0-00.01.00	Dinas Perhubungan	0,00	179.746.307.087,00	25.742.000.000,00	154.004.307.087,00	125.370.974.225,50	28.633.332.861,50
2-16.2-20.0-00.01.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	4.102.000.000,00	0,00	0,00	4.102.000.000,00	410.200.000,00	3.691.800.000,00
2-17.3-30.3-31.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18.0-00.0-00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-19.3-26.0-00.01.00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-27.2-09.0-00.01.00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.01	Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.02	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.03	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.04	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.05	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.06	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-09.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-01.5-05.0-00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-02.0-00.0-00.01.01	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-03.0-00.0-00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-01.0-00.0-00.01.00	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-01.0-00.0-00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-02.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode SKPD	SKPD	Saldo Awal 2025	Bertambah 2025	Berkurang 2025	Saldo Akhir 31 Des 2025	Saldo Akhir Penyusutan 31 Des 2025	Nilai Buku 31 Des 2025
TOTAL		2.302.379.548.278,98	718.473.779.735,00	71.160.953.470,00	2.949.692.374.543,98	1.535.404.228.240,61	1.414.288.146.303,37

6. Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Berdasarkan SKPD

Kode SKPD	SKPD	Saldo Awal 2025	Bertambah 2025	Berkurang 2025	Saldo Akhir 31 Des 2025	Saldo Akhir Penyusutan 31 Des 2025	Nilai Buku 31 Des 2025
1-01.0-00.0-00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-02.2-14.0-00.01.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.984.000.000,00	0,00	2.984.000.000,00	0,00	2.984.000.000,00
1-03.0-00.0-00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	289.071.774.261,57	9.458.228.040,00	0,00	298.530.002.301,57	0,00	298.530.002.301,57
1-05.0-00.0-00.01.00	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1-06.2-08.0-00.01.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	1.185.000.000,00	0,00	1.185.000.000,00	0,00	1.185.000.000,00
2-07.3-29.0-00.01.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	10.000.000,00	419.000.000,00	0,00	429.000.000,00	0,00	429.000.000,00
2-11.2-10.3-28.01.00	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-12.2-13.0-00.01.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-15.0-00.0-00.01.00	Dinas Perhubungan	0,00	16.593.964.000,00	0,00	16.593.964.000,00	0,00	16.593.964.000,00
2-16.2-20.0-00.01.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17.3-30.3-31.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18.0-00.0-00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2-19.3-26.0-00.01.00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-27.2-09.0-00.01.00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Daerah	1.120.399.000,00	0,00	0,00	1.120.399.000,00	0,00	1.120.399.000,00
4-01.0-00.0-00.01.01	Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.02	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.03	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.04	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.05	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.06	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-09.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-01.5-05.0-00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	792.950.000,00	0,00	792.950.000,00	0,00	792.950.000,00
5-02.0-00.0-00.01.01	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	99.900.000,00	0,00	0,00	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00
5-03.0-00.0-00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-01.0-00.0-00.01.00	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-01.0-00.0-00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
9-02.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		290.332.073.261,57	31.433.142.040,00	0,00	321.765.215.301,57	0,00	321.765.215.301,57

7. Mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan SKPD

Kode SKPD	SKPD	Saldo Awal 2024	Bertambah 2024	Berkurang 2024	Saldo Akhir 31 Des 2024
1-01.0-00.0-00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1-02.2-14.0-00.01.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
1-03.0-00.0-00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	370.521.703.926,88	71.457.990.390,00	47.712.593.570,00	394.267.100.746,88
1-05.0-00.0-00.01.00	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
1-06.2-08.0-00.01.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
2-07.3-29.0-00.01.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
2-11.2-10.3-28.01.00	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
2-12.2-13.0-00.01.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00
2-15.0-00.0-00.01.00	Dinas Perhubungan	0,00	74.788.882.614,00	0,00	74.788.882.614,00
2-16.2-20.0-00.01.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17.3-30.3-31.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18.0-00.0-00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
2-19.3-26.0-00.01.00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.500.000.000,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00
3-27.2-09.0-00.01.00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.01	Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.02	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.03	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.04	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.05	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4-01.0-00.0-00.01.06	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	8.887.407.000,00	0,00	8.887.407.000,00
4-09.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5-01.5-05.0-00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5-02.0-00.0-00.01.01	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5-03.0-00.0-00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
6-01.0-00.0-00.01.00	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8-01.0-00.0-00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9-02.0-00.0-00.01.00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**376.021.703.926,88**	**155.134.280.004,00**	**47.712.593.570,00**	**483.443.390.360,88**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.3.1.4 – Rekapitulasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025

1. Mutasi Aset Lainnya Berdasarkan Sub Rincian Objek

No	Kode Rekening	Uraian Rekening	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025
1	***1.5.03***	***Aset Tidak Berwujud***	***5.384.627.510,00***	***845.874.383,00***	***0,00***	***6.230.501.893,00***
2	1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	5.384.627.510,00	845.874.383,00	0,00	6.230.501.893,00
3	1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	5.384.627.510,00	845.874.383,00	0,00	6.230.501.893,00
4	1.5.03.01.01.0005	Software	0,00	845.874.383,00	0,00	845.874.383,00
5	1.5.03.01.01.0006	Kajian	5.384.627.510,00	0,00	0,00	5.384.627.510,00
6	***1.5.04***	***Aset Lain-lain***	***32.536.246.877,57***	***7.135.627.953,16***	***16.526.420.282,33***	***23.145.454.548,40***
7	1.5.04.01	Aset Lain-lain	32.536.246.877,57	7.135.627.953,16	16.526.420.282,33	23.145.454.548,40
8	1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	32.536.246.877,57	7.135.627.953,16	16.526.420.282,33	23.145.454.548,40
9	1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	32.536.246.877,57	4.846.835.408,16	0,00	37.383.082.285,73
10	1.5.04.01.01.0004	Kekurangan Volume Barang dan Jasa	0,00	1.999.047.958,00	16.526.420.282,33	(14.527.372.324,33)
11	1.5.04.01.01.0005	Gaji dan Tunjangan yang Telah Memasuki BUP dan Meninggal Dunia	0,00	289.744.587,00	0,00	289.744.587,00
12	***1.5.05***	***Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud***	***(2.153.851.004,00)***	***0,00***	***1.246.100.378,60***	***(3.399.951.382,60)***
13	1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.153.851.004,00)	0,00	1.246.100.378,60	(3.399.951.382,60)
14	1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.153.851.004,00)	0,00	1.246.100.378,60	(3.399.951.382,60)
15	1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	169.174.876,60	(169.174.876,60)
16	1.5.05.01.01.0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(2.153.851.004,00)	0,00	1.076.925.502,00	(3.230.776.506,00)
17	***1.5.08***	***Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)***	***17.334.398.274,00***	***0,00***	***17.334.398.274,00***	***0,00***
18	1.5.08.01	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	17.334.398.274,00	0,00	17.334.398.274,00	0,00
19	1.5.08.01.01	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	17.334.398.274,00	0,00	17.334.398.274,00	0,00
20	1.5.08.01.01.0001	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	17.334.398.274,00	0,00	17.334.398.274,00	0,00
TOTAL (1+6+12+17)			**53.101.421.657,57**	**7.981.502.336,16**	**35.106.918.934,93**	**25.976.005.058,80**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Lampiran 5.3.2.1 - Rekapitulasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
1	Kepala Daerah	Pph 23	18.018.018,00	0,00	18.018.018,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	078D100R6F80JM1E
2	Kepala Daerah	Pph 23	5.405.405,00	0,00	5.405.405,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	22B440T8M9QD3EQ6
3	Kepala Daerah	Pph 23	5.405.405,00	0,00	5.405.405,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	4690C74753R41P9D
4	Kepala Daerah	Pph 23	1.801.802,00	0,00	1.801.802,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	EECAE2M3LUV63I6F
5	Kepala Daerah	Pph 23	9.009.009,00	0,00	9.009.009,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	7F1362M3LUV66547
6	Kepala Daerah	Pph 23	9.009.009,00	0,00	9.009.009,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	BA9A200R6F811GE3
7	Kepala Daerah	PPh 22	13.513.514,00	0,00	13.513.514,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	392F367PL98NUKM6
8	Kepala Daerah	PPN	99.099.099,00	0,00	99.099.099,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	56E1467PL98O215U
9	Kepala Daerah	PPN	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	866862M3G2NISPR2
10	Kepala Daerah	PPh 22	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	FCAE667PFD13MCFV
11	Kepala Daerah	PPN	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	B4B1867PFD13U5IH
12	Kepala Daerah	PPh 22	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	A864E67PFD140FQG
13	Kepala Daerah	PPh 22	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	65122OOROJODAIPN
14	Kepala Daerah	PPh 22	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	2OVFF2M3G2NIEG92
15	Kepala Daerah	Pph 23	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	74AC82M3G2NINO4E
16	Kepala Daerah	PPN	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	OEFEEOOROJOEOUJF
17	Kepala Daerah	PPh 22	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	B6EDC2M3G2NJ6O7B
18	Kepala Daerah	PPN	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	5A38C746V7JHRMB7
19	Kepala Daerah	PPh 22	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	4869E746V7JHK5OC
20	Kepala Daerah	PPh 22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	5ED5B1PMO857J62F
21	Kepala Daerah	PPh 22	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	235153IGVTAOTJGC
22	Kepala Daerah	PPh 22	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	DF8512M3G2NKA1DR
23	Kepala Daerah	PPh 22	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	2361D4EUFNSDF130
24	Kepala Daerah	PPh 22	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	95167OT8GDIROOQB
25	Kepala Daerah	PPh 22	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	DBF33OOROJOFGTPP
26	Kepala Daerah	Pph 23	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	7999C2M3G2NKQESI
27	Kepala Daerah	PPh 22	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	Sudah di Setor	18 Februari 2025	17B61OOROJOFMLDR
28	Kepala Daerah	PPh 21	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	25 Februari 2025	A88E200R0J6V5HLS
29	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 22	121.622,00	0,00	121.622,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	734C706QQJ83ARLH
30	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 22	405.405,00	0,00	405.405,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	423B31VLQHGIN5S5
31	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 22	405.405,00	0,00	405.405,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	6B2C66DPAF69R50G
32	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 23	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	2FC3B7A6R5TS66TR
33	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 23	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	552946DPBTLG7PJ5
34	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 22	658.784,00	0,00	658.784,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	447555HBR9RHS3NC
35	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPN	891.892,00	0,00	891.892,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	D016C06QSLNL2AMJ
36	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPN	2.972.973,00	0,00	2.972.973,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	C05F23OGPTTRR6AD
37	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPN	2.972.973,00	0,00	2.972.973,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	3AC435HBPLG0Q17C
38	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPN	4.831.081,00	0,00	4.831.081,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	B125D4KUA3AR74RS
39	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	PPh 23	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	05 Maret 2025	45B6606QRF4GIPG3

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
40	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.702.703,00	0,00	2.702.703,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	9DE0A74753SUKU3A
41	Sekretariat Daerah	PPN	19.819.820,00	0,00	19.819.820,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	01A3F74753T52O5S
42	Sekretariat Daerah	PPh 23	5.405.405,00	0,00	5.405.405,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	06A2B4EULK5POF59
43	Sekretariat Daerah	PPh 23	9.009.009,00	0,00	9.009.009,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	8E58A4EULK5SPAM2
44	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.702.703,00	0,00	2.702.703,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	56B054EULK5PUAI0
45	Sekretariat Daerah	PPN	19.819.820,00	0,00	19.819.820,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	CD2F94EULK5Q2H90
46	Sekretariat Daerah	PPh 23	5.405.405,00	0,00	5.405.405,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	FC2422M3LV11CM4A
47	Sekretariat Daerah	PPh 23	7.207.207,00	0,00	7.207.207,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	F08B667PL9AJ4O16
48	Sekretariat Daerah	PPh 22	675.676,00	0,00	675.676,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	DE9AB5BC5EOFAG1I
49	Sekretariat Daerah	PPN	4.954.955,00	0,00	4.954.955,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	65DCF3IH5PJM9U1M
50	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.027.027,00	0,00	2.027.027,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	C36041PM64EQRCU5
51	Sekretariat Daerah	PPN	14.864.865,00	0,00	14.864.865,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	AC42974753T5FCEM
52	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.824.324,00	0,00	2.824.324,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	AEAE367PL9AK1472
53	Sekretariat Daerah	PPN	20.711.712,00	0,00	20.711.712,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	484395BC5EO7OJR8
54	Sekretariat Daerah	PPh 23	3.603.604,00	0,00	3.603.604,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	99BDD0T8M9S9SOQV
55	Sekretariat Daerah	PPh 23	3.603.604,00	0,00	3.603.604,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	C4C6E5BC5EO82RVS
56	Sekretariat Daerah	PPh 23	2.702.703,00	0,00	2.702.703,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	F637C1PM64EMK3T6
57	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.364.865,00	0,00	2.364.865,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	4E3FF67PL9AKT6KE
58	Sekretariat Daerah	PPN	17.342.342,00	0,00	17.342.342,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	6E1E20T8M9SAM0CO
59	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.364.865,00	0,00	2.364.865,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	487360T8M9SAQKUE
60	Sekretariat Daerah	PPN	17.342.342,00	0,00	17.342.342,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	BE4291PM64ENBVJF
61	Sekretariat Daerah	PPh 23	18.018.018,00	0,00	18.018.018,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	002325BC5EO93DTQ
62	Sekretariat Daerah	PPh 23	9.009.009,00	0,00	9.009.009,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	B59D71PM64EKK42B
63	Sekretariat Daerah	PPh 23	5.405.405,00	0,00	5.405.405,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	74D0A74753T283MV
64	Sekretariat Daerah	PPh 23	3.603.604,00	0,00	3.603.604,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	1FCCE4EULK5T7ASN
65	Sekretariat Daerah	PPh 22	10.135.135,00	0,00	10.135.135,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	81FA167PL9AMAPKR
66	Sekretariat Daerah	PPN	74.324.324,00	0,00	74.324.324,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	94D2A2M3LV15LVNA
67	Sekretariat Daerah	PPh 23	18.018.018,00	0,00	18.018.018,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	9C1C000R6FA0JM5O
68	Sekretariat Daerah	PPh 22	4.729.430,00	0,00	4.729.430,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	42EB65BC5EOB7V7E
69	Sekretariat Daerah	PPN	34.684.685,00	0,00	34.684.685,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	A39EF0T8M9SDAT73
70	Sekretariat Daerah	PPh 22	675.676,00	0,00	675.676,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	D91804EULK5QGJJS
71	Sekretariat Daerah	PPN	4.954.955,00	0,00	4.954.955,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	8C6E62M3LV11RARK
72	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.027.027,00	0,00	2.027.027,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	6704D0T8M9S96HTR
73	Sekretariat Daerah	PPN	14.864.865,00	0,00	14.864.865,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	CB5155BC5EO7CD7L
74	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.702.703,00	0,00	2.702.703,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	5427567PL9AOH2NC
75	Sekretariat Daerah	PPN	19.819.820,00	0,00	19.819.820,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	DC5FA3IH5PJD6GTC
76	Sekretariat Daerah	PPh 22	2.027.027,00	0,00	2.027.027,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	93E542M3LV16ICS9
77	Sekretariat Daerah	PPN	14.864.865,00	0,00	14.864.865,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	DBDB574753T4OQP9
78	Sekretariat Daerah	PPh 22	4.729.430,00	0,00	4.729.430,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	812FB1PM64ER7OGK
79	Sekretariat Daerah	PPN	34.684.685,00	0,00	34.684.685,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	BABEF2M3LV17V6GO
80	Sekretariat Daerah	PPh 23	2.702.703,00	0,00	2.702.703,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	A8EE14EULK60U1NK
81	Sekretariat Daerah	PPh 23	13.513.514,00	0,00	13.513.514,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	E81F474753T6GONM
82	Sekretariat Daerah	PPh 23	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	5A8F61PM64ES6NL7
83	Sekretariat Daerah	PPN	4.954.955,00	0,00	4.954.955,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	1B8812M3LV16CT5L
84	Sekretariat Daerah	PPh 22	675.676,00	0,00	675.676,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	3339D67PL9ANS0U4
85	Sekretariat Daerah	PPN	4.954.955,00	0,00	4.954.955,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	350244EULK61NP2P
86	Sekretariat Daerah	PPh 22	675.676,00	0,00	675.676,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	3E7B53IH5PJLEN1O

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
87	Sekretariat Daerah	PPN	7.396.432,00	0,00	7.396.432,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	0152274753T7LR7M
88	Sekretariat Daerah	PPh 22	1.013.514,00	0,00	1.013.514,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	1B8A167PL9ARBQ19
89	Sekretariat Daerah	PPN	4.954.955,00	0,00	4.954.955,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	10F940T8M9SGCR18
90	Sekretariat Daerah	PPh 22	675.676,00	0,00	675.676,00	0,00	Sudah di Setor	02 Mei 2025	D4C465BC5EOEGVK0
91	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	PPN	4.786.486,00	0,00	4.786.486,00	0,00	Sudah di Setor	07 Maret 2025	8BC0606H20686UIK
92	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	PPh 22	652.703,00	0,00	652.703,00	0,00	Sudah di Setor	07 Maret 2025	28C203O71AFPQGVM
93	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPh 21	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	Sudah di Setor	03 Maret 2025	A5EB41VC1L9JPP30
94	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPh 21	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	Sudah di Setor di Tahun 2024		
95	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPh 22	1.738.689,00	0,00	1.738.689,00	0,00	Sudah di Setor di Tahun 2024		
96	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPh 23	2.173.188,00	0,00	2.173.188,00	0,00	Sudah di Setor di Tahun 2024		
97	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPN	21.183.719,00	0,00	21.183.719,00	0,00	Sudah di Setor di Tahun 2024		
98	Dinas Kesehatan		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	0,00	Masuk ke Kas di Kas Daerah	6 Januari 2025	
99	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral		0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	Pengakuan utang PFK		
100	Biro Organisasi		0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	Pengakuan utang PFK		
101	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00	Pengakuan utang PFK		
102	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat		0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	Pengakuan utang PFK		
103	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		0,00	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	Pengakuan utang PFK		
104	Inspektorat Daerah		0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	Pengakuan utang PFK		
105	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		0,00	4.825.000,00	0,00	4.825.000,00	Pengakuan utang PFK		
106	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		0,00	3.355.135,00	0,00	3.355.135,00	Pengakuan utang PFK		
107	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral		0,00	184.500,00	0,00	184.500,00	Pengakuan utang PFK		
108	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		0,00	11.981.981,00	0,00	11.981.981,00	Pengakuan utang PFK		
109	Biro Organisasi		0,00	11.313.200,00	0,00	11.313.200,00	Pengakuan utang PFK		
110	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	349.455,00	0,00	349.455,00	Pengakuan utang PFK		
111	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat		0,00	438.715,00	0,00	438.715,00	Pengakuan utang PFK		
112	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		0,00	183.518,00	0,00	183.518,00	Pengakuan utang PFK		
113	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		0,00	7.297.400,00	0,00	7.297.400,00	Pengakuan utang PFK		
114	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral		0,00	871.200,00	0,00	871.200,00	Pengakuan utang PFK		
115	Sekretariat Daerah		0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	Pengakuan utang PFK		
116	Biro Organisasi		0,00	15.323.708,00	0,00	15.323.708,00	Pengakuan utang PFK		
117	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	793.600,00	0,00	793.600,00	Pengakuan utang PFK		
118	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat		0,00	5.642.883,00	0,00	5.642.883,00	Pengakuan utang PFK		
119	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		0,00	20.500.600,00	0,00	20.500.600,00	Pengakuan utang PFK		
120	Inspektorat Daerah		0,00	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	Pengakuan utang PFK		
121	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Pengakuan utang PFK		

No	OPD	Jenis Pajak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025	Keterangan	Tanggal Penyetoran	NTPN
122	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	Pengakuan utang PFK		
123	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		0,00	24.604.323,00	0,00	24.604.323,00	Pengakuan utang PFK		
124	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral		0,00	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	Pengakuan utang PFK		
125	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		0,00	65.900.898,00	0,00	65.900.898,00	Pengakuan utang PFK		
126	Biro Organisasi		0,00	3.233.120,00	0,00	3.233.120,00	Pengakuan utang PFK		
127	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		0,00	2.562.670,00	0,00	2.562.670,00	Pengakuan utang PFK		
128	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat		0,00	53.623.107,00	0,00	53.623.107,00	Pengakuan utang PFK		
129	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		0,00	1.134.100,00	0,00	1.134.100,00	Pengakuan utang PFK		
	Total		**2.803.372.874,00**	**285.807.113,00**	**2.803.372.874,00**	**285.807.113,00**			